



EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2010 -2014

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2013**



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan memberikan informasi kinerja pembangunan, khususnya pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta alternatif tindak lanjut yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

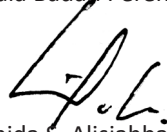
RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden dan telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Saat ini, RPJMN 2010-2014 telah melewati separuh waktu pelaksanaannya. Untuk itu, evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil, dan kesesuaian arah pencapaian visi, misi, dan sasaran prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sampai saat ini telah memberikan hasil pembangunan yang cukup baik. Dibandingkan dengan kondisi awal pada 2009, saat ini Indonesia telah menjadi negara yang lebih sejahtera dan lebih demokratis. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pencapaian itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan di tengah kondisi ekonomi dunia yang melemah. Pengakuan dunia internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga — setelah India dan Amerika Serikat — dalam hal demokrasi adalah bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan bidang politik.

Secara umum, kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi telah mengalami peningkatan, tetapi upaya sungguh-sungguh perlu terus dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif disertai dengan kerja keras dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dengan demikian, keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Maret 2013

8 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional


Armida S. Alisjahbana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II EVALUASI PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN AGENDA PEMBANGUNAN	9
BAB III EVALUASI PENCAPAIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.....	31
BAB IV EVALUASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL.....	49
IV.1 Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola.....	49
IV.2 Prioritas Nasional 2: Pendidikan	56
IV.3 Prioritas Nasional 3 : Kesehatan	65
IV.4 Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan	76
IV.5 Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan	83
IV.6 Prioritas Nasional 6: Infrastruktur.....	90
IV.7 Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi Dan Iklim Usaha	100
IV.8 Prioritas Nasional 8: Energi	107
IV.9 Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana	112
IV.10 Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan PascaKonflik	120
IV.11 Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, Dan Inovasi Teknologi	129
IV.12 Prioritas Nasional 12: Politik, Hukum, Dan Keamanan	126
IV.13 Prioritas Nasional 13 : Perekonomian.....	136
IV.14 Prioritas Nasional 14 : Bidang Kesejahteraan Rakyat	142
BAB V TINDAK LANJUT	151
LAMPIRAN	L-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda I	12
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda II	21
Tabel II.3	Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda III	24
Tabel II.4	Perkembangan Status Kebebasan Pers.....	25
Tabel II.5	Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda IV	23
Tabel II.6	Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda V	30
Tabel III.1	Capaian Perkembangan Makro Ekonomi.....	33
Tabel IV.1	Capaian Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.....	50
Tabel IV.2	Capaian Prioritas Nasional Pendidikan.....	56
Tabel IV.3	Persentase Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan	60
Tabel IV.4	Capaian Prioritas Nasional Kesehatan.....	66
Tabel IV.5	Capaian Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan	77
Tabel IV.6	Capaian Prioritas Nasional Ketahanan Pangan	75
Tabel IV.7	Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012	85
Tabel IV.8	Capaian Prioritas Nasional Infrastruktur	92
Tabel IV.9	Kondisi Kemantapan Jalan	94
Tabel IV.10	Perkembangan Armada Nasional Indonesia dan Negara-Negara ASEAN (Juta GT)	96
Tabel IV.11	Angkutan Udara Perintis Tahun 2009-2011	96
Tabel IV.12	Capaian Prioritas Nasional Iklim Investasi dan Iklim Usaha	101
Tabel IV.13	Peringkat Pilar Efisiensi Pasar Kerja Indonesia dalam.....	105
Tabel IV.14	Capaian Prioritas Nasional Energi	108
Tabel IV.15	Capaian Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.....	112
Tabel IV.16	Capaian Sasaran Prioritas Nasional Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik	121
Tabel IV.17	Capaian Prioritas Nasional Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi teknologi.....	122

Tabel IV.18	Capaian Sasaran Prioritas Nasional Politik, Hukum dan Keamanan	129
Tabel IV.19	Capaian Sasaran Prioritas Nasional Lainnya Perekonomian	138
Tabel IV.20	Capaian Sasaran Prioritas Nasional Lainnya Kesejahteraan Rakyat.....	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Analisis Evaluasi RPJMN.....	10
Gambar II.2	Struktur Misi 1	10
Gambar II.3	Struktur Misi 2	13
Gambar II.4	Struktur Misi 3	14
Gambar II.5	Peta Status Kebebasan (<i>Freedom Status</i>).....	21
Gambar III.1	Pertumbuhan PDB dan inflasi.....	32
Gambar IV.1	Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	58
Gambar IV.2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas	58
Gambar IV.3	APM SD/MI/Paket A	58
Gambar IV.4	APM SMP/MTs/Paket B	58
Gambar IV.5	APK SMA/SMK/MA/Paket C	59
Gambar IV.6	APK PT/PTA (Usia 19-23 Tahun)	59
Gambar IV.7	Angka Partisipasi Sekolah Kuantil 1	60
Gambar IV.8	Angka Partisipasi Sekolah Kuantil	60
Gambar IV.9	APK SMA/SMK/MA/Paket C Menurut Provinsi	61
Gambar IV.10	Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi, Tahun 2010-2011	68
Gambar IV.11	Cakupan Imunisasi Campak Menurut Provinsi, Tahun 2012..	69
Gambar IV.12	Persentase Pangsa Pasar Armada Pelayaran Nasional Angkutan Dalam Negeri	95
Gambar IV.13	Capaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika terhadap Target RPJMN 2010-2014 (dalam persentase).....	98
Gambar IV.14	Realisasi PMDN dan PMA	100
Gambar IV.15	Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha Rata-rata Per Periode) Tahun 1990 - 2011	115
Gambar IV.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Tertinggal...	122
Gambar IV.17	Perkembangan Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Di Daerah	123
Gambar IV.18	Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	124

Gambar IV.19	Pencapaian Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional dan Target 2014	138
--------------	---	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2010 - 2012L-1
Lampiran 2	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 2: Pendidikan Tahun 2010 - 2012L-27
Lampiran 3	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 3: Kesehatan Tahun 2010 - 2012L-35
Lampiran 4	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 - 2012L-45
Lampiran 5	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan Tahun 2010 - 2012L-77
Lampiran 6	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Tahun 2010 - 2012L-98
Lampiran 7	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Tahun 2010 - 2012L-125
Lampiran 8	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 8: Energi Tahun 2010 - 2012L-141
Lampiran 9	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Bencana Alam Tahun 2010 - 2012L-151
Lampiran 10	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik Tahun 2010 - 2012L-159
Lampiran 11	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Tahun 2010 - 2012L-169
Lampiran 12	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 12: Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010 - 2012.....L-175
Lampiran 13	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 13: Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian Tahun 2010 - 2012L-201
Lampiran 14	Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 13: Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian Tahun 2010 - 2012L-203

DAFTAR SINGKATAN

A

ACFTA	: ASEAN–China Free Trade Agreement
AIDS	: <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
AJCEP	: ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKFTA	: ASEAN-Korea Free Trade Agreement
AKI	: Angka Kematian Ibu
Alkom	: Alat Komunikasi
Alpalhankam	: Alat Peralatan Pertahanan Keamanan
Alutsista	: Alat Utama Sistem Per(senjata)an
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APEC	: Asia-Pacific Economic Cooperation
APG	: ASEAN Para Games
API	: <i>Annual Paracite Incident</i>
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ARAM	: Angka Ramalan
ARG	: Anggaran Responsif Gender
ARV	: <i>Anti Retroviral</i>
ASEAN	: Association of South East Asia Nations
Askes	: Asuransi Kesehatan
AWOS	: Automatic Weather Observation System
AWS	: Automatic Weather Station

B

B3	: Bahan Beracun dan Berbahaya
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBG	: Bahan Bakar Gas
BBM	: Bahan Bakar Minyak
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKPM	: badan Koordinasi Penanaman Modal
BLU	: Badan Layanan Umum
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BOS SM	: Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah

BP3TI	: Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHN	: Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	: Badan Pengawas Keuangan
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPTA	: Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
BRIC	: Brazil, Russia, India, China
BRIK	: Badan Revitalisasi Industri Kehutanan
BRT	: <i>Bus Rapid Transit</i>
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara

C

CAT	: Computer Assisted Test
CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CIVITS	: China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa
COD	: Commercial Operation Date
CPI	: Corruption Perception Index
CPR	: <i>Contraceptive Prevalance Rate</i>
CTBT	: <i>Comprehensive Test Ban Treaty</i>
CTTF	: <i>Counter Terrorism Task Force</i>

D

D4	: Diploma 4
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBD	: Demam Berdarah <i>Dengue</i>
DHAM PBB	: Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
DMO	: Destination Management Organization
DO	: Drop Out
DOTS	: <i>Directly Observed Treatment, Short-Course</i>
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DTPK	: Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

E

e-KTP	: elektronik Kartu Tanda Penduduk
EOR	: Enhanced Oil Recovery

F

FKPT	: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
FTA	: Free Trade Agreement

G

GCI	: <i>Global Competitiveness Index</i>
GCTF	: Global Counter Terrorism Task Force
GDP	: Gross Domestic Product
GEMARIKAN	: Gemar Makan Ikan
GKG	: Gabah Kering Giling
GNB	: Gerakan Non Blok
GP3K	: Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi
GPS	: Global Positioning System
GRK	: Gas Rumah Kaca
GT	: <i>Gross Tonnage</i>

H

HAM	: Hak Asasi Manusia
HD	: Hutan Desa
HIV	: <i>Human immunodeficiency virus</i>
HKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HLC	: High Level Committee
HRK	: Hutan Rakyat Kemitraan

I

IA-CEPA	: Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
ICH	: Intangible Cultural Heritage
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
IDI	: Indeks Demokrasi Indikator
IFX	: Indonesia Fighter Experiment
IIPP	: Indeks Integritas Pelayanan Publik
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IT	: Information Technology
ITB	: Institut Teknologi Bandung
IUD	: <i>Intra Uterine Device</i>
IUU	: Illegal Unreported and Unregulated

J

Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal	: Jaminan Persalinan
Jamsostek	: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
JAT	: Jamaah Ansharut Tauhid
JIDES	: Jaringan Irigasi Desa
JITUT	: Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani

K

K/L	: Kementerian/Lembaga
KA	: Kereta Api
KB	: Keluarga Berencana
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
KemenPP dan PA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemhan	: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
KESDM	: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
KFX	: Korea Fighter Xperiment
KKIP	: Komite Kebijakan Industri Pertahanan
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KN1	: Kunjungan Neonatal Pertama
KPDT	: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPJM	: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPS	: Kerjasama Pemerintah dan Swasta
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KSK	: Kawasan Strategis Kabupaten
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KSPN	: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
KtA	: Kekerasan terhadap Anak
KTKLN	: Kartu Tanda Kerja ke Luar Negeri

KtP	: Kekerasan terhadap Perempuan
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
KUR-TKI	: Kredit Usaha Rakyat untuk Tenaga Kerja Indonesia
KUT	: Kredit Usaha Tani
KVH	: Koefisien Variasi Harga
KY	: Komisi Yudisial
L	
LDR	: Loan to Deposit Ratio
Litbang	: Penelitian dan Pengembangan
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
LPTK	: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
M	
MA	: Madrasah Aliyah
MA	: Mahkamah Agung
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MEF	: Minimum Essential Force
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MIH	: Menuju Indonesia Hijau
MK	: Mahkamah Konstitusi
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MoU	: Memorandum of Understanding
MP3EI	: Masterplan Percepatan Pembangunan Perekonomian Indonesia
MP3KI	: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Kemiskinan
MPA	: Masyarakat Peduli Api
MRA	: Mutual Recognition Arrangement
MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
MTEF	: <i>Medium-Term Expenditure Framework</i>
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MW	: Megawatt
N	
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NAPZA	: Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NLP	: Nomor Lembar Peta

Non-PNS	: Non-Pegawai Negeri Sipil
NPT	: Non-Proliferation Treaty
NSW	: <i>National Single Window</i>
NTP	: Nilai Tukar Petani
NTT	: Nusa Tenggara Timur

O

ODHA	: Orang Dengan HIV AIDS
------	-------------------------

P

P2DTK	: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PA	: Peserta Aktif
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Parpol	: Partai Politik
PB	: Peserta Baru
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
Persero	: Perusahaan Seorangan
PHK	: Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja
Pilkada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKN	: Peningkatan Kehidupan Nelayan
PKO	: Peacekeeping Operation
PKT	: Pusat Kesehatan Terpadu
PLIK	: <i>Pusat Layanan Internet Kecamatan</i>
PLIK	: Pusat Layanan Internet Kecamatan
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMTB	: Pembentukan Modal tetap Domestik Bruto
PN	: Prioritas Nasional
PNG	: Portable Network Graphics
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PNPM-DTK	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Kepulauan
PNPM-LMP	: Lingkungan Mandiri Perdesaan
PNPM-PISEW	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
PNPM-PUAP	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Agribisnis Perdesaan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resor
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PONED	: Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	: Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
PPRG	: Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
PPT	: Pusat Pelayanan Terpadu
PRIMA	: Program Indonesia Emas
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PROPER	: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
PT	: Perguruan Tinggi
PT	: Perseroan Terbatas
PTA	: Perguruan Tinggi Agama
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTT	: Pegawai Tidak Tetap
PUAP	: Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
PUG	: Pangarus Utamaan Gender
PUG&A	: Pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak
PUMP	: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat

Q

QS : *Quacquarelli Symond*

R

RAD GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RAN	: Rencana Aksi Nasional
RAN API	: Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim
RAN GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
RAN PRB	: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RANHAM	: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RB	: Reformasi Birokrasi

RENAS PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
Renja	: Rencana Kerja
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
RI	: Republik Indonesia
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
RKA K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKB	: Ruang Kelas Baru
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPTC	: Rumah Perlindungan Trauma
RS	: Rumah Sakit
RSPA	: Rumah Perlindungan Sosial Anak
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RTS	: Rumah Tangga Sasaran
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
RUNK	: Rencana Umum Nasional Keselamatan
RUU	: Rancangan Undang-Undang

S

SAR	: Search and Rescue
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
SBN	: Sura Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SCR-PB	: Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
SD	: Sekolah Dasar
SDKI	: Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEA	: South East Asia
SEA Games	: Southeast Asian Games
SIAK	: Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan
SIM-TKI	: Sistem Informasi TKI
SIN	: Sistem Integritas Nasional
SINAS	: Sistem Informasi Nasional
Sisdiknas	: Sistem Pendidikan Nasional
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLI	: Sekolah Lapang Iklim
SLPTT	: Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
SM	: Sekolah Menengah
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMART	: Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan

SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standard Operating Procedure
SPO	: Sistem Prosedur dan Operasi
SP	: Sensus Penduduk
SPBG	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPIP	: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIPISE	: Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Stranas PPK	: Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Susenas	: Survey Sosial Ekonomi Nasional

T

TA	: Tahun Anggaran
TAM	: Tata Air Mikro
TB	: <i>Tuberculosis</i>
TESA	: Telepon Sahabat Anak
TEWS	: Tsunami Early Warning System
TFR	: <i>Total Fertility Rate</i>
TI	: <i>Transparency International</i>
TI	: Teknologi Informasi
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
TMII	: Taman Mini Indonesia Indah
TMMD	: TNI Manunggal Membangun Desa
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
ToT	: Training of Trainer
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Traktat	: Training dan Perekrutan Anggota
TT	: Tempat Tidur

U

UAV	: Unmanned Aerial Vehicle
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UHH	: Usia Harapan Hidup
UI	: Universitas Indonesia
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UKGM	: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah

UN	: Ujian Nasional
UN PKO	: United Nations Peacekeeping Operation
UNCAC	: United Nation Framework Convention on Climate Change
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UPPA	: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
UPR	: <i>Universal Periodic Review</i>
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
USB	: Unit Sekolah Baru
USO	: <i>Universal Service Obligation</i>
UU	: Undang-Undang
V	
V/C Ratio	: <i>Volume to Capacity Ratio</i>
W	
WB	: World Bank
WEF	: World Economic Forum
WNI	: Warga Negara Indonesia
WP3WT	: Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



BAB I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Rencana pembangunan nasional Tahap Kedua Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah memasuki pertengahan pelaksanaan. Pemerintah secara konsisten terus melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Selama dua setengah tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, Pemerintah telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan tersebut, melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L).

Dokumen RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden terpilih yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Dokumen ini menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerjanya.

Visi Pembangunan Indonesia 2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN yang diuraikan lebih jauh dalam **Misi-misi Pembangunan**.

Misi

Misi Pembangunan Indonesia 2010-2014 merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis, meliputi: **Pertama**, melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera, yang tercermin pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran melalui program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya

lingkungan hidup secara berkelanjutan. **Kedua**, memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. **Ketiga**, memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antardaerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender.

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya Visi dan Misi Pembangunan Nasional akan diwujudkan melalui 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: **Agenda I. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi; Agenda IV. Penegakan Hukum; serta Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.**

Prioritas Pembangunan

Visi, Misi serta Agenda Utama Pembangunan dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) Prioritas Nasional lainnya yaitu:

Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dengan pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Prioritas Nasional 2: Pendidikan yang ditujukan terutama untuk peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien.

Prioritas Nasional 3: Kesehatan dengan penitikberatan pada pendekatan preventif dan kuratif.

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan termasuk perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan serta lanjutan revitalisasi pertanian.

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Prioritas Nasional 8: Energi yang diprioritaskan pada terjaminnya kelangsungan pertumbuhan nasional dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.

Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik yang mengutamakan dan menjamin pertumbuhannya keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik.

Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang diarahkan pada pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya.

Prioritas Nasional 12: Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, khususnya pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan/penangkalan terorisme.

Prioritas Nasional 13: Bidang Perekonomian yang terkait dengan kebijakan Industri Nasional dan peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Prioritas Nasional 14: Bidang Kesejahteraan Rakyat diantaranya mencakup: Peningkatan kerukunan umat beragama maupun peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Pada tahun ini, Pemerintah menganggap perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan (RPJMN 2010-2014) sampai dengan tahun

2012. Dengan demikian dapat diupayakan peningkatan konsistensi dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan pembangunan tersebut, serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan. Hasil evaluasi paruh waktu RPJMN 2010-2014 ini melengkapi hasil evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2011 sebagaimana amanat dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Penilaian terhadap capaian sasaran-sasaran pembangunan dilakukan dengan menggunakan *gap analysis*, yaitu melihat perbedaan capaian sampai dengan Juni 2012 dan memperkirakan pencapaian sasarnya pada tahun 2014 pada tingkat visi, misi dan agenda pembangunan kebijakan ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan serta sasaran 14 prioritas nasional. Analisis pencapaian sasaran utama pembangunan didasarkan pada indikator sasaran utama pembangunan nasional serta berdasarkan pada kegiatan prioritas yang dianggap strategis yang dimuat dalam Buku I RPJMN 2010-2014, permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2012 dan perkiraan permasalahan yang akan dihadapi dalam tahun 2013 dan 2014 serta upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target 2014.

Buku Laporan Hasil Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 disajikan dalam 6 (enam) BAB sebagai berikut: Pendahuluan; Evaluasi Pencapaian Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan; Evaluasi Pencapaian Kebijakan Makro Ekonomi dan Pembiayaan Pembangunan; Evaluasi Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional; Rencana Tindak Lanjut; dan Penutup.

Pengembangan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan senantiasa diupayakan sehingga kualitas dari hasil evaluasi lebih baik, lebih akurat dan dapat diandalkan yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dan perbaikan untuk penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya.



BAB II

PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN AGENDA PEMBANGUNAN

EVALUASI PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Visi Indonesia 2014 dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Selama dua setengah tahun pelaksanaan RPJMN banyak hal telah dicapai melalui pembangunan di segala bidang untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2014 tersebut. Indikator-indikator pembangunan menunjukkan saat ini Indonesia lebih sejahtera dan demokratis dibandingkan kondisi awal pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun demikian, terdapat indikasi kesenjangan yang sedikit melebar. Di samping itu, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi masih menghadapi kendala dalam pencapaian targetnya.

Konsekuensinya adalah dalam sisa sekitar dua tahun pelaksanaan RPJMN ke depan perlu upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang inklusif dan mendukung pemerataan pendapatan dan keadilan, disertai kerja keras dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional. Dengan demikian keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan dan proses demokratisasi akan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mengetahui pencapaian visi dan misi Presiden secara menyeluruh, dilakukan evaluasi dengan kerangka analisis seperti Gambar II.1. Dari kerangka analisis ini dapat dilihat bahwa pencapaian visi merupakan hasil dari pencapaian kinerja misi-misi yang mendukungnya. Pencapaian misi ditentukan dari hasil pencapaian kinerja agenda-agenda, sedangkan pencapaian agenda merupakan resultan dari kinerja program-program kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 14 prioritas nasional.

Indonesia menjadi lebih sejahtera, demokratis dan berkeadilan dibandingkan kondisi awal pelaksanaan RPJMN 2010-2014.



Gambar II.1 Kerangka Analisis Evaluasi RPJMN

2.1.Misi Pembangunan

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera



Gambar II.2 Struktur Misi 1

Angka IPM Indonesia membaik menjadi 0,617 pada 2011, tetapi posisinya masih berada di urutan 124 dari 187 negara.

Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Yang Sejahtera merupakan misi yang didukung oleh Agenda I dan Agenda V. Pencapaian misi pertama ini ditunjukkan oleh membaiknya beberapa indikator, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, usia harapan hidup, dan infrastruktur dasar. Angka IPM Indonesia

saat ini meningkat dari 0,607 (2009) menjadi 0,617 (2011), meskipun dalam Human Development Report UNDP (2011) posisi IPM Indonesia masih berada pada urutan ke-124 dari 187 negara.

Peluang untuk meningkatkan IPM cukup besar mengingat kinerja positif pencapaian beberapa indikator terkait, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan pendidikan. Selama kurun waktu 2010-2012, pertumbuhan ekonomi berkisar 6-6,5 %, angka kemiskinan menurun dari 14,2 % (32,53 juta jiwa) pada 2009 menjadi 11,66 % (28,59 juta jiwa) pada September 2012, meskipun laju penurunannya dari tahun ke tahun melambat.

Trend capaian berbagai indikator sampai dengan pertengahan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 menunjukkan bahwa, dengan kerja keras, target-target pembangunan Misi I akan tercapai. Pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan tahun 2014 berpeluang akan tercapai. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sasaran sebesar 7% dan angka kemiskinan akan turun setidaknya pada kisaran 10%.

Terkait akses dan pemerataan pendidikan, menunjukkan capaian dua indikatornya yaitu capaian Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas selama 3 tahun terakhir sudah sesuai harapan, sehingga diperkirakan target 2014 akan tercapai.

Peningkatan akses pendidikan sudah *on track*.

Untuk bidang Kesehatan kinerjanya agak kurang sesuai harapan. Walaupun indikator Usia Harapan Hidup (UHH) sedikit meningkat dari 70,7 tahun pada 2009 menjadi 71,1 pada 2012, namun masih perlu usaha keras untuk mencapai target 2014 di angka UHH 72. Sementara itu dua indikator terkait lainnya yaitu penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) sangat sulit untuk dapat mencapai target RPJM pada tahun 2012. Dengan demikian, bidang kesehatan perlu melihat kembali program-program kerjanya agar upaya meningkatkan kinerja dalam periode dua tahun ke depan dapat diperbaiki secara optimal.

Usia Harapan Hidup (UHH) sedikit meningkat dari 70,7 pada tahun 2009 menjadi 71,1 pada 2012, namun pencapaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih perlu kerja keras.

Dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan dan dalam jangka panjang memperbaiki generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya, salah satu upaya Pemerintah adalah melaksanakan PKH (Program Keluarga

Program PKH bukan hanya membantu distribusi pendapatan tetapi juga akan membantu penurunan AKI dan AKB

Harapan). Capaian PKH sampai tahun 2012 adalah jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapat bantuan sebesar 1,52 juta KSM, mencakup 33 Provinsi dan 166 kabupaten/kota (33%). Target PKH 2014 adalah perluasan PKH mencakup seluruh kabupaten/kota dan peningkatan jumlah RTSM menjadi 3 juta. Namun demikian ukuran capaian sebenarnya bukan hanya perluasan lokasi dan peningkatan jumlah RTSM tetapi juga pada meningkatkan keakuratan sasaran. Untuk itu perlu diperkuat sistem

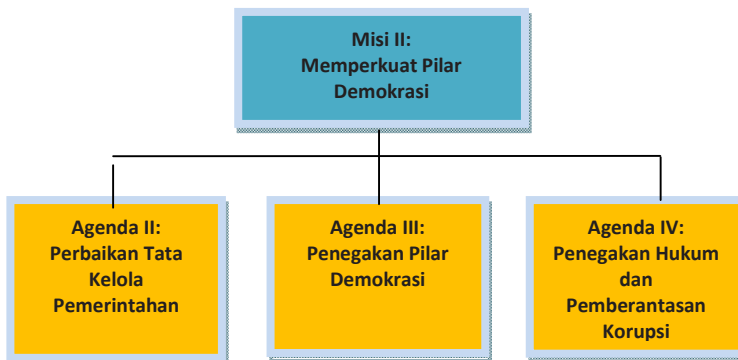
pengendalian yang dapat menjamin terpenuhinya kewajiban RTSM penerima untuk memeriksakan anggota keluarganya (Ibu Hamil dan Balita) ke fasilitas kesehatan dan menyekolahkan anaknya sesuai ketentuan wajib belajar, sehingga program PKH bukan hanya membantu distribusi pendapatan tetapi juga akan membantu penurunan AKI dan AKB.

Berkurangnya lahan kritis akan berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca

Sementara itu, infrastruktur dasar menunjukkan beberapa perbaikan yang berarti, yang ditunjukkan oleh meningkatnya kapasitas penyediaan sistem air minum menjadi sebesar 19,1 m³/dt dan membaiknya penyehatan lingkungan, antara lain melalui pelaksanaan program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri perkotaan. Beberapa hal yang sudah dicapai adalah terbangunnya jalan lingkungan sepanjang 31.100 km, drainase sepanjang 8.800 km, fasilitas sanitasi dan pengolahan limbah sebanyak 164.800 unit, terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan dan penurunan pencemaran. Terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam skala luas, upaya yang dilakukan pemerintah antara lain rehabilitasi hutan dan lahan rusak dengan menurunkan luas lahan kritis menjadi 27,2 juta ha pada tahun 2011. Berkurangnya lahan kritis akan berdampak pada perbaikan lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Capaian lainnya adalah penurunan tingkat pencemaran atau beban pencemaran air yang lebih dari 11 ton BOD⁵¹ perhari, dan 132 juta ton ekuivalen CO₂.

¹ BOD⁵ adalah jumlah oksigen terlarut yang dikonsumsi untuk memproses kandungan bahan organik di air melalui proses biologi dalam lima hari.

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi.



Gambar II.3 Struktur Misi 2

Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi didukung oleh Agenda II, III, dan IV. Keberhasilan pencapaian Misi 2 terlihat dari pencapaian Agenda III, melalui pembangunan di bidang politik yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dari terjaganya pemenuhan hak politik dan kebebasan sipil masyarakat, serta membaiknya kebebasan pers. Disamping itu, dunia internasional mengakui dan menempatkan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga di dunia dalam hal demokrasi setelah India dan Amerika Serikat.

Indonesia diakui oleh dunia Internasional sebagai negara terbesar ketiga di dunia dalam hal demokrasi setelah India dan Amerika Serikat.

Pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai keberhasilan Misi 2, mengingat pencapaian beberapa indikator yang belum sesuai harapan. Terutama yang terdapat dalam Agenda II dan IV seperti: 1) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih rendah; 2) Opini WTP di Daerah yang kenaikannya terus melambat; 3) Kemudahan berusaha di Indonesia yang semakin memburuk; 4) Penyelesaian perkara yang masih rendah; 5) Rendahnya jumlah perkara yang masuk ke tahap penuntutan dan eksekusi oleh KPK dan Kejaksaan; serta 6) Lambatnya pembuatan RUU menjadi UU melalui Prolegnas. Demikian juga dengan kinerja di bidang tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak sesuai harapan.

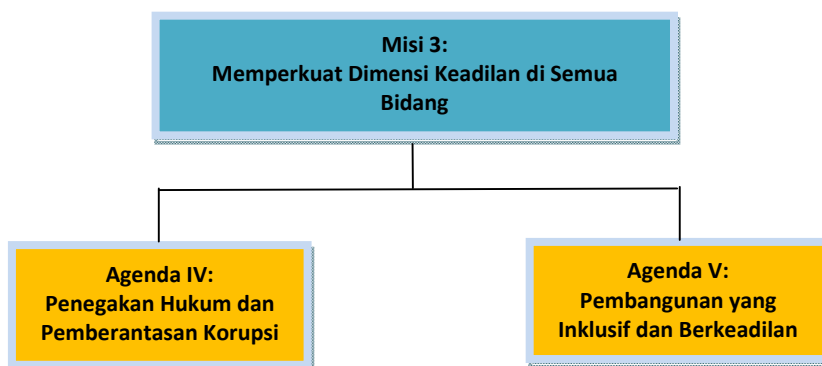
Pemerintah perlu kerja keras untuk mencapai Misi 2 karena masih banyaknya hambatan yang dihadapi terutama dalam perbaikan kinerja aparatur, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

Keberhasilan pemerintah dalam bidang politik salah satunya adalah dalam menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan ruang yang cukup luas bagi

masyarakat di daerah untuk menggunakan hak politiknya (memilih dan dipilih) sehingga kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pemilu/pemilukada semakin terbuka lebar.

Gambaran lengkap mengenai keberhasilan capaian Misi 2 dapat dilihat pada bagian penjelasan Agenda II, III, dan IV.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.



Gambar II.4 Struktur Misi 3

Misi Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang didukung oleh Agenda IV dan V. Indikator yang menunjukkan kinerja Misi ketiga yang relatif membaik adalah adanya jaminan kesehatan masyarakat, perbaikan akses untuk semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik, kesetaraan gender dan penghapusan segala macam bentuk diskriminasi.

Diperlukan kerja keras untuk mencapai target 2014 yaitu 100% penduduk terlayani jaminan kesehatan.

Keadilan sosial antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat. Sampai tahun 2011 cakupan kepesertaan Jaminan kesehatan mencapai 64,58%, yang dilaksanakan melalui Program Jamkesmas, Askes, Jamsostek dan jaminan kesehatan lainnya. Dengan demikian masih ada sekitar 35,42% masyarakat yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Untuk itu diperlukan kerja keras untuk mencapai target 2014 sebesar 100% penduduk terlayani jaminan kesehatan. Hal yang harus dilakukan antara lain pemerintah harus mempercepat terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar pelayanan kesehatan akan mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, mulai pekerja hingga rakyat miskin. Selain itu pemerintah perlu memastikan agar ketepatan data

sasaran Jamkesmas di daerah benar-benar akurat sehingga pelayanan jaminan sosial dapat semakin optimal.

Dalam rangka menjamin hak berpolitik masyarakat, khususnya hak memilih/dipilih, pemerintah telah melaksanakan Program e-KTP. Dengan e-KTP diharapkan kekisruhan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di waktu lalu menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan hak suara bisa diminimalisir. Walaupun DPT sudah sesuai, ada kemungkinan target partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 akan sulit tercapai. Hal ini dilihat dari perkembangan tingkat partisipasi politik pemilukada di berbagai daerah pada tahun 2011 yang hanya berkisar 75%, angka ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan pemilukada tahun 2009 yaitu 75,28%. Jika trend ini berlaku juga untuk tingkat nasional dimana angka partisipasi tidak jauh berbeda dengan posisi tahun 2009 yaitu 70,99 % pemilu legislatif dan 72,56 % untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden, maka target 75% (2014) sulit dicapai. Bahkan bukannya tidak mungkin capaian akan berada di bawah posisi tahun 2009, apabila kondisi yang tidak kondusif seperti permasalahan institusional politik, citra politisi dan partai yang memburuk akibat terlibat kasus korupsi berlanjut. Kondisi yang tidak kondusif tersebut akan menimbulkan *political distrust* yang selanjutnya akan menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat.

Untuk menjamin hak berpolitik masyarakat, pemerintah telah melaksanakan Program e-KTP. Dengan e-KTP diharapkan kekisruhan DPT yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan hak suara bisa diminimalisir.

Kesetaraan gender di bidang politik ditunjukkan oleh terpenuhinya kewajiban menyertakan sekurang-kurangnya 30 % keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat pada partai politik yang lolos verifikasi faktual untuk ikut pemilu 2014. Hal ini diamanatkan dalam UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian juga untuk mewujudkan keadilan di bidang hukum, pemerintah masih perlu kerja keras untuk mengatasi kendala kendala dalam penegakan hukum. Penegakan hukum akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya yang terus dilakukan pemerintah antara lain meningkatkan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka.

Sementara untuk menjamin keadilan dalam bidang ekonomi, dilakukan upaya afirmasi terhadap kelompok masyarakat yang tertinggal, orang cacat dan terpinggirkan dalam bidang ekonomi. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai program pembangunan berbasis masyarakat, seperti PNPM, PKH, peningkatan beasiswa miskin, dan peningkatan pemberian kredit usaha kecil menengah dan koperasi. Dalam rangka meningkatkan keadilan ekonomi, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Kemiskinan (MP3KI) harus segera direalisasikan dalam bentuk program-program nyata di lapangan dan dalam intensitas dan akurasi yang semakin baik. Selain itu program-program pembangunan regular berbasis sektor, khususnya sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan, juga perlu diarahkan secara cermat ke lokasi-lokasi tempat tinggal masyarakat miskin dan sedapat mungkin dilaksanakan dengan mekanisme padat karya.

2.2. Agenda Pembangunan

Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat telah menunjukkan perbaikan yang nyata walaupun masih ada indikator yang kurang memuaskan sehingga untuk mencapainya diperlukan kerja keras, perbaikan dan perkuatan program. Secara garis besar capaian indikator-indikator utama yang membentuk kinerja Agenda I adalah seperti dalam tabel sebagai berikut.

Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda I

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,6	7	6,2	6,5	6,3 ¹⁾	
Inflasi	%	2,8	3,5 - 5,5	7,0	3,8	3,5 ²⁾	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Suku Bunga (SBI 3 Bulan)	%	6,6	5,5 - 6,5	6,6	5,0	4,2	
Tingkat Kemiskinan	%	14,15	8-10	13,33	12,49	11,96 ³⁾	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,87	5-6	7,14	6,56	6,32 ⁴⁾	
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	tahun	7,72	8,14	7,92	7,92	n.a	
Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	%	5,30	4,18	4,79	4,43	na	
Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	70.7	72	70.9	71.1	71.1	
Angka Kematian Ibu (AKI)	per seratus ribu kelahiran	228 ⁵⁾	118	n.a	n.a	n.a ⁶⁾	
Angka Kematian Bayi (AKB)	Perseri bu kelahiran	34 ⁵⁾	24	34 ⁷⁾	34 ⁷⁾	32 ⁸⁾	
Nilai Tukar Petani (NTP)	n.a	101,20	115-120	102,80	105,75	105,76	
Keterangan: 1) Angka Triwulan 2 tahun 2012 2) Inflasi s/d September 2012, sedangkan inflasi tahun 2012 sebesar 4,3 3) Angka Maret 2012, sementara angka September 2012 sebesar 11,66 4) Angka bulan Februari 2012, sedangkan angka bulan Agustus 2012 adalah 6,14 5) Menggunakan angka status awal 2008 6) Perhitungan hasil SDKI 2012 belum selesai 7) Data SP tahun 2010 8) Hasil sementara SDKI 2012  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia telah diakui dunia internasional antara lain dengan bergabungnya Indonesia dalam kelompok G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85 % PDB dunia, yang memiliki peranan sangat penting dan menentukan dalam membentuk kebijakan ekonomi global.

Di tengah melemahnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup memuaskan dari 4,6% pada 2009 menjadi 6,3% pada triwulan II 2012.

Selain itu, di tengah melemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat cukup memuaskan dari 4,6 % ditahun 2009 menjadi 6,3 % di triwulan dua tahun 2012. Demikian juga dengan laju inflasi berhasil dikendalikan, dari 7% pada tahun 2010 menjadi sekitar 3,5 % pada tahun 2012. Penurunan Inflasi ini mampu mendorong penurunan tingkat suku bunga perbankan cukup besar dari 6,6 % di tahun 2010 menjadi 4,2 % tahun 2012, tingkat suku bunga yang relatif rendah ini akan lebih mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, namun demikian laju penurunan kemiskinan tersebut cenderung melambat dalam tiga tahun terakhir ini, sehingga perlu upaya peningkatan efektifitas program penanggulangan agar penurunannya dapat lebih cepat, sehingga target RPJMN pada tahun 2014 sebesar 8-10 % dapat tercapai.

Pemerintah perlu mengatasi kendala kendala inefisiensi yang menurunkan daya saing produk Indonesia.

Selama tiga tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 7,87% pada 2009 menjadi 6,32% pada 2012. Berdasarkan progres tersebut, target pengangguran terbuka pada 2014 sebesar 5-6% diperkirakan tercapai. Untuk mempertahankan laju perbaikan TPT, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja baru dan upaya mengatasi kendala-kendala inefisiensi yang menurunkan daya saing produk Indonesia. Kendala-kendala tersebut antara lain produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah², tingkat korupsi yang tinggi, dan infrastruktur yang masih terbatas. Selanjutnya tuntutan kenaikan upah buruh yang tidak diikuti perbaikan kendala-kendala yang ada akan

² Produktivitas tenaga kerja Indonesia dikategorikan buruk dibanding tenaga kerja di beberapa negara asia lainnya seperti China, Vietnam ataupun Malaysia, bahkan dalam laporan Mc. Kinsey (2012), produktivitas tenaga kerja Indonesia hanya 50 persendari produktivitas tenaga kerja Malaysia. McKinsey Global Institute, The archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential, 2012

membebani pengusaha dan akan berdampak pada pemutusan kerja.

Indikator pembangunan bidang pendidikan sampai dengan 2012 telah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan arah pencapaian target RPJMN. Pencapaian dua Indikator utama bidang pendidikan adalah: Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 tahun ke atas meningkat dari 7,72 tahun pada 2009 menjadi 7,92 tahun pada 2011, demikian juga Angka Buta Aksara pada Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas juga telah berhasil diturunkan dari 5,3% pada 2009 menjadi 4,43% pada 2011. Indikator penting lainnya yaitu Angka Partisipasi Sekolah juga menunjukkan perkembangan yang sama. Dengan perkembangan ini, diperkirakan target RPJMN pada 2014 akan tercapai.

Pembangunan bidang pendidikan telah menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan arah pencapaian target

Meskipun target-target bidang pendidikan dapat tercapai, namun masih terdapat ketidak-sesuaian dengan kebutuhan pendidikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa seperti: krisis karakter bangsa, penurunan daya saing, korupsi yang merajalela, dan permintaan pasar tenaga kerja. Pendidikan tidak hanya memperkaya siswa dengan pengetahuan saja tetapi juga harus meningkatkan kemampuan dalam penerapan ilmu dan pengembangan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Perbaikan kurikulum yang akan diterapkan di tahun 2013, diharapkan bukan hanya memasukkan kurikulum budi pekerti, tetapi juga perlu memasukkan komponen etos kerja dan budaya anti korupsi untuk mengatasi krisis karakter bangsa yang terjadi saat ini. Kurikulum ini juga didesain sesuai dengan pasar kerja dan mendorong terjalannya *networking* antara sekolah dengan dunia usaha.

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan status kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan, namun untuk mencapai target UHH pada 2014 sebesar 72 tahun, perlu kerja keras terutama melihat perkembangan AKI dan AKB yang kurang memuaskan.

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan.

AKB pada 2012 adalah sebesar 32 (hasil sementara SDKI 2012). Angka ini lebih rendah dari AKB 2009 sebesar 34. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembangunan bidang kesehatan. Meskipun demikian, capaian ini masih jauh dari target penurunan AKB dalam RPJMN 2014, yaitu sebesar

Perkembangan Angka Kematian Bayi kurang memuaskan.

24. Dengan demikian target AKB pada 2014 akan sulit diwujudkan. Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk mengupayakan capaian target tersebut, diantaranya dengan memperluas cakupan pelayanan kunjungan neonatal, imunisasi, pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pelayanan tersebut agar dapat menjangkau seluruh masyarakat termasuk yang berada di daerah tertinggal. Hal penting lainnya adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.

Peningkatan kesejahteraan petani juga merupakan aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat jumlah petani yang cukup besar. Salah satu Indikator kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN, nilai NTP meningkat dari 101,20 (2009) menjadi 105,76 pada 2012. Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan petani. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mendekati angka target pada 2014 sebesar 115-120. Kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya pada stabilitas harga, tetapi juga pada peningkatan produksi beberapa komoditi pangan utama (padi, jagung, tebu dan perikanan) yang kurang memadai, bahkan produksi kedelai mengalami penurunan. Oleh karena itu, selain menjaga stabilitas harga komoditi pangan, upaya yang perlu dilakukan adalah akselerasi program swasembada pangan terutama kedelai dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Inti dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah bukan sekadar patuh pada aturan secara formal tetapi menuju tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu budaya tata kelola yang baik (*good governance*). Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi dan perbaikan pelayanan publik. Secara umum capaian dari indikator utama untuk Agenda II ini kurang memuaskan (Tabel II.2).

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda II

Indikator	Satuan	Status Awal 2009	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Penurunan Tingkat Korupsi							
Skor IPK (0-10)	n.a	2,8	5,0	2,8	3,0	32 ¹⁾	
Persentase K/L dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (Pusat)	%	41	100	56	63	77	
Persentase Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah)	%	2,68	60	3	9	16	
Perbaikan Pelayanan Publik							
Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat) (0-10)	n.a	6,64	8,0	6,16	7,07	6,86	
Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah) (0-10)	n.a	6,46	8,0	5,26	6,00	6,32	
Peringkat Kemudahan Berusaha (1-183) ²⁾	n.a	129	75	115	126	129	
Keterangan:							
¹⁾ Perubahan metode penghitungan mulai tahun 2012							
²⁾ Peringkat menurut <i>International Finance Corporation</i> (IFC)							
 Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat dari 2,8 pada 2010 menjadi 3,0 pada 2011 (skala 0-10). Pada 2012 *Transparency International* (TI) merubah metode survei dan skala penilaian menjadi skala 0-100, dalam hal ini skor Indonesia adalah 32. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan, meskipun masih jauh

Skor IPK Indonesia meningkat, meskipun masih berada pada posisi rendah, yaitu peringkat ke-100 dari 183 negara

dari target pencapaian IPK dalam RPJMN. Disamping itu, Indonesia masih menempati posisi yang rendah dibanding negara-negara lain, yaitu peringkat ke-100 dari 183 negara yang disurvei.

Di samping itu, persentase pencapaian opini WTP oleh BPK pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Target pencapaian WTP Instansi Pemerintah Pusat pada tahun 2014 diperkirakan akan tercapai 100%. Meskipun demikian, peningkatan pencapaian WTP oleh daerah dirasakan masih kurang maksimal karena masih jauh dari target 2014 sehingga diperkirakan sulit untuk dicapai.

Perkembangan skor integritas pelayanan publik juga memiliki trend yang sama seperti perkembangan opini WTP. Skor integritas pelayanan publik pada Pemerintah Pusat diperkirakan akan mencapai target RPJMN, namun tidak demikian dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berusaha lebih keras lagi dalam mengupayakan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di daerahnya.

Iklim investasi masih mengalami hambatan berupa inefisiensi birokrasi, korupsi, infrastruktur yang tidak memadai, peraturan buruh yang membatasi dll.

Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Menurut *International Finance Corporation* (IFC), peringkat Indonesia turun dari 115 pada 2010 menjadi 129 pada 2012. Memburuknya kemudahan berusaha berpengaruh pada menurunnya daya saing ekonomi Indonesia. Laporan *World Economic Forum* (WEF) juga menyebutkan bahwa posisi daya saing ekonomi Indonesia turun empat tingkat dari posisi ke-46 pada tahun 2011 menjadi posisi ke-50 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah dalam iklim investasi di Indonesia, yang disebabkan oleh birokrasi yang tidak efisien dan korup, infrastruktur tidak memadai, etika kerja buruk, peraturan buruh yang membatasi, akses pada pembiayaan yang sulit, kurangnya jumlah tenaga kerja terdidik, dan rendahnya kemampuan berinovasi. Jika segala hambatan diatas tidak segera diatasi maka diprediksi target peringkat ke-75 dalam kemudahan berusaha (IFC) pada tahun 2014 tidak akan tercapai. Diperkirakan pada 2014 peringkat kemudahan berusaha hanya berada pada kisaran di atas 100.

Untuk mencapai target penurunan tingkat korupsi dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, maka Pemerintah

perlu melakukan langkah-langkah akselerasi secara menyeluruh, misalnya melalui: a) penegakan hukum secara konsisten dan pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi; b) penguatan dan pembenahan institusi penegak hukum beserta perangkat yang ada di Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengadilan (MA, MK, KY); c) menyelesaikan dengan segera kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan politisi, mafia hukum, dan pejabat publik tingkat tinggi; d) penguatan peran dan fungsi KPK dan pengadilan TIPIKOR; dan e) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang diperluas baik sasaran maupun kualitasnya, seperti, penerapan pakta integritas, kontrak kinerja, pengembangan IKU pada instansi pemerintah, serta evaluasi kinerja program/kegiatan yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi.

Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi.

RPJMN 2010-2014 menyebutkan pentingnya penegakan pilar demokrasi dalam pembangunan menuju Indonesia yang demokratis. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap hak azasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, dan jaminan terhadap keberagaman. Berkaitan dengan itu, penegakan pilar-pilar demokrasi di Indonesia juga dilakukan melalui penguatan peran kelembagaan, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan harmoni interaksi antarlembaga tersebut, yang mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam bentuk diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggungjawab.

Dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia mendapat catatan kritis dalam sidang *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan HAM PBB, yang berlangsung pada 23-25 Mei 2012, di Jenewa, Swiss. Sebanyak 74 negara berpartisipasi dalam sidang UPR tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah Indonesia sudah menyatakan menerima 179 rekomendasi yang disampaikan oleh UPR, dengan rincian langsung mengadopsi 143 rekomendasi dan akan mempertimbangkan kembali 36 rekomendasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia serius dan

Indonesia serius dan bersungguh-sungguh dalam penghapusan diskriminasi, intoleransi beragama, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta impunitas atas kasus pelanggaran HAM berat.

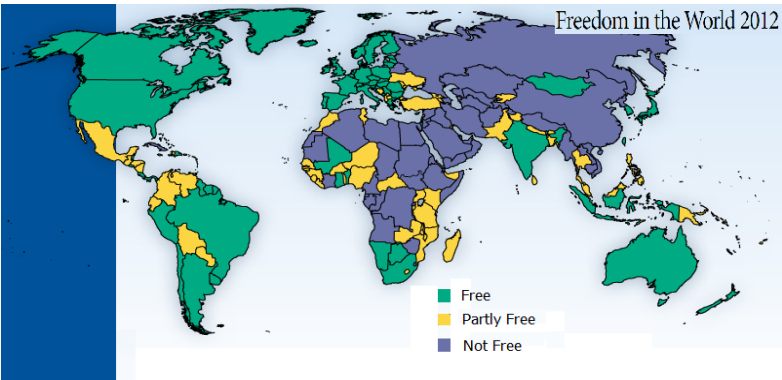
bersungguh-sungguh dalam penghapusan diskriminasi, intoleransi beragama, perlindungan terhadap kelompok minoritas, serta impunitas atas kasus pelanggaran HAM berat.

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda III

Indikator	Satuan	Status Awal 2009	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	n.a	67,3	73	63,17	65,48		
Institusi Demokrasi	n.a	62,72	n.a	63,11	74,72		
Tingkat Partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilu Legislatif	%	70,99	75				
Tingkat Partisipasi Politik Rakyat dalam Pemilu Presiden / Wakil Presiden	%	72,56	75				
Keterangan:							
 Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Pemenuhan hak politik dan kebebasan sipil merupakan salah satu pilar demokrasi penting. Sasaran pemerintah dalam bidang politik seperti yang tertuang dalam RPJMN adalah Pemilu yang adil dan tidak diskriminatif dengan tingkat partisipasi politik rakyat pada Pemilu 2014 mencapai 75 % dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2014 yang mencapai skor 73. Pencapaian partisipasi politik masyarakat dalam pemilu baru dapat diketahui setelah pelaksanaan pemilu pada 2014. (Tabel II.3)

Pembangunan bidang politik di Indonesia telah memberikan hasil yang nyata dalam penegakan pilar demokrasi. Dalam laporan *Freedom of the World 2012*, Indonesia termasuk dalam kategori negara yang bebas (*Freedom Status: Free*) bersama negara-negara maju karena mampu memberikan dan menjaga hak politik dan kebebasan sipil masyarakat. (Gambar II.5) Freedom House menilai skor Tingkat Kebebasan (*Freedom Rating*) Indonesia sebesar 2,5 (skala 0-10, semakin kecil semakin baik) dan dapat dipertahankan sejak 2009 sampai 2012.



Gambar II.5 Peta Status Kebebasan (*Freedom Status*)
Sumber: *Freedom House*

Kebebasan mengemukakan pendapat yang merupakan salah satu pendukung demokrasi yang penting juga semakin membaik. Hal ini ditunjukkan oleh dicabutnya kewenangan Jaksa Agung untuk melarang peredaran buku pada tahun 2010, terjaminnya kebebasan pers dan penggunaan internet.

Tabel II.4 menunjukkan penilaian *Freedom House* atas kondisi kebebasan pers dan penggunaan internet di Indonesia. Penilaian tersebut merupakan gambaran terjaganya kondisi kebebasan pers yang semakin membaik. Sampai 2012 Indonesia memperoleh status *Partly Free* dalam bidang pers, dengan skor kebebasan pers (*Freedom of Press*) yang semakin membaik, yaitu dari 54 pada tahun 2009 menjadi 49 pada 2012. Perbaikan skor ini didukung oleh membaiknya skor pada lingkungan legal dan politik.

Tabel II.4 Perkembangan Status Kebebasan Pers

	2009	2010	2011	2012
Press Status	Partly Free	Partly Free	Partly Free	Partly Free
Press Freedom Score	54	52	53	49
Legal Environment	18	18	18	16
Political Environment	21	19	20	18
Economic Environment	15	15	15	15
Note: 0=most free. 100=least free				

Terjaganya pemenuhan hak politik, kebebasan sipil masyarakat dan membaiknya kebebasan pers merupakan capaian penting dalam pembangunan pilar-pilar demokrasi. Meskipun demikian, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan, antara lain disebabkan oleh: a) meningkatnya jumlah kekerasan di masyarakat dan antarkelompok masyarakat sebagai dampak dari masih adanya politik pragmatisme-transaksional pada pelaksanaan pemilu dan pilkada, dan permasalahan institusional politik yang berpotensi pada munculnya *political distrust*; b) adanya masalah prosedural pemilu dalam bentuk belum akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya hambatan hak memilih dan dipilih, dan masih buruknya fasilitas penyandang cacat pada Pemilu; c) terbatasnya kaderisasi dalam parpol; dan d) masih rendah peran DPRD, terutama dalam pelaksanaan hak inisiatif.

Diprediksi bahwa sasaran RPJMN 2014 untuk penegakan pilar demokrasi masih berpotensi dapat dicapai melalui pelaksanaan: 1) Penyusunan DPT secara profesional, partisipatif dan transparan; 2) Pendidikan politik dan pemilih tepat sasaran, penggunaan budaya lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi; 3) Pengawasan secara intensif penyelesaian peraturan perundangan bidang politik agar tepat waktu; 4) Desain bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu; 5) Pengawasan ketersediaan anggaran untuk tahapan pemilu agar tepat waktu; serta 6) Perhatian pada penyediaan fasilitasi penyandang cacat.

Agenda IV: Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Wujud dari penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini akan dilaksanakan melalui peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum, serta mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. Agenda penegakan hukum mencakup keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang, termasuk proses penjabarannya, pengawasannya dan penegakan aturan hukumnya.

Beberapa indikator utama pada agenda ini, yaitu jumlah penyelesaian perkara, baik di tingkat Peradilan Umum dan MA, dan penanganan kasus korupsi masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMN, sementara indikator penyelesaian Prolegnas diperkirakan akan sangat sulit dicapai pada tahun 2014.

Tabel II.5 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda IV

Indikator	Status Awal 2009	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
			2010	2011	2012	
Penegakan Hukum						
Jumlah Penyelesaian Perkara di Tingkat MA ¹⁾ : a. Perkara yang ditangani (Pkr) b. Perkara yang putus (Pkr)	22.315 13.891	10.500*	22.315 13.891	21.414 13.719	4.885 ²⁾	
Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana & tepat waktu) di lingkungan Peradilan Umum ³⁾ : <u>Tingkat Pertama:</u> a. Perkara yang ditangani (Pkr) b. Perkara yang putus (Pkr) <u>Tingkat Banding:</u> a. Perkara yang ditangani (Pkr) b. Perkara yang putus (Pkr)		153.100	2.742.169 2.703.265 13.488 10.795	4.854.111 4.808.881 13.577 10.911	n.a	
Penanganan Kasus Korupsi oleh KPK ¹⁾						
Penyelidikan (kasus)	67	80	54	78	45**	
Penyidikan (perkara)	37	75	62	66	50**	
Penuntutan (perkara)	32	65	55	45	41**	
Eksekusi (perkara)	39		38	33	16**	

Indikator	Status Awal 2009	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
			2010	2011	2012	
Penanganan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan ¹⁾						
Penyidikan (perkara)	1609		2315	1729	450**	
Penuntutan (perkara)	1369		1706	1499	442**	
Sumber: ¹⁾ Pidato Presiden RI 16 Agustus 2012 ²⁾ Angka sampai dengan Mei 2012 ³⁾ Laporan Evaluasi Dua Tahun RPJMN 2010-2014 ⁴⁾ Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan–Bappenas, &Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Keterangan: * Target dalam RPJMN 2010-2014 ** Data per Juni 2012						
 Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai						

Penyelesaian perkara pada peradilan umum tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan gambaran terlaksananya aspek penegakan hukum yang baik. Sebagian besar perkara yang ditangani dapat diselesaikan. Akan tetapi, pada tingkat Mahkamah Agung (MA), masih dijumpai banyaknya “hutang” perkara yang masih tersisa.

Banyaknya hutang perkara di tingkat MA dan semakin rendahnya proporsi jumlah perkara korupsi yang masuk ke tahap penuntutan dan eksekusi oleh KPK dan Kejaksaan, memperlihatkan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Sementara terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, salah satu upaya yang dapat ditempuh selain penegakan hukum yang konsisten, adalah terus mengupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, sehingga tercapai rasa keadilan di masyarakat dan terciptanya pemerintahan yang bersih.

Pada tataran pelaksanaan, sistem penegakan hukum masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala, terutama terkait dengan aspek koordinasi antarinstansi. Masing-masing lembaga penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbedaan tersebut harus diselaraskan dan

diharmonisasikan dalam tataran pelaksanaannya, agar penegakan hukum dapat dilaksanakan secara tepat dan sesuai kaidah hukum yang berlaku, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Salah satu penyebab buruknya penilaian masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia ternyata tidak terlepas dari sistem hukum itu sendiri, yang membuat aparat penegak hukum di Indonesia tidak dapat bekerja secara maksimal. Sebagai contoh adalah adanya peraturan yang mengharuskan para penegak hukum untuk meminta izin kepada Presiden dalam melakukan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa oleh lembaga penegak hukum.

Sistem hukum yang ada membuat aparat penegak hukum di Indonesia tidak bisa bekerja secara maksimal

Sementara itu, proses pembuatan undang-undang berjalan lambat yang ditunjukkan oleh rendahnya capaian Prolegnas setiap tahun. Hal ini mengindikasikan adanya kebuntuan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif, karena capaian Prolegnas adalah hasil kompromi antara DPR dan Pemerintah. Selain itu, hal ini juga mengindikasikan DPR lebih memprioritaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran daripada fungsi legislasi.

Rendahnya capaian Prolegnas perlu dijadikan bahan koreksi bersama antara Pemerintah dan DPR dalam menetapkan target Prolegnas dalam tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini, perlu perbaikan /peningkatan efektifitas komunikasi dan penyesuaian target Prolegnas dengan mempertimbangkan kemampuan penyelesaiannya. Jika hal ini tidak segera diatasi maka diprediksi target Prolegnas tahun 2014 tidak akan tercapai.

Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh rakyat tanpa membuat kesenjangan dan disparitas. Walaupun selama ini Pemerintah sudah bekerja keras untuk dapat menjalankan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, tetapi beberapa indikator utama dalam RPJMN diperkirakan akan sulit untuk dicapai targetnya. Beberapa target tersebut antara lain persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan dan angka kemiskinan daerah tertinggal.

Tabel II.6 Pencapaian Kinerja Indikator-Indikator Agenda V

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Persentase anggota DPR perempuan	Persentase	17.86%	25%	17.90%	18.40%	21.74%	
Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan untuk menggunakan hak ikut pemilu melalui perekaman sidik jari e-KTP dalam rangka keakuratan DPT	Juta jiwa	n.a	172	n.a	n.a	147,4	
Jumlah RT peserta PKH	Ribu RTSM	726	1.170	774	1052	1.492	
Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	%	48	100	59,07	63,1	64,58	
PNPM Perdesaan	Jumlah desa	4.334	5100	4.791	4.978	5.070	
PNPM Perkotaan *)	Jumlah Kelurahan	11.014	10,948	10,930	10,999	10,948	
Angka Kemiskinan daerah tertinggal	%	20,19	14.2	19,86	19,15	18,43	
Keterangan: *)Status awal yang lebih besar dari target 2014 adalah akibat penyesuaian data jumlah kelurahan.  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Untuk mempercepat pencapaian target-target tersebut, perlu dilakukan percepatan beberapa program.

Jangkauan pelayanan kesehatan perlu diperluas, khususnya melalui perluasan cakupan sistem jaminan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan perlu dilakukan secara terpadu dalam satu pengelolaan di bawah BPJS kesehatan, yang mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kesehatan, seperti Jamkesmas, Jamsostek, Askes, dan Jamkesda.

Dalam kaitan dengan keadilan ekonomi, perlu dipercepat pelaksanaan program-program pembangunan yang bersifat padat karya. Sebagai contoh, percepatan pembangunan bidang pertanian, terutama akselerasi program swasembada pangan, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, peningkatan akses petani pada sumber daya produktif, dan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menyiapkan program/kegiatan daerah yang mendukung.

Demikian juga dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan sekitarnya perlu lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah, yang selanjutnya akan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam kaitan dengan keadilan dan kesetaraan di bidang politik, Undang-Undang telah menjamin keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan politik, yang antara lain ditunjukkan oleh proporsi kursi DPR yang diduduki oleh perempuan yang meningkat secara signifikan. Proporsi ini telah meningkat dari data pemilu tahun 2004 11.09% menjadi 17.86% hasil pemilu 2009. Kemudian sejalan dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW), persentase jumlah perempuan di DPR pada semakin meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 17.9% pada tahun 2010, sebesar 18.40% pada tahun 2011 dan 21,4% pada tahun 2012. Hal ini juga tercermin pada kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30 % dalam struktur kepengurusan partai sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Kuota keterwakilan perempuan merupakan salah satu dari tiga hal yang diverifikasi KPU terhadap partai peserta pemilu 2014. Jumlah partai yang mendaftar ke KPU untuk berpartisipasi pada pemilu 2014 sebanyak 73 partai,

dan yang lolos verifikasi faktual berjumlah 16 partai. Beberapa partai yang lolos dalam proses verifikasi faktual dengan struktur kepengurusan yang telah menempatkan pengurus perempuan minimal 30% antara lain Partai Gerindra dengan 99 orang pengurus perempuan atau 31,52% dari total anggota, Partai Golkar (116 orang = 31,52%), Partai PDI (76 orang = 30%) dan Partai Demokrat (59 orang = 31%).

Dengan adanya e-KTP selain masyarakat mendapat keadilan politik dengan diberikan hak pilihnya dengan DPT, penyimpangan manipulasi data bisa diminimalisir

Penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terkait dengan pemilihan umum dengan pemenuhan hak rakyat untuk memilih dan dipilih melalui pemutakhiran data pemilih (DPT), pengumpulan data-data kewilayahan dan kependudukan dari seluruh KPU di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan sistem KTP manual banyak terjadi penyimpangan dalam penyusunan DPT, sehingga sebagian masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan banyak manipulasi data dimana seorang bisa terdaftar di beberapa lokasi dengan menggunakan beberapa nama. Dengan adanya e-KTP selain masyarakat mendapat keadilan politik dengan diberikan hak pilihnya dengan terdaftar dalam DPT, penyimpangan manipulasi data bisa diminimalisir. Sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan perekaman sidik jari sebanyak 147,4 juta jiwa wajib KTP dan sudah dicetak e-KTP sebanyak 68,55 juta keping, diprediksikan target e-KTP 2014 sebanyak 172 juta akan tercapai.

Kesejahteraan yang lebih merata merupakan salah satu dimensi pembangunan inklusif dan berkeadilan. Program Keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu program afirmatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan pemberian bantuan tunai bersyarat. Dana yang disalurkan melalui program PKH meningkat lebih dari 200% pada tahun 2012 dibanding lima tahun sebelumnya. Jumlah RTSM yang mendapat bantuan sampai 2012 adalah 1,52 juta RTSM, mencakup 33 Provinsi dan 166 kabupaten/kota (33%) sehingga diperkirakan target PKH 2014 berupa peningkatan RTSM menjadi 3 juta dan perluasan PKH mencakup seluruh kabupaten/kota akan tercapai. Program afirmatif lainnya adalah Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk jenjang pendidikan dasar, dimana pada tahun 2012 telah disalurkan bantuan untuk 10,1 juta siswa SD, 2,8 juta siswa MI, 4,6 juta siswa SMP, dan 2,3 juta siswa MTs.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan diwujudkan antara lain dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), yang dalam proses perencanaannya bersifat *bottom-up* dan pelaksanaannya bersifat inklusif. Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan meningkat dari 4.334 desa pada tahun 2009 menjadi 5.070 desa pada tahun 2012. Sementara itu, PNPM Mandiri Perkotaan pada 2012 telah mencakup 10.946 kelurahan dan sudah mencapai target yang ditentukan. Keterlibatan masyarakat diperluas juga melalui Program PNPM lainnya, antara lain: (1) PNPM-PISEW untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar; (2) PNPM PUAP untuk mendukung akses permodalan pertanian; (3) PNPM Mandiri Pariwisata untuk pengembangan desa wisata. Dengan keterlibatan secara aktif, masyarakat merasa lebih memilikidan mendapatkan manfaat program sehingga akan mendukung keberlanjutan dari hasil program tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian terhadap capaian lima agenda dan tiga misi pembangunan seperti diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Visi RPJMN 2010-2014 untuk mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan berpeluang akan tercapai, yang antara lain ditunjukkan dengan berbagai indikator kesejahteraan dan demokrasi yang cenderung meningkat dalam periode 3 tahun pelaksanaan RPJM yang sudah berjalan dan diharapkan akan terus membaik sampai tahun 2014. Selanjutnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera ini juga semakin terbuka dalam menyalurkan aspirasinya, baik melalui berbagai organisasi sosial politik, maupun secara individu dalam berbagai kegiatan pelaksanaan demokrasi. Berbagai kekurangan tentu saja masih ada dan harus terus diperbaiki, namun secara umum proses dan sistim demokrasi yang sudah dibangun diharapkan dapat terus mengoreksi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Salah satu kekurangan yang harus terus diperbaiki adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan yang antara lain dicerminkan dari perbaikan pemerataan pendapatan antar-golongan dan antardaerah. Upaya perbaikan pemerataan ini dilakukan dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat meliputi

program-program afirmatif di bidang kemiskinan, pembangunan pertanian dan perdesaan, serta pengelolaan sumber daya alam, sehingga pencapaian visi RPJMN terkait keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa semakin mendekati kenyataan. Dengan demikian pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014, kita dapat berharap bahwa Indonesia menjadi lebih Sejahtera, lebih Demokratis dan lebih Berkeadilan.



BAB III

EVALUASI PENCAPAIAN

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

DAN PEMBIAYAAN

PEMBANGUNAN

EVALUASI PENCAPAIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, sasaran pertumbuhan ekonomi selama periode 2010-2014 adalah sekitar 6,3-6,8 % per tahun, dengan peningkatan bertahap mulai dari 5,5-5,6 % pada tahun 2010 menjadi sekurang-kurangnya 7 % pada tahun 2014. Stabilitas ekonomi didukung dengan menurunnya tingkat inflasi secara bertahap dengan besaran sekitar 4-6 %. Penurunan inflasi juga diharapkan berpengaruh pada menurunnya tingkat suku bunga sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi. Total investasi kumulatif yang dibutuhkan selama kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 11.913,2-12.462,6 triliun, dengan perkiraan sebesar 18 % dapat dipenuhi oleh pemerintah.

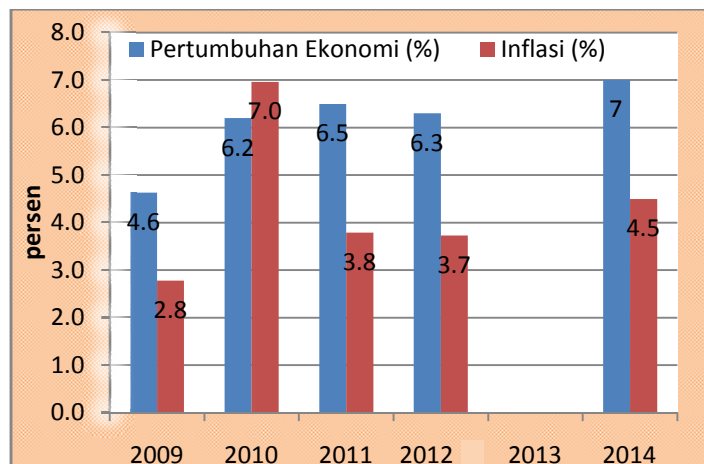
Penurunan inflasi diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi

Secara umum, realisasi perkembangan besaran ekonomi makro sampai dengan triwulan III tahun 2012 telah dicapai, bahkan, capaian beberapa indikator tertentu lebih baik dibandingkan dengan sasaran ekonomi makro yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Pertumbuhan PDB berada dalam kisaran sasaran RPJMN, inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang cukup rendah, dan suku bunga cenderung menurun. Di samping itu, defisit APBN terjaga di bawah ambang yang ditetapkan dalam RPJMN, dan cadangan devisa terus meningkat.

Pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2010 hingga semester I 2012 masih dalam kisaran sasaran RPJMN. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari sasaran, yaitu mencapai 6,2 %. Tahun 2011, perekonomian nasional berkembang lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5 %, lebih tinggi dari yang telah ditargetkan. Pada tahun 2012, meskipun tertekan cukup kuat karena terjadinya krisis keuangan di Eropa, perekonomian nasional

Tahun 2011, tumbuh melebihi target, mencapai 6,5 persen.

hingga semester I tahun 2012 masih dapat tumbuh sebesar 6,4 %.



Keterangan : 1) Target Inflasi 2014 adalah 3,5-5,5 %

Gambar III.1 Pertumbuhan PDB dan inflasi

Cadangan devisa terus meningkat lebih tinggi dari target RPJMN

Stabilitas ekonomi tetap terjaga kokoh untuk mendukung pertumbuhan. Inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2010 (7,0 %) dapat diturunkan secara cepat. Tahun 2011 inflasi hanya 3,8 %, jauh di bawah target yang ditetapkan. Pada Semester II 2012 inflasi adalah 3,7 %. Rendahnya inflasi berdampak pada menurunnya tingkat suku bunga, bahkan pada tahun 2011 dan Semester I 2012 dibawah perkiraan RPJMN. Besaran suku bunga terus menurun dari 6,6 % pada tahun 2010, menjadi 5,04 % pada 2011, dan 4,32 % pada Semester I 2012. Defisit APBN pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing -0,7 % dan -1,1 %, sudah lebih rendah dibanding sasaran RPJMN tahun 2012 sebesar -1,2 %. Cadangan devisa terus meningkat lebih tinggi dari target RPJMN. Target besaran cadangan devisa pada 2014 adalah sekitar US\$ 101,4-105,5 milyar. Target tersebut sudah terlampaui, pada tahun 2011 cadangan devisa telah mencapai US\$ 110,1 Miliar, bahkan pada Semester I 2012 sudah dicapai US\$ 106,5 milyar. Namun perlu kehati-hatian, bahwa neraca perdagangan luar negeri kita mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2012, dengan demikian, perlu diambil langkah strategis dan taktis dalam menghadapi masalah ini, dengan lebih menggiatkan lagi aktivitas ekspor baik ke negara tujuan yang ada maupun dengan membuka pasar ekspor pada negara tujuan yang baru yang berpotensi.

Tabel III.1 Capaian Perkembangan Makro Ekonomi

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,6	7,0	6,2	6,5	6,3 ¹⁾	
Inflasi	%	2,8	3,5 - 5,5	7,0	3,8	3,5 ²⁾	
PMTB	%	3,3	n.a	8,5	8,8	10,0 ³⁾	
Suku Bunga (SBI 3 Bulan)	%	6,6	5,5 - 6,5	6,6	5,0	4,2	
Defisit APBN	%	-1,6	-1,2	-0,7	-1,1	n.a	
Cadangan Devisa	US\$ Miliar	66,1	101,4 - 105,5	96,2	110,1	106,5 ⁴⁾	
Perdagangan Luar Negeri (neto)	US\$ Miliar	30,9	n.a	30,6	34,8	7,7 ¹⁾	
Pengangguran	%	7,87	5,0 - 6,0	7,14	6,56	6,32 ⁵⁾	
Kemiskinan ⁵⁾	%	14,15	8,0 - 10,0	13,3	12,49	11,96 ⁶⁾	
Catatan: ¹⁾ Laju pertumbuhan s/d Triwulan II tahun 2012, ²⁾ Inflasi s/d bulan September 2012, sedangkan inflasi tahun 2012 sebesar 4,3, ³⁾ Laju pertumbuhan s/d Triwulan II tahun 2012, ⁴⁾ Keadaan Semester I tahun 2012, ⁵⁾ Angka bulan Februari 2012, sedangkan angka bulan Agustus 2012 adalah 6,14, ⁶⁾ Angka bulan Maret 2012, sementara angka bulan September adalah 2012 adalah 11,66. na: data belum/tidak tersedia  Sudah tercapai/on track/ on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Perekonomian yang terus bertumbuh dan dukungan stabilitas yang kokoh telah memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh semakin menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Angka pengangguran terus mengalami penurunan hingga sudah lebih rendah daripada proyeksi RPJMN. Angka pengangguran pada tahun 2010 adalah 7,14 %, turun menjadi 6,56% pada 2011, dan 6,32% pada 2012. Tingkat kemiskinan juga terus menurun sesuai dengan arah sasaran RPJMN. Proporsi penduduk miskin pada tahun 2010 adalah

13,3%, turun menjadi 12,49% pada tahun 2011, dan 11,96% pada Maret 2012.

Kemandirian pendanaan juga ditunjukkan oleh menurunnya ketergantungan terhadap utang, yang tercermin pada menurunnya *Debt to GDP ratio*.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, kebijakan investasi nasional diarahkan pada pemenuhan dan pengoptimalan pendanaan menuju kemandirian pendanaan pembangunan. Kemandirian dalam pendanaan pembangunan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas makroekonomi yang kondusif. Peningkatan kemandirian pendanaan pembangunan dapat terlihat dengan semakin meningkatnya penerimaan negara baik pajak maupun non pajak, sehingga pembiayaan defisit dapat ditekan hingga di bawah 3 % dari PDB.³ Kemandirian pendanaan juga ditunjukkan oleh menurunnya ketergantungan terhadap utang, yang tercermin pada menurunnya *Debt to GDP ratio* dari 26,0 % pada tahun 2010 menjadi sekitar 22,9 % pada Agustus 2012.⁴ Penurunan *Debt to GDP ratio* merupakan hasil dari upaya yang konsisten dalam pembayaran utang melebihi penyerapan utang (*Negative net transfer*) dalam setiap tahun anggaran. Indikator lain yang menunjukkan peningkatan perbaikan adalah adanya kecenderungan peningkatan pada pasar keuangan nasional, baik pasar modal, saham, maupun obligasi. Hal ini dikuatkan dengan naiknya peringkat investasi Indonesia dari BB+ menjadi BBB- versi Fitch⁵, yang membawa dampak positif bagi investor untuk menyalurkan dananya ke Indonesia baik melalui pasar keuangan maupun penanaman modal berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Peningkatan kemandirian pendanaan pembangunan dicapai melalui penerapan dua strategi penting, yaitu (i) optimalisasi sumber dan skema pendanaan pembangunan, dan (ii) peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan.

Strategi pertama, optimalisasi sumber dan skema pendanaan pembangunan, dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak berupa ekstensifikasi wajib pajak, pengembangan skema pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang terdiri dari

³ Buku Saku Statistik Utang Negara, Kementerian Keuangan, per September 2012

⁴ *ibid*

⁵ Dikutip, *ibid*

pembiayaan perbankan maupun bukan (non) perbankan, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

Pembiayaan dalam negeri Pemerintah yang terdiri dari pembiayaan perbankan maupun bukan perbankan menunjukkan kecenderungan yang positif. Peningkatan peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi pendanaan ditunjukkan dengan meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR pada Bank Umum meningkat dari 75,2 % pada 2010 menjadi 83,7 % pada Agustus 2012, LDR pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat dari 79,0 % pada 2010 menjadi 83,6 % pada Agustus 2012.

Di samping perbankan, dana masyarakat juga dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank, dimana saat ini telah dibentuk Otoritas Jasa Keuangan sesuai Undang-undang No 21 Tahun 2011, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan lembaga pembiayaan dan diharapkan mampu mendukung peningkatan manajemen pada lembaga pembiayaan. Pembiayaan non perbankan dalam negeri terutama diperoleh dari Surat Berharga Negara (SBN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk, dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN). Sampai bulan Agustus 2012, sebagian besar SBN/SBSN dimiliki oleh lembaga keuangan, Perbankan (36,19 %) dan Lembaga Non-Bank (59,88 %), dan hanya sekitar 3,93 % dimiliki oleh Institusi Pemerintah dan Bank Indonesia.

Tingginya permintaan terhadap SBN/SBSN oleh lembaga keuangan maupun masyarakat, terutama didukung oleh stabilitas makroekonomi dan meningkatnya rating investasi Indonesia menjadi '*Investment Grade*'. Hal lain yang penting untuk dicatat ialah telah diterbitkannya SBSN berbasis proyek (*SBSN underlying project*) sebagai instrumen baru obligasi pemerintah. Di samping itu, minat perbankan (BUMN) juga sangat tinggi dalam mendukung skema PDN untuk pelaksanaan kegiatan dengan bekerjasama dengan institusi pemerintah. Karenanya, Pemerintah melakukan penjajakan pengembangan sumber pendanaan ini untuk membiayai pembangunan infrastruktur, dan peningkatan industri dalam negeri, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP 54/2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah.

Pinjaman luar negeri dan hibah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat dalam mengungkit, mendorong transfer iptek dan meningkatkan kerjasama internasional

Terkait dengan optimalisasi sumber dan skema pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2011 (PP No. 10/2011) tentang Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006. Revisi peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dengan tetap berpegang pada prinsip: transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara. Pinjaman luar negeri dan hibah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat dalam (i) mengungkit investasi (*investment leverage*), (ii) mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (*knowledge transfer*), dan (iii) meningkatkan kerjasama internasional (*international cooperation*).

Pengelolaan hibah diatur secara khusus dalam PP No. 10/2011 dan aturan turunannya, dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan hibah dengan tetap menjaga akuntabilitasnya, sehingga dapat meningkatkan potensi hibah yang ada. Secara umum hibah diarahkan untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi instansi pelaksana kegiatan hibah maupun penerima manfaat yang lain, penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, serta isu-isu global seperti: perubahan iklim (*climate change*), dan penyakit menular.

Strategi Kedua, peningkatan kualitas pemanfaatan sumber dan skema pendanaan pembangunan dilakukan upaya antara lain melalui penajaman fokus belanja dan peningkatan efektivitas belanja Pemerintah dan pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran. Penajaman fokus belanja dilakukan dengan perencanaan alokasi anggaran belanja Pemerintah sesuai prioritas pembangunan nasional, termasuk pendanaan untuk direktif Presiden seperti pembangunan infrastruktur sesuai Masterplan Percepatan Pembangunan Perekonomian Indonesia (MP3EI), perkuatan Klaster 4 dalam rangka pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan nasional menuju pemenuhan *minimum essential forces* (MEF).

Peningkatkan efektivitas belanja Pemerintah dan pelaksanaan percepatan penyerapan anggaran dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain:

1. Pemantapan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) melalui restrukturisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang berbasis kinerja, telah dilakukan penyempurnaan mekanisme penyusunan RKA K/L sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
2. Pengembangan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) atau *Medium-Term Expenditure Framework* (MTEF), antara lain melalui peningkatan kualitas *baseline* dan *forward estimates*, serta penerapan mekanisme Inisiatif Baru berbasis kompetisi pada penyusunan RKP sehingga memungkinkan untuk melakukan penyesuaian pada *baseline*.
3. Perkuatan pemantauan dan evaluasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran, melalui penggunaan Indikator Kinerja.
4. Pengembangan awal dukungan Teknologi Informasi (TI) dalam Reformasi Penganggaran, yang akan mengintegrasikan database Renja K/L, RKA K/L dan DIPAs.

Perekonomian nasional tidak terlepas dari dinamika perekonomian dunia dan tantangan yang harus dihadapi dari dalam negeri. Terjadinya krisis utang Eropa yang terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS yang berlangsung lambat akan memberikan pengaruh pada ekonomi Indonesia. Krisis di kawasan ini berpotensi menurunkan permintaan ekspor nasional yang mungkin berdampak tidak menguntungkan terhadap neraca perdagangan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi cadangan devisa. Di samping itu, krisis politik di Afrika Utara dan Timur Tengah yang tidak kunjung membaik telah memicu naiknya harga minyak dunia sehingga memberi dampak yang cukup berarti bagi

Krisis di kawasan Eropa dan AS berpotensi menurunkan permintaan ekspor nasional yang mungkin berdampak tidak menguntungkan terhadap neraca perdagangan

perekonomian nasional. Oleh karena sebagian BBM yang digunakan di dalam negeri berasal dari impor, maka kenaikan harga minyak mentah dunia dapat mempengaruhi APBN, kegiatan perekonomian dalam negeri dan inflasi, yang pada gilirannya akan dapat mengurangi tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat.

Dari sisi internal, tantangan penting yang dihadapi antara lain: (1) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas; (2) Keterbatasan ketersediaan infrastruktur masih menjadi kendala untuk mempercepat peningkatan kegiatan ekonomi karena dapat memperlambat pasokan aliran barang dan mobilisasi tenaga kerja; (3) upaya peningkatan investasi dengan terus memperbaiki iklim investasi; (4) masih kurang efektifnya belanja negara dalam APBN, baik pada sisi penerimaan negara, arah dan prioritas belanja, maupun penyerapannya.

Dengan berbagai tantangan ini, pencapaian sasaran ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 pada dua tahun terakhir cukup berat. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih keras dan langkah-langkah yang lebih cermat antara lain:

1. Untuk mengurangi dampak negatif akibat krisis keuangan kawasan Eropa dan lambatnya proses pemulihan ekonomi AS, Pemerintah perlu mengupayakan alternatif pasar ekspor dari pasar utama selama ini yang meliputi China, Jepang, AS, dan Singapura ke kawasan potensial lainnya.
2. Dengan adanya potensi ekspor yang menurun, pencapaian target pertumbuhan ekonomi sampai dengan tahun 2014 harus diupayakan melalui penguatan ekonomi domestik. Dengan demikian sumber pertumbuhan dari konsumsi masyarakat dan investasi harus dapat ditingkatkan melalui peningkatan daya beli masyarakat dan daya saing produk nasional. Peningkatan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan langkah-langkah terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan lebih membuka lapangan pekerjaan. Peningkatan daya saing diantaranya dilakukan dengan mempercepat ketersediaan infrastruktur dan pemantapan ketahanan energi.

Peningkatan investasi akan dirorong melalui upaya yang lebih kuat untuk memperbaiki iklim investasi.

3. Dari sisi produksi, kemajuan perekonomian akan ditingkatkan dengan mendorong peningkatan pertumbuhan industri pengolahan. Selain itu upaya sektor pertanian terus diupayakan atau paling sedikit dipertahankan pertumbuhannya sekaligus dengan pemantapan ketahanan pangan.
4. Dalam kondisi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian, pemerintah memerlukan adanya keleluasaan untuk melaksanakan kebijakan fiskal untuk mencapai kemajuan ekonomi seperti yang ditargetkan. Efektifitas penerimaan negara harus lebih ditingkatkan. Demikian pula, perlu peningkatan efektivitas penyerapan anggaran agar peran belanja pemerintah sebagai stimulator yang memberikan efek pengganda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan sesuai harapan.
5. Masih terkait APBN, berbagai upaya pengendalian subsidi BBM harus dilakukan agar dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan sekaligus menjaga agar defisit APBN yang ditargetkan dapat tercapai. Upaya yang lain yang perlu dilakukan adalah meningkatkan lifting minyak nasional.
6. Dalam rangka peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat, langkah-langkah strategis akan dipusatkan pada upaya-upaya menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat. Dilengkapi juga dengan kebijakan yang serius guna meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.



BAB IV

EVALUASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

EVALUASI PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Perkembangan pencapaian 14 Prioritas Nasional (PN) hingga 2,5 tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian target akhir di tahun 2014. Secara umum, pencapaian sasaran PN menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sebagian besar pencapaian PN diperkirakan mencapai target tahun 2014 (dalam RPJMN 2010-2014) yang ditetapkan. Dari 14 PN, sembilan PN diperkirakan mencapai target yang ditetapkan, sementara lima PN lainnya masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target tahun 2014.

Pencapaian PN diukur melalui pencapaian indikator penting yang merupakan indikator sasaran utama RPJMN 2010-2014, indikator substansi inti atau indikator kegiatan prioritas. Penjelasan mengenai pencapaian masing-masing PN diawali dengan penjelasan mengenai arah kebijakan atau sasaran yang harus dicapai diikuti pencapaian sasaran secara umum. Kemudian pencapaian dijelaskan lebih terperinci berikut dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan terutama untuk capaian indikator yang masih memerlukan kerja keras ataupun yang sulit tercapai.

Sebagai gambaran perkiraan pencapaian target 2014 maka digunakan 3 warna notifikasi yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan PN, yaitu hijau (sudah tercapai/*on track/on trend*), kuning (perlu kerja keras), dan merah (sangat sulit tercapai).

IV.1 Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih, (2) meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan (3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Upaya yang dilakukan, antara lain: (a) penataan kelembagaan instansi pemerintah, yang didukung oleh pelaksanaan

reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemda; (b) penguatan otonomi daerah melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penataan daerah, penggunaan dana perimbangan daerah, dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah; (c) pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit; (d) percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan; (e) penetapan dan penerapan Sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik; dan (f) perbaikan data kependudukan melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAD), serta penerapan e-KTP.

Secara umum, pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan tata kelola masih kurang menggembirakan, yang ditunjukkan dengan tidak akan tercapainya beberapa target yaitu: persentase Pemda dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemda (daerah), peringkat kemudahan berusaha, dan indeks efektifitas pemerintahan. Sedangkan Integritas pelayanan publik (daerah) dan persentase Kab/Kota yang akuntabel memerlukan kerja keras untuk mencapai target. Sementara indikator yang diperkirakan tercapai antara lain persentase K/L dengan opini WTP atas laporan keuangan K/L (pusat), skor integritas pelayanan publik (pusat), persentase K/L yang Akuntabel, dan persentase provinsi yang akuntabel. Adapun pencapaian PN Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola hingga 2012 disajikan dalam Tabel IV.1.

Tabel IV.1 Capaian Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih							
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Skor 0-10	2.8	5.0	2.8	3.0	32 ^{*)}	
Persentase K/L dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (Pusat) ¹	%	41	100	56	63	77	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Persentase Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah) ¹	%	2,68	60	3	9	16	
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							
Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat) ²	Skor 0-10	6,64	8,0	6,16	7,07	6,86	
Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah) ²	Skor 0-10	6,46	8,0	5,26	6,00	6,32	
Peringkat Kemudahan Berusaha ³	Peringkat 0-183	122 ^{**)}	75	115	126	129	
3. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi							
Indeks Efektifitas Pemerintahan ⁴	Skor -2,5 s.d 2,5	-0,29	0,5	-0,19	-0,24	n.a	
Persentase K/L yang Akuntabel ⁵	%	47,37	100	63,29	82,93	95,06	
Persentase Provinsi yang Akuntabel ⁵	%	3,76	80	31,03	63,33	75,76	
Persentase Kab/Kota yang Akuntabel ⁵	%	5,08	60	8,77	12,78	n.a	
Keterangan : *) Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0-100); **) Doing Bussiness Report 2010 Sumber:1) BPK, 2) KPK, 3) IFC/WB, 4) WB, dan 5) KemenPAN dan RB  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, Akuntabel dan Efektif

Target opini WTP pada K/L akan tercapai, namun pada Pemda sulit tercapai

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berbagai upaya yang dilakukan telah menunjukkan kemajuan, salah satunya target 100% K/L memperoleh Opini WTP akan tercapai. Namun, untuk target 60% Pemda memperoleh WTP nampaknya tidak akan tercapai.

Hal ini disebabkan antara lain: komitmen pemda untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang belum optimal, kapasitas pengelola keuangan dan auditor belum menunjang tersusunnya kualitas laporan keuangan yang baik, serta manajemen pengelolaan barang milik negara yang belum optimal.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Banyak kendala yang dihadapi untuk mencapai target peringkat 75 pada Kemudahan Berusaha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, berbagai upaya yang dilakukan telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih terbatas. Target Skor 8,0 pada Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) pada instansi pusat dan daerah perlu kerja keras untuk mencapainya. Di samping itu, melihat kecenderungan capaian hingga tahun 2012, target untuk mencapai peringkat 75 pada Kemudahan Berusaha tidak akan tercapai. Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target tersebut antara lain: keterlambatan penetapan peraturan pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, komitmen pimpinan penyelenggara pelayanan publik untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas pada umumnya masih rendah, manajemen kinerja pelayanan publik belum diterapkan secara luas, penerapan TIK untuk menunjang pelayanan publik belum optimal, implementasi SPM masih terkendala kapasitas SDM yang belum memadai dan keterbatasan anggaran, belum tersedia sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang efektif, dan belum tersedia sistem nasional penanganan pengaduan masyarakat yang efektif. Khususnya terkait dengan upaya peningkatan peringkat Kemudahan Berusaha, hingga saat ini belum tersusun rencana aksi yang terukur, serta belum ditetapkan mekanisme koordinasi dalam pencapaiannya.

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, target untuk mencapai Indeks Efektifitas Pemerintahan menjadi 0,5 pada 2014 diperkirakan tidak akan tercapai. Sedangkan untuk instansi yang akuntabel dengan target K/L 100 % dan provinsi 80 %, diperkirakan akan tercapai. Namun, untuk mengejar target 60 % instansi kab/kota yang akuntabel, diperlukan kerja keras dan upaya akselerasi. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut, antara lain: kualitas birokrasi pemerintah belum mampu mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien; SDM aparatur belum bekerja secara profesional, berintegritas dan bermental melayani; tekanan politik terhadap kinerja birokrasi masih kuat dan berpengaruh pada lemahnya independensi; kualitas kebijakan/regulasi dan implementasinya belum konsisten dan tumpang tindih; dan penerapan manajemen kinerja pada semua lini pemerintahan masih lemah.

Perlu upaya akselerasi untuk mengejar target 60 persen Instansi Kab/Kota yang akuntabel.

Di samping capaian sasaran utama, terdapat beberapa capaian lainnya yang penting dan strategis. Capaian tersebut antara lain, adalah: diterapkannya sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP) pada 50 K/L dan 457 pemda; dibentuknya 500 Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) yang melayani 755 instansi pusat dan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa dan menekan potensi terjadinya korupsi. Sedangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, telah dicapai, antara lain: terbitnya PP No. 96/2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; terbentuknya 444 unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah; terbitnya 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM); melakukan evaluasi terhadap 12.000 Perda dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan; penerbitan NIK bagi setiap penduduk di 497 Kab/Kota yang telah diselesaikan pada tahun 2011 dan penerbitan e-KTP dengan target 172 juta jiwa dalam RPJMN 2010-2014. Sampai triwulan III tahun 2012 telah dilakukan perekaman sidik jari bagi 147,4 juta jiwa wajib KTP. Secara keseluruhan, dari target 172 juta e-KTP yang akan didistribusikan kepada masyarakat, masih ada sekitar 122.400.000 e-KTP yang belum dicetak dan didistribusikan. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kapasitas dan

Capaian strategis lainnya: Stranas PPK, SPIP, LPSE, PTSP, SPM, Evaluasi Perda, dan e-KTP.

akuntabilitas kinerja birokrasi, telah dilaksanakan reformasi birokrasi pada 40 K/L dan diperluas ke instansi pemerintah daerah di 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kota, dan 33 pemerintah kabupaten.

Permasalahan dan Kendala

Memperhatikan capaian dan analisis tersebut di atas, untuk mencapai target yang diamanatkan RPJMN 2010-2014, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1) masih terdapat persepsi bahwa reformasi birokrasi identik hanya dengan perbaikan remunerasi, komitmen pimpinan belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi pada instansinya, dan dampak reformasi birokrasi belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat; (2) tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya diorientasikan pada pelayanan kepada masyarakat; (3) kualitas pengelolaan anggaran daerah (APBD) yang masih rendah; (4) komposisi PNS yang belum ideal baik dilihat dari jumlah, kompetensi, penempatan, dan sistem promosi/mutasi; (5) peningkatan kualitas pelayanan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, berupa pelayanan yang murah, cepat, dan transparan, terutama di bidang pertanahan, investasi dan perizinan, perpajakan dan kepabeanan, dan sistem administrasi kependudukan; (6) masih banyak ditemukan Perda yang bermasalah yang membutuhkan pengkajian dan tindak lanjut; (7) sebagian besar masyarakat belum menerima e-KTP.

Langkah Tindak Lanjut

Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan berbagai upaya akselerasi untuk mencapai sasaran yang ditetapkan RPJMN 2010-2014. Untuk mewujudkan sasaran pemerintahan yang bersih, tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (1) pengembangan dan penerapan sistem integritas secara menyeluruh pada instansi pemerintah, termasuk peningkatan integritas SDM aparatur dan perluasan zona integritas dan wilayah bebas korupsi, serta pengembangan sistem *whistle blower*; (2) peningkatan kualitas implementasi SPIP; (3) peningkatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan pada instansi pusat dan daerah; (4)

peningkatan pengelolaan barang milik negara; dan (5) peningkatan kualitas *e-procurement*.

Dalam rangka mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (1) pembenahan manajemen pelayanan, yang meliputi aspek kelembagaan, tatalaksana, SDM dan pemanfaatan TIK, serta pengembangan sistem nasional pengaduan pelayanan publik; (2) penerapan SPM baik skala tahapan maupun kualitas manajerialnya; (3) percepatan implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik; (4) peningkatan kualitas pembentukan regulasi baru melalui penerapan reformasi regulasi di semua tingkatan, baik di pusat maupun daerah. Capaian penataan data kependudukan perlu akselerasi sesuai dengan target RPJMN 2010-2014, khususnya untuk mengatasi sisa pekerjaan e-KTP. Hal ini karena dari target 172 juta e-KTP yang akan didistribusikan kepada masyarakat, baru sebanyak 49,6 juta keping yang telah didistribusikan kepada penduduk, sehingga masih ada sekitar 122.400.000 e-KTP yang belum dicetak/didistribusikan.

Untuk mewujudkan sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, tindak lanjut yang diperlukan, antara lain: (1) melanjutkan penataan organisasi, melalui audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran. Tim Penataan Organisasi K/L yang dikoordinasikan Kementerian PAN dan RB diharapkan dapat menghasilkan penyederhanaan birokrasi pemerintah secara mendasar, (2) peningkatan profesionalisme SDM aparatur, antara lain melalui: (a) penyelesaian RUU Aparatur Sipil Negara beserta langkah-langkah implementasinya, (b) pengembangan *assessment center* pada instansi pusat dan daerah, (c) penerapan sistem *computer assisted test* (CAT) sebagai basis penerapan sistem merit; (3) pemantapan penerapan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah; (4) peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah. Pada saat yang bersamaan, kapasitas penjaminan kualitas untuk mengawal pelaksanaan reformasi perlu ditingkatkan guna memastikan reformasi birokrasi yang sedang berjalan dapat memberikan dampak yang diharapkan; dan (5) peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sejalan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi.

IV. 2 PRIORITAS NASIONAL 2: PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, bahkan melampaui target.

Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan diarahkan terutama untuk: (1) meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; (2) meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal; (3) meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; (4) meningkatkan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan; (5) memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (6) meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan; dan (7) memperkuat tata kelola pendidikan untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan pendidikan, yang berdampak pada perbaikan kinerja pendidikan nasional. Sasaran pembangunan bidang pendidikan dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, yang diindikasikan oleh peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, penurunan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, peningkatan angka partisipasi murni (APM), dan peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di seluruh jenjang pendidikan.

Pembangunan pendidikan hingga tahun 2012 telah mampu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, bahkan capaian beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Secara keseluruhan, sasaran pembangunan pendidikan diperkirakan mencapai target sesuai rencana seperti pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Capaian Prioritas Nasional Pendidikan

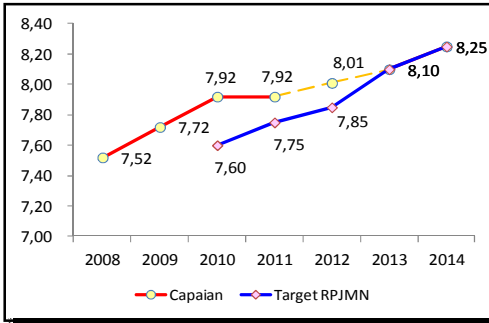
Indikator	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			(Notifikasi)
			2010	2011	2012 ¹⁾	
Rata-rata Lama Sekolah	7,72	8,25	7,92	7,92	7,85	
Angka Buta Aksara Penduduk 15 Tahun ke Atas	5,30	4,18	4,79	4,43	4,84	

Indikator	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			(Notifikasi)
			2010	2011	2012 ¹⁾	
APM SD/SDLB/MI/ Paket A	95,23	96,00	95,41	95,55	95,69	
APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B	74,52	76,00 ²⁾	75,64	77,71	75,4	
APK SMA/SMK/MA/ Paket C	69,60	85,00	70,53	76,50	79	
APK PT usia 19-23 Tahun	21,57	30,00	26,34	27,09	27,4	
Keterangan: 1) Data belum tersedia pada bulan Juni 2012. Sesuai siklus pendataan, data capaian dari hasil Susenas BPS (indikator no. 1) dan data capaian dari hasil pengolahan K/L (indikator no. 2 s.d. 6) baru tersedia pada triwulan kedua tahun berikutnya (tahun 2013) 2) Merupakan target yang telah disesuaikan dengan capaian tahun 2011. Target awal RPJMN pada tahun 2014 adalah 76,0% yang sudah tercapai pada tahun 2011  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai						

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Penurunan Buta Aksara

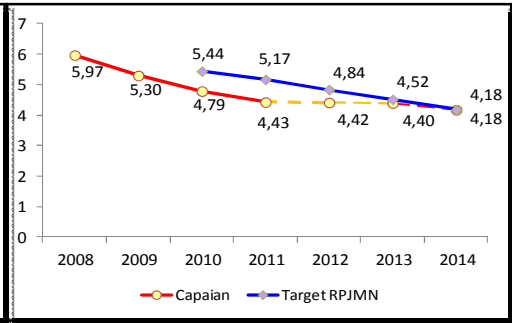
Dampak pembangunan pendidikan antara lain ditandai oleh meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2011 (Gambar IV.2). Selain itu, proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang dalam hal ini diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun mengalami penurunan signifikan, dari 5,3 % pada tahun 2009 menjadi 4,8 % pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 % pada tahun 2011 (Gambar IV.2). Pencapaian pada tahun 2009, 2010 dan 2011 tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, dan pada tahun 2014, target rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas dan angka buta aksara penduduk 15 tahun keatas diperkirakan akan tercapai.

Proporsi buta aksara dan rata-rata lama sekolah tahun 2010, 2011 dan 2012 telah melampaui target tahunan dan diperkirakan target 2014 akan tercapai.



Gambar IV.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas

Sumber: Susenas dan RPJMN 2010-2014

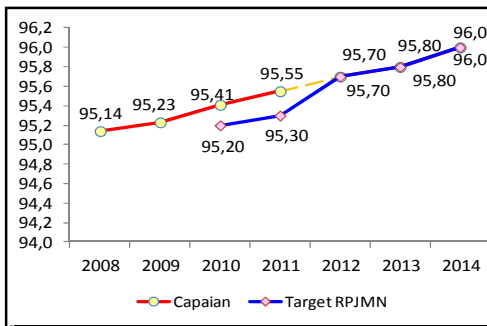


Gambar IV.1 Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

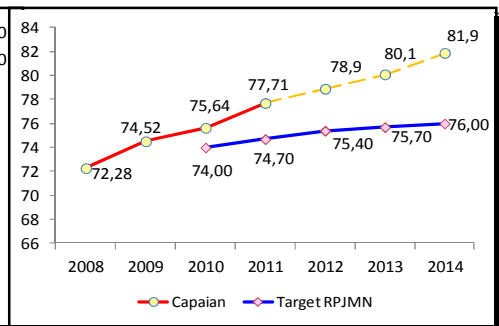
Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah

APM Pendidikan dasar-menengah pada tahun 2010, 2011, dan 2012 telah melampaui target tahunan

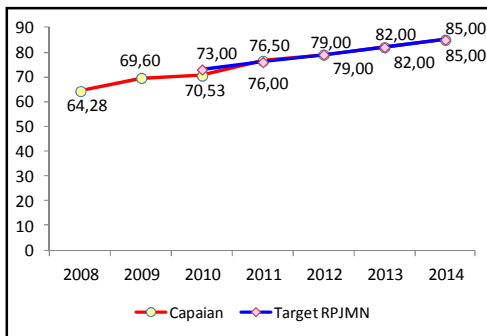
Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan meningkatnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/ sederajat dan APM SMP/MTs/ sederajat masing-masing sebesar 95,2 % dan 74,5 %, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 95,4 % dan 75,6 %, serta pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 95,6 % dan 77,7 % (Gambar IV.3 dan IV.4). Peningkatan APM SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, dan diperkirakan target tahun 2014 dapat tercapai.



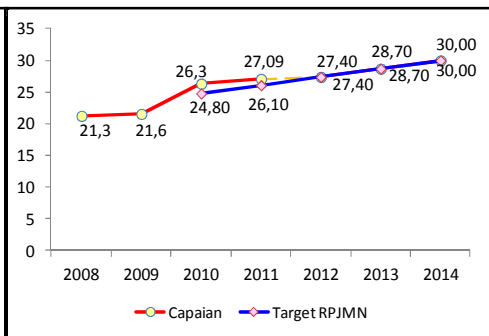
Gambar IV.3 APM SD/MI/Paket A



Gambar IV.4 APM SMP/MTs/Paket B



Gambar IV.5 APK SMA/SMK/MA/Paket C



Gambar IV.6 APK PT/PTA (Usia 19-23 Tahun)

Demikian pula partisipasi pendidikan jenjang pendidikan menengah terus membaik. Hal ini terlihat pada APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 %, meningkat menjadi 70,53 % pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 76,50 %. Diperkirakan pada tahun 2012 APK jenjang pendidikan menengah menjadi 79,0 % sesuai dengan target 2012 yang ditetapkan RPJMN 2010-2014. Sasaran RPJMN 2010-2014 untuk APK jenjang pendidikan menengah diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2014 (Gambar IV.5). Adapun APK jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,09 %, dan pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 27,4 %. Target APK jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2014 diperkirakan dapat tercapai sesuai dengan target RPJMN, yaitu sebesar 30,0 % (Gambar IV.6).

Peningkatan angka partisipasi jenjang pendidikan dasar dan menengah tersebut diiringi dengan turunnya persentase jumlah siswa putus sekolah, yaitu untuk kurun waktu 2010-2011, angka putus sekolah turun dari 1,5 % menjadi 1,3 % untuk jenjang SD/MI; 1,8 % menjadi 1,6 % untuk jenjang SMP/MTs; dan 4,3 % menjadi 4,0 % untuk jenjang SMA/SMK/MA. Selain itu, persentase lulusan tidak melanjutkan mengalami penurunan untuk kurun waktu yang sama dari 8,6 % menjadi 7,2 % pada jenjang SD/MI; 24,0 % menjadi 10,9 % pada jenjang SMP/MTs; dan 51,7 % menjadi 48,4 % pada jenjang SMA/SMK/MA.

Tabel IV.3 Persentase Putus Sekolah dan Tidak Melanjutkan

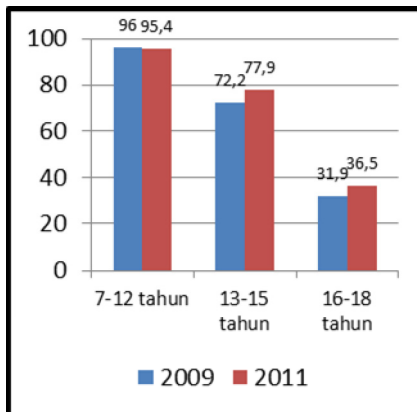
Jenjang	Putus Sekolah		Tidak Melanjutkan	
	2010	2011	2010	2011
SD/MI	1,5%	1,3%	8,6%	7,2%
SMP/MTs	1,8%	1,6%	24,0%	10,9%
SMA/SMK/MA	4,3%	4,0%	51,7%	48,4%

Sumber: Kemdikbud

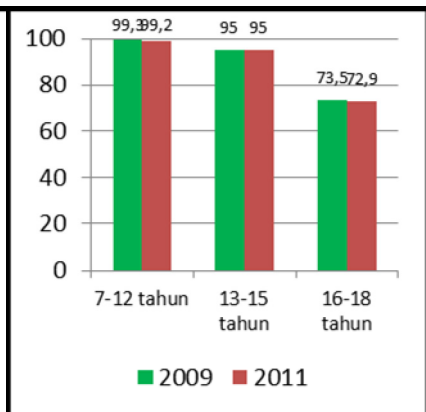
Pengurangan Kesenjangan Partisipasi Pendidikan

Angka putus sekolah dan persentase lulusan tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan

Pembangunan pendidikan telah menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi. Angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kuantil termiskin meningkat dari sebesar 72,2 % pada tahun 2009 menjadi 77,9 % pada tahun 2011. Peningkatan APS terjadi pada seluruh kelompok umur di kuantil termiskin. Sedangkan APS penduduk kelompok umur yang sama di kuantil terkaya cenderung tetap. Data ini menunjukkan bahwa selisih persentase APS antara penduduk paling miskin dan paling kaya pada kelompok umur 13-15 dalam waktu 2009-2011 menurun dari 22,8 % menjadi 17,1 % dan pada kelompok umur 16-18 tahun menurun dari 41,6 % menjadi 36,3 % (Gambar IV.7 dan IV.8).



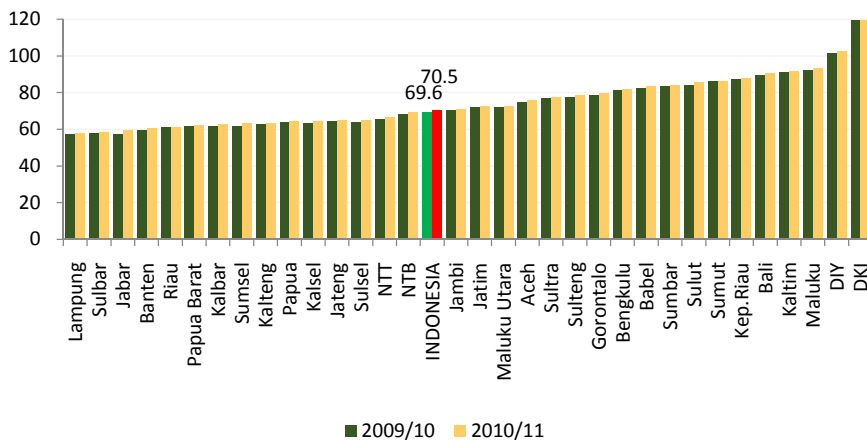
Gambar IV.7 Angka Partisipasi Sekolah Kuantil 1



Gambar IV.8 Angka Partisipasi Sekolah Kuantil 5

Penurunan kesenjangan APS SMA/SMK/MA/Paket C antarprovinsi juga terjadi, yaitu ditunjukkan pada sebaran

APK di 33 provinsi dalam Gambar IV.9. Pada tahun 2010, selisih APK SMA/SMK/MA/Paket C pada provinsi dengan APK tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan terendah yaitu Provinsi Lampung adalah sebesar 61,2 %, lebih rendah dari selisih di tahun 2009 yang sebesar 62,0 %. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan angka partisipasi diiringi pula dengan peningkatan pemerataan akses pendidikan.



Gambar IV.9 APK SMA/SMK/MA/Paket C Menurut Provinsi

Peningkatan Layanan Pendidikan yang Berkualitas

Perkembangan capaian pembangunan pendidikan yang terus meningkat antara lain merupakan hasil dari kebijakan dan program pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Program-program layanan pendidikan yang dilaksanakan antara lain penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI dan SMP/MTs, penyediaan bantuan siswa miskin (BSM), pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), dan rehabilitasi ruang kelas SD/MI-SMP/MTs yang rusak. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2011 telah dibangun sebanyak 691 USB SMP/MTs, 1.391 RKB SD/MI, dan 8.354 RKB SMP/MTs. Selain itu, pada tahun 2011 telah direhabilitasi sebanyak 18.878 ruang kelas SD/MI dan 5.951 ruang belajar SMP/MTs rusak berat. Pada tahun 2012, jumlah ruang kelas rusak berat yang direhabilitasi sebanyak

Pemerintah menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara termasuk meningkatkan jumlah dan kualitas sekolah.

137 ribu ruang kelas SD/MI dan 44 ribu ruang belajar SMP/MTs.

Dalam rangka mendukung peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah, sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 telah dibangun sebanyak 114 USB SMA, 505 USB SMK, 323 USB MA, 5.285 RKB SMA, 8.640 RKB SMK, dan 1.400 RKB MA, 3.157 perpustakaan/laboratorium SMA, 850 perpustakaan/workshop SMK, dan 900 perpustakaan/laboratorium MA. Selain itu, telah pula direhabilitasi sebanyak 1.575 ruang SMA, 1.200 ruang SMK, dan 5.421 ruang MA. Dalam periode yang sama, Pemerintah menyediakan BSM untuk jenjang pendidikan menengah. Pada tahun 2009, penerima BSM sebanyak 898 ribu siswa, 2011 sebanyak 1.168 ribu siswa, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.580 siswa.

Dengan mekanisme yang baru, dana BOS dapat disalurkan lebih tepat waktu dan tepat jumlah.

Program BOS yang diberikan bagi seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTs baik satuan pendidikan negeri maupun swasta, terus diperbaiki efektivitas penyalurannya. Pada tahun 2012 mekanisme penyaluran dengan transfer dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah kab/kota, kemudian disalurkan ke satuan pendidikan. Program BOS berhasil mencakup 44,7 juta siswa jenjang pendidikan dasar. Selain itu, Pemerintah menyediakan program BSM untuk jenjang pendidikan dasar. Pada tahun 2012, telah disalurkan BSM untuk 10.097.370 siswa SD dan 2.780.000 siswa MI, serta 4.577.485 siswa SMP dan 2.280.000 siswa MTs.

Percepatan peningkatan akses ke pendidikan tinggi dilakukan dengan meningkatkan daya tampung di perguruan tinggi yang sudah ada dan pembukaan perguruan tinggi baru.

Berbagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan telah banyak dilakukan, antara lain, melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanatkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Hingga tahun 2011, jumlah guru yang berkualifikasi S1/D4 atau lebih telah mencapai 58,0 % dan yang sudah tersertifikasi sebanyak 45,9 %. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pada tahun 2012 Pemerintah telah memberikan tunjangan profesi kepada 994.879 guru PNS dan non-PNS, tunjangan khusus kepada 53.954 guru PNS, tambahan penghasilan kepada 805.241 guru SD PNS, dan tunjangan fungsional kepada 259.577 guru

non-PNS. Untuk guru-guru di madrasah, pada tahun 2012 Pemerintah telah memberikan tunjangan profesi bagi 396.768 guru, tunjangan fungsional non-PNS bagi 452.348 guru non-PNS, dan tunjangan khusus bagi 3.500 guru di madrasah di daerah terpencil.

Permasalahan dan Kendala

Meskipun pembangunan pendidikan telah menghasilkan banyak capaian yang menggembirakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan ke depan yang harus dipecahkan. Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (1) masih belum meratanya akses pendidikan, terutama dimulai pada jenjang SMP, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah; (2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ditandai oleh pengetahuan dan keterampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia usaha dan rendahnya kemampuan bersaing bangsa; (3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 serta telah tersertifikasi, dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada masih rendahnya rasio guru:murid pada jenjang SD/MI; dan (4) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa yang ditandai oleh munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak-anak usia sekolah, melemahnya nilai-nilai moral, dan memudarnya ikatan sosial.

Akses pendidikan belum merata, kualitas dan relevansi masih rendah, distribusi guru belum merata, dan belum optimalnya pendidikan karakter

Langkah Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata adalah: (1) pemantapan implementasi BOS; (2) peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (3) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (4) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus; (5) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke

Pemberian BOS untuk seluruh siswa tingkat menengah negeri dan swasta, dan bantuan untuk 1,1 juta siswa miskin.

SMP/MTs/ sederajat, dan (6) pengembangan pendidikan karakter bangsa.

Untuk mempercepat peningkatan akses pendidikan menengah, pada tahun 2013 Pemerintah akan memberikan bantuan operasional Sekolah Menengah (BOS SM) kepada seluruh siswa sekolah menengah baik negeri maupun swasta. Di samping itu, penerima BSM tetap dipertahankan sebanyak 1,1 juta siswa SM. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan menengah bagi lulusan SMP/ sederajat yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.

Perbaikan tata kelola perlu dilakukan agar perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai institusi yang mampu mengembangkan IPTEK.

Pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dilakukan melalui upaya: (1) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi dengan kebutuhan pembangunan; (2) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan program studi; (3) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (4) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional dan mendapatkan paten; (5) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri; (6) peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk *technopreneur* bagi dosen dan mahasiswa; (7) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/ SMK/ MA yang berprestasi dan kurang mampu. Selain itu, upaya lainnya adalah memperbaiki tata-kelola perguruan tinggi dengan memberi otonomi penuh, serta membangun tradisi dan kultur akademik yang kondusif, agar perguruan tinggi dapat berfungsi sebagai institusi yang mampu mengembangkan IPTEK.

Pada Tahun 2013 seleksi guru akan dilakukan secara khusus sesuai UU No.20 Tahun 2003.

Rencana tindak lanjut terkait upaya peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan difokuskan pada: (1) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (2) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (3) pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul dan revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai upaya memantapkan penjaminan mutu

(*quality assurance*); (4) pelaksanaan *pre-service training* dan *in-service training* yang bermutu di Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK); (5) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan persebaran guru; dan (6) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Pada tahun 2013 akan dimulai program seleksi guru yang dilakukan secara khusus dengan pendidikan berasrama dan berbeasiswa seperti diamanatkan oleh UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.

Dalam hal peningkatan pendidikan karakter, upaya tindak lanjut yang perlu ditempuh adalah melalui internalisasi nilai budaya ke dalam proses pembelajaran, pembudayaan berperilaku dan berkarakter dan peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta bahasa hubungan antarbangsa.

IV.3 PRIORITAS NASIONAL 3 : KESEHATAN

Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam RPJMN 2010-2014, sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita, dan menurunnya angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*). Pencapaian sasaran pembangunan nasional didukung melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, dan pemenuhan sumber daya kesehatan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Selain itu, didukung pula dengan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, penyediaan jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin dan tidak mampu, penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan, pengembangan manajemen dan informasi kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk melalui revitalisasi Program KB, serta penyerasian kebijakan pengendalian penduduk.

Secara umum pencapaian sasaran pembangunan kesehatan masih kurang menggembirakan, seluruh capaian indikator

Pembangunan kesehatan hingga tahun 2012 diperkirakan memerlukan upaya keras atau tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sehingga secara keseluruhan, sasaran pembangunan kesehatan masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target seperti pada Tabel IV.4.

Tabel IV.4 Capaian Prioritas Nasional Kesehatan

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Usia Harapan Hidup	tahun	70,7	72	70,9 ¹⁾	71.1	71.1	
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	228	118	n.a	n.a	n.a	
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan)	%	84,3	90	79,82	81,25	88,64	
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 kelahiran hidup	34	24	34	34	32 ³⁾	
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	59	90	53,8	84,7	86,8	
Prevalensi kekurangan gizi	%	18.4	<15	17,9 ⁴⁾	n.a	n.a	
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	63.9	85	67.87	71.4	75,10	
Total Fertility Rate (TFR) : Angka Kelahiran Total	per 1000 wanita	2,6	2,1	2,4 ²⁾	n.a	2,6 ³⁾	
Prevalensi Tuberkulosis	persen-mil (pcm)	326	224	224	289	281	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Prevalensi Kasus HIV(% penduduk 15 tahun keatas yang memiliki pengetahuan)	%	66,2	95	57,5	n.a	79,5	
Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API)	%-permil	1,85	1	1,96	1,75	1,69	
Persentase jangkauan akses sumber air bersih	%	47,7	68	44,19	55,04	n.a	
Sumber:1)Hasil SP tahun 2010, BPS (AKB sebesar 26, TFR sebesar 2,4); 2)Perhitungan SDKI 2012 belum selesai; 3) Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012; 4) Riskesdes 2010  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Usia Harapan Hidup Terus Meningkat

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu indikator yang menggambarkan status kesehatan masyarakat terus mengalami peningkatan dari 70,7 tahun pada tahun 2009 dan menurut hasil Sensus Penduduk (2010) menjadi 70,9 pada tahun 2010. Dalam rangka mencapai target UHH pada tahun 2014 sebesar 72 tahun, upaya dan kerja keras perlu dilakukan melalui akselerasi pengurangan AKI dan AKB, perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit.

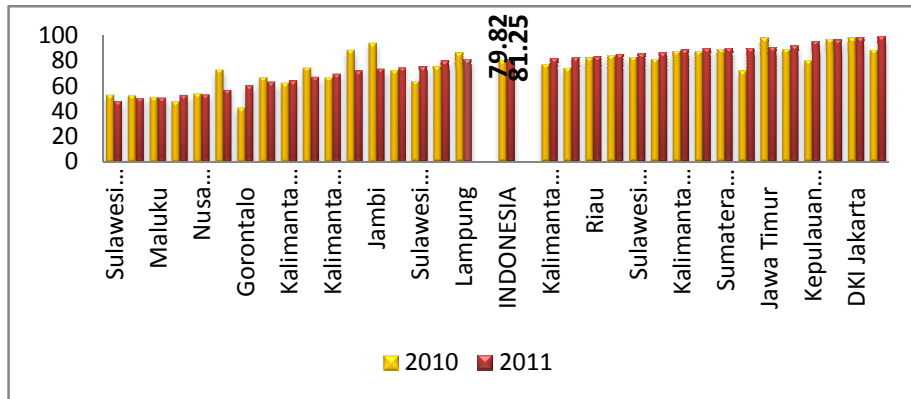
UHH meningkat dari 70,7 tahun (2009) menjadi 70,9 tahun (2010) dan terus diupayakan mencapai target 72 tahun (2014)

Angka Kematian Ibu Masih Tinggi

Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi yaitu 228 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI 2007. Capaian ini masih jauh dari target 118 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Penyebab utama masih tingginya AKI antara lain belum optimalnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Cakupan pelayanan antenatal telah melampaui target tahun 2012 sebesar 90,18%, namun masih jauh dari target tahun 2014 sebesar 95%. Sementara itu, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih tercapai 81,25% dari target 86% tahun 2011, namun masih jauh dari target tahun 2014 sebesar 90%. Adanya disparitas

Disparitas pertolongan persalinan antar-provinsi menjadi salah satu kendala masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih antarprovinsi masih menjadi kendala dalam upaya penurunan angka kematian ibu melahirkan, seperti pada Gambar IV.10.



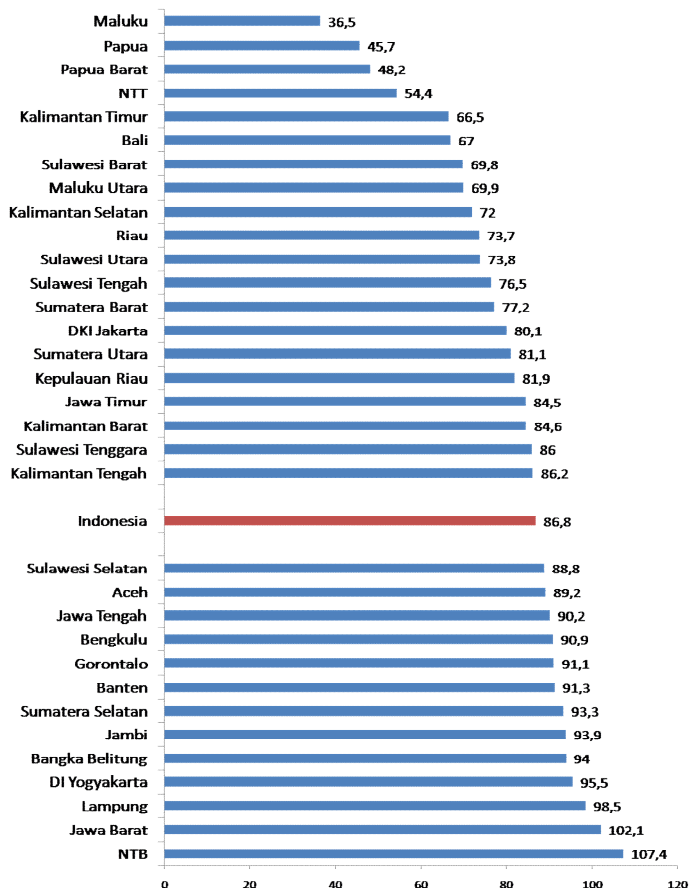
Gambar IV.10 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi, Tahun 2010-2011
Sumber: Susenas, 2010-2011

Total Fertility Rate Menunjukkan Tidak Ada Perubahan

Upaya mendukung peningkatan kesehatan ibu dilakukan pula melalui program Keluarga Berencana (KB). Capaian jumlah peserta KB telah mencapai target yaitu 9,58 juta akseptor baru dan 34,87 juta akseptor aktif. Namun pencapaian TFR menunjukkan tidak ada perubahan pada angka 2,6 kelahiran per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun berdasarkan hasil sementara SDKI 2012. Selanjutnya, angka penggunaan kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) naik tidak signifikan sebesar 0,5 % yaitu dari 57,4% menjadi 57,9% serta angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) turun menjadi 8,5% dari 9,1%. Hal ini disebabkan masih banyaknya ketidakberlangsungan (DO), yaitu angka kegagalan alat/cara KB 1,6 %, keinginan untuk hamil lagi 5,4%, efek samping 9,5%, dan alasan lain 3,4%. Disamping itu, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP (IUD, Implant, vasektomi, tubektomi) masih rendah dan lebih banyak penggunaan kontrasepsi jangka pendek (Pil dan Suntik), sehingga kemungkinan akseptor KB baru (PB) untuk menjadi akseptor KB aktif (PA) sangat rendah (saat ini perbandingannya 10 PB:1 PA). *Mix* kontrasepsi yang

digunakan adalah IUD sebesar 6,6%, Metoda Operasi Wanita (vasektomi) sebesar 1,2%, implant sebesar 8%, suntik sebesar 48,2%, pil sebesar 27,9%, Metoda Operasi Pria (tubektomi) sebesar 0,3%, dan kondom sebesar 7,8%.

Penurunan Angka Kematian Bayi Perlu Ditingkatkan



Gambar IV. 11 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Provinsi, Tahun 2012

Pencapaian AKB sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup, masih cukup jauh dari target tahun 2014 sebesar 24 per 1000 kelahiran hidup. Upaya penurunan AKB didukung dengan pencapaian cakupan imunisasi dan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Cakupan imunisasi dasar lengkap terus mengalami peningkatan yaitu dari 53,8% pada tahun 2010 menjadi 87,3% pada tahun 2010 menjadi 86,8% pada

Pencapaian AKB masih cukup jauh dari target 2014 meskipun terjadi peningkatan pada cakupan imunisasi, kunjungan neonatal pertama dan program KB

tahun 2012, namun angka ini masih kurang dari target 90% pada tahun 2014. Capaian cakupan imunisasi ini masih terkendala dengan kondisi disparitas antarprovinsi yang cukup lebar, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik IV.11, terdapat 20 provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional seperti provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Kalimantan Timur, dan Maluku. Selanjutnya, cakupan KN1 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,0 pada tahun 2010 menjadi 91,8% pada tahun 2012 dan telah melebihi target tahun 2014 sebesar 90%. Walaupun telah terjadi perbaikan pada cakupan imunisasi dan kunjungan neonatal pertama, namun capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk terus mendukung penurunan AKB.

Prevalensi Kekurangan Gizi Mengalami Perbaikan

Capaian prevalensi kekurangan gizi terus mengalami perbaikan, namun masih diperlukan upaya lebih keras dalam pencapaian target 2014, diantaranya mendorong gerakan sadar gizi nasional pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Prevalensi kekurangan gizi terus mengalami perbaikan dari 18,4% pada tahun 2009 menjadi 17,9% pada tahun 2010. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan perbaikan yang bermakna sehingga masih perlu dilakukan upaya penurunan untuk mencapai target sebesar kurang dari 15% pada tahun 2014. Prevalensi anak balita pendek (*stunting*) sebagai indikator gizi telah menunjukkan perbaikan yaitu mengalami penurunan dari 36,8% pada tahun 2007 menjadi 35,6% pada tahun 2010, namun masih kurang dari target tahun 2014 sebesar 32%. Walaupun demikian, masih banyak provinsi dengan prevalensi *stunting* di atas rata-rata nasional, seperti Nusa Tenggara Timur (58,4%), Papua Barat (49,2%), Nusa Tenggara Barat (48,2%), dan Sumatera Utara (42,3%). Dengan kondisi tersebut, diperlukan komitmen lebih kuat dari berbagai pihak, pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, baik di pusat maupun di daerah dalam menangani masalah *stunting*, termasuk mendorong gerakan sadar gizi nasional yang difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan.

Capaian pengendalian penyakit cenderung mengalami perbaikan dari tahun ke tahun

Pengendalian Penyakit untuk Mendukung Peningkatan Status Kesehatan Penduduk

Pengendalian penyakit dilakukan terutama untuk mendukung peningkatan status kesehatan penduduk yang sekaligus merupakan target MDGs. Pengendalian penyakit meliputi pengurangan prevalensi dan jumlah kasus HIV dan

AIDS, meningkatkan jumlah kasus *tuberculosis* (TB) yang ditemukan dan disembuhkan, serta penurunan kasus malaria. Kasus HIV dan AIDS dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 pencapaian sebesar 0,20 % telah mencapai target tahun 2014 sebesar kurang dari 0,50 %. Sementara itu, cakupan orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang telah mendapatkan terapi *Anti Retroviral* (ARV) pada tahun 2011 menjadi sebesar 80,30 %. Beberapa hal yang mendorong penurunan jumlah kasus diantaranya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan konseling dan pengobatan. Jumlah penduduk di atas usia 15 tahun yang mendapatkan pengetahuan HIV dan AIDS pada tahun 2011 sebesar 131.404 orang dan jumlah orang usia 15 tahun ke atas yang menerima konseling sebesar 884.905 orang pada tahun 2012.

Persentase capaian kasus TB yang ditemukan telah mencapai 82,2% pada tahun 2011 jauh melampaui target MDGs sebesar 70 % pada tahun 2014. Hingga tahun 2012, kasus TB yang telah diobati dan disembuhkan mencapai 84,35 %. Jumlah kasus malaria terus membaik yang ditunjukkan dengan penurunan angka *Annual Paracite Incidence* (API) dari 1,96 per 1.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi sebesar 1,69 per 1.000 penduduk pada tahun 2012. Untuk mencapai target API tahun 2014 sebesar 1,0 per 1.000 penduduk, masih diperlukan upaya antara lain peningkatan program kelambunisasi. Upaya pengendalian penyakit menular lainnya seperti Demam Berdarah *dengue* (DBD) dan diare terus pula dilakukan. Upaya pengendalian penyakit perlu terus dilakukan diantaranya melalui dukungan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan preventif dan promotif serta kegiatan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka mencegah kasus penyakit menular, upaya penyehatan lingkungan seperti penyediaan air bersih dan sanitasi terus dilakukan. Sampai saat ini, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air bersih mencapai 55,04 %, namun angka ini masih jauh dari target tahun 2014 sebesar 67 %. Sementara itu, persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi dasar berkualitas mencapai 55,6% masih di bawah target 67 % di tahun 2011, sehingga perlu upaya kerja keras untuk dapat mencapai target 75 % di tahun 2014. Upaya pencapaian tersebut didukung dengan Gerakan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilakukan di 7.325 desa atau 36 % dari total target tahun 2014.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Fasilitas Kesehatan, Ketenagaan, dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan

Pemenuhan fasilitas layanan kesehatan, ketenagaan dan luas cakupan pelayanan jaminan kesehatan terus mengalami peningkatan

Pencapaian dari sasaran utama PN kesehatan didukung pula oleh pelayanan kesehatan meliputi fasilitas layanan kesehatan, ketenagaan, serta jaminan pembiayaan kesehatan. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas terus ditingkatkan dalam mendukung penurunan AKI dan AKB. Jumlah puskesmas meningkat dari 9.005 pada tahun 2010 menjadi 9.510 pada tahun 2012, dengan persentase puskesmas perawatan sebesar 33,14%. Dengan memperhatikan capaian jumlah puskesmas sampai tahun 2012, diharapkan target jumlah puskesmas sebanyak 9.536 di tahun 2014 dapat dicapai. Sementara itu, jumlah rumah sakit meningkat dari 1.632 pada tahun 2010 menjadi 2.083 pada tahun 2012 yang diiringi dengan peningkatan jumlah tempat tidur rumah sakit, terutama rumah sakit kelas tiga untuk melayani pasien jamkesmas dan jampersal. Pada tahun 2011 jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia sebanyak 168.656 tempat tidur (TT) atau 70,97 TT per 100.000 penduduk. Penambahan jumlah tempat tidur terus dilakukan untuk mencapai target 51 % TT kelas tiga rumah sakit pada tahun 2014, sejalan dengan upaya pemenuhan layanan kesehatan dalam rangka mendukung Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang mulai efektif pada awal tahun 2014.2

Dalam rangka peningkatan dukungan pelayanan ketenagaan, telah dilakukan penempatan dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan bidan melalui program Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang didukung pula oleh PTT daerah. Total penempatan tenaga PTT hingga tahun 2011 berjumlah 39.452 orang. Penempatan dilakukan di berbagai daerah dengan kriteria terpencil, sangat terpencil dan biasa. Untuk memenuhi pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) pada tahun 2011 telah diangkat 1.391 tenaga kesehatan strategis yang terdiri dari Ahli Kesehatan Lingkungan, Ahli Gizi, Perawat, Ahli Farmasi, dan Analis Kesehatan di 35 kabupaten prioritas DTPK di 12 Provinsi.

Upaya keras masih perlu dilakukan untuk mencapai target tahun 2014 sebanyak 7.020 tenaga kesehatan di DTPK.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang berakreditasi internasional, pada tahun 2011 telah terdapat 2 kota di Indonesia yang memiliki rumah sakit standar kelas dunia sesuai target tahun 2011 yaitu RS Santosa Bandung, RS Siloam Gleneagles Karawaci Banten, RS Eka Bumi Serpong Damai Banten, RS Premier Bintaro Banten, dan RS Premier Jatinegara Jakarta. Selain itu, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan yang berstandar internasional, pada tahun 2011 telah teregistrasi 1.372 rumah sakit umum dan 349 rumah sakit khusus. Cakupan rumah sakit yang sudah terakreditasi hingga tahun 2011 sebesar 63 % dari target 90 % pada tahun 2014.

Keterjangkauan masyarakat terhadap obat, ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan terus ditingkatkan untuk mendukung upaya penanganan berbagai kasus penyakit maupun peningkatan cakupan imunisasi. Pada tahun 2012, ketersediaan obat dan vaksin sudah melampaui target 92,85% dari target 85 % dan diharapkan dapat mencapai target 100% pada tahun 2014. Untuk penggunaan obat generik di Puskesmas pada tahun 2011 mencapai 96,70 %, sedangkan penggunaan obat generik di rumah sakit mencapai 66,50 %. Selain itu, telah dilakukan rasionalisasi harga obat generik pada tahun 2011 sebanyak 499 jenis. Dalam upaya meningkatkan kemandirian bahan baku obat, telah dilakukan berbagai penelitian yang melibatkan lembaga penelitian maupun industri obat dengan fokus memberdayakan keragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, saat ini masih terus dikembangkan sistem jaminan kesehatan. Hingga 2012, jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan sebesar 64,58%. Jumlah ini termasuk jumlah penduduk yang menerima jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) sebesar 32,4 % dan jaminan persalinan yang mencakup hampir 1,5 juta ibu bersalin. Pada tahun 2014, sistem jaminan kesehatan akan dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan berbagai jenis jaminan kesehatan, seperti jamkesmas, jamsostek, askes, jamkesda dan lain-lain dalam satu pengelolaan di bawah BPJS kesehatan. Selain itu, dalam mendukung kegiatan promotif

dan preventif dalam pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya, telah dilakukan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 9.323 puskesmas.

Permasalahan dan Kendala

Permasalahan umum diantaranya belum optimalnya cakupan pelayanan, disparitas antar-daerah, kurangnya kualitas dan kualitas tenaga kesehatan serta belum meratanya pemenuhan fasilitas

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pencapaian pembangunan kesehatan antara lain belum optimalnya K4 dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih yang menjadi penyebab masih tingginya AKI, disparitas capaian indikator kesehatan antarprovinsi dan antarstatus sosial ekonomi, belum optimalnya penyediaan tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, serta belum meratanya pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam program KB, permasalahan yang dihadapi adalah kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan. Hal ini disebabkan tidak ada sinergisitas dan harmonisasi antarkegiatan, strategi teknis pelaksanaan pelayanan KB di lapangan yang kurang optimal karena hanya mengandalkan kegiatan momentum daripada kegiatan rutin, kurangnya tenaga lapangan KB, kurangnya komitmen Pemerintah Daerah dalam menggerakkan kembali tenaga lapangan dan pelayanan KB, pencarian target akseptor hanya berorientasi kepada kuantitas tidak kepada kualitas. Di samping itu, mekanisme pembiayaan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan program KB di daerah dan lapangan masih belum jelas. Demikian pula dukungan pendataan yang akuntabel belum berjalan optimal.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian dalam pencapaian sasaran program kesehatan masyarakat adalah upaya untuk: (1) memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak terutama di DTPK; (2) memenuhi kebutuhan ber-KB yang masih belum terpenuhi (*unmet need*) karena terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kontrasepsi; (3) meningkatkan jumlah puskesmas mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) dan rumah sakit mampu pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) dalam mendukung pelayanan

kesehatan ibu dan anak; (4) mengoptimalkan kegiatan bersifat sensitif dalam penanganan masalah gizi yang melibatkan lintas sektor; (5) meningkatkan kegiatan preventif terpadu dalam pengendalian penyakit terutama melalui kegiatan survailans dan promosi komunikasi informasi dan edukasi termasuk upaya perbaikan kualitas kesehatan lingkungan; (6) mengoptimalkan mobilisasi pembiayaan kesehatan terutama untuk mendukung program kesehatan preventif dan promotif; dan (vii) menjamin penyediaan obat dan vaksin sehingga selalu tersedia di fasilitas pelayanan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan dasar.

Langkah Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan capaian, permasalahan dan tantangan di atas, rencana tindak lanjut pembangunan kesehatan ke depan diprioritaskan pada pencapaian target UHH pada tahun 2014 melalui akselerasi pengurangan AKI dan AKB, perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit. Dalam rangka menurunkan AKI, dilakukan pengembangan program jaminan persalinan, penyelenggaraan kelas ibu hamil, penyediaan rumah tunggu ibu hamil, peningkatan puskesmas mampu PONEC dan rumah sakit mampu PONEK, serta peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Sementara itu dalam rangka menurunkan AKB dilakukan peningkatan pelayanan kunjungan neonatal oleh tenaga kesehatan, peningkatan cakupan imunisasi campak, serta penyediaan dan distribusi obat.

Terkait dengan upaya perbaikan status gizi anak terutama dilakukan melalui Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Beberapa kegiatan yang telah terbukti efektif dalam penanganan masalah gizi mencakup peningkatan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui pengukuran berat badan (D/S), sosialisasi pemberian ASI eksklusif, penyediaan makanan pendamping ASI, dan pemberian suplemen vitamin A perlu ditingkatkan cakupannya. Selain itu, kegiatan pendukung yang meliputi penanggulangan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, ketahanan pangan dan

Tindak lanjut diprioritaskan pada upaya menurunkan AKI, AKB, perbaikan status gizi, dan penurunan TFR.

gizi, serta fortifikasi bahan pangan perlu terus didorong dalam mendukung perbaikan gizi.

Untuk mempercepat penurunan TFR, tindak lanjut perlu yang dilakukan adalah peningkatan dan pemerataan akses pelayanan KB yang berkualitas guna meningkatkan jumlah akseptor KB; menurunkan angka berlangsungan (DO), kegagalan dan efek samping dalam penggunaan kontrasepsi; dan menurunkan *unmet need*.

Dalam rangka pengendalian penyakit, dilakukan upaya melalui pelayanan terpadu dan komprehensif HIV dan AIDS, peningkatan pengetahuan remaja terhadap HIV dan AIDS, peningkatan penemuan dan tata laksana kasus, upaya peningkatan kesembuhan dari kasus TB melalui strategi *Direct Observed Treatment Short Course* (DOTS), peningkatan kualitas dan akses terhadap penemuan dini dan pengobatan malaria, serta peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, ketenagaan dan jaminan pembiayaan kesehatan perlu terus ditingkatkan dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional kesehatan

Berbagai kegiatan tersebut perlu didukung pula dengan peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; penyediaan obat dan vaksin di fasilitas layanan kesehatan; penyediaan pembiayaan kesehatan preventif dan promotif dalam rangka pengendalian penyakit melalui perluasan BOK, pengembangan jaminan persalinan dan Jamkesmas, penyediaan dan perbaikan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk penambahan tempat tidur kelas III rumah sakit; serta peningkatan sarana dan prasarana untuk petugas KB lapangan dalam rangka meningkatkan daya jangkau dan kemudahan dalam pelaksanaan program.

IV.4 PRIORITAS NASIONAL 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kemiskinan menurun namun penurunannya cenderung melambat

Sasaran utama prioritas penanggulangan kemiskinan adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat melalui berbagai program penang-gulangan kemiskinan. Secara nasional, tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 14,1 % pada 2009 menjadi 11,66 % pada September 2012. Penurunan tersebut dicapai melalui perluasan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, serta

peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan (klaster 1, 2 dan 3). Namun demikian, dalam tiga tahun terakhir laju penurunan kemiskinan cenderung melambat karena adanya perlambatan laju per-tumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan yang disebabkan oleh meningkatnya inflasi bahan pangan, serta belum optimalnya sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih serius untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 8-10 % pada tahun 2014.

Tabel IV.5 Capaian Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (ribu)	RTSM	726,38	1.170	772,83	1.052	1.516	
Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)(ribu)	RTS	18.497,3	17.488	18.497,3	18.497,3	17.488	
PNPM Inti (Kecamatan)	Kec.	4.334	5.100	4.791	4.978	5.020	
Dukungan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	%	n.a	100	100	100	100	
Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	%	48	80,10	59,07	63,1	64,58	
 Sudah tercapai/ <i>on track/on-trend</i>  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Mengurangi Beban Masyarakat Miskin Melalui Bantuan Sosial

Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasarnya, pemerintah telah memberikan bantuan sosial melalui **program klaster-1** yang antara lain mencakup bantuan sosial yaitu jaminan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan tunai bersyarat, beras untuk masyarakat miskin (raskin) dan penyediaan lapangan kerja. Secara keseluruhan, kegiatan dalam klaster-1 hampir mencapai target yang sudah ditetapkan.

Hingga bulan Juni tahun 2012, target program penanggulangan kemiskinan klaster-1 mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin yang memiliki Jamkesmas meningkat dari 48 % pada tahun 2009 menjadi 64,58 % pada tahun 2012. Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin telah meningkat dari 8.541 pada tahun 2009 menjadi 9.125 pada tahun 2012, dan persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin meningkat dari 62% menjadi 85 %.

Akses siswa miskin untuk bersekolah meningkat dengan adanya BSM

Cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2012 meningkat signifikan dari cakupan tahun 2009 yaitu sekitar 4,75 juta siswa/mahasiswa menjadi 6,38 juta siswa/mahasiswa. Penyaluran BSM kepada siswa sekolah umum dan mahasiswa PTA terus diupayakan secara kontinyu untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. Pemerintah telah menyalurkan bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin berprestasi (BIDIK MISI) bagi 80.000 mahasiswa pada tahun 2012 ini.

Untuk mendorong masyarakat miskin memenuhi hak dasarnya, pemerintah memberikan Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) dan penyaluran Raskin.

Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sekitar 1.52 juta (2012). Program Raskin telah mencapai target yang ditetapkan dalam pendataan PPLS 2008. Sebanyak 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) telah mendapatkan beras sebanyak 15 kg/bulan selama satu tahun. Untuk pelaksanaan bulan Juni-Desember tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan target mengikuti pendataan RTS terbaru yaitu berdasarkan PPLS 2011 (17,5 juta RTS).

Hingga Juni 2012 telah tersedia pekerjaan untuk sementara waktu bagi 167.869 orang penganggur dan telah dibangun sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat melalui kegiatan padat karya infrastruktur dan produktif di 360 kab/kota,

serta terfasilitasinya 17.110 orang pekerja anak untuk diselamatkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA).

Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM

Pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang masuk dalam **kelompok klaster-2** telah mencapai target yang ditetapkan. Program PNPM Mandiri Perdesaan telah mencapai target dari jumlah kecamatan yang ditetapkan, dan mengalami peningkatan dari 4.334 kecamatan pada tahun 2009 menjadi 5.020 kecamatan pada tahun 2012. Kinerja proses pendampingan telah meningkat melalui pelibatan sekitar 12,5 juta orang pelaku aktif masyarakat, 13.955 orang konsultan dan fasilitator yang bertugas mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan program di desa dan kecamatan, serta 23.513 orang aparatur pemerintah kabupaten dan provinsi terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan program pada tahun 2009 hingga tahun 2011. Sedangkan untuk PNPM Mandiri Perkotaan, target jumlah desa/kelurahan penerima program tercapai, yaitu 10.999 kelurahan pada tahun 2012. Capaian tersebut antara lain ditunjukkan oleh jalan lingkungan yang terbangun sepanjang 31.100 kilometer, drainase sepanjang 8.800 kilometer, rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk rumah tangga miskin 126.800 unit, fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah sebanyak 164.800 unit, fasilitas kesehatan sebanyak 9.450 unit, dan kegiatan dana bergulir untuk masyarakat sebanyak 222.180 unit.

Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, kegiatan PNPM terus ditingkatkan cakupannya

Pelaksanaan PNPM-PISEW sebagai salah satu PNPM Inti, telah berhasil mendukung pembangunan infrastruktur dasar di 237 kecamatan dalam 34 kabupaten di 9 provinsi. Lebih lanjut, RPJM Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) didukung melalui perencanaan terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Demikian pula program RISE PNPM Mandiri telah mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian kegiatan pada tahun 2011 meliputi tersedianya jumlah fasilitator masyarakat yang telah dilatih dan disebarkan sebanyak 1.070 dengan 30 % diantaranya adalah perempuan.

Target program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)/PNPM-DTK tahap I (2009-2012) telah tercapai. Pada tahun 2012 PNPM-DTK memasuki masa pengakhiran program yang ditandai dengan serah terima dan alih kelola hasil pelaksanaan kepada pemerintah daerah. Sedangkan PNPM-DTK Tahap II (target lokasi 36 kabupaten) saat ini masih dalam proses persiapan dan pengusulan. Apabila kelanjutan program ini belum dapat dilaksanakan, maka lokasi yang ditargetkan akan ditangani melalui PNPM Perdesaan.

Dalam kelompok PNPM Penguatan, PNPM Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) telah menunjukkan kinerja yang baik. Setiap tahunnya berhasil disusun satu model pembiayaan bersubsidi dan satu kebijakan pembiayaan pertanian. Jumlah desa penerima program telah memenuhi target yang ditetapkan melalui penyaluran penguatan modal PUAP kepada sejumlah Gapoktan dan tersusunnya satu kebijakan pembiayaan pertanian tiap tahun. Program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan telah mencapai target dengan tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar, serta petambak garam. Sasaran program untuk lokasi Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), pada tahun 2012, merupakan target sasaran yang sama untuk klaster-4 program pro-rakyat, yaitu program peningkatan kehidupan nelayan.

PNPM Mandiri Pariwisata terus dioptimalkan untuk mencapai target dari jumlah desa wisata yang ditetapkan yaitu dengan telah dilaksanakannya pengembangan desa wisata yang memfokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh. Unsur objek dan daya tarik wisata (alam, budaya, khusus), fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif budaya menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di suatu daerah/destinasi pariwisata.

Program PNPM Generasi telah melampaui target dari jumlah kecamatan yang ditetapkan dengan ruang lingkup sektor kegiatan yang hanya meliputi dua bidang yaitu pendidikan dan kesehatan. Program PNPM *Green*/PNPM LMP telah pula mencapai target jumlah kecamatan yang ditetapkan yaitu dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan PNPM LMP di 33 kabupaten pada 10 provinsi.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebagai salah satu program PNPM Penguatan lainnya, telah menunjukkan pencapaian akumulatifnya yaitu: (1) tercapainya penyusunan rencana penguatan kapasitas kelembagaan di seluruh pemerintah daerah untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan pendekatan PAMSIMAS; (2) bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses sanitasi hingga lebih dari 80 % dari total target 3,1 juta jiwa di tahun 2012; dan (3) bertambahnya jumlah penduduk menurut status sosial ekonomi yang dapat mengakses air minum sebanyak lebih dari 3,8 juta jiwa. Sedangkan dua indikator utama lainnya yaitu masyarakat yang Stop BABS dan masyarakat yang mengadopsi program cuci tangan pakai sabun masih harus dipercepat pencapaiannya. Kegiatan PAMSIMAS terkait air bersih pada tahun 2012 ini menjadi target sasaran klaster-4 program pro rakyat untuk program air bersih untuk rakyat.

Program klaster-3 mencakup upaya-upaya untuk memfasilitasi rakyat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan akses permodalan. Pelaksanaannya difokuskan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan upaya-upaya pemberdayaan usaha mikro dan kecil lainnya. Penyaluran KUR pada periode 1 Januari 2010 – 31 Desember 2012 mencapai Rp80,4 triliun, yang diterima oleh sekitar 5,3 juta debitur. Kinerja ini didukung penerapan kebijakan baru di tahun 2012 berupa penambahan jumlah bank penyalur KUR dari 19 bank menjadi 33 bank (tujuh bank umum dan 26 Bank Pembangunan Daerah), dan penurunan suku bunga KUR ritel dari maksimal 14 % efektif per tahun menjadi 13 % efektif per tahun. Perbaikan kebijakan KUR yang didukung penyediaan pendampingan KUR mulai tahun 2012 diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR hingga tahun 2014.

Pelaksanaan program peningkatan akses permodalan usaha mikro dan kecil pada umumnya hampir mencapai target. Dukungan diberikan dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan peningkatan kapasitas koperasi perdesaan dan perkotaan. Selain itu, dukungan bagi usaha mikro dan kecil diberikan pula dalam rangka peningkatan akses pemasaran bagi usaha

Suku bunga KUR ritel berhasil diturunkan dari maksimal 14% menjadi 13% per tahun

mikro dan kecil melalui revitalisasi tiga unit pasar tradisional yang dikelola oleh koperasi di wilayah tertinggal/perbatasan.

Permasalahan dan Kendala

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tiga klaster program penanggulangan kemiskinan adalah: (1) cakupan program terbatas karena luasnya cakupan masyarakat miskin dan berbeda karakteristiknya; (2) penentuan sasaran program belum optimal karena koordinasi antarpemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan sinergitasnya; (3) pelaksanaan program masih terlambat karena kurang optimalnya komitmen dan dukungan di daerah; (4) rendahnya kapasitas SDM di daerah; dan (5) sinergitas pusat/daerah dalam sosialisasi untuk pelaksanaan di daerah belum optimal.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak lanjut guna mengatasi permasalahan adalah: (1) klaster-1, yaitu perluasan cakupan penerima bantuan sosial dengan lebih menitikberatkan kepada masyarakat miskin dan pemanfaatan data terbaru PPLS 2011 untuk mensinergikan berbagai program; (2) klaster-2, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan penyempurnaan indikator keberhasilan pinjaman bergulir, serta optimalisasi pendanaan tahun anggaran 2013 untuk pembiayaan BLM dengan penajaman kriteria, yaitu tingkat penduduk miskin, kondisi lokasi, dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya; dan (3) klaster-3, yaitu melalui peningkatan keterpaduan pemberdayaan UMKM dalam aspek pembiayaan, produksi, pemasaran, kapasitas dan kualitas SDM, serta penguatan kelembagaan usaha.

Selain hal di atas, perlu dilakukan upaya tindak lanjut berikut: (1) peningkatan advokasi dan sosialisasi terhadap keseluruhan program-program penanggulangan kemiskinan; (2) penyempurnaan proses penentuan sasaran program dengan koordinasi baik antara pihak/instansi yang berkepentingan ditambah dengan penyelarasan sasaran program dengan data dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya demi terciptanya sinergitas program; (3) peningkatan koordinasi antara

pemerintah pusat dan daerah; dan (4) peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi program pada tingkat Divisi Regional dan Nasional.

IV. 5 PRIORITAS NASIONAL 5 : KETAHANAN PANGAN

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan pada RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat; melanjutkan dan meningkatkan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan untuk mewujudkan daya saing produk pertanian dan perikanan; dan peningkatan pendapatan petani; serta tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun sasaran yang perlu dicapai yaitu terciptanya kemandirian ketahanan pangan pada akhir tahun 2014 pencapaian surplus beras 10 juta ton dan meningkatnya produksi komoditas pangan utama lainnya, meningkatnya PDB sektor pertanian sekitar 3,7 % per tahun dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014.

Kebijakan pembangunan bidang ketahanan pangan diarahkan untuk pencapaian surplus beras, peningkatan komoditas pangan utama lainnya, peningkatan PDB sektor pertanian dan NTP

Secara umum, selama kurun waktu 2010-2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 3,4 % per tahun, namun angka tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 3,7-3,9 % per tahun. Kondisi tersebut disebabkan belum tercapainya target peningkatan produksi pangan utama seperti padi, jagung, kedelai, tebu dan perikanan. Hanya daging sapi yang mengalami peningkatan produksi dan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sementara itu, NTP meningkat menjadi 105,87 pada tahun 2012 dari 101,2 pada tahun 2009. Adapun capaian prioritas Ketahanan Pangan terdapat pada Tabel IV.6.

Tabel IV.6 Capaian Prioritas Nasional Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Peningkatan Pertumbuhan Pertanian							
PDB Pertanian	%	3,96	3,7-3,9	2,99	3,35	3,97 ¹⁾	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Laju Peningkatan Produksi Pangan Utama							
Padi	%	6,75	3,93 ²⁾	3,22	-1,07	5 ³⁾	
Jagung	%	8.04	10,02	3,96	-3,73	9,83 ³⁾	
Kedelai	%	25,63	20,05	-6,92	-6,15	0,04 ³⁾	
Gula	%	-2.96	12,55	7,02	-17,30	16,75 ⁴⁾	
Daging Sapi	%	16,15	7,30	6,65	11,18	4,16 ⁴⁾	
Perikanan	Juta ton	10,82	21,09	18,80	6,20	19,98	
Kesejahteraan Petani							
Nilai Tukar Petani	Indeks	101,20	115-120	102,80	105,75	105,87	
Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi	Ha (ribu)	623,91	1.340	293,04	284,14	98	
Sumber: BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012 Keterangan : ¹⁾ Kumulatif hingga Triwulan III 2012; ²⁾ Target berubah disesuaikan dengan target surplus beras 10 juta ton pada 2014, target RPJMN 3,22 ³⁾ ASEM 2012; ⁴⁾ Kementerian Pertanian; ⁵⁾ Perkiraan; ⁶⁾ Akumulatif capaian s/d Juni 2012							
 Sudah tercapai/on track/on-trend tercapai  Perlu kerja keras  Sangat sulit							

Peningkatan Produksi Pangan Utama

Surplus beras mengalami peningkatan

Pencapaian surplus beras mengalami peningkatan, namun masih perlu upaya keras untuk mencapai target surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Pada tahun 2010 surplus beras mencapai 4,30 juta ton, pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3,91 juta ton yang disebabkan karena produksi padi pada tahun 2011 menurun sebesar 1,07 % yang disebabkan menurunnya luas panen, dan pada tahun 2012 surplus beras diperkirakan meningkat lagi menjadi sekitar 5,77 juta ton. Dalam kurun waktu 2010-2012, produksi padi mampu mengalami peningkatan sebesar 2,38%

per tahun, yaitu dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 69,04 juta ton GKG pada tahun 2012 (ASEM 2012). Namun, peningkatan padi ini masih di bawah target RPJMN sebesar 3,93% per tahun. Berdasarkan ASEM 2012, produksi padi pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 69,04 juta ton atau meningkat 5% dari tahun 2011 yang mencapai 65,76 juta ton.

Tabel IV.7 Perkembangan Pencapaian Surplus Beras Periode 2010-2012

Tahun	Produksi			Populasi (juta)	Konsumsi /kapita/ tahun (kg)	Total Konsumsi (ton) (juta)	Surplus Beras (ton) (juta)
	Gabah (ton) (juta)	Pertum- buhan (%)	Beras (ton) (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2010	66,47	3,22	37,37	237,64	139,15	33,07	4,3
2011	65,76	(1,07)	36,97	241,18	137,06	33,06	3,91
2012 ¹⁾	69,04	5	38,82	244,78	135,01	33,05	5,77

Sumber: 1): ASEM (Estimated), BPS, 2012

Peningkatan produksi padi ini didukung oleh: (1) perluasan areal sawah yang pada tahun 2012 mencapai 58.036 Ha atau 46,67% dari target tengah tahun RPJMN seluas 124.350 Ha; serta (2) optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan seluas 206.541 Ha atau telah melebihi dari target tengah tahun RPJMN seluas 131.859 Ha.

Selain itu, peningkatan produksi padi didukung pula dengan: (1) pembangunan jalan usaha tani dan jalan produksi yang mencapai 2.679 km atau 45,67 % dari target sepanjang 5.867 km; (2) optimasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) dan pengembangan Tata Air Mikro (TAM) yang mencapai 876,12 ribu ha atau 102,96 % dari target 850,92 ribu ha; serta (3) pembangunan/peningkatan jaringan irigasi dan rawa telah mencapai 300 ribu ha atau telah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 139 ribu ha. Sementara rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa telah tercapai sebesar 911 ribu ha atau 51 % dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 1,79 juta ha. Namun demikian, upaya Pemerintah meningkatkan kuantitas dan kualitas pasokan air melalui pembangunan waduk masih

Perluasan areal sawah serta optimasi, konservasi dan rehabilitasi lahan mendukung dalam peningkatan produksi padi

belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari target pembangunan 12 waduk (diluar target pembangunan 7 Waduk di DAS Bengawan Solo), hingga Juni 2012 sembilan diantaranya masih dalam proses konstruksi dan diperkirakan belum ada satu pun yang selesai dibangun pada akhir tahun 2012.

Tingkat pertumbuhan produksi jagung dan gula yang meningkat selama periode 2010-2012 masih di bawah rata-rata per-tahun yang ditetapkan RPJMN, sedangkan tingkat produksi kedelai mengalami penurunan

Selanjutnya, produksi jagung dan gula selama periode 2010-2012 rata-rata meningkat masing-masing sebesar 3,35% dan 2,16 %, namun tingkat pertumbuhannya masih dibawah target rata-rata per tahun yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu masing-masing sebesar 10,02 % dan 12,55 %. Sedangkan untuk produksi kedelai mengalami penurunan rata-rata sebesar -4,34% selama periode yang sama. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya luas panen karena petani lebih memilih menanam padi atau jagung yang harganya lebih menarik. Dengan perkembangan produksi tersebut, produksi kedelai tersebut tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Sehubungan dengan itu, pada saat ini pemerintah sedang merumuskan kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi kedelai dan sekaligus menjaga stabilitas harga kedelai di dalam negeri.

Produksi daging sapi dan perikanan selama periode 2010-2012 mengalami peningkatan, bahkan peningkatan produksi daging sapi melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN

Untuk komoditas pangan utama lainnya terutama sumber pangan protein hewani, yaitu produksi daging sapi dan perikanan selama periode 2010-2012 mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, produksi daging meningkat rata-rata sebesar 7,33% per tahun, sedikit lebih tinggi dari target RPJMN 2010-2014 sebesar 7,30 % per tahun. Peningkatan produksi daging sapi tersebut terjadi disebabkan karena peningkatan populasi sapi potong. Selanjutnya produksi perikanan meningkat sebesar 14,97 % per tahun selama periode 2010-2012, terutama dari produksi perikanan budidaya yang didukung oleh kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya. Konsumsi ikan per kapita nasional yang pada tahun 2011 adalah sebesar 31,64 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 3,81 % dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 30,48 kg/kapita/tahun. Peningkatan tersebut menggambarkan ketersediaan produk perikanan yang mencukupi kebutuhan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan).

Peningkatan Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani yang mengukur perkembangan rasio nilai yang diterima petani dari hasil usaha taninya terhadap biaya produksi dan biaya untuk kebutuhan sehari-harinya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, NTP masih berada pada posisi 101,20 meningkat menjadi 102,80 pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 menjadi 105,75, dan pada tahun 2012 meningkat kembali menjadi 105,87.

NTP terus mengalami peningkatan

Peningkatan Konsumsi Pangan

Selanjutnya, pencapaian tujuan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan mengalami perkembangan yang baik yang dicerminkan dengan meningkatnya tingkat konsumsi energi oleh masyarakat, dari sebesar 1.927 kkal per kapita per tahun pada tahun 2009, menjadi 1.952 kkal per kapita per tahun pada tahun 2011. Besarnya Angka Kecukupan Energi yang diharapkan dapat dicapai adalah sebesar 2.000 kkal per kapita per tahun. Sementara itu, konsumsi ikan per kapita nasional yang pada tahun 2011 adalah sebesar 31,64 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 3,81% dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 30,48 kg/kapita/tahun. Peningkatan tersebut menggambarkan ketersediaan produk perikanan yang mencukupi kebutuhan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan).

Tingkat konsumsi energi oleh masyarakat meningkat

Permasalahan dan kendala

Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan dan rencana tindak lanjutnya. Permasalahan yang terkait dengan lahan dan tata ruang dalam mendukung ketahanan pangan adalah masih terdapat konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain; sulitnya penerapan UU Lahan pertanian berkelanjutan (UU No. 41/2009); baru sekitar 37 ribu Ha lahan terlantar yang telah ditetapkan melalui penerbitan surat keputusan Kepala BPN sehingga menghambat pencapaian perluasan areal pertanian seluas 2 juta hektar.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan bidang pangan diantaranya lahan dan tata ruang, infrastruktur pertanian, dan tidak ada perubahannya NTP.

Masalah penting lainnya yang menghambat peningkatan produksi terutama produksi padi adalah ketersediaan infrastruktur pertanian. Permasalahan tersebut antara lain

sekitar 52 % jaringan irigasi yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah mengalami rusak, sekitar 40 % jalan kabupaten dalam kondisi rusak; serta kurangnya dukungan infrastruktur perikanan tangkap dan budidaya.

Permasalahan ketahanan pangan yang terkait dengan Penelitian dan Pengembangan adalah masih rendahnya produktivitas dari komoditi pangan utama dan masih rendahnya penerapan benih unggul bersertifikat oleh petani yaitu baru sekitar 40 % petani yang menggunakan benih unggul tersebut. Selain itu, terdapat permasalahan lain yang terkait dengan Investasi, Pembiayaan dan Subsidi yaitu masih rendahnya realisasi penyerapan kredit ketahanan pangan dan keterlambatan penyediaan benih unggul sesuai dengan jadwal tanam. Sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan pangan dan gizi adalah masih lambatnya penganeekaragaman konsumsi pangan sehingga ketergantungan konsumsi beras masih tinggi.

Permasalahan NTP yang tidak ada perubahan perlu mendapat perhatian. NTP yang mencerminkan rasio harga barang dan jasa yang diterima petani dengan nilai barang dan jasa yang dibayar petani tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan oleh cenderung tetap atau bahkan menurunnya harga *output*, sementara harga *input* cenderung terus meningkat. Harga *input* seperti pupuk, benih, sewa lahan dan biaya tenaga kerja terus meningkat. Sementara harga *output* pada saat panen cenderung rendah, bahkan seringkali lebih rendah dari biaya produksi. Penurunan harga *output* dapat pula diakibatkan oleh adanya peningkatan persaingan dari impor.

Langkah tindak lanjut

Sangat penting adanya koordinasi pelaksanaan pengamanan produksi pangan

Langkah tindak lanjut terkait lahan dan tata ruang adalah: (1) pemastian peran BUMN, melalui Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) dan swasta lain, mendukung pengembangan *food estate* di wilayah luar Pulau Jawa; (2) pemanfaatan lahan transmigrasi untuk perluasan areal pertanian baru; (3) penghentian alih fungsi lahan sawah; dan (4) pelaksanaan secara penuh peraturan pemerintah terkait dengan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan pada tahun 2015 (PP No. 1/2012 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan dan

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, PP No. 2/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dan PP No. 25/2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan).

Selanjutnya, tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya menangani ketersediaan infrastruktur pertanian adalah mempercepat rehabilitasi dan pembangunan irigasi dan tampungan air baru; mensinergikan peta sawah dan layanan irigasi; memastikan ketersediaan anggaran pemda untuk membangun jalan desa-kecamatan, dan kabupaten khususnya sentra produksi beras; mensinergikan pembangunan jaringan irigasi tambak primer, sekunder, dan tersier; mendukung pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan seperti listrik dan air bersih; merevitalisasi tambak rakyat; dan mendorong peningkatan peran daerah dalam mengelola dan melengkapi fasilitas pendaratan perikanan di daerahnya.

Tindak lanjut terkait penelitian dan pengembangan adalah melakukan percepatan *release* benih unggul dan pengawalan di tingkat lapangan; melakukan revitalisasi sistem perbenihan nasional termasuk perbaikan sistem penyebarluasan hasil-hasil penelitian ke petani, dan penguatan penangkar-penangkar benih di petani. Sedangkan langkah tindak lanjut terkait investasi, pembiayaan dan subsidi adalah melakukan pemutihan KUT; menyusun skema baru subsidi bunga kredit dan penjaminan oleh pemerintah; merubah sistem penganggaran penyediaan benih dan pupuk dari sistem bantuan langsung menjadi sistem subsidi; melakukan perluasan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) seluas 4 Juta Ha; serta melakukan pengawasan subsidi pupuk dan benih salah satunya dengan menggunakan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Dalam upaya menangani permasalahan pangan dan gizi adalah memperluas cakupan pembinaan panganekaragaman konsumsi pangan ke 17.000 Desa; meningkatkan kegiatan penyuluhan panganekaragaman konsumsi pangan; mendorong industri pengolahan pangan yang berbasis sumber daya lokal; serta meningkatkan pembinaan pola hidup sehat dan pengetahuan gizi; dan lebih memfungsikan kelembagaan pangan dan gizi masyarakat yang dapat meningkatkan keragaman pangan untuk memperluas akses

pangan dan menurunkan ketergantungan pada konsumsi beras.

Langkah tindak lanjut permasalahan NTP berupa pengendalian kelancaran dan stabilisasi harga *input* produksi, pengendalian harga *output* terutama saat panen, dan peningkatan produktivitas agar biaya produksi per unit keluaran relatif akan semakin menurun.

Langkah tindak lanjut pengelolaan di tingkat mikro untuk mensinergikan pelaksanaan semua faktor/substansi ini sangat penting, maka diperlukan adanya koordinasi pelaksanaan pengamanan produksi pangan agar terjadinya: (1) sinergi antara lahan dan sarana prasarana irigasi di lapangan, terutama di daerah sentra produksi padi; (2) ketepatan sasaran dan waktu distribusi pupuk dan benih bersubsidi; dan (3) efektivitas penyuluhan untuk mengawal proses produksi pangan, yang perlu didukung ketersediaan informasi tanam untuk dasar sinergi mobilisasi input produksi, informasi panen guna mencegah adanya penurunan harga di waktu panen, serta peningkatan peran Pemda.

IV.6 PRIORITAS NASIONAL 6: INFRASTRUKTUR

Alokasi anggaran untuk infrastruktur terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mendorong kemajuan dunia usaha.

Pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada terjaminnya ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, dan terjaminnya kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional. Sasaran pembangunan infrastruktur adalah pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 alokasi anggaran untuk infrastruktur terhadap PDB terus ditingkatkan dari 3,4 % pada tahun 2010, menjadi 4,1 % pada tahun 2012, sehingga diharapkan akan mengarah pada pemenuhan minimal 5 % dari PDB. Peningkatan tersebut merupakan upaya kuat dari pemerintah untuk terus mendorong agar dunia usaha di Indonesia tetap bergairah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi antara 6,3–6,8 %, sesuai sasaran RPJMN 2010-2014, di tengah-tengah perekonomian dunia yang cenderung tidak ada perubahan.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur dilakukan pula melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Dari estimasi nilai investasi KPS dalam RPJMN 2010-2014 sebesar Rp344.6 triliun, sampai saat ini proyek KPS yang telah selesai transaksi dan mulai konstruksi adalah sebesar Rp. 32 triliun. Pada tahun 2012 telah digulirkan peluang investasi proyek KPS sejumlah 58 proyek dengan perkiraan total investasi mencapai Rp. 500 Triliun, dimana saat ini 17 proyek senilai Rp. 98 triliun sedang dalam proses transaksi dan 13 proyek senilai Rp. 58 triliun sedang dalam proses persiapan transaksi. Dengan semakin memadainya alokasi anggaran infrastruktur tersebut diharapkan dapat menghasilkan capaian-capaian penting dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Pembiayaan Infrastruktur semakin memadai dengan diterapkannya skema KPS.

Pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 secara umum cukup menggembirakan. Sebagian besar indikator penting diperkirakan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014, seperti kemandirian jalan nasional, pangsa angkutan laut domestik (D) dan ekspor-impor (E-I) untuk armada pelayaran nasional, penyelesaian Banjir Kanal Timur Jakarta, ibukota kab/kota yang terhubung secara *broadband*, serta desa yang dilayani akses telekomunikasi. Meskipun demikian indikator panjang jalur KA baru yang dibangun dan pembangunan rusunawa memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014, dan target pembangunan jalan tol diperkirakan tidak dapat tercapai. Capaian PN Infrastruktur terdapat pada Tabel IV.8.

Peningkatan Konektivitas Domestik dan Nasional

Sasaran pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2010-2014 terutama dalam upaya meningkatkan keterhubungan wilayah (*domestic connectivity*) yang dilaksanakan melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, secara umum akan dapat dicapai. Hingga akhir tahun 2012 terdapat pertambahan jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dari 87,3 % pada awal tahun 2009 menjadi 90,82 % pada akhir tahun 2012. Berdasarkan kinerja kemanfaatannya, penambahan lajur-Km dan lebar jalan telah menghasilkan rasio volume lalu lintas dengan kapasitas (*V/C ratio*) jalan nasional rata-rata mencapai 0,41,

Ruang pemanfaatan jalan nasional (*V/C ratio*) masih memadai, namun pengembangan jalan tol masih terhambat pembebasan lahan.

yang berarti bahwa terdapat ruang pemanfaatan jalan yang masih memadai. Sementara itu capaian pembangunan jalan tol hingga Juni 2012, terdapat penambahan panjang jalan tol yang telah terbangun dan beroperasi sepanjang 86,19 Km baik yang dibangun oleh Pemerintah maupun swasta. Capaian tersebut masih jauh dari target RPJMN sepanjang 1.296 km sehingga memerlukan upaya yang keras dan sungguh-sungguh khususnya terkait dengan hambatan pembebasan lahan dalam pembangunan jalan tol.

Tabel IV.8 Capaian Prioritas Nasional Infrastruktur

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Tanah dan Tata Ruang							
Inventarisasi pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T)	Bidang	n.a	1.678.350	317.154	280.244	29.033	
Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya	Provinsi	-	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	
Jalan							
Jumlah Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 km (ribu)	KM	2.443	19.370*	2.808	3.292	12.097*	
Kemantapan Jalan Nasional	%	87,3	90,0	87,0 ¹⁾	87,7	90,5	
Jumlah jalan strategis di Lintas Selatan Jawa, Perbatasan, terpencil, dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 KM	KM	379	1.377,94*	274	302	1.504*	
Jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta	Km	85	1.296*	135	53	296*	

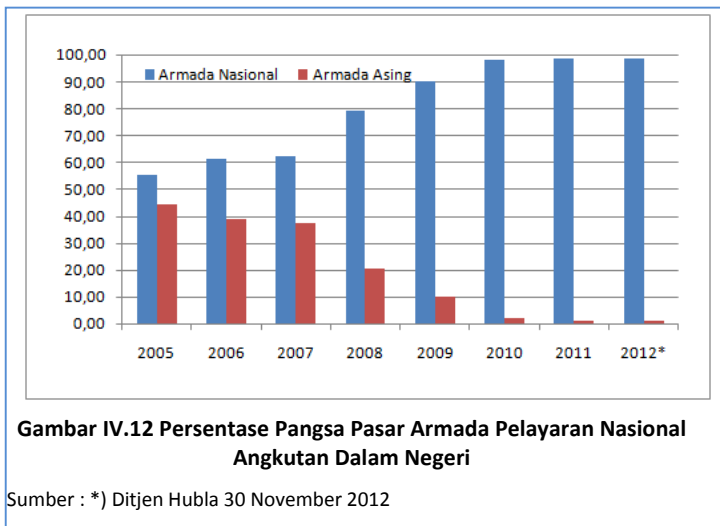
Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Perhubungan							
Panjang jalur KA baru yang dibangun	Km	135,2	954*	81	135	319*	
Jumlah Bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi	paket	170	205	65	150	275*	
Pangsa angkutan laut domestik (D) dan ekspor-impor (E-I) untuk armada pelayaran nasional	%	90,2 (D) 9,0 (E-I)	100,0 (D) 10,0 (E-I)	98,1 (D) 9,0 (E-I)	98,8 (D) 9,5 (E-I)	98,8 (D) 9,9 (E-I)	
Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang dibangun dan ditingkatkan		60	300	157	205	607	
Perumahan Rakyat							
Jumlah Rusunawa Terbangun ¹⁾	Twin Block (TB)	106	650	89	70	435*	
Pengendalian banjir							
Diselesaikannya pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 s/d 29	paket	Konstruksi	Selesai sebelum 2012	Paket 22-29	Paket 30-31	beroperasi	
Telekomunikasi							
Ibukota Kab/Kota yang terhubung secara broadband	kab/kota (%)	311 (63)	437 (88)	311 (63)	328 (66)	343 (69)	
Desa yang dilayani akses telekomunikasi	desa (%)	24.051 (72,5)	33.184 (100,0)	27.670 (83,4)	30.413 (91,6)	30.441 (91,7)	
Keterangan: ¹⁾ Terdapat penambahan panjang jalan nasional dari 34.628,83 Km menjadi 38.569,82 Km. *) Kumulatif							
 tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Tabel IV.9 Kondisi Kemantapan Jalan

Jenis Jalan	Panjang (Km)	Persentase Kondisi Mantap	Persentase Kondisi Tidak Mantap
Nasional	38.570	87.38	12.62
Provinsi	48.984	56.48	43.52
Kab/Kota	376.405	55.15	44.85
Jakarta	6.266	64.00	36.00
Jalan Tol	742	96.00	4.00
TOTAL	470.967	58.11	41.89

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 (diolah)

Pembangunan infrastruktur perhubungan untuk meningkatkan konektivitas nasional dilaksanakan melalui pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang ter-integrasi. Hingga per-tengahan RPJMN 2010-2014 capaian penting dalam pembangunan jaringan prasarana antara lain telah dilaksanakan pembangunan dermaga VI serta pembangunan kapal 5000 GT sebanyak 3 unit untuk mengurai *bottleneck* pada lintas penyeberangan strategis Merak-Bakauheni; peningkatan sub-sidi perintis angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari 99 lintas pada 2010 menjadi 135 lintas pada 2012, serta pembangunan jalur KA sepanjang 319,36 Km (termasuk jalur ganda lintas utara Jawa) yang dapat mewujudkan terciptanya angkutan multimoda untuk penumpang dan barang serta mengurangi beban kemacetan lalu-lintas maupun kerusakan jalan di sepanjang jalur pantai utara Jawa. Indikator penting dari upaya tersebut diantaranya terjadinya peningkatan jumlah angkutan penumpang kereta api dari 76,5 Juta orang pada tahun 2009 menjadi 79,9 Juta orang pada tahun 2011, dan untuk angkutan barang terjadi peningkatan dari 18,97 juta ton pada tahun 2009 menjadi 19,49 juta ton pada tahun 2011. Sedangkan dalam rangka meningkatkan keselamatan transportasi jalan, telah dapat dihasilkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yang diharapkan dapat menekan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas.



Sebagai implementasi dari penerapan *azas cabotage*, sejak tahun 2005-2012 jumlah armada pelayaran nasional meningkat dari 6.041 unit kapal (5,67 juta GT) pada Maret 2005 menjadi 11.791 unit kapal (16,63 juta GT) pada November 2012, atau mengalami peningkatan sebanyak 5.750 unit kapal (95,18 %) setara dengan peningkatan tonase kapal sebesar 10,96 juta GT (193 %). Hal tersebut memberikan dampak pada peningkatan pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk angkutan dalam negeri dari 114,5 juta ton (55,5 %) menjadi 283,5 juta ton (98,8 %). Pencapaian yang hampir 100 % ini merupakan target sapu bersih untuk angkutan dalam negeri dalam upaya mendukung penguatan konektivitas dan sistem logistik nasional serta peningkatan daya saing nasional. Keberhasilan di dalam negeri ini diharapkan mampu berimbas pada pangsa pasar angkutan luar negeri melalui program *beyond the cabotage*. Kebijakan ini perlu didukung pula dengan penyediaan sumber pendanaan murah dalam pengadaan kapal bagi pengusaha armada pelayaran nasional.

Tabel IV.10 Perkembangan Armada Nasional Indonesia dan Negara-Negara ASEAN (Juta GT)

Negara	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Indonesia	3,66	3,82	4,38	4,81	4,95	7,06	8,20
Singapore	12,42	14,69	14,88	16,44	16,48	17,37	18,69
Malaysia	6,05	5,45	6,28	7,40	7,71	8,78	9,32
Thailand	2,58	2,74	2,49	3,52	3,50	3,01	3,47
Philipina	3,95	4,05	2,02	-	-	-	-
Vietnam	-	-	2,54	3,19	3,62	4,56	4,72

Sumber : *Review of Maritime Transport*, UNCTAD Tahun 2005 s.d 2011 (*Vessels of 1.000 and above*)

Dalam lima tahun terakhir pergerakan pertumbuhan penumpang transportasi udara mengalami peningkatan rata-rata 9,3 % per tahun, dan pada tahun 2011 peningkatannya mencapai 14,0%. Peningkatan per-

Tabel IV.11 Angkutan Udara Perintis Tahun 2009-2011

URAIAN	2009	2010	2011
Rute	94	118	130
Kota Terhubung	85	89	98
Provinsi	14	14	15
Lokasi Subsidi BBM	8	9	9
Jumlah Armada	22	22	28

Sumber: Kementerian Perhubungan (2012)

tumbuhan penumpang angkutan udara ter-sebut terutama pada kota yang dilayani oleh pesawat dengan kapasitas diatas 100 penumpang. Hal tersebut perlu diiringi dengan peningkatan pelayanan angkutan udara untuk wilayah perbatasan dan terpencil yang dilayani oleh pesawat dengan kapasitas dibawah 50 penumpang yang saat ini jumlahnya masih sangat terbatas. Disamping itu, perlunya peningkatan sistem navigasi udara untuk wilayah-wilayah yang masih *blankspot*.

Pembangunan MRT dan Monorail masih terhambat, namun pembangunan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi dan sosial perkotaan lainnya sudah berhasil dilaksanakan.

Pembangunan infrastruktur perkotaan ditujukan untuk mewujudkan wilayah perkotaan yang mampu mengakomodasi aktifitas ekonomi dan sosial serta kebutuhan masyarakat. Hingga pertengahan 2012 beberapa capaian diantaranya telah dilakukan pemutakhiran terhadap Rencana Induk Transportasi Terpadu Jabodetabek; telah disusun konsep kelembagaan Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ) yang saat ini dalam proses penerbitan

landasan hukum; serta pelaksanaan program pengembangan *Bus Rapid Transit* (BRT) di 13 lokasi, yaitu Bogor, Yogyakarta, Pekanbaru, Manado, Palembang, Gorontalo, Batam, Semarang, Bandung, Solo, Tangerang, Prov. Maluku dan Prov. Bali. Sementara itu target pembangunan sistem *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta hingga tahun 2012 baru diselesaikan *Basic Design*. Target penyelesaian pembangunan MRT dan Monorail di Jakarta belum dituntaskan karena permasalahan skema pendanaan dan perhitungan investasi oleh pihak Pemerintah Daerah.

Peningkatan Akses Penduduk terhadap Lingkungan Permukiman yang Berkualitas

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai, hingga tahun 2012 pemerintah memberikan bantuan subsidi perumahan secara kumulatif mencapai 402.404 unit dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 220.886 unit. Sedangkan bagi masyarakat yang belum mampu memiliki rumah sendiri khususnya di perkotaan, pemerintah menyediakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), namun, pembangunannya masih tersedat dari total 380 TB yang direncanakan selesai pada tahun 2012. Bagi masyarakat yang menyediakan rumahnya secara swadaya, pemerintah memberikan fasilitasi untuk pembangunan baru mencapai 28.706 unit dan peningkatan kualitas rumah mencapai 111.476 unit. Selain itu, pemerintah memberikan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti jalan lingkungan, air minum, dan sanitasi. Indikator capaian proporsi rumah tangga kumuh di kawasan perkotaan berkurang dari 13,0 % (2010) menjadi 12,6 % (2011). Namun sebaliknya, proporsi rumah tangga kumuh di perdesaan meningkat dari 15,8 % (2010) menjadi 16,4 % (2011).

Peningkatan akses terhadap hunian yang layak telah berhasil mengurangi jumlah rumah tangga kumuh di perkotaan, namun di perdesaan belum sesuai harapan.

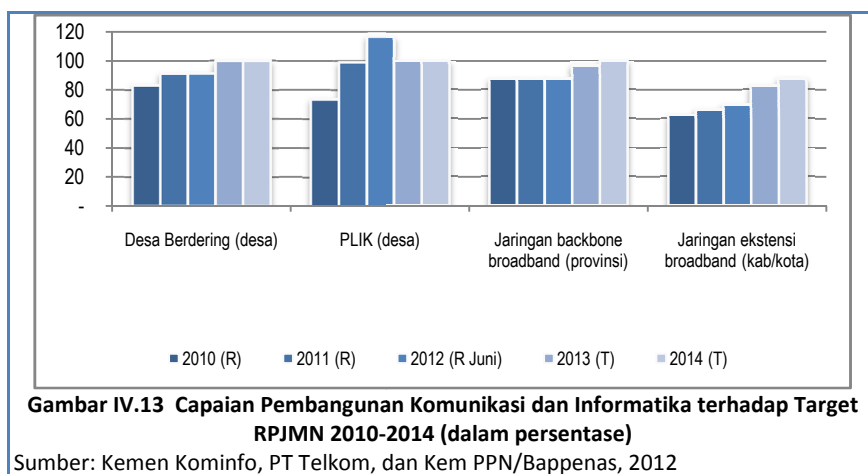
Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

Dalam rangka pencapaian sasaran pengendalian banjir, penyelesaian pembangunan Kanal Banjir Timur telah berhasil diselesaikan sebelum tahun 2012 sesuai dengan sasaran yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014. Pada akhir tahun 2011, Kanal Banjir Timur Jakarta telah mulai beroperasi untuk

Kanal Banjir Timur telah berhasil dibangun dan dioperasikan.

melayani sistem drainase pada wilayah seluas 207 km², melindungi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara seluas 256 km² dari banjir akibat luapan Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jati Kramat, dan Sungai Cakung, serta mengurangi 13 kawasan genangan (11 Kelurahan di Jakarta Timur dan dua Kelurahan di Jakarta Utara).

Peningkatan Akses Komunikasi Data dan Suara Bagi Seluruh Rakyat



Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) telah berhasil melampaui target RPJMN.

Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang baru dimulai pada tahun 2010, saat ini telah mencapai 6.694 desa ibukota kecamatan atau sudah melebihi target RPJMN 2010-2014 sebanyak 5.748 desa. Keberhasilan lain adalah tercapainya: (1) kesepakatan demarkasi rute pembangunan jaringan *broadband* yang akan dibangun oleh PT Telkom dan Pemerintah untuk memastikan tidak adanya *overlap* rute pembangunan; (2) perluasan tugas pokok dan fungsi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pengelola *ICT Fund*; (3) penerbitan Permen Kominfo No. 23/2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Layanan Pita Lebar yang merupakan penyempurnaan dari Permen Kominfo No. 21/2011; dan (4) penetapan belanja modal sebagai skema penggunaan *ICT Fund* untuk membiayai proyek Palapa Ring.

Permasalahan dan Kendala

Dari berbagai capaian tersebut, pembangunan infrastruktur hingga tahun 2012 masih dihadapkan pada permasalahan, diantaranya: (1) hambatan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang sangat kompleks, seperti belum diperolehnya izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi oleh peraturan perundangan sampai penolakan dari warga masyarakat yang mengarah pada permasalahan sosial; (2) lemahnya koordinasi dan sinergi lintas sektor yang berakibat pada kurang terintegrasinya pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien; (3) belum optimalnya pelaksanaan skema pendanaan KPS baik dari aspek kelembagaan, yakni kurangnya kapasitas dan komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), kerangka hukum yang masih perlu dilakukan harmonisasi, serta dukungan pemerintah baik dalam penyiapan dan transaksi proyek. Permasalahan tersebut diperkirakan masih belum dapat teratasi mengingat permasalahan pembebasan lahan sangat terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan dan memerlukan pemecahan yang terintegrasi dan berkeadilan.

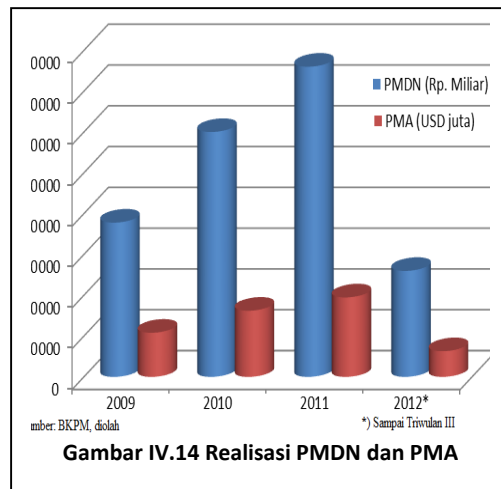
Langkah Tindak Lanjut

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, tindak lanjut yang diperlukan antara lain meningkatkan kualitas kegiatan persiapan baik dalam aspek teknis maupun aspek sosial-kemasyarakatan agar setiap potensi hambatan yang terjadi dapat segera diketahui dan segera dirumuskan rekomendasi penyelesaiannya sehingga tidak menghambat pelaksanaan konstruksi. Selain itu upaya peningkatan koordinasi dan partisipasi *stakeholder* terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat akan ditempuh agar kendala pembebasan lahan yang saat ini masih berlangsung dapat segera menemukan jalan keluar. Dengan telah terbitnya UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diharapkan memberikan jalan keluar yang lebih baik dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

IV. 7 PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Kebijakan peningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong peningkatan investasi dan peringkat investasi menjadi *investment rating* menjadi *investment grade*

Kebijakan pe-ningkatan iklim investasi dan iklim usaha telah mendorong pe-ningkatan inves-tasi dan daya saing produk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh meningkat-nya Pembentuk-an Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dan membaiknya peringkat investasi (*investment rating*) Indonesia.



Gambar IV.14 Realisasi PMDN dan PMA

Perbaikan iklim

investasi ini merupakan hasil dari berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan pada penyederhanaan prosedur perijinan, pe-ngembangan sistem logis-tik nasional, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui skema KPS, dan sinkro-nisasi kebijakan ketenaga-kerjaan dan iklim usaha.

Pertumbuhan yang baik terjadi pada PMTB, PMA, dan PMDN.

Pertumbuhan PMTB tahun 2010 dan 2011 masing-masing 8,5 % dan 8,8 %, lebih cepat dari pertumbuhannya pada 2009 yaitu 3,3 %. Pada tahun 2012 PMTB tumbuh mencapai 10 % (*y-o-y*, hingga Semester I). Selanjutnya, PMDN me-ningkat dari Rp37,8 triliun pada 2009 menjadi Rp76,0 triliun pada tahun 2011, demikian pula PMA meningkat dari USD 10,8 juta menjadi USD19,5 juta. Hingga tahun 2012 Triwulan III, realisasi PMDN dan PMA masing-masing sebesar Rp. 25,2 triliun dan USD6,3 juta atau masing-masing meningkat sekitar 37% dan 22% dibandingkan dengan realisasi Triwulan III tahun 2011. Selain itu, peringkat investasi Indonesia telah membaik sehingga dimasukkan dalam kategori negara yang layak investasi (*investment grade*), yaitu *Fitch: BBB-*, *Moody's: BAA3*, dan *Standard & Poors: BB+*. Peningkatan peringkat ini merupakan cerminan perbaikan persepsi

terhadap situasi perekonomian Indonesia. Predikat *investment grade* akan menambah kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Berikut pada Tabel IV. 12 adalah capaian Prioritas Nasional Iklim Investasi dan Iklim Usaha.

Tabel IV.12 Capaian Prioritas Nasional Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Capaian			Target 2014	Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
			2010	2011	2012		
Jumlah PTSP di Daerah	prov/ kab/ kota	360	394	420	444	530	
Jumlah provinsi dan Kab/Kota yang telah menerapkan SPIPISE	prov/ kab/ kota	n.a n.a	33 Prov dan 40 kab/ko ta	33 Prov dan 50 kab/ kota	33 Prov dan 50 kab/ kota	33 Prov dan 50 kab/ kota	
Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama	%	n.a	4,5	3,5	2,2	5 - 9	
Rata-rata rasio koefisien variasi harga provinsi dan nasional		n.a	1,8	1,9	2,1	1,5 - 2,5	
Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi	hari	n.a	6	5	4	2	
Jumlah pasar percontohan	unit	10	12 dan -	15 dan 1	20 dan 1	26 dan 5	
Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor <i>online</i> melalui INATRADE	perusaha an	n.a	1.536	2.064	2.618	7.500	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Capaian			Target 2014	Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
			2010	2011	2012		
Tersusunnya peraturan tentang kompensasi dan penetapan PHK, hubungan kerja (kontrak dan <i>outsourcing</i>) serta pengupahan	Peraturan	Masuk dalam Prolegnas	Naskah Akademis	Penundaan revisi dan dikeluarkan dari Prolegnas ¹⁾	Permenakertrans No. 13 tahun 2012 dan No. 19 Tahun 2012 ²⁾	-	
Jumlah lembaga kerjasama bipartit di perusahaan dalam rangka pencapaian kesepakatan hubungan kerja		12.115	13.246	13.912	14.339	15.000	
Keterangan: ¹⁾ Karena belum adanya kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha, maka oleh DPR dilakukan penundaan. ²⁾ Peraturan tentang komponen dan pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan Layak dan syarat-syarat Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain.							
 Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Penyederhanaan Perizinan dan Peningkatan Daya Saing Usaha

Sebagian besar daerah sudah membentuk PTSP, namun masih sedikit daerah yang telah menerapkan SPIPISE dan melakukan pengurangan biaya untuk berusaha.

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar daerah yang semakin meningkat, dilakukan upaya peningkatan tata kelola ekonomi daerah melalui percepatan perizinan di daerah dengan: (1) penerapan PTSP, (2) penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), dan (3) pengurangan biaya untuk berusaha. Sampai tahun 2012 sudah sebanyak 444 daerah (provinsi/kab/kota) yang telah membentuk PTSP, atau 83,8% dari total 530 daerah di Indonesia. Jumlah ini sudah melampaui target RPJMN sebesar 70 % pada tahun 2014. Namun demikian, yang telah menerapkan SPIPISE baru 138 daerah (15%), masih lebih rendah daripada target RPJMN sebesar 83 %. Selanjutnya, hingga tahun 2012 baru 37,7 % (200 daerah) yang melakukan

pengurangan biaya berusaha. Pencapaian ini baru sekitar separuh dari target RPJMN sebesar 70 %. Lambatnya pencapaian upaya ini disebabkan oleh belum optimalnya sosialisasi peraturan tentang pengurangan biaya berusaha di daerah.

Pengembangan Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sistem transportasi dan pembangunan daerah menjadi sebuah konektivitas nasional dalam jalur distribusi intra pulau, antarpulau, dan jalur perdagangan internasional sangat strategis dalam menunjang daya saing usaha, mengurangi disparitas antarwilayah, dan menjaga kestabilan harga bahan pokok.

Dalam periode 2009-2012, variasi harga antarwilayah tetap terjaga pada kisaran yang sesuai dengan target yang direncanakan dalam RPJMN 2010-2014. Angka Rasio Koefisien Variasi Harga Provinsi dan Nasional pada tiga tahun terakhir berturut-turut adalah: sebesar 1,8 pada tahun 2010, sebesar 1,9 pada tahun 2011 dan 2,1 pada tahun 2012. Besaran rasio tersebut berada dalam kisaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2010-2014, yaitu dalam kisaran 1,5–2,5.

Selain terjaganya variasi harga antarwilayah, secara umum harga komoditi pangan pokok tetap terjaga stabilitasnya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Koefisien Variasi Harga (KVH) sebagai indikator. Rata-rata KVH selama 3 tahun adalah: 4,5% (2010), 3,5% (2011), dan 2,2% (2012). Rata-rata nilai koefisien variasi ini masih berada dalam kisaran 5–9%, sesuai dengan yang ditargetkan dalam Rencana Strategis. Meskipun demikian, masih terjadi fluktuasi harga musiman pada sejumlah komoditi tertentu, terutama pada puncak hari raya. Terjaganya stabilitas harga antara lain didukung oleh upaya perbaikan sarana distribusi perdagangan, termasuk telah dibangunnya 47 unit pasar percontohan dalam kurun waktu 2010 hingga pertengahan 2012.

Salah satu peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan adalah dibangunnya sistem perizinan secara elektronik (*e-licensing*) yang disebut “INATRADE”, sejalan dengan Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Perpres No. 10/2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka *National Single Window* (NSW). Pada INATRADE diterapkan prinsip *single entry* dan *single exit point* sehingga tidak perlu dilakukan tatap muka

Pembangunan sistem Logistik Nasional mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok dan variasi harga antarwilayah, meskipun masih terjadi fluktuasi harga musiman pada komoditi dan waktu tertentu seperti hari raya.

antara pemohon dengan pejabat pemroses. Hingga kini sebanyak 15 jenis perizinan perdagangan dalam negeri sudah dapat dilayani secara *online*, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 12 jenis. Demikian pula untuk perizinan perdagangan luar negeri, sebanyak 55 jenis perizinan impor telah dapat dilayani secara *online*, meningkat cukup tinggi dari tahun 2009 yang hanya mampu melayani 26 jenis perizinan impor secara *online*. Sementara itu, sejumlah 36 perijinan ekspor (28 jenis perijinan ekspor yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, 7 berupa Laporan *Surveyor* (LS) dan 1 Laporan Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK), proses permohonan perizinannya belum dapat dilaksanakan secara *online*. Namun demikian, seluruh perizinan tersebut (89 perijinan ekspor dan impor) sudah dapat disampaikan secara elektronik ke Ditjen Bea dan Cukai, untuk selanjutnya diteruskan ke portal NSW. Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor *online* melalui INATRADE selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 1.536 perusahaan (2010) menjadi 2.064 perusahaan (2011), dan 2.618 perusahaan di tahun 2012 dari total target sebanyak 7.500 perusahaan pada tahun 2014.

Semakin banyak jenis perizinan perdagangan dalam negeri dan ekspor/impor sudah dapat dilayani secara *online* tetapi jumlah perusahaan yang menggunakannya masih relatif belum banyak.

Waktu pelayanan menjadi lebih singkat dan tanpa dipungut biaya. Sebelum 2010, penyelesaian perizinan memakan waktu antara 5-15 hari kerja, saat ini (Juni 2012) dengan penerapan sistem *online*, pelayanan perizinan dapat diselesaikan rata-rata dalam waktu 4 hari. Untuk perizinan ekspor dan impor sejak tahun 2011 dapat diselesaikan rata-rata dalam waktu 3 (tiga) hari.

Kebijakan Ketenagakerjaan

Peringkat Indonesia dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja menurun.

Kebijakan ketenagakerjaan dalam prioritas ini dimaksudkan untuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial dalam rangka mengurangi hambatan dalam perkembangan pasar tenaga kerja. Sampai saat ini, Indonesia masih mengalami kendala dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik, sehingga menyebabkan peringkat Indonesia dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Data dari *Global Competitiveness Report* (Tabel IV.13) menunjukkan hal tersebut. Dari 144 negara pada tahun 2012, efisiensi pasar kerja Indonesia berada pada peringkat 120. Indonesia

menduduki peringkat 114 dalam fleksibilitas penentuan upah dan 137 dalam indikator redundansi biaya.

Tabel IV.13 Peringkat Pilar Efisiensi Pasar Kerja Indonesia dalam *Global Competitiveness Report*

No.	Indikator	2008 (dari 134 negara)	2009 (dari 133 negara)	2010 (dari 139 negara)	2011 (dari 142 negara)	2012 (dari 144 negara)
1	Efisiensi pasar tenaga kerja	43	75	84	94	120
2	Kerjasama hubungan karyawan pengusaha	19	42	47	68	61
3	Fleksibilitas penentuan upah	79	92	98	113	114
4	Kekakuan lapangan kerja	87	82	100	104	-
5	Praktek penerimaan dan pemutusan kerja	19	34	38	51	52
6	Biaya redundansi	117	119	127	131	137

Sumber: *Global Competitiveness Report*, 2008-2012

Target utama yang ingin dicapai dalam Kebijakan Ketenagakerjaan adalah penyempurnaan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama terkait dengan kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan *outsourcing*), dan pengupahan. Untuk itu, pada tahun 2010 telah menyusun rancangan amandemen UU No. 13/2003. Namun pada tahun 2011 terjadi penundaan revisi terhadap UU tersebut karena belum adanya kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha.

Penyempurnaan UU No. 13/2003 ditangguhkan pembahasannya oleh DPR dan dikeluarkannya dari prolegnas tahun 2011.

Kawasan Ekonomi Khusus

Pengembangan KEK melalui skema KPS merupakan salah satu upaya perbaikan iklim investasi. Sampai saat ini pencapaian dalam pengembangan KEK belum mencapai sesuai dengan yang diinginkan karena menghadapi beberapa kendala. Kendala utama adalah belum diterbitkannya

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengakomodasi lokasi KEK, belum efektifnya skema KPS dalam pembangunan infrastruktur, dan belum efektifnya kebijakan dan peraturan pendukung bagi pemberian fasilitas fiskal di KEK.

Dalam hal KPS, terdapat masalah mendasar yang menjadi kendala pembangunan proyek-proyek infrastruktur, yaitu belum adanya peraturan perundangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan proyek KPS. Hal ini diperlukan dalam memberikan landasan bagi penentuan skema bisnis dan bentuk kerjasama yang ditawarkan, kepemilikan proyek KPS sebagai proyek pemerintah.

Permasalahan dan Kendala

Beberapa masalah dan kendala masih dijumpai dalam pencapaian upaya peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. Dalam hal upaya penyederhanaan prosedur pelayanan dan mengurangi biaya berusaha, kendala yang ada adalah masih kurangnya sinkronisasi dan sosialisasi kegiatan di daerah. Di samping itu, belum seluruh wewenang dilimpahkan kepada lembaga PTSP. Upaya penataan kebijakan ketenagakerjaan menghadapi kendala utama berupa terhentinya proses pembahasan amandemen UU No. 13/2003 karena dikeluarkan dari prolegnas tahun 2011 oleh DPR, sebagai akibat masih adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dan serikat pekerja. Masalah utama yang menjadi kendala dalam pengembangan KEK adalah belum diterbitkannya RTRW untuk mengakomodasi lokasi KEK dan belum adanya peraturan perundangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan proyek KPS. Di samping itu, masih terdapat masalah-masalah antara lain kurang jelasnya skema KPS skema, bisnis dan bentuk kerjasama yang ditawarkan, belum adanya kesamaan persepsi mengenai kepemilikan proyek KPS sebagai proyek pemerintah, dan belum ada regulasi tentang pemberian insentif fiskal bagi proyek infrastruktur dengan skema KPS.

Langkah tindak lanjut

Untuk terus meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif, prosedur pelayanan usaha harus semakin ditingkatkan melalui beberapa hal antara lain: (1) peningkatan efektifitas PTSP dengan penguatan kewenangan

PTSP yang sudah dibentuk, meningkatkan sosialisasi untuk mendorong peningkatan pemanfaatan INATRADE; (2) mendorong dialog antara pengusaha dan serikat pekerja untuk menuju kesamaan pandangan atas kebijakan ketenagakerjaan serta mendorong pembahasan untuk amandemen UU No. 13/2003; (3) menyiapkan peraturan perundangan yang menjadi payung hukum dalam pembangunan infrastruktur dengan skema KPS, di samping peningkatan kualitas penyiapan proyek infrastruktur skema KPS; peningkatan koordinasi antar lembaga dalam percepatan penyediaan infrastruktur dengan skema KPS; serta pembahasan regulasi yang spesifik mengatur ketentuan tentang pemberian insentif fiskal bagi proyek infrastruktur dengan skema KPS.

IV.8 PRIORITAS NASIONAL 8: ENERGI

Kebijakan pembangunan bidang energi diarahkan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi guna menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional. Substansi inti dari kebijakan bidang energi mencakup antara lain kapasitas energi, pemanfaatan energi alternatif khususnya panas bumi, dan konversi penggunaan sumber energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Sasaran yang ingin dicapai dalam kapasitas energi adalah: (a) produksi minyak bumi mulai tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barrel per hari; (b) tambahan kapasitas pembangkit rata-rata 3.000 *megawatt* (MW) per tahun; (c) rasio elektrifikasi sebesar 80 % pada tahun 2014; dan (d) Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari energi alternatif, khususnya panas bumi, mencapai 5.000 MW. Sedangkan sasaran dalam konversi penggunaan gas adalah: (a) terbangunnya jaringan gas kota di 19 kota dengan 80.000 sambungan rumah, dan; (b) terbangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 21 unit.

Secara umum, pencapaian sasaran utama pembangunan bidang energi masih belum menggembirakan, terutama produksi minyak bumi dan pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Pencapaian sasaran utama pembangunan disajikan pada Tabel IV.14.

Fokus
Pembangunan
Energi mencakup
kapasitas energi,
pemanfaatan
energi alternatif,
dan konversi gas.

Tabel IV.14 Capaian Prioritas Nasional Energi

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target (2014)	Perkembangan Pencapaian			Perkiraan Capaian 2014 (notifikasi)
				2010	2011	2012	
Produksi Minyak Bumi	Ribu Barrel/Hari	949	1.010 ^{*)}	945	902	877	
Kapasitas Pembangkit	Tambahan (MW)	31.959	3.000 MW/Tahun	2.024	5.916	2.940	
	Terpasang (Kumulatif MW)			33.983	39.899	42.839	
Rasio Elektrifikasi	%	65,79	80	67,15	72,95	75,90	
Kapasitas PLTP	Terpasang (Kumulatif MW)	1.179	5.000	1.189	1.226	1.231	
Pembangunan Jaringan Gas Kota	Kota/Sambungan Rumah (Kumulatif)	2/6.210	19/80.000	6/19.376	9/45.576	14/61.576	
Pembangunan SPBG	Unit (Kumulatif)	n.a ^{**)}	21	FEED ^{***)}	4	8	
Keterangan: *) 1,01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1,2 juta; **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) <i>Front End Engineering Design</i>.  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Produksi Minyak Bumi Semakin Menurun

Produksi minyak bumi semakin menurun karena sebagian besar berasal dari sumber minyak yang sudah menua, dan terlambatnya pembukaan sumber minyak baru

Capaian produksi minyak bumi dari tahun ke tahun semakin menurun. Produksi minyak bumi tahun 2012 hingga bulan Juni rata-rata adalah sebesar 877 ribu barrel per hari. Angka ini masih jauh dari sasaran produksi minyak bumi pada tahun 2014 sebesar 1.010 ribu barrel per hari atau baru mencapai 86,83 %. Hal ini disebabkan karena sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian besar (62%) berasal dari lapangan minyak tua (*mature*), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (*natural depletion*) sekitar 10% - 12%. Sementara, lapangan minyak baru yang diharapkan dapat meningkatkan produksi mengalami keterlambatan. Di samping itu, terjadi kehilangan potensi produksi akibat penghentian produksi yang direncanakan maupun tidak direncanakan (*unplanned shut-down*). Ke depan, produksi minyak bumi diharapkan dapat meningkat seiring dengan

mulai berproduksinya lapangan minyak di Banyu Urip dan Ande-Ande Lumut pada tahun 2014.

Rasio Elektrifikasi dan Kapasitas Pembangkit Listrik mampu mencapai target 2014

Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW/tahun dan rasio elektrifikasi sebesar 80% pada tahun 2014 diperkirakan akan tercapai. Pada tahun 2012, rasio elektrifikasi sudah mencapai 75,90% atau mendekati target tahun 2014 sebesar 80%. Peningkatan rasio elektrifikasi didukung dengan adanya tambahan kapasitas pembangkit listrik. Sampai Juni 2012, kapasitas pembangkit listrik mencapai 42.839 MW. Artinya, ada tambahan kapasitas sebesar 10.880 MW dibandingkan kapasitas yang ada pada tahun 2009 sebesar 31.959 MW.

Panas Bumi sebagai Pemanfaatan Energi Alternatif untuk Pembangkit Listrik belum dapat dimaksimalkan

Sampai saat ini, pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya belum kompetitif serta biaya investasi yang relatif besar, disamping adanya tumpang tindih lahan antara lapangan panas bumi dengan kawasan hutan. Potensi energi panas bumi sekitar 29.000 MW dan baru dapat dimanfaatkan untuk kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.231 MW. Kapasitas ini masih jauh lebih kecil dari yang diharapkan, yakni sekitar 4,24 % dari potensi keseluruhan dan 24,62 % dari target RPJMN sebesar 5.000 MW.

Pemanfaatan panas bumi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena harganya yang belum kompetitif dan biaya investasi yang besar

Pelaksanaan Konversi Penggunaan Gas Diperkirakan Mencapai Target

Pembangunan jaringan gas kota dan SPBG dalam rangka konversi BBM ke BBG diperkirakan mencapai target sesuai dengan sasaran RPJMN. Dari rencana pembangunan jaringan gas di 19 kota dan 80.000 sambungan rumah, diperkirakan pada tahun 2014 akan terbangun di 21 kota serta 76.280 sambungan rumah. Pembangunan SPBG sampai 2014 akan mencapai target yang ditetapkan. Untuk mendukung pelaksanaan penggunaan gas di sektor transportasi, telah

diterbitkan Perpres No. 64/2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga BBG untuk Transportasi Jalan. Dengan adanya Perpres tersebut, implementasi penggunaan BBG diharapkan dapat lebih baik, terutama dalam peningkatan jumlah pembangunan SPBG.

Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan dalam pembangunan bidang energi antara lain pada laju produksi minyak bumi terus menerus mengalami penurunan, disamping adanya kehilangan potensi produksi. Penurunan laju produksi terutama disebabkan oleh penurunan alamiah dari sumur-sumur yang sudah *mature*, sedangkan penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi selanjutnya (*secondary* dan *tertiary recovery*) masih terbatas. Potensi kehilangan produksi terutama terjadi akibat keterlambatan produksi lapangan minyak baru serta kendala teknis yang bersumber dari tingkat kehandalan peralatan produksi, serta kendala non-teknis yang bersumber dari masalah perijinan penggunaan lahan.

Terkait kapasitas pembangkit listrik, tambahan kapasitas terutama diperoleh melalui program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap I. Namun demikian, program tersebut dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan, sehingga kontribusinya terhadap penambahan kapasitas terpasang tidak sesuai dengan sasaran. Keterlambatan ini disebabkan oleh mundurnya waktu *Commercial Operation Date* (COD) dari beberapa proyek pembangkit karena masalah administratif, teknis, dan finansial. Sampai saat ini, proyek pembangkit 10.000 MW Tahap I yang sudah beroperasi sebesar 4.450 MW.

Kendala yang ditemui dalam pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi, adalah mengenai harga dan tumpang tindih lahan. Biaya produksi dari energi alternatif cukup tinggi sehingga menyebabkan energi alternatif tidak dapat berkompetisi dengan harga energi berbasis fosil, yang masih disubsidi. Sebagian besar potensi panas bumi berada di kawasan hutan lindung/konservasi, dan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pengembangan panas bumi memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian, pelaksanaan eksplorasi menjadi terlambat dan berdampak

pada rendahnya pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik.

Sementara pada pemanfaatan jaringan gas kota dan SPBG yang sudah terbangun terkendala dalam hal serah terima aset kepada pengelola serta jaminan kepastian alokasi atau pasokan gas dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Langkah Tindak Lanjut

Langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan produksi minyak bumi adalah: (a) memberikan insentif optimasi produksi melalui *infill drilling* dan penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR); (b) mempercepat pengembangan lapangan baru termasuk pengembangan struktur *idle*; (c) meningkatkan kehandalan peralatan untuk mengurangi gangguan produksi (*unplanned shut-down*); dan (d) mempercepat penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan perijinan, keamanan, dan tumpang tindih lahan. Sedangkan untuk menyukseskan program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW Tahap I adalah dengan mempercepat penyelesaian masalah melalui koordinasi yang lebih intensif.

Upaya tindak lanjut yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala pemanfaatan energi alternatif adalah: (a) amandemen UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi untuk mengakomodasi bahwa panas bumi tidak termasuk kegiatan pertambangan terkait dengan UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan; (b) pemberian jaminan kelayakan usaha untuk PT PLN (Persero) untuk dapat membeli listrik yang bersumber dari panas bumi; dan (c) implementasi *feed-in tariff* panas bumi.

Sementara untuk proses serah terima aset dapat diselesaikan dengan mempercepat proses serah terima aset kepada pengelola dan perjanjian jual beli gas. Harga BBG yang saat ini masih relatif rendah (*affordable*) telah menyebabkan badan usaha belum tertarik untuk melakukan investasi SPBG. Untuk itu, guna meningkatkan minat investasi badan usaha, akan diterapkan paket insentif BBG, baik berupa insentif fiskal kendaraan BBG, pengadaan peralatan *converter kit*, dan infrastruktur pendukungnya maupun keringanan pajak penjualan BBG.

IV.9 Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana

Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kestabilan lingkungan

Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diarahkan pada: (a) antisipasi dampak dan pengendalian laju perubahan iklim; (b) upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; (c) pengembangan sistem peringatan dini; dan (d) penanggulangan bencana. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran utama, yaitu Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup yang disertai dengan penguasaan dan pengelolaan risiko bencana. Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, sedangkan penguasaan dan pengelolaan risiko bencana dilakukan guna mengantisipasi perubahan iklim.

Secara umum sasaran pembangunan tersebut telah tercapai (lihat Tabel IV.15). Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan semakin meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, yakni dari 66 % pada periode 2010-2011 menjadi 69% pada periode 2011-2012. Ini merupakan wujud dari upaya perbaikan kondisi lingkungan dan penyeimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan ditujukan untuk menurunkan beban pencemaran dan mereduksi Gas Rumah Kaca (GRK) guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan kondisi lingkungan yang ada saat ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang diantaranya adalah pengendalian terhadap perubahan iklim, pengendalian kerusakan lingkungan, peningkatan sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana.

Tabel IV.15 Capaian Prioritas Nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas (ribu)	Ha (ribu)	703,05	1.600	229,22	742,36	1.251,88	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa (ribu)	Ha (ribu)	78,24	2.500	528,51	1.036,68	1.537,01	
Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku 105ndustry pertukangan (ribu)	Ha (ribu)	n.a	250	51,51	102,07	158,42	
Jumlah industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri dan manufaktur yang dipantau dan diawasi (industri)	Jumlah industri	627	680	705	996	1312	
Persentase capaian indeks kualitas Lingkungan Hidup Nasional (terhadap IKLH maksimal = 100%)	Persentase (%)	59,79	70	61,07	60,25	n.a	
Penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20 % per tahun dari rerata 2005-2009	%	58.890 titik (rerata 2005-2009)	67,2	83,42	51,65	45,11	
Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS)	unit	n.a	108	22	58	95	
Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami	%	75	90	90	100	100	

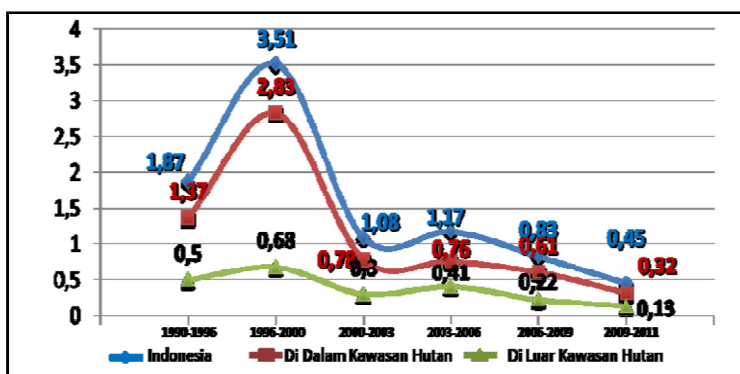
Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim	%	45	80	50	66,67	78,78	
Persentase pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	%	75	90	39	68	80	
Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan (Prov/Kota)	lokasi	5	77	16	265	160	
Terbentuknya satuan reaksi cepat/SRC-PB	lokasi	7	2	2	2	2	
Keterangan:							
 Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Pengendalian Perubahan Iklim

Dalam rangka pengendalian terhadap perubahan iklim, sejak tahun 2010 disusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK)

Dalam rangka pengendalian terhadap perubahan iklim telah dilakukan upaya nasional penurunan emisi gas rumah kaca melalui penerbitan Perpres No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71/2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Untuk penyusunan rencana aksi di daerah, telah diterbitkan pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) melalui Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Dalam Negeri No. 0005/M.PPN/01/2012, No. 01/MENLH/01/2012 dan No. 660/95/SJ/2012. Hingga Desember 2012 telah berhasil disusun RAD GRK untuk 29 provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Gubernur.

Dalam kaitan di atas, telah dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (RHL) pada DAS prioritas akan tercapai secara kumulatif seluas 1.251.883 ha di akhir tahun 2012. Selain itu, sampai dengan akhir tahun 2012, penetapan areal kerja HKm dan Hutan Desa diharapkan mencapai 1.537.005 ha, dimana capaian tersebut melebihi target RPJMN 2010-2014 yang seluas 500.000 ha per tahunnya. Untuk mendorong rehabilitasi di luar kawasan hutan, pada tahun 2010 dapat memfasilitasi huta rakyat kemitraan mencapai seluas 51.506 ha, 50.651 ha pada tahun 2011, dan tahun 2012 diharapkan dapat mencapai seluas 56.354 ha. Selanjutnya, laju deforestasi dapat dikendalikan dengan terjadinya penurunan laju deforestasi dari sebesar 830.000 ha per tahun (periode 2006-2009) menjadi sebesar 450.000 per tahun (periode 2009-2011). Laju deforestasi tersebut terdiri dari 320.000 ha di kawasan hutan dan 130.000 ha di luar kawasan hutan (Gambar IV.15).



Gambar IV.15 Laju Deforestasi Indonesia (Juta Ha Rata-rata Per Periode) Tahun 1990 - 2011

Sumber: Kementerian Kehutanan, 2012

Untuk pengendalian kerusakan lingkungan, telah dilakukan pencegahan atau pengurangan pencemaran melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dengan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menurunkan beban pencemarannya. Penurunan tingkat pencemaran atau beban pencemaran air telah dicapai lebih dari 11 ton BOD₅[#] perhari, dan 132 juta ton ekuivalen CO serta penurunan potensi pencemaran limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dengan pengelolaan 94,5 juta ton limbah B3 pertahun.

Penurunan tingkat pencemaran atau beban pencemaran air telah mencapai lebih dari 11 ton BOD₅ per hari

Selain itu, berbagai upaya pengendalian kebakaran hutan terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dilakukan dengan mengurangi jumlah *hotspot* (titik api).

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati telah dikembangkan: (a) 20 Balai Kliring Keanekaragaman Hayati; (b) 17 *database* Profil Keanekaragaman Hayati provinsi dan kabupaten; (c) pembangunan 8 Taman Keanekaragaman Hayati di wilayah provinsi; dan (d) Naskah Akademis RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik. Hingga tahun 2011, telah dilakukan Gerakan Penyelamatan Ekosistem Danau Rawa Pening dan Danau Maninjau sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bali tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan. Dalam rangka Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) pada tahun 2011 telah diberikan penghargaan Trophy Raksaniyata kepada 5 (lima) kabupaten yaitu: Kolaka (Sulawesi Tenggara), Deli Serdang (Sumatera utara), Buleleng (Bali), Lampung Barat (Lampung), dan Paser (Kalimantan Timur) sebagai apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang dinilai mampu mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan berfungsi lindung.

Informasi prediksi cuaca ekstrim semakin cepat dan menyebar luas

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi cuaca telah dilakukan pemasangan *Automatic Weather Station* (AWS) di 167 lokasi, sehingga informasi terjadinya cuaca ekstrim dapat diprediksi 3 jam sebelum kejadian pada tahun 2010, lebih awal 30 menit dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, cakupan pelayanan peringatan dini diperluas ke tingkat kabupaten di 23 provinsi melalui media elektronik dan cetak lokal, dengan tingkat akurasi sebesar 75 % dan frekuensi layanan ke masyarakat mencapai 365 kali prakiraan cuaca harian, sesuai target yang direncanakan. Untuk layanan cuaca penerbangan secara *on line* dan *real time*, pada saat lepas landas dan pendaratan, hingga pertengahan tahun 2012 telah dibangun *Automatic Weather Observation System* (AWOS) di ujung *runway* di 13 bandara.

Informasi mengenai kegempaan menjadi lebih cepat, yakni kurang dari 5 menit setelah gempa

Informasi tentang Gempa Bumi dan Tsunami terus ditingkatkan kecepatan pengolahan dan penyebaran informasinya. Setelah dibangun dan beroperasinya sistem *Tsunami Early Warning System* (TEWS) pada tahun 2010, waktu untuk mengolah data dan menyebarkan informasi kepada masyarakat dapat dipercepat menjadi 5 menit setelah gempa terjadi, sebelum ada sistem TEWS

memerlukan waktu 30 menit sampai 2 jam. Tahun 2011 telah dapat dipercepat lagi menjadi kurang dari 5 menit serta ditayangkan melalui televisi dan pesan pendek (sms) kepada Presiden, Kepolisian, Pemda, BNPB dan perorangan lainnya yang terdaftar di BMKG. Pada saat ini, sedang dikembangkan informasi atau peta tingkat kerusakan akibat terjadinya gempa, dengan dukungan 160 jaringan *broadband* dengan *tide gauge* dan GPS, serta pengadaan 237 unit akselerograf dari target 500 unit pada tahun 2014 dan 38 lokasi *intensity meter* dari target 100 lokasi.

Untuk pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG, telah disusun peta kesesuaian agroklimat untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan di tiga wilayah, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Informasi prakiraan rawan kekeringan telah dibuat pula untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Banten. Hingga tahun 2011, atlas periode ulang curah hujan maksimum telah disusun untuk 58 kab/kota, dimana informasi yang ada dapat digunakan untuk perkiraan daerah berpotensi banjir, perhitungan pengendalian banjir dan rancangan drainase. Sejalan dengan perubahan iklim, telah dilakukan penambahan wilayah terlayani informasi iklim, dengan dibangunnya 22 stasiun klimatologi per provinsi di seluruh provinsi di Indonesia. Cara penyebaran informasi iklim disebarakan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) untuk petani di 11 provinsi. Pada tahun 2011, provinsi yang terlayani informasi dini kualitas udara untuk antisipasi kebakaran hutan adalah Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Selain itu, dilakukan pembuatan Peta Kerentanan Perubahan Iklim di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana telah disusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2010-2014, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010-2012, serta Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami dengan fokus kawasan *megathrust* Mentawai, Selat Sunda, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali – Nusa Tenggara dan kawasan utara Papua. Penanggulangan bencana, hingga pertengahan tahun 2012 telah dilakukan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana pencarian, pertolongan dan penyelamatan (SAR), penyelenggaraan diklat dan pemasyarakatan SAR, penyelenggaraan operasi dan latihan SAR, dan pengelolaan

komunikasi SAR, diklat teknis kebencanaan, dukungan penyusunan rencana kontijensi, dan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di 33 Provinsi serta identifikasi kebutuhan dan pengadaan logistik dan peralatan bagi daerah rawan bencana.

Untuk penguatan kapasitas penanganan bencana, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 33 Provinsi yang mencapai 366 BPBD tingkat kab/kota dengan prioritas pada kab/kota rawan bencana, penguatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SCR-PB) di Kawasan barat dan Timur dengan peralatan yang memadai dan keterlibatan TNI/Polri, peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana melalui gladi gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor, serta pelibatan masyarakat melalui relawan bencana.

Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, upaya percepatan pemulihan diprioritaskan pada wilayah pascabencana di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, Wasior, Kepulauan Mentawai dan Merapi. Selain itu telah dilakukan verifikasi lebih dari 120 kab/kota yang mengusulkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Permasalahan dan Kendala

Belum tersedianya masterplan dan road map pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan terintegrasi dengan bidang pembangunan ekonomi lainnya merupakan hambatan nyata dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah: (1) aktivitas deforestasi dan degradasi hutan disebabkan oleh tingginya konflik kawasan akibat belum selesainya tata batas kawasan hutan; (2) realisasi hasil penanaman RHL tidak tampak secara nyata akibat belum adanya pengelola kawasan hutan di tingkat tapak yang dapat menjamin hasil RHL; (3) belum adanya *baseline* penurunan emisi di masing-masing sektor dan daerah; (4) masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim, terutama untuk aksi adaptasi perubahan iklim; dan (5) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, target yang ada belum sepenuhnya tercapai karena: (1) indikator ukuran kualitas lingkungan hidup (indeks komposit)

belum lengkap, (2) upaya pengelolaan lingkungan hidup di daerah masih belum optimal, dan (3) banyak kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di luar kawasan hutan.

Dalam rangka pembangunan sistem peringatan dini masih dihadapi keterbatasan jaringan komunikasi untuk mendiseminasikan peringatan dini cuaca ekstrim sampai di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, dan masih banyaknya penggunaan peralatan konvensional dan manual. Dalam rangka penanggulangan bencana, permasalahan yang masih dihadapi kurangnya media komunikasi serta sarana dan prasarana yang efektif dalam penyebarluasan informasi pengurangan risiko bencana, serta keterbatasan, kapasitas lembaga serta alokasi pendanaan di daerah.

Langkah Tindak Lanjut

Permasalahan deforestasi dan degradasi hutan, diselesaikan dengan memperluas tata batas kawasan hutan. Pendanaan guna operasionalisasi KPH perlu disiapkan untuk RHL. Percepatan operasionalisasi KPH ini akan didukung dengan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kehutanan.

Berkaitan dengan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan aksi adaptasi perubahan iklim, maka koordinasi dan peningkatan kapasitas penurunan emisi baik di tingkat pusat maupun di daerah akan terus dilakukan, baik dalam penyusunan *baseline* tingkat emisi dan penurunan emisi maupun monitoring dan evaluasinya. Untuk melengkapi kebijakan penanganan perubahan iklim, sedang disusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) untuk membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.

Permasalahan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akan diatasi dengan memperkuat koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor *eco-region* yang dibangun sesuai dengan mandat UU No. 32/2009 dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di tingkat provinsi dan kab/kota. Berbagai penghargaan untuk pihak-pihak yang sudah melakukan langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan masih dilanjutkan. Untuk menyelesaikan persoalan kebakaran hutan di luar kawasan hutan, akan dilakukan pelatihan SMART (Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis), Rapat Koordinasi Teknis

Pengendalian Kebakaran Hutan, dan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk mendorong partisipasi masyarakat pada provinsi yang rawan kebakaran hutan.

Adapun permasalahan penanggulangan bencana akan diatasi dengan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah, pengintegrasian kebijakan pengurangan resiko bencana di pusat dan daerah, penguatan kapasitas masyarakat dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, koordinasi dan keterpaduan penanganan kedaruratan dan korban di wilayah pascabencana, serta dukungan penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

IV.10 PRIORITAS NASIONAL 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCAKONFLIK

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar, sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya. Sedangkan arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Secara umum pencapaian sasaran Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari indikator utama prioritas ini, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal dan indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal yang masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2014. Namun demikian target pengentasan daerah tertinggal yang sedikitnya mencapai 50 Kabupaten pada 2014,

diperkirakan akan tercapai, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4.16 berikut :

**Tabel IV.16 Capaian Sasaran Prioritas Nasional
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik**

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	%	5,84	7,1	6,00	6,08	6,16	
Tingkat kemiskinan di daerah tertinggal	%	20,19	14,2	19,86	19,15	18,31	
Indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal		65,77	72,2	66,51	66,99	67,48	
Jumlah kabupaten daerah tertinggal	Kabupaten	199	133	183	-	142 ¹⁾	
Sumber: BPS (diolah) Keterangan: 1) Sesuai RPJMN 2010-2014 target pengentasan daerah tertinggal sedikitnya 50 Kabupaten. Berdasarkan estimasi daerah tertinggal yang terentaskan pada 2012 adalah 41 kabupaten  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

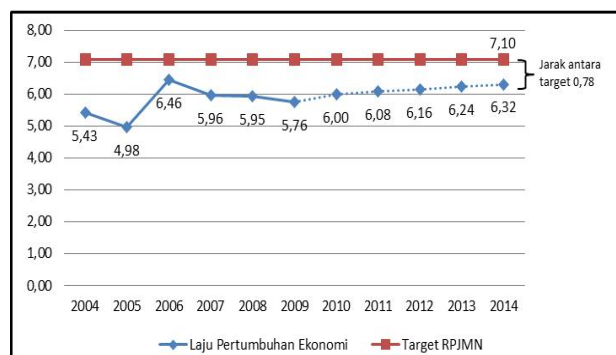
Pengembangan Perekonomian di Daerah Tertinggal

Pengembangan perekonomian di daerah tertinggal tertinggal, terluar dan pascakonflik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di daerah tertinggal. Berdasarkan proyeksi dengan menggunakan data aktual hingga tahun 2010, perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal tahun 2012 sebesar 6,16 %. Pencapaian tersebut masih dibawah sasaran pembangunan pada tahun 2014 sebesar 7,1 %, oleh karena

itu diperlukan kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan kurangnya dukungan infrastruktur menghambat pertumbuhan daerah tertinggal

Hasil estimasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi per kabupaten pada 183 kabupaten tertinggal menunjukkan bahwa terdapat 26,23% (48 kabupaten) telah sesuai dengan sasaran RPJMN, sebanyak 47,54% (87 kabupaten) memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran, dan 26,23% (48 kabupaten) diperkirakan tidak dapat mencapai sasaran. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi di daerah tertinggal adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal dan kurangnya dukungan Infrastruktur kawasan pendukung kegiatan ekonomi (terutama infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi). Perkiraan pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada tahun 2014 dengan menggunakan ekstrapolasi dari data aktual adalah sebesar 6,32 % (target 2014 sebesar 7,1 %).



Gambar IV.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Daerah Tertinggal

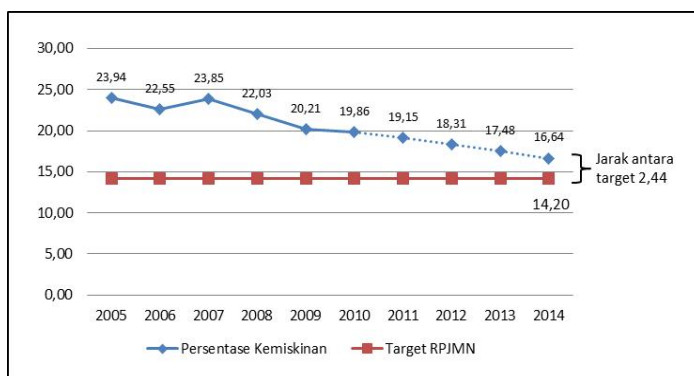
Pengurangan Kemiskinan Daerah Tertinggal

Jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan, meskipun belum meliputi seluruh Kabupaten

Pengurangan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan menurun. Perkiraan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2012 sebesar 18,31 %. Pencapaian tersebut masih dibawah sasaran pembangunan pada tahun 2014. Meskipun demikian, hasil ramalan terhadap estimasi pencapaian target pengurangan kemiskinan per kabupaten untuk 183 kabupaten tertinggal menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten 57,38 % (105 kabupaten) sudah berada diatas sasaran nasional, 34,97 % (64 kabupaten) memerlukan

kerja keras untuk mencapai sasaran nasional, dan 7,65 % (14 kabupaten) diperkirakan tidak dapat mencapai sasaran nasional. Sebagian besar kabupaten yang tidak dapat mencapai target pengurangan kemiskinan berlokasi di wilayah timur yaitu Pulau Nusa Tenggara dan Papua. Penyebab belum tercapainya sasaran pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal karena program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik ketertinggalan daerah. Faktor lain yang menjadi penghambat belum tercapainya target pengurangan kemiskinan adalah masih belum dikembangkannya kelembagaan permodalan yang dapat memberikan dukungan bagi masyarakat miskin di daerah tertinggal untuk mengembangkan usahanya, dan rendahnya sarana dan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat distribusi menuju pusat-pusat pertumbuhan. Perkiraan berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2014 sebesar 16,64% (target 2014 sebesar 14,2%).

Program-program penanggulangan kemiskinan yang ada masih berjalan secara parsial, dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik ketertinggalan daerah.



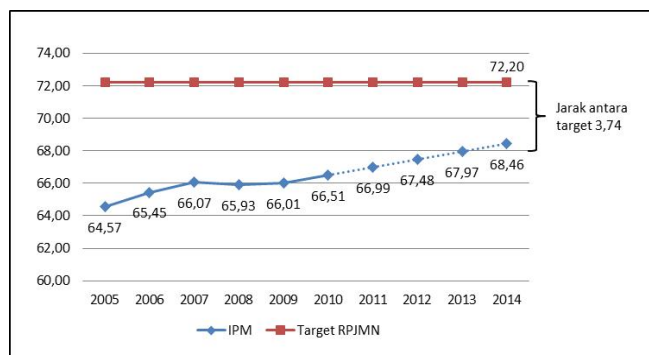
Gambar IV.17 Perkembangan Rata-Rata Persentase Penduduk Miskin Di Daerah Tertinggal

Peningkatan Kualitas SDM Daerah Tertinggal

Peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal telah menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan proyeksi dengan menggunakan data aktual hingga tahun 2010, IPM daerah tertinggal tahun 2012 diperkirakan mencapai 67,48, perkiraan tersebut meningkat dibanding IPM tahun 2011

Rendahnya kualitas SDM di daerah tertinggal disebabkan oleh permasalahan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar

yang mencapai 66,57. Pencapaian tersebut masih dibawah sasaran pembangunan pada tahun 2014, oleh karena itu diperlukan kerja keras untuk mencapai target peningkatan kualitas SDM yang diharapkan. Meskipun demikian, hasil ramalan terhadap estimasi pencapaian target peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal per kabupaten untuk 183 kabupaten tertinggal menunjukkan bahwa 17,5 % (32 kabupaten) sudah diatas sasaran nasional, 72,7 % (133 kabupaten) memerlukan kerja keras untuk mencapai sasaran nasional, dan 9,8 % (18 kabupaten) diperkirakan tidak dapat mencapai sasaran nasional. Hal tersebut menunjukkan terdapat ketimpangan distribusi IPM yang sangat besar antar kabupaten. Kabupaten yang masuk dalam kategori tidak dapat mencapai sasaran nasional berada di Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT. Sedangkan mayoritas daerah tertinggal masuk dalam kategori memerlukan kerja keras. Penyebab belum tercapainya sasaran peningkatan kualitas SDM di daerah tertinggal adalah karena masih rendahnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, dan perbatasan. Minimnya akses terhadap pelayanan dasar serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya di daerah terpencil untuk hidup sehat dan bersekolah. Perkiraan peningkatan IPM di daerah tertinggal tahun 2014 sebesar 68,46 (target 2014 sebesar 72,2). Oleh karena itu diperlukan pemihakan yang lebih besar terhadap daerah tertinggal agar dapat mencapai target pembangunan daerah tertinggal tahun 2014 sesuai dengan RPJMN 2010-2014.



Gambar IV.18 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Tertinggal

9 Kebijakan Khusus untuk Daerah tertinggal, Terluar, dan Pascakonflik, Termasuk Kebijakan untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat

Untuk mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terluar dan pascakonflik, pemerintah melaksanakan 9 kebijakan khusus. 1 (satu) kebijakan ditujukan khusus untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Hingga pertengahan 2012, pemerintah telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana, pendayagunaan pulau-pulau kecil, peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal, dan perbatasan. Capaian kebijakan tersebut antara lain: (1) terbangunnya permukiman transmigrasi untuk 7.000 KK; (2) terbangunnya jalan sepanjang 365 km dan jembatan sepanjang 699,80 M di wilayah perbatasan, wilayah terluar dan terdepan; (3) tersedianya pembangunan 12 dermaga penyeberangan dan beberapa unit dermaga lain; (4) Pengadaan 139 rute angkutan udara perintis; (5) tersedianya jasa akses layanan komunikasi dan informatika yang mencakup 30.441 Desa Berdering atau 92 % dari target dan 6.694 desa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) atau 116,5 % dari target; (6) teridentifikasi dan terpetakannya potensi 39 pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar; (7) terfasilitasinya penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (20 pulau).

Berbagai program khusus telah dilaksanakan untuk Papua dan Papua Barat

Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat pemerintah telah melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar melalui: (1) penanganan 4 ruas jalan prioritas menembus pegunungan tengah + 4 ruas jalan tambahan; (2) penanganan 2 ruas jalan prioritas + 2 ruas jalan tambahan di Papua Barat; (3) pembangunan 12 unit PLTS dan 1 PLTMH; Pemihakan terhadap putra/putri asli Papua melalui: (a) Akademi TNI dan Akademi Kepolisian, diterima 16 orang siswa; (b) Anggota TNI, diterima 66 orang; (c) Anggota POLRI, diterima 757 orang, dll, (d) pemihakan kepada pengusaha asli Papua melalui penyiapan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Papua dan Papua Barat (dalam proses di Setkab) dan Pengembangan ekonomi melalui penyediaan sapi di kawasan peternakan terpadu di Bomberai dan Pembinaan Industri pengolahan sagu rakyat.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah telah meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dengan membangun 24 unit Rumah Sakit Bergerak dan 86 unit Puskesmas Rawat Inap. Khusus untuk Papua dan Papua Barat, telah ditambah 48 dokter spesialis di 19 Kab, 197 PTT dokter di 34 Kab, 19 dokter gigi di 14 Kab, 89 Bidan PTT di 12 Kab dan Pembangunan Puskesmas di 13 kabupaten. Di bidang pendidikan telah disalurkan tunjangan khusus untuk 53.954 guru jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah terpencil serta 3.790 orang guru madrasah di daerah terpencil. Khusus untuk Papua dan Papua Barat, di tahun 2012, terjadi peningkatan pemberian pelayanan pendidikan gratis melalui BOS SD bagi 556.682 siswa (2011: 531.117 siswa), BOS SMP bagi 144.688 siswa (2011: 141.597 siswa). Sedangkan rintisan BOS SMA bagi 72.163 siswa, dan Rintisan BOS SMK bagi 37.633 siswa baru diberikan di tahun 2012. Selanjutnya, beasiswa bagi 749 mahasiswa Papua dan Papua Barat di 32 PTN seluruh Indonesia merupakan program afirmasi yang belum pernah diberlakukan sebelumnya.

Pengamanan Wilayah dan Sumber Daya Kelautan

Luasnya wilayah pengawasan, minimnya ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pengawasan menjadi kendala pengamanan wilayah

Dalam rangka meningkatkan pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan maka perlu didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pengamanan dan pengawasan yang handal. Dalam rangka meningkatkan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Bagian Barat dan Bagian Timur yang bebas *IUU Fishing*, capaian hingga Juni 2012 telah dilaksanakan pengawasan mencapai 6 WPP (seharusnya 10 WPP) di Bagian Barat dan 12 untuk WPP (seharusnya 18 WPP) di Bagian Timur. Sementara itu, target hingga 2014 adalah 20 WPP di Bagian Barat dan 30 WPP di bagian Timur. Kendala yang dihadapi adalah karena ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pengawasan yang minim dan kurang memadai serta luasnya wilayah pengawasan. Capaian lainnya tersedianya sarana dan prasarana perbatasan sebanyak 206 pos keamanan, target hingga 2014 adalah 224 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan. Target tersebut diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2014, dengan pertimbangan adanya kebijakan percepatan peningkatan

sarana prasarana pertahanan di kawasan perbatasan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan telah dilaksanakan penggelaran satuan TNI di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan RI – Malaysia, RI – Philipina, RI – Timor Leste, dan RI – Papua Nugini. Selain itu, telah dilaksanakan pula operasi bakti TNI secara terpilih di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Keutuhan Wilayah Republik Indonesia

Untuk mewujudkan keutuhan wilayah RI, pemerintah telah memperkuat diplomasi perbatasan melalui perundingan terkait dengan pembuatan perjanjian bilateral dan trilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau selama 2,5 tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan *Border Diplomacy*. Kemajuan signifikan tersebut ditandai dengan telah dilakukannya sebanyak 119 perundingan dari total 60 target perundingan (12 perundingan setiap tahun) yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014. Dengan melihat pada target tersebut, maka target 5 tahun RPJMN telah terlampaui pada masa 2,5 tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010-2014 disertai dengan upaya percepatan penyelesaian delimitasi batas pada segmen-segmen batas yang belum disepakati, telah tercapai setiap tahunnya sesuai target, dan diperkirakan target 2014 dapat dicapai. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain: (1) tersusunnya peta batas wilayah negara di darat, yaitu Peta *Joint Mapping* RI-PNG skala 1 : 50.000 sebanyak 27 nomor lembar peta (NLP) atau 100 % dari 27 NLP yang direncanakan; (2) Peta *Joint Mapping* RI-Malaysia skala 1 : 50.000 sebanyak 45 NLP atau 100 % dari 45 NLP yang direncanakan ; (3) tersusunnya peta batas wilayah negara di laut, yaitu Peta Zona Ekonomi Eksklusif skala 1:1.000.000 (telah selesai 100 %), Peta Garis Pangkal skala 1:200.000 (telah selesai 100 %), Peta NKRI skala 1:5.000.000 sebanyak 1 NLP, Peta pulau-pulau sebanyak 94 pulau atau 82,5 % dari 114 pulau-pulau terluar yang direncanakan; (4) terkelolanya basis data dan sistem informasi batas wilayah negara dan

daerah. Capaian pembangunan lainnya adalah tersedianya data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) sebanyak 184 SP.

Permasalahan dan Kendala

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan pascakonflik antara lain: (1) adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional; (2) masih minimnya ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan; (3) belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal; (4) belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal dan terluar/terdepan; (5) Masih lemahnya koordinasi antar pelaku pembangunan, dan (6) terbatasnya sarana dan prasarana dasar wilayah; (7) belum efektifnya pemanfaatan Dana Otonomi khusus; (8) belum optimalnya perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program khusus dan alokasi pendanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan; (9) adanya perbedaan pandangan mendasar antara Indonesia dan negara tetangga mengenai batas kedua Negara; (10) belum terpadunya antar anggota tim delegasi dalam pelaksana diplomasi perundingan perbatasan.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: (1) meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan termasuk fasilitasi kegiatan stimulan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik melalui optimalisasi peran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maupun Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; (2) melakukan pengembangan ekonomi lokal secara terintegrasi dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang memadai dan peningkatan kerjasama antar daerah; (3) mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi; (4) pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, sanitasi dan

lain sebagainya; dan (5) membentuk sekretariat bersama diplomasi perbatasan untuk mengoptimalkan keterpaduan antar anggota delegasi tim perundingan dalam rangka mempercepat penyelesaian delimitasi batas negara.

IV.11 PRIORITAS NASIONAL 11: KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

Pengembangan dan perlindungan terhadap kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya diperlukan untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa. Hal ini harus didukung dan disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim kepulauan. Maka, untuk mencapai hal-hal tersebut disusunlah arah Kebijakan prioritas pembangunan di bidang kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, yaitu: (1) meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, (2) mendorong berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap keberagaman seni dan budaya, serta (3) menguatkan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis. Sementara sasaran pembangunannya adalah: (1) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan; (2) penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; (3) penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; dan (4) terselenggaranya paket riset insentif SINAS, yang terdiri atas insentif riset dasar, insentif riset terapan, insentif difusi iptek dan insentif peningkatan kapasitas iptek.

Pembangunan prioritas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi hingga bulan Juni 2012 telah selaras dengan sasaran pembangunan RPJMN 2010-2014, bahkan capaian beberapa indikator bidang tersebut telah melampaui target sasaran RPJMN 2010-2014, seperti terlihat pada Tabel IV.17.

Arah kebijakan untuk mendukung pengembangan dan perlindungan terhadap kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya difokuskan pada bidang Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

Pengelolaan Cagar Budaya, Revitalisasi Museum dan Perpustakaan

Pencapaian untuk menjaga cagar budaya dan perpustakaan di Indonesia dilakukan secara efektif dengan meningkatkan kerjasama antar satuan kerja daerah dan adanya dukungan dari pemerintah setempat.

Dalam upaya menjaga cagar budaya dan ilmu pengetahuan sejumlah pencapaian pelaksanaan kegiatan telah diraih. Beberapa capaian yang telah berhasil diraih adalah : (1) meningkatnya kualitas pengelolaan terpadu cagar budaya terutama di kawasan Candi Borobudur, Candi Prambanan dan kawasan situs manusia purba Sangiran, termasuk penetapan kawasan lansekap budaya Bali sebagai warisan budaya dunia; (2) meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum di seluruh provinsi. Pencapaian ini dapat diraih melalui peningkatan kerjasama SKPD yang menangani kebudayaan dengan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) museum dalam melaksanakan revitalisasi museum. Hal ini terbukti efektif, sehingga pada tahun 2010 telah dilaksanakan revitalisasi 6 museum, dan kembali meningkat pada tahun 2011, dengan telah dilaksanakannya revitalisasi di 30 museum yang berbeda; (3) meningkatnya pelayanan di 33 perpustakaan provinsi, 350 perpustakaan kab/kota. Selain itu adanya pengembangan perpustakaan desa/kelurahan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang IT di daerah. Proses pengembangan ini didukung pula dengan peningkatan komitmen pemerintah daerah.

**Tabel IV.17 Capaian Prioritas Nasional
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi**

Indikator	Satuan	Status awal (2009) ¹⁾	Target (2014)	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012 ²⁾	
PERAWATAN: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011							
Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya	Kesepakatan/ Peraturan	n.a	3	1	2	3	
Jumlah museum yang direvitalisasi	Unit Museum	n.a	30	6	30	6	
Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (e-library)	Unit Perpustakaan	n.a	33	33	33	33	

Indikator	Satuan	Status awal (2009) ¹⁾	Target (2014)	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012 ²⁾	
SARANA: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012							
Jumlah daerah yang mendapatkan sarana seni budaya. - Provinsi - Kab/Kota	- Provi nsi - Kab/K ota	n.a n.a	14 238	5 15	14 247	25 399	
PENCIPTAAN: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas							
Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan	Peneliti an	n.a	22	13	21	n.a ³⁾	
INOVASI TEKNOLOGI: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda							
Jumlah paket riset dasar dan terapan	Paket	n.a	35 60	54 144	38 155	n.a ³⁾	
Jumlah paket peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi	Paket	n.a	100	109	78	n.a ³⁾	
Keterangan: ¹⁾ Kegiatan baru ada pada tahun 2010 ²⁾ Untuk capaian tahun 2012 adalah hingga bulan Juni 2012 ³⁾ Data capaian baru dapat diperoleh pada akhir tahun 2012							
 Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Pengembangan, Pendalaman dan Pagelaran Seni Budaya

Dalam mendukung pengembangan, pendalaman pagelaran seni budaya, pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah diraih adalah meningkatnya apresiasi dan kreativitas pelaku seni melalui penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di 14 provinsi dan 247 kab/kota pada tahun 2011. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2010 yang hanya dilakukan di 5 provinsi dan 15 kab/kota.

Penelitian, Penciptaan dan Inovasi Teknologi

Kegiatan yang mendukung pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi teknologi telah meraih pencapaian dan peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dan beberapa diantaranya telah memenuhi target yang ditetapkan di RPJMN 2010-2014.

Pencapaian pada PN di bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, salah satunya didukung oleh pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi serta memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan terlaksananya 21 penelitian di bidang kebudayaan pada tahun 2011. Tiga judul penelitian yang dilakukan diantaranya merupakan penelitian usulan nominasi warisan budaya tak benda (*Intangible Cultural Heritage-ICH*) UNESCO, yaitu : Noken Kerajinan Tangan Masyarakat Papua untuk kategori *Urgent Safeguarding List of ICH*, Tari Tradisi Bali untuk kategori *Representative List of ICH*, dan Penciptaan Ruang Budaya untuk Pelindungan, Pengembangan, dan Pendidikan Warisan Budaya di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) untuk kategori *Best Practices of ICH*. Jumlah penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut lebih banyak dari jumlah penelitian pada tahun 2010 (13 penelitian). Berbagai capaian tersebut telah sesuai dengan target dan beberapa kegiatan melampaui target yang ditetapkan pada RPJMN 2014.

Pelaksanaan riset diberbagai bidang dan peningkatan kapasitas -serta kreativitas pemuda telah banyak dilakukan untuk mendukung peningkatan dan pengelolaan Sumber Daya di Indonesia.

Pembangunan bidang inovasi teknologi, dicapai melalui peningkatan pengelolaan sumber daya maritim untuk menuju ketahanan energi, pangan, danantisipasi perubahan iklim serta pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda. Dalam bentuk nyata, jumlah riset terapan pada tahun 2011 telah mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 155 paket lebih banyak dari jumlah riset terapan pada tahun 2010 sebanyak 144 paket. Angka ini memperlihatkan bahwa total jumlah riset terapan meningkat hampir lima kali lipat dari target yang ditetapkan (60 paket riset). Namun, penurunan terjadi pada pelaksanaan 38 paket riset dasar pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 54 paket riset dasar. Pada riset insentif, tahun 2011 telah dilaksanakan 78 paket riset insentif dan pada tahun 2010 sebanyak 109 paket, meskipun pencapaian tahun 2011 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pelaksanaan paket riset insentif telah melampaui target yang ditetapkan RPJMN 2010-2014. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kreativitas pemuda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, dan industri kreatif telah dilakukan fasilitasi

peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq, seni, budaya, dan industri kreatif bagi pemuda kader.

Permasalahan dan Kendala

Meskipun sebagian besar sasaran dan target RPJMN 2010-2014 telah tercapai, namun masih terdapat permasalahan umum yang dihadapi pada pembangunan bidang kebudayaan yang perlu diupayakan pemecahannya yaitu: (1) penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan terpadu cagar budaya sesuai dengan UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, mengingat keberadaan situs/kawasan cagar budaya yang tersebar secara luas di seluruh wilayah Indonesia; (2) peningkatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan secara berkelanjutan, sehubungan dengan pengelolaan cagar budaya yang bersifat lintas sektor, program dan wilayah; (3) peningkatan kualitas pelayanan museum di seluruh provinsi; (4) peningkatan pemahaman dan apresiasi terhadap seni dan budaya disertai dengan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); dan (5) peningkatan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan sesuai dengan dinamika perkembangan kebudayaan.

Sedangkan dalam hal inovasi teknologi, tantangan yang masih ditemui diantaranya adalah: (1) peningkatan sinergi kegiatan inovasi iptek (integrasi program, koordinasi, kolaborasi, kerjasama, dan harmonisasi kegiatan) diantara sesama pelaku riset iptek; (2) pengembangan sistem intermediasi yang efektif menghubungkan sisi penyedia dan pengguna teknologi, mengakibatkan rendahnya kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru hasil invensi teknologi yang tersedia; dan (3) peningkatan apresiasi, kreasi dan budaya iptek di masyarakat.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kebudayaan adalah: (1) meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya secara terpadu, berkualitas dan berkelanjutan; (2) meningkatkan manajemen pelayanan dan pengelolaan museum, termasuk naskah kuno; (3) menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi; (4) menyediakan sarana

untuk pengembangan seni budaya; (5) melakukan penelitian dan pengembangan kebudayaan serta arkeologi; (6) peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan budaya seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, dan berbagai industri kreatif berbasis budaya.

Di bidang inovasi teknologi, paket riset perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kualitas riset dilakukan dengan menerapkan sistem seleksi yang melibatkan para pakar sesuai dengan bidang penelitian yang diusulkan. Sebagai jaminan kualitas, para peneliti diharuskan mempublikasikan hasilnya di jurnal-jurnal ilmiah internasional, atau sejak dini telah bekerja dengan pihak yang potensial menggunakan hasilnya. Upaya ini perlu didukung oleh kebijakan lain di bidang iptek seperti revitalisasi laboratorium-laboratorium, peningkatan pendidikan peneliti hingga jenjang doktoral, serta dorongan kepada pihak swasta untuk bekerja sama dengan para peneliti di dalam negeri. Dengan demikian, dalam waktu dekat perekonomian berbasis pengetahuan dapat tumbuh dan secara nyata meningkatkan daya saing nasional. Upaya lainnya yang perlu dilakukan yaitu mengembangkan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda serta meningkatkan kemampuan iptek mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional antara lain melalui pengkajian dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, seperti dihasilkannya sistem aplikasi perisalah yang mampu membuat notulen rapat. Perisalah ini sudah dipatenkan dan diproduksi (alih teknologi) oleh PT. INTI, serta sudah digunakan oleh Bank Indonesia, Kemenkeu dan lainnya. Demikian pula dengan *e-voting*, yang secara teknis sudah diuji coba di TPS pada pemilukada dalam fungsi mendukung pemungutan suara.

IV. 12 PRIORITAS NASIONAL 12: POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Peningkatan posisi, partisipasi dan prakarsa Indonesia dalam forum Internasional untuk menjaga perdamaian dunia sangat penting dilakukan.

Prioritas Nasional Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mencakup substansi inti penanggulangan terorisme, peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, pembangunan bidang hukum, dan pendayagunaan industri pertahanan. Arah Kebijakan Pembangunan tahun 2010–2014 untuk penanggulangan terorisme ditekankan pada pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur

penanganan terorisme, dan pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan peran Indonesia untuk turut menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia dilakukan antara lain melalui partisipasi aktif dan prakarsa Indonesia dalam mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan melaksanakan kerja sama internasional dalam penanganan senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, dan penanggulangan kejahatan lintas negara. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi Indonesia dalam forum PBB; dan meningkatnya kerjasama multilateral dalam isu perdamaian dunia.

Arah kebijakan pembangunan hukum adalah terwujudnya penegakan hukum, terjaganya ketertiban umum dan tercapainya peningkatan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Saat ini yang menjadi prioritas Pemerintah adalah mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Sasaran *outcome* dalam pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 dengan skor 5.

Salah satu sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan adalah terwujudnya postur dan struktur pertahanan sebesar 25-27,5 % dari kekuatan pokok minimum (*minimum essential force/MEF*) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar, dengan dukungan dari industri pertahanan nasional yang kuat dan handal. Oleh karena itu, pendayagunaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan, melalui penyusunan cetak biru beserta *Road Map*, peningkatan penelitian dan pengembangan, serta dukungan pendanaannya merupakan arah kebijakan yang sangat strategis bagi upaya kemandirian alutsista TNI sekaligus untuk mengurangi ketergantungan alutsista produksi luar negeri.

Rangkuman capaian sasaran pembangunan adalah sebagaimana yang disajikan dalam Tabel IV.18.

Pendayagunaan industri pertahanan nasional merupakan kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap alutsista produksi luar negeri.

Penanggulangan Terorisme

Di bidang penindakan terorisme, secara akumulatif sejak tahun 2000-2012 sebanyak 775 tersangka teroris telah ditangkap, dan 597 orang telah diadili, dengan 586 orang sudah mendapatkan vonis pengadilan, dan diantaranya telah bebas 279 orang. Pada bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi; telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk membuat *Standard Operating Procedures (SOP)* pengawasan terhadap orang, barang, dan lain-lain yang potensial dimanfaatkan kelompok teroris. Selain itu, telah dilakukan pula kegiatan kontra propaganda intelijen terhadap komunitas peretas dunia maya. Koordinasi bersama instansi terkait dilakukan pula dalam menyusun dan merumuskan SOP tentang Sistem Pengamanan terkait pencegahan terorisme pada Bandar Udara, Pelabuhan Laut, Hotel, Mal, dan Obyek Vital. Pada bidang deradikalisasi, telah dibentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) daerah di 15 provinsi yang akan menjadi mitra strategis dan perpanjangan tangan BNPT di daerah.

Berbagai upaya penanggulangan terorisme telah berhasil dilakukan, termasuk penindakan terhadap teroris yang menggunakan *cyber space* untuk menghimpun dana.

Selama beberapa bulan terakhir, telah dilakukan operasi penindakan dalam rangka pencegahan terorisme dengan menggunakan *cyber space* sebagai sarana mencari dana (*financing terrorism*) yang dilakukan oleh beberapa anggota kelompok Hisbah Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) untuk membiayai aktifitas terorisme kelompok ini dengan hasil kejahatan mencapai sekitar Rp. 8 miliar. Dalam operasi yang dilakukan bulan April hingga Mei 2012, berhasil ditangkap 11 anggota kelompok Hisbah dan beberapa aset serta uang yang disita.

Indonesia dipercaya menjadi ketua APEC CTTF, Adviser strategi penanggulangan teroris kawasan ASEAN, dan Chairs Working Group dalam Forum GCTF.

Pada bidang kerjasama internasional dalam memerangi tindak kejahatan terorisme, telah dilakukan kerjasama bilateral dengan Rusia, Srilanka, dan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Aljazair dan Canada. Indonesia dipercaya sebagai *Co-chairs Working Group on Southeast Asia* bersama Australia di forum *Global Counter Terrorism Task Force (GCTF)*, dan Ketua *APEC Counter Terrorism Task Force (CTTF)* periode 2013–2014. Indonesia ditunjuk sebagai adviser dalam kebijakan strategi penanggulangan terorisme di kawasan Regional ASEAN tahun 2011 – 2013. Dengan berbagai pelaksanaan yang telah dilakukan sampai 2012, dan tetap konsisten melaksanakan program pada 2013 dan 2014

serta didukung kerja sama berbagai pihak, keamanan dan ketertiban dari ancaman tindakan terorisme dapat dijaga.

Tabel IV.18 Capaian Sasaran Prioritas Nasional Politik, Hukum dan Keamanan

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Penanggulangan Terorisme							
Jumlah terduga teroris yang ditangkap	orang	501	n.a	148	93	89***)	
Jumlah terduga teroris yang sudah diadili/ di proses pengadilan	orang			388	22	26	
Terlaksananya dukungan operasi penegakan intelijen ¹		n.a	n.a	Terbentuknya Badan Nasional Penanggula ngan Terorisme. Terungkapnya jaringan latihan kelompok teroris di NAD	12 kali kegiatan	Terbentuknya Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) daerah pada 5 provinsi dari 15 provinsi yang direncana-kan	
Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia							
Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional ²	posisi	n.a	n.a	12*	26 *	12 (target 10)*	
Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB ²	prakarsa	n.a	n.a	3*	5*	5 (target 4)	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Pendayagunaan Industri Pertahanan							
Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears ³		n.a	n.a	Surat Men PPN/Ka Bappenas No. 223 perihal PDN TA 2010 Untuk Polri Surat Men PPN/Ka Bappenas No. 223 perihal PDN TA 2010 Untuk Kemhan/T NI	Kepmen PPN/Ka. Bappenas No:Kep.10 /M.PPN/H K/01/2011 ttg DKPDN Tahun 2010 – 2014 Surat Men PPN/Ka. Bappenas No.0065/ M.PPN/03 /2011 Ttg DKPPDN Tahun 2011	Kepmen PPN/Ka Bappenas No:Kep.86 /M.PPN/H K/09/2011 ttg Daftar Kegiatan PDN Tahun 2012	
Tersedianya badan <i>Clearing House</i> lintas bidang dan lintas K/L ⁴		n.a	n.a	Perpres No. 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	n.a	Tersusunnya konsep awal KKIP baru	
Meningkatnya produksi Alutsista Industri darat dalam negeri	%	n.a	17,571	12,65	13,61	15,86	
Pembangunan Bidang Hukum							
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ¹		2.8	5.0	2.8	3.0	32	
% Kesesuaian Ratifikasi UNCAC	%	n.a	80	n.a	n.a	30	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Indeks Sistem Integritas Nasional (SIN)		n.a	5% (kenaikan Indeks)	n.a	n.a	Penyusunan awal <i>baseline</i> SIN	
Indeks Perilaku Anti Korupsi		n.a	n.a	n.a	n.a	Penetapan <i>baseline</i>	
Meningkatnya produksi Alutsista Industri darat dalam negeri	%	n.a	17,571	12,65	13,61	15,86	
Sumber: 1) BNPT, 2) Kemlu, 3) Bappenas, 4) Kemhan  Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian Dunia

Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia semakin nyata dan membuat Indonesia semakin dihargai dan diakui sebagai negara dengan prakarsa dan sikap yang konsisten mereformasi DK PBB. Saat ini, *intermediate approach* yang diusung oleh Indonesia dalam mencegah kebuntuan perundingan reformasi DK PBB telah mendapat perhatian dan dukungan sejumlah negara dari kelompok kunci. Di samping itu, partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN PKO) yang menempatkan Indonesia pada posisi ke- 15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB dengan tujuh misi dan 1,992 personel sepanjang tahun 2012 banyak mendapatkan apresiasi masyarakat internasional dan penting untuk menguatkan postur Indonesia di PBB.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia melalui PBB (reformasi DK PBB, UN PKO), Gerakan Non Blok dan gerakan perdamaian lainnya.

Dalam isu perlucutan senjata dan non-proliferasi khususnya senjata pemusnah massal (nuklir, biologi, dan kimia), dan isu-isu terkait pengaturan senjata konvensional (*arms control*) Indonesia konsisten berperan aktif. Indonesia memimpin perancangan posisi bersama negara-negara Gerakan Non Blok (GNB) mengenai isu-isu perlucutan senjata, serta menjadi juru runding utama mewakili negara-

negara GNB dalam pertemuan untuk membahas traktat internasional tertentu dan berbagai norma internasional baru. Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai pertemuan internasional tentang isu nuklir, senjata biologi, serta perdagangan senjata. Indonesia telah meratifikasi Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Ledak Nuklir/*Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT) pada tahun 2011, dan melakukan sosialisasi dan implementasi berbagai kesepakatan yang telah dicapai di dalam *Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty Review Conference* (NPT RevCon).

Pembangunan Bidang Pemberantasan Korupsi

Skor IPK terus meningkat namun target IPK 5,0 tahun 2014 akan sulit tercapai.

Capaian penting yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah ditetapkannya Perpres No.55/2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Strategi Nasional ini akan menjadi payung untuk seluruh kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya melalui enam strategi utama yaitu: (1) pencegahan; (2) penegakan hukum; (3) harmonisasi peraturan perundang-undangan; (4) kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil Tipikor; (5) pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Melalui keenam strategi tersebut diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat terwujud dengan berdasarkan pada indikator keberhasilan utama yaitu: (1) Indeks Persepsi Korupsi; (2) kesesuaian regulasi dengan UNCAC; dan (3) Indeks Sistem Integritas Nasional. Namun, target mencapai IPK 5,0 pada 2014 (atau skor IPK 50, sesuai revisi metodologi tahun 2012) nampaknya akan sulit dicapai.

Pembangunan Bidang Hukum dan HAM

Di bidang peningkatan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, capaian penting yang telah dilakukan Pemerintah adalah terbitnya beberapa regulasi yang semakin memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM pada masyarakat seperti Perpres No. 23/2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Tahun 2011-2014 dan

ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia RAN HAM di 32 K/L dan ditingkat Provinsi dan Kab/Kota. Selain itu, pemerintah telah menetapkan UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum yang semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum dan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta terlaksananya Strategi Nasional Akses terhadap keadilan melalui penguatan mekanisme pengaduan publik (*public complaint mechanism*) dan peradilan adat sebagai upaya penyelesaian kasus hukum di luar peradilan. Capaian penting lainnya di bidang pembangunan HAM adalah Pemerintah turut serta dalam pelaporan pelaksanaan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women* (CEDAW), turut sertanya Pemerintah Indonesia dalam kegiatan *Universal Periodic Report* kepada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (DHAM PBB), semakin meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Indonesia serta adanya komitmen pemerintah untuk meratifikasi *Optional Protokol Konvensi CEDAW*.

Pendayagunaan Industri Pertahanan

Meskipun berbagai alutsista produksi dalam negeri semakin mewarnai kelengkapan alutsista TNI, namun upaya pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping kemampuan *delivery* belum memadai, riset dan pengembangan yang minim, keterbatasan modal kerja, terkait pula dengan kepercayaan *user* terhadap hasil produksinya. Penetapan Undang-Undang nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan, merupakan tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional, terutama dari aspek penyerapan produk-produknya. Di dalam pasal-pasalnya, undang-undang ini menetapkan bahwa pengadaan alutsista TNI harus mengutamakan produksi dalam negeri. Pengadaan dari luar negeri hanya diperkenankan apabila alutsista belum dapat diproduksi di dalam negeri dan harus mensyaratkan adanya *off set* berupa *transfer of technology*, *joint production*, atau *product license*. Ke depan, penerapan peraturan perundangan secara konsisten akan berdampak pada meningkatnya penyerapan produk industri pertahanan dalam negeri yang pada akhirnya disamping meningkatkan

kemandirian alutsista, berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Permasalahan dan Kendala

Di bidang penanggulangan terorisme, permasalahan yang dihadapi tahun 2012 dan masih akan dihadapi pada tahun 2013 dan 2014 adalah isu radikalisme yang cenderung meningkat, koordinasi antarlembaga yang masih menghadapi kendala, serta undang-undang tentang penanggulangan terorisme yang ada belum efektif untuk diterapkan dalam memberantas tindak kejahatan terorisme.

Dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, secara substantif perjuangan Indonesia untuk mendorong reformasi PBB masih akan terbentur sikap sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait isu *enlargement* (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara geografis) dan *veto power*, sehingga butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melihat hasil nyata dari upaya ini

Permasalahan pokok yang masih dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah masih rendahnya komitmen dan belum meratanya kesepahaman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ditingkat pusat dan daerah. Selain itu, pencapaian sasaran utama dalam pemberantasan korupsi nampaknya akan sulit dilakukan khususnya pencapaian IPK 5,0 pada tahun 2014 yang dikarenakan pencegahan dan pemberantasan korupsi masih lebih lemah dibandingkan dengan pertumbuhan kasus korupsi, implementasi sistem integritas nasional belum berjalan optimal dan terkonsolidasi, masih timbul persepsi publik bahwa pemberantasan korupsi belum tepat sasaran, dan kampanye publik anti korupsi belum optimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam penguatan perlindungan HAM adalah (1) masih kurangnya komitmen instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah; (2) masih adanya instansi ditingkat pusat dan daerah yang belum membentuk panitia RANHAM yang dapat menghambat percepatan pengarusutamaan perlindungan dan pemenuhan HAM; (3) belum terbangunnya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pengarusutamaan HAM dan gender di masing-masing institusi pemerintah; (4) belum efektifnya koordinasi

dan sinergitas di kalangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan kasus pelanggaran HAM; dan (5) munculnya berbagai peraturan baik ditingkat pusat dan daerah yang terindikasi melanggar HAM khususnya terhadap kaum perempuan.

Langkah Tindak Lanjut

Dalam upaya mengatasi permasalahan dalam penanggulangan terorisme, langkah ke depan yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan negara dalam bidang penegakan hukum yang diikuti dengan pelaksanaan program nasional deradikalisasi dan kontra radikalisme untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Sementara itu, untuk mengatasi permasalahan dalam pemberantasan korupsi perlu dilakukan peningkatan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang terukur dan konkrit pada K/L dan pemda. Untuk target 30 % kesesuaian regulasi dengan UNCAC masih membutuhkan koordinasi yang intensif khususnya di internal pemerintah dan dengan DPR dalam proses penetapan RUU menjadi UU. Selain RUU Tipikor, pemerintah tengah berupaya melakukan penyesuaian berbagai regulasi yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi dengan UNCAC diantaranya yaitu RUU KUHP, RUU KUHP dan RUU Perampasan Aset.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri Pemerintah diharapkan segera menyusun sejumlah peraturan dan kebijakan terkait dengan: Perencanaan pemenuhan kebutuhan alpalhankam; Perencanaan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; Penentuan teknologi dan produk yang akan dikuasai dan dikembangkan; Standarisasi serta kelaikan produk; Pembinaan, registrasi; dan sertifikasi industri pertahanan; sumber pendanaan; dan Pengendalian dan pengawasan teknologi.

Ke depan, dalam upaya berpartisipasi mewujudkan perdamaian dunia, Reformasi DK PBB perlu selalu menjadi prioritas utama Indonesia, selain itu Indonesia harus konsisten menyampaikan inisiatif mengenai *intermediate approach* yang dapat menyediakan jalan tengah. Mengingat sensitivitas isu *enlargement*, Indonesia perlu berupaya mendorong reformasi melalui jalur *working methods*

(mendorong transparansi, akses informasi persidangan), yang dalam jangka panjang diharapkan dapat mendorong reformasi yang lebih mendasar pada isu *enlargement*, sehingga DK PBB menjadi lebih representatif.

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka panjang, serta masalah dan tantangan yang dihadapi, maka strategi pembangunan bidang hukum yang perlu dilakukan adalah (1) peningkatan efektivitas dan kualitas peraturan perundang-undangan; (2) peningkatan kualitas dan integritas SDM hukum; (3) pembenahan hubungan dan penguatan koordinasi antar kelembagaan hukum; dan (4) peningkatan kesadaran hukum di seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

IV.13 PRIORITAS NASIONAL 13 : PEREKONOMIAN

Kebijakan bidang perekonomian diarahkan pada pengembangan industri, peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional serta peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI

Arah kebijakan PN Lainnya di bidang perekonomian mencakup: (a) pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. selain itu, hingga saat ini telah tercapai pertumbuhan pada sektor non-migas; pemantapan peran Indonesia dalam berbagai forum perdagangan internasional; dan perbaikan pelayanan terhadap TKI.

Sasaran PN perekonomian secara umum tercapai, namun lambatnya pemulihan krisis ekonomi global masih menjadi tantangan yang dihadapi sektor industri.

Pertumbuhan Industri

Krisis ekonomi global menjadi tantangan sektor industri

Kebijakan Industri Nasional menggariskan pemberian fasilitas kepada industri prioritas, dengan sasaran mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Tantangan besar yang dihadapi sektor industri dalam mencapai sasaran tahun 2013 dan 2014 yaitu lambatnya pemulihan krisis ekonomi global.

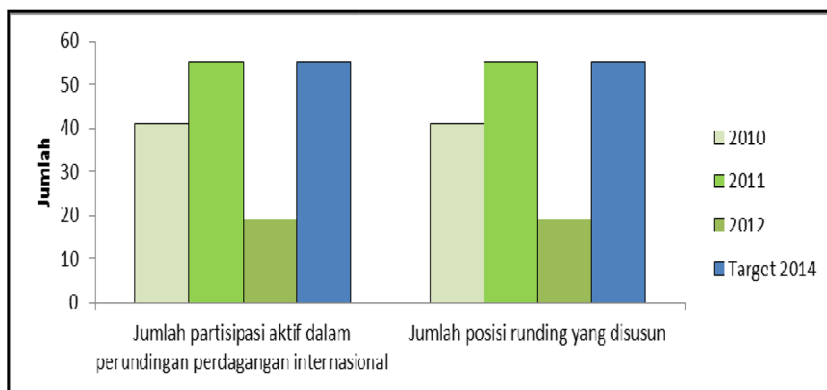
Sasaran pertumbuhan industri hingga Triwulan III Tahun 2012 telah tercapai baik untuk industri secara keseluruhan maupun industri non-migas. Namun demikian krisis ekonomi global memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan industri. Untuk itu, diperlukan penyesuaian arah kebijakan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan kekayaan sumber alam dan perlindungan pasar domestik dari serbuan produk yang ilegal dan tidak berkualitas. Meski demikian, sasaran pertumbuhan industri non-migas diprediksi masih tetap dapat dicapai. Industri migas diperkirakan masih tetap tumbuh negatif disebabkan minimnya investasi di sektor ini. Oleh karena itu, pencapaian sasaran pertumbuhan industri secara keseluruhan membutuhkan kerja keras. Untuk itu pengembangan industri non-migas akan diarahkan pada industri-industri pengolah hasil pertanian dan pertambangan, serta industri yang memanfaatkan SDM yang tersedia serta pemenuhan kebutuhan domestik.

Sasaran pertumbuhan industri hingga Triwulan III Tahun 2012 telah tercapai baik untuk industri secara keseluruhan maupun industri nonmigas, namun krisis ekonomi global masih memberikan dampak yang signifikan

Peningkatan Peran dan Kemampuan RI Dalam Diplomasi Perdagangan Internasional

Dalam rangka meningkatkan akses pasar produk ekspor Indonesia dilakukan *multitrack strategy* di forum multilateral, regional, dan bilateral. Dalam forum multilateral, Indonesia telah berhasil memperkuat perannya melalui G-20, G-33, dan NAMA 11. Posisi Indonesia semakin mantap di dalam kelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa), sebagai sebuah *hotspot* investasi baru yang menjadi alternatif BRIC (Brazil, Russia, India, China). Dalam kurun waktu 2010-2012 telah dihasilkan 603 dokumen hasil perundingan, baik yang berupa hasil perundingan di luar negeri maupun hasil perundingan berupa kesepakatan kerjasama komoditi, MRA, MoU, *Agreed Minutes*, *Declaration*, *Chair Report*, respon terhadap pengamanan kebijakan perdagangan, *guidance of principal*, *summary of discussion*, *protocol*, serta dokumen perundingan lainnya yang memperjuangkan akses pasar bagi Indonesia dan kepentingan petani yang terkait dengan aspek ketahanan pangan. Pencapaian setiap tahunnya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Multitrack strategy di forum multilateral, regional, dan bilateral dilakukan untuk meningkatkan akses pasar produk ekspor



Gambar IV.1 Pencapaian Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional dan Target 2014

Tabel IV.19 Capaian Sasaran Prioritas Nasional Lainnya Perekonomian

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Pertumbuhan Industri							
Pertumbuhan Industri	%	n.a	7,0-7,3	4,48	6,22	6,10	
Pertumbuhan Industri Nonmigas	%	n.a	7,3-7,8	5,09	6,83	6,60	
Peningkatan peran dan kemampuan RI dalam Diplomasi Perdagangan Intrernasional							
Jumlah partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional		-	55	41	55	19	
Jumlah posisi runding yang disusun		-	55	41	55	19	
Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri		-	8	17	29	7	
Jumlah hasil perundingan internasional		-	34	34	37	13	

Indikator	Satuan	Status Awal (2009)	Target 2014	Capaian			Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
				2010	2011	2012	
Jumlah sosialisasi hasil perundingan internasional		-	8	4	8	5	
Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan TKI							
Ratifikasi konvensi buruh migran		-	Ratifikasi konvensi buruh migran	-	-	Ratifikasi konvensi buruh migran (UU 6/2012)	
Amandemen UU 39/2004		-	Amandemen UU	-	RUU Revisi UU 39/2004 atas inisiatif DPR	Menyelaikan rancangan revisi sesuai Ampres	
Pusat layanan pengaduan TKI	Hotline service	-	1		1	1	
Penyelesaian kasus pengaduan TKI	Persen kasus	83,68	100	21,42	7,69	76,84	
Calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota	%	-	100	100	100	100	
TKI yang memanfaatkan fasilitas KUR-TKI	orang	-	35.000	-	-	1.698	
Persentase rekomendasi kebijakan koordinasi pembiayaan kredit yang diimplementasikan	%	-	80	60	65	70	
Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan	orang	-	14.998	15.766	24.567	16.051	

Indonesia sebagai ketua dan tuan rumah ASEAN memberikan peluang strategis

Dalam meningkatkan akses pasar di forum regional, khususnya dalam kerangka ASEAN, Indonesia berperan dalam perjanjian antara lain ASEAN–China *Free Trade Agreement* (ACFTA), ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) dan ASEAN-Korea *Free Trade Agreement* (AKFTA). Menghadapi beberapa FTA tersebut, Indonesia menerapkan strategi penguatan daya saing, pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor. Tahun lalu merupakan momentum Indonesia di mata internasional, di mana Indonesia menjadi *hosting country* sekaligus *Chairman of ASEAN* pada tahun 2011. Tema Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2011 ini adalah “*ASEAN Community in a Global Community of Nations*” yang mengusung keberhasilan pencapaian Komunitas ASEAN 2015. Sebagai Ketua ASEAN yang memiliki nilai strategis tersendiri, Indonesia harus mampu menjalin relasi secara intens dengan para pemimpin tinggi negara-negara maju. Indonesia dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk melibatkan diri secara aktif dalam berbagai forum kerja sama ekonomi global. Selain itu, Peran Indonesia sebagai ketua dan tuan rumah ASEAN memberikan peluang strategis yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh *stakeholders* di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh masyarakat.

Secara bilateral, beberapa kesepakatan penting telah dibuat diantaranya adalah: MoU *on Combating Illegal Logging and Associated Trade* yaitu perjanjian penanganan pemberantasan *illegal logging* antara Indonesia dengan Amerika Serikat; peluncuran putaran perundingan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA); dan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China mengenai Perluasan dan Pendalaman Kerjasama Bilateral Ekonomi dan Perdagangan.

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan TKI

Peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI sesuai target 2014, sementara itu pemanfaatan KUR-TKI masih belum sesuai target

pelayanan dan perlindungan TKI menunjukkan pencapaian sesuai target 2014, meskipun jadwal penyelesaian beberapa tahapan kegiatan mundur dari jadwal yang ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan, telah ditempuh langkah kebijakan berikut: (1) menyediakan pusat layanan pengaduan (*crisis center*) bagi TKI; (2) membuat

sistem informasi TKI (SIM-TKI) yang terintegrasi dengan NIK; (3) meningkatkan pelayanan oleh pemerintah daerah; (4) meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai keberangkatan; (5) meningkatkan pelayanan kesehatan dan asuransi; dan (6) meningkatkan perlindungan hukum di dalam negeri dan di luar negeri.

Pemerintah telah memfasilitasi penempatan TKI ke luar negeri bagi 1.438.226 orang selama 2010–Juni 2012. Hingga kini TKI yang bekerja di luar negeri tersebar di 133 negara. Dalam upaya perlindungan TKI yang terkena kasus hukum, Pemerintah telah memulangkan 18.675 orang WNI *over-stayer*, yaitu mereka yang berada di Arab Saudi tetapi tidak memiliki izin tinggal/kerja yang sah, dimana 13.063 orang di antaranya bersatus TKI. Pemberian bantuan dan pendampingan hukum (*lawyer*) oleh Pemerintah telah berhasil membebaskan 34 orang TKI dari hukuman mati (Malaysia 12 orang, Arab Saudi 10 orang, Cina 10 orang, dan Iran 2 orang). Untuk meningkatkan pelayanan pemberian bantuan hukum, upaya yang dilakukan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, adalah antara lain menunjuk pengacara tetap (*retainer lawyer*) terutama di Malaysia dan Arab Saudi, serta menerapkan SOP dan membentuk unit kerja khusus untuk meringankan TKI yang terancam hukuman mati.

Sementara itu, pemanfaatan KUR-TKI belum sesuai dengan target yang ditetapkan karena masih adanya hambatan dalam persyaratan kredit, yaitu syarat kartu tanda kerja ke luar negeri (KTKLN) dan memiliki perjanjian kerja. Persyaratan tersebut akan dihilangkan agar pencairan kredit dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan. Sosialisasi intensif terutama di daerah kantong TKI.

Permasalahan dan Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran, diantaranya: (1) terkait dengan peningkatan pertumbuhan industri, permasalahan yang dihadapi diantaranya belum memadainya infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri seperti pelabuhan, akses jalan, angkutan, listrik dan gas; dan (2) terkait dengan pelayanan dan perlindungan TKI, Tantangan yang dihadapi tahun 2013 dan 2014, yaitu penyelesaian kasus pengaduan TKI, pemanfaatan

KUR-TKI oleh calon TKI, dan pemberian bantuan hukum bagi WNI di luar negeri. Masalah TKI yang diadukan melalui *hotline service* belum dapat diselesaikan secara optimal karena mekanisme penyelesaian masalah antarinstansi masih belum terbangun.

Langkah Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengupayakan peningkatan pencapaian sasaran PN lainnya perekonomian diantaranya: (1) mengupayakan penyediaan infrastruktur serta jaminan penyediaan bahan baku industri melalui insentif fiskal dan insentif lainnya; (2) meningkatkan peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar; (3) mengupayakan dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah-daerah basis TKI untuk memperluas akses pelayanan bagi calon TKI serta mengupayakan pengurangan biaya remitansi dan memberlakukan struktur biaya pembiayaan TKI; (4) meningkatkan koordinasi dan sinergi antarinstansi untuk mengoptimalkan penyelesaian masalah TKI.

IV.14 PRIORITAS NASIONAL 14: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pembangunan PN Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan melalui pembangunan Agama, Pariwisata, Pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan, serta Pemuda dan Olahraga.

Kebijakan pembangunan agama diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama; (2) peningkatan kualitas kerukunan umat beragama; (3) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan (4) pelaksanaan haji yang tertib dan lancar. Adapun sasaran utama pembangunan bidang agama dalam RPJMN 2010-2014 adalah meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

kesejahteraan rakyat melalui pengembangan destinasi, peningkatan promosi pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata, dan penguatan kelembagaan pariwisata. Sasaran utama pembangunan pariwisata dalam RPJMN 2010-2014 adalah peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 % secara bertahap dalam lima tahun.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada: (1) peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan (2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional. Sasaran utama pembangunan kepemudaan dan keolahragaan adalah sebagai berikut: (a) pencapaian posisi papan atas pada *South East Asia (SEA) Games* pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di *Asian Games* tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; dan (b) peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, serta revitalisasi gerakan pramuka.

Pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan difokuskan pada perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender dan anak (PUG&A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya. Sasaran utama pembangunan bidang PUG serta perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah: (1) meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah dan (2) meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak, terhadap berbagai tindak kekerasan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kesetaraan gender difokuskan pada perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG&A)

Pembangunan Agama Sebagai Landasan Utama Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Salah satu hasil pencapaian pembangunan agama adalah perbaikan pelayanan kepada 211.000 jemaah haji pada tahun 2012 yang ditunjukkan dengan adanya perbaikan dan pengembangan segala hal yang mendukung perbaikan

Salah satu pencapaian pembangunan agama ditunjukkan dengan peningkatan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia

pelayanan haji, yaitu: (a) perbaikan proses pelaksanaan ibadah haji yang didukung dengan peningkatan efisiensi dan transparansi pendaftaran calon jemaah haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (b) pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji seperti pemondokan dan katering haji dari hasil manfaat dana setoran awal; (c) penerbitan paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; (d) realisasi penyediaan 98 % pemondokan jemaah di lokasi radius 2.500 meter dari Masjidil Haram dan penyediaan transportasi publik. Sedangkan di Madinah, penyediaan pemondokan dengan radius 650 meter dari masjid nabawi dengan fasilitas setara haji khusus; (e) perbaikan sistem katering dengan perbaikan pelayanan mulai dari bandara King Abdul Aziz Madinah, dan Armina. Didukung pula dengan peningkatan ketepatan waktu transportasi para jemaah haji hingga tiba di tanah air; (f) perbaikan pembinaan dan penyuluhan haji melalui bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan dan sosialisasinya di media elektronik; pelatihan (ToT) bagi para instruktur di pusat; dan orientasi bagi kepala KUA; dan (g) perbaikan seleksi petugas haji melalui seleksi administrasi di tingkat kab/kota, ujian tertulis/tes kompetensi dan psikologi di tingkat provinsi.

Pembangunan Kepariwisata Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung melalui pengembangan pariwisata daerah

Pembangunan kepariwisataan hingga tahun 2012 sebagian besar telah menunjukkan capaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah wisman pada tahun 2011 meningkat sebesar 20,97 % dibandingkan dengan jumlah wisman pada tahun 2009. Sedangkan dibandingkan tahun 2010, jumlah wisman pada tahun 2011 meningkat sebesar 9,24 %. Sementara itu, pergerakan wisnus pada tahun 2011 meningkat sebesar 3,06 % dibandingkan tahun 2009, dan meningkat sebesar 1,01 % dibandingkan tahun 2009.

Dengan memperhatikan capaian pembangunan pariwisata hingga Juni 2012, dan membandingkan dengan sasaran utama yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2010-2014, jumlah wisman dan pergerakan wisnus pada tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan; dan secara keseluruhan diperkirakan akan dapat mencapai

target peningkatan jumlah wisman dan wisnus sebesar 20 % pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

Pencapaian pembangunan kepariwisataan tersebut disebabkan oleh terlaksananya: (1) Promosi ke 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; (2) Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; dan (3) Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality* management yang kompetitif di kawasan Asia.

Pencapaian pembangunan pariwisata didukung melalui kegiatan promosi pariwisata, dan perbaikan serta peningkatan kualitas pariwisata.

**Tabel IV.20 Capaian Sasaran Prioritas Nasional Lainnya
Kesejahteraan Rakyat**

Indikator	Satuan	Status awal (2009)	Target (2014)	Perkembangan capaian			Perkiraan Capaian 2014 (notifikasi)
				2010	2011	2012	
Penyelenggaraan Haji							
Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar	Jemaah (ribu)	211	210	221 ¹⁾	221 ¹⁾	211 ²⁾	
Pelayanan kesehatan kepada jemaah haji	Jemaah (ribu)	211	210	221	221	211	
Pembangunan Kepariwisataaan							
Jumlah wisatawan mancanegara	Juta orang	6,32	8,6	7,00	7,65	3,88 ³⁾	
Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara	Juta perjalanan	229,73	276	234,38	236,75	53,87 ³⁾	
Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan							
Prestasi olahraga pada SEA Games 2011	Peringkat	3	1	-	1	-	
Jumlah olahragawan andalan nasional	Orang	-	520	520	520	-	
Jumlah pemuda kader kepemimpinan	Orang (ribu)	-	11,5	4,5	10,0	-	

Indikator	Satuan	Status awal (2009)	Target (2014)	Perkembangan capaian			Perkiraan Capaian 2014 (notifikasi)
				2010	2011	2012	
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Orang (ribu)	-	3,5	3,18	10,0	-	
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Orang	-	5.600	1.000	4.850	-	
PUG dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak terhadap Berbagai Tindak Kekerasan							
Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG	kebijakan	⁴⁾	49	8	12	-	
Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG	K/L Prov	⁴⁾	16 K/L	7 K/L ujicoba	11 K/L	28 K/L 10 prov (dana dekon)	
Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender	K/L Prov	⁴⁾	8 K/L	1 K/L	4 K/L dan 8 provinsi	-	
Pelatihan analisis gender di K/L dan Provinsi	K/L Prov	⁴⁾		39 K/L 33 Prov	39 K/L 33 Prov	39 K/L 33 Prov	
Kebijakan dan pedoman tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan	Permen UU Surat Edaran	Kurang lengkap dan kurang harmonis	Semakin lengkap dan harmonis	Permen PPPA No. 1 dan 2 tahun 2010	Permen PPPA No. 2,6,dan 7 tahun 2011	Disahkan UU no 11/2012; surat edaran MA no 6/2012	
Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Prov Kab/Kota	Belum tersedia	Meningkat	-	20 prov 117 kab/kota	26 prov 163 kab/kota	
Sumber: Susenas, KemenPP dan PA, Kemendikbud Keterangan: 1) Kenaikan disebabkan karena adanya tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi 2) Penurunan disebabkan karena tidak mendapatkan kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi 3) Data sampai dengan Juni 2012 4) Terjadi restrukturisasi program dan kegiatan yang sama sekali berbeda antara RKP 2010 dengan RKP tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat diisi/dibandingkan							
 Sudah tercapai/on track/on-trend  Perlu kerja keras  Sangat sulit tercapai							

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak terhadap Berbagai Tindak Kekerasan

Pencapaian berarti telah diraih dalam penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satunya adalah percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) yang telah diterapkan di 28 K/L dan 10 provinsi pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya komitmen dan pemahaman K/L.

Pencapaian PUG didukung dengan adanya efektifitas kelembagaan, dan menguatkan komitmen dan pemahaman K/L terhadap pentingnya isu gender

Di lain pihak, peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan antara lain ditunjukkan dengan disahkannya berbagai kebijakan perundang-undang, peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah agung terkait dengan hal tersebut. Pada tahun 2012, dalam rangka penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA), telah ada P2TP2A di 26 provinsi dan 163 Kab/Kota serta 306 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda/Polres. Sistem rujukan yang dilakukan oleh unit pelayanan sudah menunjukkan peningkatan. Pengaduan yang diterima P2TP2A atau UPPA akan dirujuk kepada unit layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban, misalnya korban yang membutuhkan layanan kesehatan akan dirujuk ke PKT di 22 RSUD atau PPT di 42 RS Polri, sedangkan korban yang butuh tempat tinggal sementara dirujuk ke 33 Rumah Perlindungan Trauma (RPTC) atau 15 unit Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA). Untuk layanan pengaduan kekerasan pada anak telah tersedia Telepon Sahabat Anak (TESA) 129 di 14 Kab/Kota.

Permasalahan dan Kendala

Permasalahan yang masih dihadapi pada saat ini dalam pelaksanaan ibadah haji antara lain adalah: (1) semakin bertambahnya jumlah jemaah haji yang harus menunggu (*waiting list*) untuk dapat melakukan ibadah haji; (2) masih adanya Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang belum menggunakan Siskohat, sehingga menyulitkan masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan haji; (3) belum efektifnya pelaksanaan bimbingan bagi calon jemaah haji sehingga belum menumbuhkan rasa kemandirian para jemaah pada saat pelaksanaan ibadah haji, dan (4) pedoman

serta SOP yang ada belum sepenuhnya dapat mewujudkan petugas yang profesional.

Pembangunan kepariwisataan telah menunjukkan pencapaian yang cukup menggembirakan, namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1) belum optimalnya kemitraan antarpelaku pariwisata yang didukung oleh koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra dan antarlembaga, pusat dan daerah; (2) masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata; (3) peningkatan pemanfaatan media elektronik, cetak, dan berbasis teknologi informasi untuk promosi pariwisata; dan (4) peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM pariwisata termasuk kesiapan masyarakat di daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kepemudaan, antara lain: (1) belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan; (2) meningkatnya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS, serta kekerasan dikalangan pemuda; dan (3) belum optimalnya peran organisasi kepemudaan. Di bidang Keolahragaan permasalahan yang dihadapi, antara lain: (1) masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (2) terbatasnya SDM keolahragaan yang berkualitas; (3) belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlet andalan; dan (4) masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penerapan PUG adalah masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender, belum optimalnya pelaksanaan PPRG, serta belum memadainya penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah kurang harmonisnya perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak, kurangnya koordinasi antar K/L/SKPD terkait, belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM terkait, dan belum memadainya ketersediaan dan kualitas data.

Langkah tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan ibadah haji adalah: (1) memprioritaskan pemberangkatan calon haji yang belum pernah melaksanakan haji, untuk mengurangi jemaah yang harus menunggu keberangkatan (*waiting list*); (2) melanjutkan pengembangan jaringan komputerisasi untuk 34 Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang belum *online*, dan meningkatkan (*upgrade*) dengan sistem biometrik sebanyak 161 kab/kota; (3) meningkatkan kualitas bimbingan bagi calon jemaah haji, dan (4) menyempurnakan SOP dan pedoman bagi petugas haji dalam rangka meningkatkan profesionalisme petugas.

Dalam pembangunan pariwisata, tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain: (1) meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi lintas lembaga dan lintas sektor dalam pembangunan kepariwisataan melalui penyusunan peraturan perundangan; (2) menyusun perencanaan destinasi pariwisata nasional, kawasan strategis pariwisata nasional, dan fasilitasi pendukung penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah; (3) meningkatkan pemanfaatan berbagai media dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata; pengembangan kerja sama pemasaran dan promosi pariwisata dengan lembaga terkait, terutama kerja sama antar *travel-agent* dan antar *tour operator* di dalam maupun di luar negeri; dan (4) meningkatkan pengembangan profesionalisme SDM di bidang pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan SDM dan pendidikan tinggi bidang pariwisata

Tindak lanjut terkait pembangunan kepemudaan antara lain pembangunan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, fasilitasi pemuda dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, sosialisasi dan advokasi pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDs, dan fasilitasi pemuda dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, sosialisasi dan advokasi pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDs, dan fasilitasi organisasi kepemudaan. Adapun di bidang keolahragaan antara lain pemasyarakatan kegiatan olahraga, pendidikan dan pelatihan SDM keolahragaan, pembinaan dan pembibitan atlet unggulan, pemberian penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Adapun tindak lanjut dalam penerapan PUG yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, mengoptimalkan pelaksanaan PPRG di seluruh K/L; serta menyusun sistem manajemen data dan informasi gender. Sedangkan tindak lanjut dalam kebijakan perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan adalah meningkatkan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak, koordinasi antarK/L/SKPD dan antara pusat dan daerah, kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana, ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan bagi perempuan dan anak, serta pengawasan terhadap efektivitas perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan yang dilaksanakan oleh K/L/SKPD terkait.



BAB V

TINDAK LANJUT

TINDAK LANJUT

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan yang merupakan terjemahan dari beragam kebijakan dengan fokus 14 prioritas pembangunan, seperti telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Inti ragam kebijakan di berbagai bidang pembangunan tersebut diarahkan pada satu titik, yaitu kesejahteraan rakyat. Secara sederhana, 14 prioritas pembangunan merupakan turunan dari lima agenda pembangunan dalam RPJMN 2010-2014.

Pencapaian pembangunan hingga pertengahan tahun 2012, atau tengah tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dapat digambarkan telah berjalan *on track* atau sesuai rencana. Separuh waktu yang tersisa, akan merupakan upaya kelanjutan disertai penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam format perbaikan cakupan, koordinasi, dan kualitas pelaksanaan. Sasaran fokus prioritas pembangunan yang belum tercapai namun masih memungkinkan dicapai akan memerlukan kerja keras yang perlu disertai penajaman, pengintensifan, dan percepatan pelaksanaan. Sedangkan, bagi sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, tetap perlu diupayakan dengan sangat melalui penajaman, terobosan dan langkah strategis, revaluasi efektivitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi.

Dalam Bab ini dijabarkan tindak lanjut yang perlu dan akan dilakukan guna mencapai tujuan masing-masing agenda RPJMN 2010-2014. Uraian dibahas atas dasar capaian masing-masing kegiatan fokus prioritas pembangunan, seperti telah diuraikan dalam Bab IV. Diharapkan struktur diskusi yang demikian dapat menunjukkan kinerja dan capaian masing-masing agenda pembangunan, dan sekaligus dapat mengenali kelemahan dan kekurangan yang harus segera diatasi, guna mencapai tujuan dan target akhir RPJMN 2010-2014 di tahun 2014.

Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dilakukan melalui perumusan visi dan misi pembangunan 2010-2014 yang kemudian dijabarkan dalam lima agenda pembangunan yang ditopang oleh 14 prioritas pembangunan nasional

Agenda I. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat menjadi agenda prioritas dalam RPJMN 2010-2014

Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi agenda prioritas dalam RPJM 2010-2014 dan juga dalam pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. Untuk menjamin agar agenda prioritas ini tercapai, beberapa isu strategis perlu dijaga kinerjanya. Isu-isu tersebut antara lain adalah reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih efisien dan efektif, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan nilai tambah ekonomi domestik antara lain melalui pengembangan MP3EI, ketahanan pangan dan energi, dan juga pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Langkah pertama yang perlu dilakukan pada agenda pertama ini adalah meningkatkan efektifitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Walaupun selama ini peranan masyarakat dalam pembangunan terus didorong dan sudah semakin membaik, namun peran pemerintah masih sangat signifikan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Karenanya, program reformasi birokrasi akan terus didorong guna mewujudkan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih, efisien, amanah dan adil. Peran pemerintah yang demikian diperlukan untuk menjamin terciptanya iklim yang kondusif untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sosial, melindungi kelompok masyarakat yang kurang berdaya, serta menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan arif demi sebesar-besarnya kepentingan negara dan rakyat.

Perlu adanya proses *checks and balances* guna menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat

Kita menyadari bahwa peran pemerintah yang terlalu kuat akan dapat menjadi kontraproduktif. Karena itu perlu adanya proses *checks and balances* guna menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat yang diinginkan. Untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan baik, sistem pemerintahan yang demokratis perlu dibangun. Oleh karena itu, upaya pembangunan demokrasi yang efektif dan terkendali harus tetap dilanjutkan. Prinsip yang harus dipegang adalah mengharmonisasikan keberagaman yang ada sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Kemudian, kebebasan berpendapat harus dijamin dan dikembangkan dalam koridor bebas dan bertanggungjawab sehingga proses demokratisasi tidak malahan menjadi penghambat dalam proses pembangunan yang semakin luas.

Sejalan dengan peningkatan efektifitas birokrasi dan tata kelola, pembangunan bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan sebagai penyangga pilar demokrasi harus makin ditegakkan. Pembangunan ekonomi memerlukan kondisi politik yang stabil dan kondusif, kepastian hukum bagi seluruh masyarakat, serta stabilitas keamanan yang terjamin. Karena itu pembangunan pertahanan keamanan perlu lebih ditingkatkan lagi untuk menjamin pelaksanaan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kerangka negara kesatuan yang demokratis. Kebijakan pembangunan harus dapat mengoreksi kekeliruan yang terjadi di masa lalu dan menghindari terulangnya kembali kebijakan yang kurang tepat di masa mendatang yang dapat mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan menurun. Aparat Polri yang menjalankan semboyan TriBrata dan Catur Prasetya, serta aparat TNI yang menjalankan berbagai semboayannya dengan konsekuen dan konsisten sajalah yang dapat menjawab tantangan tersebut. Salah satu fokus utama pembangunan pertahanan keamanan adalah bidang sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan profesionalisme, integritas dan kesejahteraan aparat, disamping juga perbaikan kondisi sarana dan prasarana pertahanan keamanan.

Kondisi politik yang stabil dan kondusif, penegakan dan kepastian hukum, serta ketertiban dan keamanan yang terjamin diperlukan dalam pembangunan ekonomi

Upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi domestik harus dilakukan secara berkeadilan dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan ekonomi sekaligus akan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan potensi sumber daya alam, dan pada sisi lain merupakan pasar yang sangat potensial, karena jumlah penduduknya yang besar dengan pendapatan per kapita yang saat ini mencapai sekitar US\$ 3.500 per tahun, dan diperkirakan akan terus berkembang dengan cepat. Dua hal tersebut merupakan daya tarik yang sangat kuat bagi investor. Namun, kedua hal ini tidaklah cukup untuk membuat mereka menanamkan modalnya jika iklim investasi kurang mendukung. Beberapa pekerjaan rumah besar yang masih harus diselesaikan antara lain adalah reformasi birokrasi yang kurang efektif dan efisien, meningkatkan kapasitas dan daya saing infrastruktur dan kualitas tenaga kerja, serta sinkronisasi peraturan di pusat dan daerah yang kemudian dijalankan dengan konsekuen dan konsisten. Indonesia perlu mengakselerasi penyelesaian masalah-masalah tersebut jika ingin memperbaiki posisi daya

Investasi, ekspor dan inovasi teknologi merupakan fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan

saingnya dengan negara lain, karena pada saat bersamaan, negara-negara pesaing juga terus makin giat membenahi iklim investasi di dalam negeri masing-masing guna menarik minat investor. Yang perlu dijaga adalah agar investasi asing yang masuk diarahkan pada pengelolaan SDA secara berkelanjutan dengan menekankan pada upaya meningkatkan nilai tambah domestik sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Ekspor ditingkatkan melalui penetrasi pasar dan meningkatkan produktivitas

Selanjutnya peningkatan ekspor dilakukan melalui dua pendekatan yaitu penetrasi pasar yang tepat dan meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas usaha. Penetrasi pasar dilakukan dengan menjaga dan mengembangkan pasar ekspor pada negara-negara tujuan yang ada, sekaligus mencari dan membuka pasar ekspor baru pada negara-negara tujuan potensial lain. Untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional, kita harus secara konsisten dan terus menerus meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki sarana prasarana transportasi demi kelancaran arus barang dan tenaga kerja, menjamin ketersediaan dan kontinuitas energi, memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan komunikasi, serta inovasi teknologi.

Kemajuan peradaban umat manusia ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Peran teknologi sangat penting dalam menopang berbagai aktivitas dewasa ini, tidak terkecuali dunia usaha. Dengan kemajuan teknologi, dimensi jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan yang besar. Pada dunia usaha, teknologi mampu meningkatkan produktivitas, disamping juga menghasilkan barang berteknologi yang makin berkualitas. Kunci pembangunan yang berkelanjutan adalah kemajuan teknologi. Bangsa yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi secara berkelanjutan akan makin disegani dan diperhitungkan dalam pergaulan dunia. Tidakkah berlebihan bila dikatakan, kemajuan peradaban umat manusia ditentukan oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Melalui IPTEK, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.

Krisis pangan dan energi berdampak signifikan pada makin buruknya kondisi kemiskinan dan kelaparan

Dua aspek vital yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan adalah masalah pangan dan energi. Harga pangan dan energi yang tinggi sebagai akibat tidak seimbangnya penawaran dan permintaan, disusul oleh krisis

keuangan yang masih berlangsung hingga kini, ditengarai memberikan dampak signifikan pada kondisi kemiskinan dan kelaparan, yang tidak saja dapat terjadi di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Maka, ketersediaan keduanya harus terjamin baik melalui peningkatan produksi dalam negeri maupun impor, memastikan kelancaran distribusinya, serta menindak dengan tegas, keras, adil dan konsisten berbagai pihak yang melakukan spekulasi untuk mengambil untung dari permasalahan ini. Oleh karena itu, kebijakan yang arif dan cepat harus dilaksanakan untuk merealisasikan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga pemenuhannya merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Selain itu, kualitas pangan yang diberikan saat ini dapat menentukan potret generasi mendatang, makin baik kualitas pangan yang dikonsumsi saat ini, maka besar kemungkinannya makin baik kondisi generasi yang akan datang, dan sebaliknya. Pangan dapat menentukan kualitas SDM sebagai pelaku utama pembangunan. Dengan demikian, ketahanan pangan yang dinamis menjadi sangat mendesak untuk diwujudkan. Program ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan yang memadai, distribusi yang lancar menjangkau semua konsumen di berbagai lokasi, kualitas yang tidak membahayakan kesehatan dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian, peningkatan efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan ketersediaan pangan dengan prioritas utama masyarakat miskin dan kelompok rawan pangan, percepatan diversifikasi pangan, penguatan kelembagaan pangan, pengembangan usaha pengelolaan produk pertanian (agroindustri), serta penelitian dan pengembangan pangan.

Aspek lain, mewujudkan ketahanan energi. Kita harus introspeksi dan arif dalam merealisasikannya, dengan melihat peran energi menurut kedudukan dan kepentingan suatu negara, ketahanan energi negara pengekspor dan pengimpor energi akan berbeda (Daniel Yergin). Untuk Indonesia, ketahanan energi berarti menyeimbangkan pasokan suatu komoditi energi untuk kebutuhan dalam negeri dengan untuk ekspor guna menjamin pendapatan negara, meningkatkan kegiatan eksplorasi, merealisasikan

Ketahanan energi negara pengekspor dan pengimpor energi berbeda

dan mengakselerasi diversifikasi energi ke gas dan energi baru terbarukan, kepastian ketersediaan energi dengan memprioritaskan kelompok yang kurang berdaya, serta penelitian dan pengembangan energi.

Pengentasan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan yang terpadu dan bersinergi

Khusus dalam pengentasan kemiskinan, perlu diambil langkah kebijakan yang strategis, cerdas dan taktis untuk memenuhi target tingkat kemiskinan 8-10 % pada tahun 2014. Kebijakan pengentasan kemiskinan yang dibuat tidak hanya harus bersinergi antar sesama program-program penanggulangan kemiskinan saja, namun selaras pula dengan program kebijakan di luar kemiskinan, dengan harapan dapat meminimalisir dampak kebijakan yang kontra produktif terhadap penurunan kemiskinan. Jika terdapat kebijakan yang dampaknya diperkirakan dapat menambah jumlah dan beban penduduk miskin, maka langkah kebijakan antisipatif yang efektif perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Intinya, kebijakan pembangunan tidak hanya berdasarkan pada *pro-growth* saja, namun, kebijakan pembangunan harus berprinsipkan pada *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment* secara seimbang, selaras dan konsisten seperti yang telah dicanangkan diawal pelaksanaan pembangunan RPJMN 2010-2014, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Program pembangunan yang sifatnya padat karya makin ditingkatkan secara merata untuk dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Selain itu, pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas akses mereka terhadap pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja birokrasi belum efektif dan efisien

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang memuaskan, serta kinerja birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, upaya mewujudkan sasaran tersebut pada pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang tidak ringan. Hal ini diindikasikan dengan belum efektifnya penyediaan layanan publik untuk kemudahan berusaha dan pelaksanaan administrasi keuangan daerah yang masih

belum sesuai harapan. Untuk itu, birokrasi pemerintahan harus ditingkatkan kinerjanya dengan berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi katalisator pembangunan sosial dan ekonomi untuk mengakselerasi pencapaian target kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang saat ini masih belum efektif harus diarahkan untuk mempertimbangkan berbagai aspek secara lebih komprehensif, meliputi perbaikan regulasi dan tatalaksana, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembentukan budaya kerja unggul sehingga akan menunjang peningkatan kinerja nasional secara signifikan dan berkelanjutan. Dengan demikian pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada pendekatan fungsi (*functional approach*) yang terintegrasi antar berbagai kementerian dan lembaga dan menghindari adanya pengkotak-kotakan antar lembaga.

Reformasi birokrasi dilakukan secara komprehensif, baku, terintegrasi dan ditekankan pada pendekatan fungsi

Selanjutnya untuk mengakselerasi perbaikan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan langkah-langkah yang mencakup peningkatan sistem integritas, perbaikan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan dan audit internal, dan peningkatan profesionalisme SDM aparatur. Khusus mengenai pembenahan profesionalisme SDM aparatur, langkah yang akan dilakukan antara lain dengan mempercepat penyelesaian dan implementasi UU Aparatur Sipil Negara, penerapan sistem *computer assisted test* (CAT) sebagai basis penerapan sistem merit, dan pementapan penerapan sistem manajemen kinerja instansi.

Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi

Pembangunan demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan berazaskan kepada Bhineka Tunggal Eka, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalankan kewajiban dan haknya terhadap negara tanpa melihat perbedaan yang disandangnya. Selain itu, sejarah perjalanan bangsa mengajarkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa diletakkan dalam kerangka sistem yang bersifat

Rakyat Indonesia mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap negara, tanpa melihat perbedaan

monolitik, tetapi selalu berpedoman kepada prinsip-prinsip keberagaman. Karena itu sistem demokrasi Indonesia harus dapat menjamin pelaksanaan prinsip keberagaman itu, baik sebagai sebuah pandangan hidup maupun sebagai praktek hidup sehari-hari. Tanpa penerapan prinsip keberagaman ini, demokrasi Indonesia akan menjadi satu sistem yang dapat memecah belah bangsa dan masyarakat, bahkan kelangsungan negara kesatuan .

Demokrasi prosedural dan substansial, seyogyanya, berjalan serasi

Berdasarkan fenomena perjalanan sejarah demokrasi Indonesia, dapat dikatakan bahwa, Indonesia telah berhasil melalui sebuah proses transformasi politik dari sebuah negara otoriter menjadi sebuah negara yang lebih demokratis. Proses pemilihan umum yang makin baik pada tingkat nasional dan lokal menunjukkan bahwa proses konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik. Walaupun demikian, berbagai upaya serius masih harus dilakukan untuk mengawal tahap perbaikan demokrasi prosedural yang selama ini telah dilakukan untuk menuju tahap perbaikan demokrasi substansial. Penyempurnaan demokrasi prosedural yang mencakup aspek bentuk, proses, struktur, dan implementasi, harus tetap dilanjutkan dan ditingkatkan. Hal ini sebagai dasar bagi perbaikan menuju demokrasi substantif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya penguatan pilar demokrasi di bidang politik, hukum, dan pertahanan keamanan diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin proses peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan dengan baik. Berbagai penguatan di atas perlu dilakukan agar pembangunan demokrasi prosedural dan substansial berjalan serasi.

Keamanan pertahanan dapat mengatasi, mengantisipasi dan mendeteksi dini berbagai ancaman

Sementara itu, kesejahteraan rakyat akan dapat dicapai hanya bila situasi keamanan dalam keadaan kondusif. Dengan makin meningkatnya dinamika kegiatan perekonomian dan sosial, aparat keamanan dalam negeri harus dapat mengimbangi bahkan mampu mendeteksi gejala yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Karenanya, peningkatan kapasitas institusi Polri diperlukan untuk mempercepat upaya penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih sesuai dengan perkembangan dan dinamika di masyarakat. Peningkatan profesionalisme dan integritas aparat keamanan secara bertahap ditingkatkan sejalan dengan peningkatan sarana dan prasarana utama, termasuk perbaikan dan peningkatan

kesejahteraan aparat keamanan. Sementara itu, kemampuan pertahanan juga perlu mendapat perhatian khusus agar mampu menangkal ancaman baik dari luar negeri maupun mencegah dan mengatasi bahaya laten yang berasal dari dalam negeri. Dalam kaitan ini, modernisasi dan penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal industri pertahanan dalam negeri sehingga selain kemampuan pertahanan nasional meningkat, juga akan memacu perekonomian nasional. Untuk itu industri pertahanan dalam negeri secara bertahap harus dikembangkan menjadi industri yang modern dengan melakukan kerja sama dengan pihak industri pertahanan yang lebih modern, dan juga melakukan peningkatan kapasitas riset dan inovasi teknologi.

Agenda IV. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Sektor hukum merupakan landasan dan kerangka yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kegiatan sosial dan ekonomi. Upaya mencapai sasaran pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, memerlukan penegakan hukum secara konsisten, tanpa distorsi dan diskriminasi. Wujud penegakan hukum seperti ini akan menimbulkan adanya rasa aman, nyaman, dan adil yang dirasakan seluruh rakyat. Namun pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang konsisten dan tidak pandang bulu seperti kita harapkan bersama seringkali tidak mudah karena selalu ada tantangan dan hambatan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa penegakan hukum yang adil tidak mungkin untuk dilaksanakan. Permasalahan yang ada biasanya terkait dengan adanya intervensi politik terhadap proses penegakan hukum, sistem hukum yang masih belum mandiri, hubungan antar lembaga yang saling membutuhkan dan terkadang saling melindungi, serta peraturan perundangan dan aparat penegak hukum yang lemah.

Hukum merupakan landasan dan kerangka yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, kegiatan sosial dan ekonomi

Berbagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut masih berjalan dan akan tetap dilanjutkan dan ditingkatkan oleh para pemangku kepentingan. Pembenahan permasalahan hukum harus dilakukan antara lain melalui peningkatan efektivitas dan kualitas peraturan perundangan yang mencakup sinkronisasi dan menghilangkan tumpang tindih;

Paradigma pemberantasan korupsi bergeser dari aspek penindakan pada pencegahan dan budaya anti korupsi

peningkatan kualitas SDM yang amanah, profesional, dan berintegritas; penanaman budaya hukum; dan pembangunan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan transparan.

Program pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan serius di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Walaupun sudah terdapat banyak kemajuan, masalah ini masih belum dapat memperbaiki persepsi korupsi yang ada di masyarakat, yang ditunjukkan dengan masih relatif rendahnya nilai IPK Indonesia. Ke depan, upaya yang sudah dimulai ini akan makin ditingkatkan. Dalam jangka pendek, upaya-upaya yang dilakukan masih akan ditekankan pada aspek penindakan melalui peningkatan kapasitas KPK, Polri, Kejaksaan, Peradilan Tipikor, dan penyempurnaan UU Tipikor. Namun, upaya penindakan saja terbukti tidaklah cukup. Karena itu upaya penindakan harus dibarengi dengan upaya pencegahan, yang antara lain dengan melakukan edukasi budaya anti korupsi kepada masyarakat luas, khususnya kepada generasi muda sejak dini. *Grand design* pemberantasan korupsi yang sudah disusun berupa *road map* pemberantasan korupsi dengan *milestone* target capaian yang terukur harus segera dilaksanakan dengan konsekuen.

Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan mensyaratkan stabilitas dan dukungan negara yang kuat serta diwujudkan dengan menerapkan strategi pembangunan *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-job* dan *pro-environment*

Selama ini, pemerintah telah berupaya menjalankan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, namun hasilnya masih kurang memuaskan. Pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan (*growth with equity*) mensyaratkan stabilitas dan dukungan negara yang kuat. Karenanya, pelaksanaan program pembangunan nasional di masa mendatang akan lebih diarahkan kepada upaya melibatkan semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin atau mereka yang termarginalkan, untuk ikut serta dalam proses pembangunan secara aktif dengan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan *four track strategy* pembangunan, yang terdiri dari *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job* dilengkapi dengan *pro-environment* untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Keempat strategi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan saling

bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan masyarakat, dan mengedepankan aspek pemerataan.

Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi permasalahan semakin lebarnya ketimpangan baik antarpenduduk maupun antarwilayah. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata namun juga untuk mengentaskan mereka yang termarginalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun dilandasi pertimbangan meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil, dan sehat. SDM yang berkualitas merupakan pelaku sekaligus *key enabler* dalam proses pembangunan.

SDM yang berkualitas merupakan pelaku sekaligus *key enabler* dalam proses pembangunan

Sebagai salah satu wujud dari upaya pemerataan pembangunan, pembangunan infrastruktur dasar di perdesaan akan ditingkatkan dan dioptimalkan, terutama di daerah tertinggal. Pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana pendidikan sebagai infrastruktur dasar ini saja tidaklah cukup, namun harus dibarengi pula dengan penyediaan tenaga kesehatan dan pendidikan yang memadai, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta membenahi tata kelola pemeliharaan aset-aset hasil pembangunan tersebut.

Kesejahteraan rakyat yang lebih merata dapat dicapai dengan mengintensifkan pembangunan pada wilayah perdesaan

Pembangunan sektor pertanian dan UMKM akan mendapat porsi perhatian yang lebih besar lagi guna meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Alih fungsi lahan pertanian dikendalikan, pembangunan sarana dan prasarana pertanian lebih dipercepat, terutama, melalui pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi sehingga mampu meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani. Dengan makin bergairahnya kegiatan pertanian, pencapaian target program swasembada pangan atau ketahanan pangan nasional semakin cepat diwujudkan, sekaligus dapat meningkatkan pemerataan pembangunan.

Upaya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai program pembangunan seperti di atas diupayakan tetap memperhatikan, menjaga, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup karena saat ini kualitas air, udara, tanah, dan lingkungan secara umum terus memburuk. Upaya menjaga kualitas lingkungan diperlukan agar peningkatan

Lingkungan hidup harus dibangun secara bersama

kesejahteraan dapat berjalan secara berkelanjutan, dan tidak diwarnai oleh dampak kerusakan lingkungan yang akan mengurangi manfaat sosial dan ekonomi dari pembangunan. Untuk itu pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan harus diterapkan pada semua proses dan tahapan pembangunan.

PENUTUP

Keterpaduan, sinergi, fokus, dan konsistensi merupakan kata kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang

Keterpaduan, sinergi, fokus, dan konsistensi merupakan kata kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan mendatang dalam mewujudkan target pembangunan nasional, yaitu kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini tidak dapat lagi dilakukan secara terkotak-kotak hanya demi kepentingan pencapaian yang bersifat sektoral (ego sektoral) yang dapat mendistorsi pencapaian target nasional. Beberapa kebijakan prioritas tidak dapat berdiri sendiri, tetapi masih harus dijabarkan secara lebih detil dan didukung dengan berbagai kebijakan lain demi mengefektifkan target pembangunan, kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Pembangunan demokrasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tantangan terbesar

Tantangan terbesar dalam pembangunan demokrasi Indonesia yang selama ini sudah berjalan baik adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi rasa aman dan keadilan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan sesuai tujuan dari pembangunan itu sendiri. Karena itu partisipasi seluruh masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan ini harus terus dilakukan secara terus menerus dan merata.



LAMPIRAN

Tabel LAMPIRAN 1
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1:
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tahun 2010-2012

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
STRUKTUR													
Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur negara yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan energi, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2014													
1.	Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Program Kelembagaan	1. Terlaksananya konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN	Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kemeneg PAN dan RB, BKN, dan LAN	%	Kemen PAN dan RB	n.a	30%	50%	70	100%	Belum sepenuhnya ada persesuaian persepsi antar K/L terkait ruang lingkup konsolidasi struktural	- Konsolidasi dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi K/L - Penyusunan Permen PAN dan RB tentang Penataan Kelembagaan K/L lingkup bidang Aparatur Negara.	●
		2. Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya	1. Persentase Kementerian Negara yang telah tertata kelembagaannya	100%	Kemen PAN dan RB	n.a	20%	30%	75%	100%	- belum proporsionalnya jumlah dan besaran struktur organisasi pemerintah (pusat dan daerah) - Beban anggaran negara meningkat - Tumpang tindih tugas dan fungsi	- Penyempurnaan kebijakan - Penyusunan Grand Design Sistem Kelembagaan - Evaluasi dan penataan organisasi Kementerian, LPNK, LNS	●
			2. Persentase Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang	100%	Kemen PAN dan RB	n.a	20%	30%	75	100%			●

No.	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN					Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			telah tertata kelembagaannya										
			3. Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	100%	Kemen PAN dan RB	n.a	20%	30%	75%	100%			
2.	Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	1. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterbitkan (grand design RBN dan kebijakan pelaksanaannya)	Permen PAN & RB	Kemen PAN dan RB	n.a	1 Perpres, 1 Keppres, 1 Permen PAN & RB, 2 Kepmen PAN & RB.	9 Permen PAN & RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB.	3 Permen PAN & RB yg mengatur penilaian mandiri RB dan perluasan RB di daerah.	100%	- Persepsi keliru bahwa reformasi birokrasi disamakan dengan perbaikan remunerasi. - Komitmen pimpinan instansi belum sepenuhnya konsisten mendukung RB - Dampak RB belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat	- Pemantapan kebijakan dan perluasan RB di pusat dan daerah - Meningkatkan kualitas pelaksanaan RB - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB - Sinergi RB dengan aspek perbaikan manajemen pemerintahan - Mendorong <i>quick wins</i> nasional pelayanan publik.	
			2. Jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan-	K/L dan Pemda	Kemen PAN dan RB	5 K/L	9 K/L	22 K/L (catatan: 20 K/L sudah disetujui dan	40 K/L (25 K/L sdh mengajukan usulan,	100% KL 60% Pemda			

No.	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status	
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	2009	2010	2011					2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			kan reformasi birokrasi					menunggu persetujuan Presiden/Perpres).	dan 15 K/L dlm persiapan pelaksanaan)				
3.	Pembinaan dan koordinasi penyusunan produk hukum dan penataan organisasi KKP	Terselenggaranya pemenuhan peraturan perundang-undangan serta organisasi dan tata laksana	Persentase pemenuhan peraturan perundang-undangan serta efektivitas dan kemitakliran hukum laut, perijinan, prizinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta pelayanan hukum yang akuntabel	%	Kemen Kelautan dan Perikanan (KKP)			115%	62,36% (sd TW-III)				
OTONOMI DAERAH Penataan Otonomi Daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah													
1.	Penghentian/Pe- mbatasan Pemekaran Wilayah	1. Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan	Jumlah Strategi Dasar Penataan Daerah	Desertada (Desain Besar Penataan Daerah)	Kemen dagri		Desertadasu dah disusun namun belum disahkan oleh DPR RI	Desertadasu dah disusun namun belum disahkan oleh DPR RI	Penyelasian RUU tentang Pembentukan DOB berdasarkan	Penyelesaian penyusunan peraturan perundangan derivatif	beberapa daerah masih diperlukan pembinaan lebih intensif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terlaksananya Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan	

No.	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status	
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	2009	2010	2011					2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		daerah sesuai dengan pp No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian/ pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru							usulan inisiatif DPR RI	UU tentang Pemda, UU Pemilu kada dan UU Kelesti-mewaan DIY, serta UU yang meng atur daerah berkarak-ter khusus dan istimewa (Aceh, DKI Jakarta, Papua & Papua Barat		kebijakan penataan daerah sampai dengan tahun 2005, yang mencakup 4 (empat) kebijakan pokok yakni: Pertama Pembentukan Daerah Otonom Baru melalui fase daerah persiapan; Kedua Penghapusan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom; Ketiga, Pengaturan Daerah otonom Kawasan yang memiliki karakteristik khusus dan Keempat : Estimasi jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia tahun 2010 - 2015	
			Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan,	%	Kemen-dagri			33 usulan pembentukan provinsi, 123 usulan pembentuk	33 usulan pembentuk an provinsi, 123		sampai saat ini sudah ada 33 usulan pembentukan kabupaten dan 14 usulan pembentukan	Pemerintah tetap berpegang pada kebijakan moratorium pemekaran	

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			dan penghapusan sesuai dengan PP No.78 tahun 2007					an Kabupaten, 14 usulan pemben-tukan Kota	usulan pembentu-kan Kabupaten, 14 usulan pembentu-kan Kota		kota. Pada tahun 2012 sedang dibahas 19 DOB inisiatif DPRI-RI.	sampai dengan ada ketentuan peraturan perundang-undangan	
			Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan Pemerintah	Daerah	Kemen- dagri		0	0			sampai dengan tahun 2011 tidak ada usulan DOB dari Pemerintah, banyaknya desakan untuk melaksanakan pemekaran daerah dari berbagai elemen masyarakat	Penyelesaian RUU tentang Pembentukan DOB berdasarkan usulan inisiatif DPR RI	●
2.	Pembinaan Fasilitas Dana Perimbangan	1. Peningkatan efektivitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak)	Persentase Provinsi, Kab/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juklak	%	Kemen- dagri		70%	75%	95%	90%	- Tingkat kesulitan dalam hal mencari data daerah-daerah mana yang telah memanfaatkan DAK sesuai Juknis	- Bagi daerah yang bermasalah akan dikordinasikan didalam acara Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama Dana Perimbangan khususnya DAK (19 bidang). - Usulan: Indikator ini untuk dipertimbang-kan kembali ditahun depan	●
			*Catatan: di tahun 2012, indikator berubah menjadi: Persentase daerah yang telah memanfaatkan DAK sesuai Petunjuk								- Pada prinsipnya daerah yang di-ukur sebagian besar patuh pada juknis yang telah ditetapkan sehingga dapat dilaksanakan sesuai kebijakan dan apabila tidak mengikuti		

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis								juknisnya maka program dan kegiatan dimaksud tidak dapat dicairkan. - Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud keberhasilannya merupakan pertimbangan untuk syarat mendapatkan DAK di tahun-tahun berikutnya.	apakah masih relevan mengingat setiap program dan kegiatan dalam DAK pasti akan mengikuti juknisnya.	
	2. Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah		Persentase daerah yang telah Optimal (100%) menyerap DAK	%	Kemen- dagri		80%	75%	40,24 %	90 %	- Progres penyerapan ini merupakan data posisi pada triwulan III, data realisasi yang sebenarnya masih akan berubah sesuai dengan penyerapan yang dilakukan oleh daerah pada triwulan	Tidak ada	
	3. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan		Jumlah rekomendasi kebijakan untuk dukungan materi sebagai	-	Kemen- dagri		1 Paket (100%)	-					

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		daerah yang akuntabel dan tranparan	masuk terhadap revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.										
		4. Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah	Jumlah Permendagri *Catatan: di tahun 2012, indikator berubah menjadi: Jumlah kebijakan /regulasi/pedo man di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Permen	Kemen- dagri		1 Permen- dagri tentang Juknis DAK	3 Permen	2 (dua) permen 2 Permen dagri dimaksud adalah : 1) Permen dagri berkaitan dengan Dana Transfer Daerah; dan 2) Permen dagri berkaitan dengan Dana Bagi	3		Dalam proses	

No.	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								hasil, yang akan difinalisasi kan pada akhir Tahun 2012				
			Jumlah Surat Edaran Mendagri	SE		1 SE	1 SE	80 %	1 SE	2 permendagri ttg Dana Bagi Hasil dan Dana Transfer ke Daerah	Bulan Desember 2012 selesai sesuai dgn target	
3.	Pembinaan Administrasi Anggaran Daerah	1. Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD	Persentase daerah yang proporsi belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung *Catatan: di tahun 2012, sasaran berubah menjadi: Persentase Daerah Provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung	%		31%	57%	54,55 % (18 provinsi)	60 %	Prosentase belanja langsung provinsi TA. 2012 adalah (54,55) (18 daerah provinsi). Sehubungan dengan adanya kebijakan nasional maka mulai TA. 2012, untuk mengukur prosentase belanja langsung pada APBD provinsi perlu dikurangi alokasi dana BOS dan bantuan Keuangan dengan pertimbangan: 1. Amanat UUD 1945 bahwa setiap daerah (provinsi maupun kab/kota) wajib	Masih dim proses progres akhir tahun yg kemungkinan besar prosentase dapat meningkat	

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											menganggarkan 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. 2. Selanjutnya, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, pemerintah provinsi mengalami kesulitan untuk menganggarkan 20% dari APBD-nya untuk sektor pendidikan, mengingat urusan bidang Pendidikan lebih banyak menjadi kewenangan kab/kota. 3. Untuk itu, untuk memenuhi ketentuan amanat UUD 1945, maka dilakukan perubahan mekanisme penganggaran dana BOS melalui terbitnya Permendagri No. 62 Tahun 2011 tentang		

No. (1)	RPJMN 2010 – 2014				K/L (6)	CAPAIAN				Target 2014 (11)	Permasalahan (12)	Tindak Lanjut (13)	Status (14)
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	SATUAN (5)		2009 (7)	2010 (8)	2011 (9)	2012 (10)				
											Pengelolaan Dana BOS. 4. Melalui Permendagri No. 62 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana BOS, dana BOS yang sebelumnya ada dalam APBD kab/kota, pada Tahun 2012 dialihkan menjadi belanja hibah pada APBD provinsi. Dengan perubahan mekanisme ini, berdampak pada bertambahnya porsi belanja tidak langsung akibat penambahan belanja hibah dana BOS. Dengan demikian berdampak pada semakin menurunnya porsi belanja langsung pada APBD provinsi. 5. Disamping itu pula, Program Kegiatan Prov yg tidak sesuai dengan		

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											kewenangannya sebagaimana diatur dalam PP 38 Tahun 2007 dialihkan menjadi Belanja Bantuan Keuangan ke Kab/Kota sehingga terjadi pengalihan Belanja Langsung menjadi Belanja Tidak Langsung. Dengan demikian berdampak pada semakin menurunnya porsi belanja langsung pada APBD provinsi.		
			Persentase rata-rata belanja modal terhadap total belanja daerah	%	Kemen- dagri		23%	21%	18,28 %	30 %	Adanya perubahan kebijakan tentang mekanisme hibah dan bansos, dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 yang awalnya provinsi mengalokasikan barang-barang yang akan dihibahkan pada jenis belanja modal tetapi sekarang hal tersebut dialihkan menjadi jenis belanja barang dan jasa.	Pada akhirnya indikator dimaksud untuk kedepan sulit untuk menjadi target ukuran apabila kebijakannya tidak menyesuaikan dengan kebijakan dalam rangka meningkatkan belanja modal.	●

No.	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status	
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	2009	2010	2011					2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			(Provinsi)										
		2. Penetapan APBD secara tepat waktu	Persentase jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu. *Catatan: di tahun 2012, indikator berubah menjadi: APBD yang disahkan tepat waktu.	70%	Kemen-dagri		91%	84%	0 %	90 %	Masih menunggu jadwal evaluasi APBD TA. 2013 yang dilaksanakan pada bulan pertengahan oktober sampai dengan 31 Desember 2012. Sementara untuk kegiatan ini baru dilakukan rapat-rapat persiapan dalam rangka evaluasi APBD TA. 2013.	Proses menunggu evaluasi	
4.	Pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah	1. Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase daerah provinsi, Kab/Kota ber-LKPD dengan status WTP.	15%	Kemen-dagri	2,68	60	3	9	16	Dalam rangka Pelaksanaan pembinaan daerah provinsi untuk menuju Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memenuhi indikator kedisiplinan anggaran yang akan bermuara kepada peningkatan status pertanggungjawaban menuju WTP telah dilaksanakan pembinaan di 10 provinsi agar lebih baik dari segi	Masih dalam rangka proses pembinaan agar provinsi memiliki LKPD yang memenuhi indikator kedisiplinan anggaran yang akan bermuara kepada peningkatan status pertanggungjawaban menuju WTP.	

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2. Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Persentase penetapan dan penyampaian Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.	60%	Kemen-dagri		63%	90%	78,79 %	90 %	Dimungkinkan adanya perubahan data pada akhir tahun akuntabilitasnya.	Masih dalam proses evaluasi pertanggung-jawaban APBD propinsi	
			*Catatan: di tahun 2012, indikator berubah menjadi: Persentase penetapan Perda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu										
5.	Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke daerah	1. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer	Persentase ketepatan penyaluran jumlah dana transfer ke daerah	%	Kemen-keu		100%	100,18%	50,18%	100%			

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		2. Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah	Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah	100% (4 hari)	Kemen- keu		100% (4 hari)	100% (4 hari)	100% (4 hari)	3 hari			
6.	Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah	1. Tersusunnya UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan terselenggaranya Pilkada yang efisien	1. Persentase revisi terbatas UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan efisiensi pelaksanaan Pilkada	100%	Kemen- dagri		Masih menunggu pembahasan dengan DPR	Masih menunggu pembahasan dengan DPR			Keterbatasan sumberdaya, sehingga belum seluruhnya Pejabat Negara di daerah dan DPRD difasilitasi peningkatan kapasitasnya melalui orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan	Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D)	
			2. Jumlah UU tentang PEMILU Kepala Daerah dan	-	Kemen- dagri		Dalam proses penyusunan Naskah Akademik	1 RUU (Draft RUU Pilkada telah disampai-			Luasnya diskresi kewenangan Kepala Daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/pilkada bagi KDH dan Wakil KDH yang	

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Wakil Kepala Daerah					kan kepada Presiden RI melalui Setneg yg selanjutnya menunggu Ampres untuk pembahas-an antara Pemerintah dengan DPR-RI)			cenderung menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sehingga cukup banyak pejabat publik di daerah berurusan dengan aparat penegak hukum. Dalam kurun waktu 2004-2012 sebanyak 275 kepala daerah/wakil kepala daerah (20 gubernur, 7 wakil gubernur, 148 bupati, 45 wakil bupati, 37 walikota dan 18 wakil walikota) berurusan dengan aparat penegak hukum	berakhir masa jabatannya pada tahun 2013	
SUMBER DAYA MANUSIA													
Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011													
1.	Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur	1. Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (UU Aparatur Sipil Negara) 2. Tersusunnya kebijakan tentang penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP)	Jumlah RUU dan peraturan pelaksanaannya	1 RUU	Kemen PAN dan RB	1 RUU	1 RUU	1 RUU ASN (dalam pembahas-an) Usul inisiatif DPR	1 RUU ASN (dim pembahas-an DPR dg pemerint-tah)		- Komposisi PNS belum ideal (jabatan, pendidikan dan distribusi antar instansi) - perlu ditingkatkannya disiplin dan kinerja pegawai; - belum diterapkannya sistem remunerasi	- Menyempurnakan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang SDM Aparatur, khususnya penyelesaian RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)	●
			Jumlah PP	1PP	Kemen PAN dan RB	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP tentang penilaian sasaran kinerja pegawai				●

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status	
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.	Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur	1. Tersusunnya kebijakan (pp) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS	Jumlah PP	1PP	Kemen PAN dan RB	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS	-	yang berbasis kinerja; - belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan kinerja; - penerimaan CPNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan - diklat belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja.	- mengendalikan jumlah, distribusi dan komposisi PNS - melakukan penataan pegawai, guna menjamin jumlah dan kualifikasi pegawai di masing-2 unit kerja dan instansi sesuai dengan kebutuhan - mengembangkan sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada prestasi kerja (kinerja) - Menyempurnakan sistem remunerasi agar memenuhi prinsip adil, layak dan transparan sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab	●	
											(SKP) RPP sudah disampaikan kepada Presiden melalui Setneg).			
											1 RPerpres tentang Pola Dasar Karir PNS			
											1 RPP tentang diklat dalam jabatan (Revisi PP 101/2000)			
											1 RPP tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural			
2.	Tersusunnya kebijakan tentang diklat dalam jabatan	Terbit PP tentang diklat dalam jabatan	1 PP	Kemen PAN dan RB	-	1 RPP	1 RPP	1 RPP tentang diklat dalam jabatan (Revisi PP 101/2000)	-	-	-	-	-	●
2.	Tersusunnya kebijakan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Terbit PP tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	1PP	Kemen PAN dan RB	-	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	-	-	-	-	●
2.	Penyusunan kebijakan perencanaan SDM aparatur	1. Tersusunnya kebijakan (pp) tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS	Jumlah PP	1PP	Kemen PAN dan RB	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS	-	-	-	-	●
2.	Tersusunnya kebijakan (pp)	Jumlah PP	1PP	Kemen PAN dan RB	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP	1 RPP tentang sistem pengadaan /rekrutmen dan Seleksi PNS	-	-	-	-	●

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		tentang Kebutuhan Pegawai			RB				Kebutuhan Pegawai (dalam pembahasan Interdep) dan telah terbit Per. Men. PAN dan RB No. 26 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah			nya - Mengembangkan sistem Diklat yang berbasis kompetensi dan kinerja - meningkatkan netralitas, etika dan disiplin serta perlindungan hukum PNS - mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian	
3.	Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM aparatur	6. Tersusunnya kebijakan (UU/PP) ttg remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri	Jumlah PP	5 PP	Kemen PAN dan RB		1 RPP	1 RPP	1 RPP ttg remunerasi dan tunjangan kinerja Pegawai Negeri (dalam pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan BKN).				

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		7. Tersusunnya kebijakan ttg sistem pengelolaan dana pensiun PNS	Jumlah pp	1pp	Kemen PAN dan RB		1 RPP	1 RPP	1 RPP ttg sistem pengelolaan dana pensiun PNS (dalam pembahasan dengan Kemen. Keuangan dan BKN). - Sudah ditetapkan PP46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.				
REGULASI													
Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011													
1.	Penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum departemen	Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan	Jumlah perda yang dikaji	9.000 perda	Kemen-dagri		3.000 perda	7650 Perda yg telah dikaji dan dari hasil kajian tersebut sebanyak	2250 Perda (75%)		Banyak daerah yang belum menyampaikan respon atas klarifikasi MDN	Telah dikeluarkan SE MDN No. 188.34/3385/SJ tgl 4 sept 2012	

No.	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan					239 Perda yang bermasalah (data sd September 2011 /laporan triwulan III)					
2.	Perumusan Kebijakan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang PDRD	1. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah 2. Mewujudkan kebijakan daerah dan retribusi daerah yang mendukung perimbangan keuangan pusat dan daerah	Persentase jumlah kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat diimplementasikan	%		100%	100%	-	85%			●
			Realisasi janji pelayanan evaluasi Perda/ Raperda PDRD ke pihak eksternal dalam bentuk rekomendasi Menteri Keuangan	Hari		125%	84%	100%	12 hari			●
			Evaluasi dan rekomendasi Perda dan Raperda PDRD bermasalah	%		106%	154%	-	-			●

No.	RPJMN 2010 – 2014			K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Program transisi/pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah	%		100%	-	-	-			●
			Pengalihan BPHTB menjadi Pajak Daerah	%		100%	-	-	-			●
			Penerapan Pajak Rokok menjadi Pajak Daerah	%		100%	-	-	-			●
			RPP tentang sistem pemungutan pajak daerah	%		100%	-	-	-			●
			RPMK pemberian sanksi terhadap daerah yang melanggar ketentuan PDRD	%		100%	-	-	-			●
			Mengkaji penerapan PBBKB di daerah berkaitan dengan harga dan subsidi BBM	%		100%	-	-	-			●
SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH												
Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah												

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN					Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.	Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah	1. Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah	1.Jumlah SPM yang ditetapkan	15 SPM	Kemen-dagri		13 SPM	Secara keseluruhan telah ditetapkan 14 SPM yakni antara lain : SPM Bidang Kesehatan, SPM bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/ Kota	15 SPM		Untuk Penerapan SPM di daerah, masih diperlukan pengembangan kapasitas terhadap sumber daya manusia, optimalisasi sumber-sumber pendanaan, serta implementasi regulasi pendukung bagi daerah.	Pengawasan dan percepatan penerapan 15 SPM di daerah		
			2.Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diterapkan oleh Daerah	10 SPM	Kemen-dagri		Fasilitasi Penerapan atas 5 SPM	Hingga saat ini terakumulasi 10 SPM yg telah diterapkan di daerah yakni : SPM bidang Kesehatan, SPM bidang Lingkungan Hidup, SPM bidang Sosial, SPM bidang BKKBN, SPM bidang	15 SPM		Penerapan SPM di daerah belum optimal karena keterbatasan sumberdaya dan regulasi pendukung	Pengawasan dan percepatan penerapan 15 SPM di daerah		

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Pemberda- yaan Perempuan, SPM bidang Ketahanan pangan, SPM bidang Pendidikan, SPM bidang Ketenaga- kerjaan. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
	Untuk tahun 2012 sasaran berubah menjadi: 1a. Meningkatkan Implementasi urusan pemerintahan daerah I dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.	Untuk tahun 2012 indikator berubah menjadi: Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintah daerah I diterapkan oleh Daerah			Kemen- dagri						Penerapan SPM di daerah belum optimal karena keterbatasan sumberdaya dan regulasi pendukung	Kemendagri secara kontinyu berkoordinasi dgn sektor terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Memantau perkembangan penerapan SPM di daerah	

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		1b. Meningkatkan Implementasi urusan pemerintahan daerah II dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.	Penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah lingkup urusan pemerintahan daerah II		Kemen-dagri						Penerapan SPM di daerah belum optimal karena keterbatasan sumberdaya dan regulasi pendukung	Kemendagri secara kontinyu berkoordinasi dgn sektor terkait memfasilitasi Pemerintah Daerah dan Memantau perkembangan penerapan SPM di daerah	●
2.	Peningkatan koordinasi dan evaluasi program pelayanan publik	1. Terlaksananya asistensi untuk mendorong penerapan OSS/PTSP	Persentase Pemda yang menerapkan OSS (pelayanan terpadu satu pintu)	75%	Kemen PAN dan RB		78% (417) OSS	79% (420 OSS)					●
3.	Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pelayanan publik	1. Tersusunnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Jumlah PP tentang peraturan pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (PP tentang Pelaksanaan UU ttg Pelayanan Publik, dan Perpres ttg Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi dalam pelayanan	1 PP dan 1 Perpres (PP ttg Pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik dan Perpres ttg Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi dalam pelayanan	Kemen PAN dan RB	1 RPP dan 1 R-Perpres	1 RPP dan 1 R-Perpres	1 RPP dan 1 R-Perpres	1 RPP dan 1 R-Perpres (RPP tentang Pelaksanaan UU ttg Pelayanan Publik, dan Rancangan Perpres ttg Mekanisme dan ketentuan pembayaran		- Kualitas pelayanan publik belum dapat memenuhi harapan masyarakat - Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik masih terbatas - Kapasitas dan perilaku SDM pelayanan publik belum sepenuhnya profesional, ramah dan kinerjanya optimal	- Implementasi UU 25/2009 dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Perbaikan manajemen pelayanan secara profesional - Pengembangan manajemen pengaduan - Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana - Evaluasi kinerja	●

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			publik)	yan ganti rugi dalam pelayan an publik					ran ganti rugi dalam pelayanan publik)			pelayanan	
4.	Peningkatan Koordinasi dan evaluasi program pelayanan di bidang kesejahteraan sosial	1. Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah PermenPAN & RB	Permen PAN & RB tentang Juknis Standar Pelayanan Publik	Kemen PAN dan RB		0 (menunggu diselesaikannya PP pelaksanaan UU no. 25 tahun 2009).	1 Rancangan PermenPAN & RB	1 Ranc. Permen PAN & RB tentang percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik				
DATA KEPENDUDUKAN													
Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011													
*Catatan: substansi inti di tahun 2012 berubah menjadi: Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu													
1.	Pengembangan sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu	Terlaksananya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.	1. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk	497 Kab/Kota	Kemen-dagri		330 kab/kota	167 kab/kota					

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			2. Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari	24,75 juta jiwa di 75 kabupaten/kota	Kemen-dagri		masih di dalam proses persiapan (proses lelang)	Perekaman e-KTP untuk 34,5 juta penduduk	Hasil pelayanan perekaman e-KTP secara massal telah mencapai 147.411.969 jiwa. Perkem-bangan penyediaan blangko E-KTP yg sudah dicetak dan dilengkapi dgn chip telah mencapai 112 juta keping, personalisasi sejumlah 68,55 juta keping dan telah didistribusi kan sejumlah 49,6 keping		Penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2011 sebanyak 65 juta keping diusulkan untuk ditampung pada APBN 2013	✓Telah diusulkan kpd DPR RI, Menkeu dan Men PPN (Bappensa) agar sisa pekerjaan 2011 dapat ditampung dalam APBN 2013 ✓Mengevaluasi secara berkala setiap minggu perkembangan persiapan maupun pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban Konsorsium PNRI berkaitan dengan e-KTP; ✓Memberikan teguran kepada Konsorsium apabila pada saat yang telah ditentukan belum bisa menyelesaikan pekerjaannya, baik secara lisan maupun	

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												tertulis ✓Memfasilitasi bahkan ikut membantu kelancaran pelaksanaan apabila kondisinya sudah sangat mendesak seperti menyurati pihak Bea dan Cukai di bandara, ikut membantu penginstalan peralatan dan jaringan komunikasi data melalui Tim Teknis dan Tim Supervisi	

LAMPIRAN 2
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 2: PENDIDIKAN
Tahun 2010-2012

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan ^{d)}	Tindak Lanjut ^{e)}	Status
	Substansi inti / Kegiatan / Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan		2009 ^{a)}	2010 ^{b)}	2011 ^{b)}	2012 ^{c)}				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1 AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH:													
Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.													
a	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014.	APM SD/SDLB/ MI/Paket A	%	Kemen Dikbud dan Kemenag	95,23	95,41	95,55	95,69 ^{a)}	96,00			
	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah												
b	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	Meningkatnya APM pendidikan setingkat SMP dari 73% di 2009 menjadi 76% di 2014	APM SMP/SMPLB/ MTs/ Paket B	%	Kemen Dikbud dan Kemenag	74,52	75,64	77,71	75,40 ^{a)}	76,00			
	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah												
c	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMK	Meningkatnya APK pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85% di 2014.	APK SMA/SMK/ SMLB/MA/ Paket C	%	Kemen Dikbud dan Kemenag	69,60	70,53	76,50	79,0 ^{a)}	85,00			
	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA/SMLB												
	Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah												

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan ^{d)}	Tindak Lanjut ^{e)}	Status
	Substansi inti / Kegiatan / Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan		2009 ^{a)}	2010 ^{b)}	2011 ^{b)}	2012 ^{c)}				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
d	Penyediaan subsidi Pendidikan SD/SDLB berkualitas	Memantapkan implementasi BOS.	Jumlah siswa penerima dana BOS: SD/SDLB SMP/SMPLB MI/Salafiyah Ula/MTs/ Salafiyah Wustha	siswa	Kemen Dikbud dan Kemenag	27.130.968 9.465.836 5.946.329	26.630.889 9.387.670 6.184.150	26.701.267 9.364.983 6.078.338	27.150.000 ^{*)} 9.430.000 ^{*)} 6.368.538	28.211.000 10.870.000 7.245.976	1. Pencairan dana BOS pada lembaga Pondok Pesantren (PPs) lebih lam-bat dibandingkan pencairan pada madrasah; 2. Tingkat penyerapan da-na BOS pada PPs sangat rendah karena minat masyarakat untuk menyeko-lahkan anaknya ke lembaga pendidikan for-mal semakin meningkat. 3. Tim Manajemen BOS Provinsi masih ada yang melakukan pendataan pada setiap triwulan, khususnya pada PPs Ula dan Wustha	1. Melakukan pe-nyesuaian data dan anggaran agar tidak terjadi kurang bayar dana BOS 2. Untuk mempercepat realisasi dana BOS pada triwulan ke-3	

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan ^{d)}	Tindak Lanjut ^{e)}	Status
	Substansi inti / Kegiatan / Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan		2009 ^{a)}	2010 ^{b)}	2011 ^{b)}	2012 ^{d)}				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
e	Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah serta Pembinaan, Pengembangan, Kegrifikaan dan Pendidikan	Menurunkan harga buku standar di tingkat sekolah dasar melalui pembelian dan pengalihan hak cipta buku teks pelajaran.	Pengalihan Hak Cipta sejumlah judul buku teks pelajaran : SD / sederajat SMP / sederajat SMA / sederajat SMK / sederajat	judul	Kemen Dikbud	1.232	301	301	330	331			
				judul		507	179	96	30 ^{a)}	30			●
				judul		219	47	45	54 ^{a)}	53			
				judul		284	49	154	187 ^{a)}	189			
				judul		222	30	9	59 ^{a)}	59			
	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK	Menyediakan sambungan internet ber- <i>content</i> pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar.	Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	sekolah	Kemen Dikbud	n.a	9.352	12.087	65,0 ^{a)}	80,0%			●
2.	AKSES PENDIDIKAN TINGGI: Peningkatan APK pendidikan tinggi menjadi 25% di 2014	Meningkatnya APK pendidikan tinggi menjadi 25% di 2014	APK pendidikan tinggi	%	Kemen Dikbud	21,57	26,34	27,09	28,3 ^{a)}	30,0			●
3. METODOLOGI: Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (<i>teaching to the test</i>), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011; dan Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012													

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan ^{d)}	Tindak Lanjut ^{e)}	Status
	Subtansi inti / Kegiatan / Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan		2009 ^{a)}	2010 ^{b)}	2011 ^{b)}	2012 ^{c)}				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan 100% pada 2014													
a.	Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan	Diterapkannya metodologi pendidikan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia	Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional dengan memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia	%	Kemen Dikbud	n.a	80	100	100 ^{a)}	100			
b.	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah	Tersedianya Model Kurikulum dan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan	%	Kemen Dikbud	n.a	10	15	25 ^{a)}	100			
4. PENGELOLAAN:													
Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i> , mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten.													
a.	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Meningkatnya kapasitas kepala sekolah semua jenjang pendidikan sehingga mampu berperan sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul	Persentase kepala sekolah TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan kepala Sekolah terakreditasi yang berkualifikasi menurut kabupaten/kota	% (setara dengan jumlah orang)	Kemen Dikbud	n.a	15.23 (36.662 orang)	19,65 (47.306 orang)	15,51 ^{a)}	100,0			

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan ^{d)}	Tindak Lanjut ^{e)}	Status
	Substansi inti / Kegiatan / Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan		2009 ^{a)}	2010 ^{b)}	2011 ^{b)}	2012 ^{c)}				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
b.	Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Meningkatnya kapasitas pengawas sekolah untuk memperkuat perannya sebagai entitas <i>quality assurance</i>	Persentase pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengikuti pelatihan pengawas terakreditasi yang berkualitas menurut kabupaten/kota	% (setara dengan jumlah orang)	Kemen Dikbud	n.a	14,78 (21.558 orang)	21,96 (32.030 orang)	50,0 ^{a)}	90,0			
KURIKULUM:													
Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.													
5.	Penyediaan Sistem Pembelajaran, Penyempurnaan Kurikulum	Tesusunya kurikulum sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan	Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneur-ship	T	Kemen Dikbud	n.a	110	161	161 ^{a)}	161 ^{a)}			
		Jumlah model kurikulum yang disusun: ➢ SD/MI ➢ SMP/MTs ➢ SMA/MA ➢ SMK	dokumen	Kemen Dikbud	n.a	4	4	4 ^{a)}	15				
						n.a	1	1	1 ^{a)}	4			
						n.a	1	1	1 ^{a)}	3			
						n.a	1	1	1 ^{a)}	3			
						n.a	1	1	1 ^{a)}	5			
KUALITAS:													
Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.													
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan	Meningkatnya kualitas guru, pengelolaan dan	Persentase guru yang mengikuti peningkatan	%	Kemen Dikbud	110.494 orang	20	40	57,58 ^{a)}	100			

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan ^{d)}	Tindak Lanjut ^{e)}	Status
	Substansi inti / Kegiatan / Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan		2009 ^{a)}	2010 ^{b)}	2011 ^{b)}	2012 ^{c)}				
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Tenaga Kependidikan	layanan sekolah melalui: Program remediasi kemampuan mengajar guru;	kompetensi dan profesionalisme										
	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
	Madrasah												
b.	Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan	Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar;	Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun	Dokumen	Kemen Dikbud	n.a	4	20	10 ^{a)}	20			●
	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik & Tenaga Kependidikan												
	Madrasah												
c.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dikti	Sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014;	Persentase sertifikasi ISO 9001:2008 - PTN - PTS - SMK	% % %	Kemen Dikbud	n.a n.a n.a	29 18 26	70 10 24,41	74 ^{a)} 38 ^{a)} 30,0 ^{a)}	100 50 100			●
	Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMK												
	Penyediaan Layanan Kelembagaan Peningkatan Akses dan Mutu	Membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional;	Jumlah PT mengembangkan Kerjasama Kelembagaan Dalam dan Luar	%	Kemen Dikbud	n.a	40	48	56 ^{a)}	72			●
d.													

No.	RPJMN 2010 – 2014				K/L	CAPAIAN				Target 2014	Permasalahan ^{d)}	Tindak Lanjut ^{e)}	Status
	Substansi inti / Kegiatan / Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan		2009 ^{a)}	2010 ^{b)}	2011 ^{b)}	2012 ^{c)}				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pendidikan Tinggi Islam		Negeri										
e.	Penyediaan Layanan Akademik Program Studi	Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014;	Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional	PT	Kemen Dikbud	7	8	3	3	11			●
f.	Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan	Memastikan perbandingan gurumurid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40	Persentase kab/kota yang memiliki perbandingan guru dan murid: - 1:32 untuk SD/MI - 1:40 untuk SMP/MTs	%	Kemen Dikbud	n.a	48,0 47,4	51,2 50,5	75,0 ^{a)} 53,7 ^{a)}	100,0 60,0			●
g.	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah	Memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.	Penyusunan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk pendidikan agama dan keagamaan	%	Kemenag	-	Tersusun-nya 100% Draft SNP	100% tersosialisasikan ke seluruh Kantor Kemenag Kab./Kota	Penerapan secara bertahap ^{a)}	Penerapan secara bertahap			●

Keterangan:

- a) Capaian tahun 2009 yang masih kosong karena indikator belum dipantau dalam RPJMN 2009-2014
- b) Capaian tahun 2010 dan 2011 sesuai dengan Laporan Evaluasi 1 Tahun RPJN 2010-2014 dan Laporan Evaluasi 2 Tahun RPJMN 2010-2014
- c) Sampai dengan Juni 2012
- d) Permasalahan pelaksanaan dalam periode 2010-2012
- e) Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam tahun 2012-2014 untuk mencapai target 2014
- *) Data sementara, sesuai dengan target tahun 2012.

LAMPIRAN 3
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 3:Kesehatan
Tahun 2010—2012

NO.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status		
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	2009	2010	2011					2012 ¹⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1. KESEHATAN MASYARAKAT														
Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi: penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014); penurunan tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014); pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014 penyediaan akses sumber air bersih yang terjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang terjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014														
1.	Pembinaan Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak	Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014)	Angka Kematian Ibu (AKI)	persen-mil (pcm)	Kemendes	228	n.a	n.a	n.a	118	▪ Akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah baik, namun kualitas pelayanan masih belum optimal; ▪ Terbatasnya ketersediaan sumber daya strategis untuk kesehatan ibu; ▪ Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu.	▪ Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu; ▪ Peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam upaya kesehatan ibu; serta ▪ Pemberdayaan keluarga dan masyarakat.	●	
			Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN))	persen (%)		84,3	79,82	81,25	88,64	90				●
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (KA)	Persen (%)		83,32	85,56	88,27	90,18	95				●
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar	Persen (%)		n.a	n.a	40,85	76,36	100				●
2	Pembinaan Pelayanan	Penurunan tingkat kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB)	persmil (%)	Kemendes	34	34	34	32	24	▪ Masih rendahnya akses	▪ Mendorong persalinan di	●	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kesehatan Anak	bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014)	Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	persen (%)		80,6	84,01	90,51	33,59	90	masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan; ■ Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan; ■ Koordinasi dan integrasi lintas program masih belum optimal; ■ Pemberdayaan keluarga/ masyarakat terhadap penggunaan buku KIA yang belum optimal; serta ■ Masih rendahnya cakupan pelayanan antenatal.	fasilitas kesehatan; ■ Mendorong pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan untuk meningkatkan kinerja; ■ Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan; ■ Meningkatkan koordinasi dan integrasi lintas program; ■ Memperluas jejaring kesehatan ibu dan anak (KIA); ■ Meningkatkan omintem daerah terhadap ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang merata; ■ Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga	    
3	Pembinaan Imunisasi dan Karantina Kesehatan	Pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014	Persentase bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	persen (%)	Kemendes	n.a	53,8	84,7	86,8	90			
4	Bantuan Operasional Kesehatan	Tersedianya Bantuan Operasional (BOK) untuk puskesmas	Jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menjangkau pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Puskesmas	Kemendes	n.a	n.a	8.740	9.323	9.000			

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												keehatan; ▪ Meningkatkanp penggunaan Form MTBM pada kunjungan neonatus (KN); ▪ Memasukan komponen KN pada buku KIA; ▪ Sosialisasi pelayanan KN standar; ▪ Memperbaiki dan meningkatkan rvallans keehatan anak; serta ▪ Pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Buku KIA.	
5	Penyehatan lingkungan	Penyediaan akses sumber air bersih yang terjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang terjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat	persen (%) persen (%)	Kemendes	45,7 86,46	45,7 86,46	43,37 ¹⁾ 90,8 ¹⁾	41,66 ⁶⁾ 95,39 ⁶⁾	67 100	- Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan, yang ditandai dengan masih rendahnya akses penduduk terhadap air	Penyediaan akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi dasar berkualitas dan perubahan perilaku <i>hygiene</i> dan sanitasi, melalui peningkatan	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	persen (%)		55,5	55,5	55,17 ⁷⁾	56,24 ⁸⁾	75	minum dan sanitasi layak. - Masih rendahnya prioritas pembangunan air minum dan sanitasi di Pemda - Belum memadainya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah pusat & daerah kepada masyarakat desa; - Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi; serta Masih perlunya peningkatan kualitas rencana pembangunan air minum dan sanitasi kab/kota	pelayanan air minum di pembangunan sistem penyediaan air minum di 275 kawasan MBR perkotaan, 157 ibu Kota Kecamatan (KAPET, Pemekaran, Perbatasan, Pelabuhan, Perikanan, MP3EI, kawasan nelayan pulau terpencil, dan terluar), 3 kawasan regional, dan 1.610 desa rawan air/tertinggal; serta peningkatan pelayanan infrastruktur sanitasi yang mencakup infrastruktur air limbah sistem on-site di 567 kab/kota, infrastruktur air limbah sistem off site di 13 kab/kota.	
6	Pengaturan, pembangunan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum	1.063 kawasan dan 4.650 desa	Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum	Kawasan dan desa	Kemen PU	n.a	90 kawasan, 170 IKK, 2807 desa	234 kawasan, 157 IKK, 1449 desa	579 kawasan, 196 IKK, 2314 desa	677 kawasan, 820 IKK, 4650 desa			
7	Pengaturan, pembangunan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan sanitasi dan persampahan	38*) kawasan*) bukan target kumulatif	Jumlah kawasan dan kab/kota yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase) dan persampahan	Kawasan, kab/kota		n.a	93 kawasan, 87 kab/kota	203 kawasan, 156 kab/kota	449 kawasan, 160 kab/kota	250 kawasan, 481 kab/kota			

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2. SARANA KESEHATAN													
Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014													
1	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014	Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas Dunia (<i>world class</i>)	kota	Kemendes	n.a	2	2	4	5	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan; serta Fokus program untuk meningkatkan akses masyarakat di kawasan daerah terpendil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Pembinaan dan pendampingan RS untuk meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan hingga memenuhi standar bertaraf internasional.	
3. OBAT													
Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada tahun 2010													

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Peningkatan ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	Diberlakukannya DOEN dan HET dalam pengadaan obat generik	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	persen (%)	Kemenkes	n.a	82	87	92,85	100	Proses pengawasan obat dan makanan di lapangan yang masih perlu ditingkatkan.	Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu, dan penggunaan obat.	●
4. ASURANSI KESEHATAN NASIONAL													
Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014													
1	Pembinaan Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase cakupan keluarga miskin yang memiliki jaminan kesehatan	persen (%)	Kemenkes	n.a	59,1	63,1	64,58	100	Jaminan kesehatan bagi masyarakat diutamakan bagi masyarakat miskin, namun masih ditemukan kendala pendataan di lapangan.	Mendorong pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh pemerintah daerah, serta Melakukan pendataan kepesertaan dengan lebih optimal.	●
2	Pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin (jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	Persentase RS pasien penduduk miskin peserta program jamkesmas	Persen (%)		n.a	n.a	80,65	90,4	95			●
3	Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin (jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	puskes mas		n.a	8.737	9.125	9.510	9.000			●
5. KELUARGA BERENCANA													
Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014													
1	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500	1. Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapat-	juta jiwa	BKKBN	2,95	3,77	4,29	2,15	4,05	■ Penggunaan alat kontrasepsi masih didominasi oleh jenis suntik dan	■ Meningkatkan advokasi dan KIE mengenai KB, khususnya metode	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		klirik KB pemerintah dan swasta	kan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta*) 2. Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta *)	juta jiwa	BKKBN	13,10	14,26	14,60	14,57	13,10	pil (metode kontrasepsi jangka pendek); ■ Belum meratanya promosi dan konseling KB dan Kesehatan reproduksi di 23.500 klinik KB; ■ Masih lemahnya kontrol data dan informasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan; serta ■ Belum optimal dan sinerginya pemanfaatan Jankesmas, Jampersal dan Jamkesda dalam pelayanan KB di fasilitas kesehatan Pemerintah dan Swasta.	kontrasepsi jangka panjang/ MKJP serta penyediaan dukungan sarana peralatan untuk klinik KB dan Rumah Sakit bagi peningkatan pelayanan MKJP; ■ Meningkatkan penggerakan pada pelayanan statis bagi KPS dan KSI, dengan lebih banyak melibatkan kader, toga dan toma serta kegiatan-kegiatan sosial; ■ Mendorong optimalisasi sistem distribusi alat kontrasepsi dari SKPD KB ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui koordinasi dan	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												menyediakan dukungan operasional; ■ Penguatan peran Puskesmas dalam pelayanan KB dalam MKJP berkoordinasi dengan Dinkes dan Pemda; serta ■ Meningkatkan sosialisasi mengenai KB dalam Jampersal.	
6. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR													
Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan: Menurunnya prevalensi <i>Tuberculosis</i> dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus malaria (<i>Annual Parasite Index-API</i>) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.													
1.	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung	Prevalensi tuberkulosis	persen- mil (pcm)	Kemenkes	326	224	289	281	224	Masih terdapat perbedaan kapabilitas daerah dalam mengatasi masalah kesehatan; Masih kurangnya koordinasi daerah; serta Data lapordaerah masih belum	Peningkatan program KIE kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat; Penguatan surveilans lapangan di daerah; Peningkatan kemampuan	●
			Prevalensi HIV	persen (%)		n.a	0,2	0,3	n.a	< 0,5			●
			Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	persen (%)		73,1	78,3	82,2	75,59	90			●
			Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang	persen (%)		91	91,2	80,42	84,35	88			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			disembuhkan								optimal.	petugas kesehatan di daerah; serta ■ Penajaman sasaran program.	
			Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS	Persen (%)		66,2	57,5	n.a	79,5 ^{a)}	95			
2	Pengendalian penyakit bersumber binatang	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang	Annual Parasite Index (API)	Pemil (%)	Kemendes	1,85	1,96	1,75	1,69	1			

Keterangan :

¹⁾ Data capaian sampai dengan Bulan Juni 2012

²⁾ Permasalahan pelaksanaan dalam periode 2010-2012

³⁾ Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam tahun 2012-2014 untuk mencapai target 2014

⁴⁾ Data bersumber dari SDKI, 2012

⁵⁾ Data bersumber dari laporan kemendes, 2011

⁶⁾ Data bersumber dari laporan kemendes, 2012

⁷⁾ Data bersumber dari profil kesehatan, 2011

LAMPIRAN 4
Pencapaian Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2010—2012

NO.	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1. BANTUAN SOSIAL TERPADU:													
Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidental atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan <i>Parenting Education</i> mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012													
1	Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan	Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan	%	Kemendes	48,00	59,07	63,1	64,58	100,00	Cakupan jaminan perlindungan kesehatan untuk seluruh masyarakat masih terbatas, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal	Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan, melalui: (1) Penerapan asuransi kesehatan nasional untuk masyarakat miskin dan diperluas secara bertahap; (2) Perluasan cakupan jaminan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit; dan (3) Penyediaan pembiayaan jaminan persalinan (Jampersal) yang mencakup pelayanan antenatal,	

NO.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											persalinan, nifas, dan KB, didukung dengan penyelesaian rancangan perundang-undangan SJSN merujuk pada Undang-Undang BPJS, implementasi transformasi BPJS, dan implementasi kebijakan roadmap kepesertaan menyeluruh jaminan kesehatan.	
2	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di puskesmas	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin	Unit	8.541	8.737	9.125	9.510	9.000			●
3	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS	Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas	Persen	62,00	75,00	80,60	85,00	95,00	Belum semua RS bekerjasama (MoU) untuk Program Jamkesmas	Advokasi dan sosialisasi program Jamkesmas	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah	Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)	Jumlah peserta KB baru KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) *)	Juta jiwa	BKKBN	2,95	3,77	4,29	2,15 dari target 3,97	4,05	(1) Penggunaan alat kontrasepsi masih didominasi oleh jenis suntik dan pil (metode kontrasepsi jangka pendek); (2) Masih rendahnya pengetahuan PUS KPS dan KSI mengenai KB dan kespro akibat belum meratanya promosi, KIE, dan konseling KB dan Kesehatan reproduksi; (3) Masih lemahnya kontrol data dan informasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan; dan (4) Belum optimal dan sinerginya pemanfaatan Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda dalam pelayanan KB di fasilitas kesehatan	(1) Meningkatkan advokasi dan KIE mengenai KB, khususnya metode kontrasepsi jangka panjang/MKJP serta penyediaan dukungan sarana peralatan untuk klinik KB dan Rumah Sakit bagi peningkatan pelayanan MKJP; (2) Mendekatkan pelayanan KB kepada sasaran PUS miskin dengan menggunakan pelayanan mobile secara berkala dan meningkatkan kualitas pelayanan KB melalui pemberian informed choice; (3) Meningkatkan penggerakan pada pelayanan statis bagi KPS dan KSI, dengan	●
			Jumlah peserta KB aktif KPS dan KSI yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) *)	Juta jiwa	BKKBN	13,10	14,26	14,60	17,33	13,10			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Pemerintah dan Swasta	lebih banyak melibatkan kader, toga dan toma serta kegiatan-kegiatan sosial; (4) Mendorong optimalisasi sistem distribusi alat kontrasepsi dari SKPD KB ke fasilitas pelayanan kesehatan melalui koordinasi dan menyediakan dukungan operasional; (5) Penguatan peran Puskesmas dalam pelayanan KB MKJP berkoordinasi dengan Dinkes dan Pemda; dan (6) Meningkatkan sosialisasi mengenai KB dalam Jampersal	
5	Peningkatan Kesertaan KB Galcitas, Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus	Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB di daerah galcitas, wilayah khusus dan sasaran khusus	Jumlah mitra kerja yang telah mendapatkan fasilitasi pembinaan kesertaan KB galcitas,	Mitra Kerja	BKKB	n.a	n.a	2	4	6	Belum optimalnya penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus (kepuhuan, Galcitas dan kumuh miskin	Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder	

NO.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			wilayah khusus, dan sasaran khusus **)							perkotaan)	(pemangku kepentingan) dan meningkatkan peran serta mitra kerja	
6	Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi	Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana provinsi	Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di Wilayah khusus dan Galcis (6 dan 12 kali dalam 1 tahun **)	Frekuensi (kegiatan)	n.a	612	612	36	612	Belum optimalnya penggarapan KB di wilayah dan sasaran khusus (kepulauan, Galcis dan kumuh miskin perkotaan)	(1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB di daerah kepulauan melalui kerjasama dengan TNI dan Polri; (2) meningkatkan pelayanan operasional Mobil Unit Pelayanan KB di wilayah khusus/kumuh miskin perkotaan	●
7	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1	Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB *)	Persen	n.a	90,02 ***)	90,4 ***)	90,59 ***)	n.a	Masih lemahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan upaya pembinaan, pemberdayaan dan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya KPS dan KS I yang merupakan kelompok UPPKS untuk mewujudkan kemandirian dalam membantu	●
			Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan *)	Unit	34 (1 Nasional dan 33 provinsi)	34 (1 Nasional dan 33 provinsi)	3		2			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN					PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾	TARGET 2014			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Jumlah mitra kerja yang melakukan pendampingan kepada kelompok UPPKS *)	Unit		n.a	3	3		3		memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif	●
8	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, SMK, dan PTN/PTS	Tersalurkannya beasiswa pendidikan bagi siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA, SMK, dan mahasiswa	Jumlah siswa penerima beasiswa miskin:	Siswa	Kemen Diknas	1.796.800	2.246.800	3.807.845	3.530.305	3.103.210			●
			SD/SDLB	Siswa		751.193	871.193	1.532.642	1.295.450	1.195.700			●
			SMP/SMPLB	Siswa		248.124	248.800	647.296	561.832	800.000			●
			SMA	Siswa		329.000	305.950	137.778	619.882	645.298			●
			PTN/PTS	Mahasiswa		65.000	65.000	269.251	80.000	70.000			●
9	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Madrasah Bermutu dan Pendidikan Tinggi Islam	Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa MI, MTs, MA, dan PTA	Jumlah siswa penerima beasiswa miskin:	Siswa	Kemen Agama	640.000	640.000	745.759	115.838	640.000	Keterlambatan penyaluran antara lain disebabkan karena alokasi tersebar di DIPA masing-masing satker	Koordinasi satker pusat dan daerah untuk mempercepat penyaluran BSM	●
			MI	Siswa		540.000	540.000	592.015	88.514	540.000			●
			MTs	Siswa		320.000	320.000	397.620	66.579	320.000			●
			MA	Siswa		65.000	65.000	58.254	26.374	59.538			●
			PTA	Mahasiswa		726.376	772.830	1.052.000	1.516.000	1.170.000	RTSM peserta PKH kohor 2007 akan memasuki	Penyusunan konsep exit strategy yang	●
10	Bantuan Tunai Bersyarat	Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai	Jumlah RTSM yang mendapatkan	RTSM	Kemensos								

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Bersyarat bagi RTSM (PKH)	Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)								periode graduasi pada tahun 2013	meliputi: 1) rencana resertifikasi, yaitu konsep penilaian terhadap perkembangan kondisi sosial dan ekonomi peserta PKH ; dan 2) rencana transisi, yaitu konsep fasilitasi dan keterkaitan program-program yang ada , skenario pendampingan, dan pedoman operasionalnya	
11	Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)	Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasarn (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun	Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)	RTS	Kemenko Kesra/ Perum Bulog	18.497.30 2	18.497.302	18.497.302	17.488.007	17.488.007	(1) Penetapan sasaran penerima manfaat (2) Kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan tahap distribusi (3) Kondisi sarana dan prasarana moda dan angkutan jalan yang menyebabkan	(1) Pemanfaatan data PPLS 2011 didukung peningkatan koordinasi agar terjadi komplementaritas antar program (2) Peningkatan mekanisme monitoring dan evaluasi sistem penyaluran pada tingkat Divre dan Nasional	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12	Pengelolaan Tanah provinsi	Terwujudnya redistribusi tanah	Terlaksananya redistribusi tanah	Bidang	BPN	422.535	203.161	140.365	69.499	210.000	Kelangkaan sumber tanah untuk redistribusi sehingga saat ini sebagian besar sumber tanah TORA tinggal yang berasal dari tanah negara berupa tanah hutan dan tanah terlantar yang juga semakin langka dan sulit didapatkan sehingga target akumulatif 2014 sebesar 1.050.000 bidang akan sulit tercapai	1. Mengidentifikasi lokasi tanah terlantar sesuai PP 11/2010 tentang penerbitan dan pendayagunaan Tanah terlantar 2. Melakukan koordinasi yang intensif dengan kementerian kehutanan untuk pelepasan kawasan hutan	
13	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA	Orang	Kemenakertrans	n.a	3.000	3.360	10.750	8.400	Masih ditemukan ketidaksihronan data, antara data verifikasi pekerja anak dari pusat dengan kondisi di lapangan, seperti perpindahan tempat tinggal anak. Beberapa pekerja anak yang ditarik juga tidak	Untuk mengatasi akurasi data dan validasi data, maka petugas pendamping yang melakukan kunjungan ke tempat tinggal pekerja anak berkoordinasi dengan UP PKH di masing-masing	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											memiliki kartu jamkesmas sehingga ketika sakit sulit mengakses fasilitas kesehatan.	kabupaten/kota	
		Berkurangnya jumlah anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak	Persentase pekerja anak yang ditarik dari BPTA yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh pelatihan keterampilan	Persen	Kemenakertrans	n.a	75	100	100	100	Kurangnya koordinasi antara instansi terkait (seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan) untuk memastikan pekerja anak yang ditarik masuk ke dunia pendidikan serta beberapa pekerja anak tidak memiliki kartu Jamkesmas sehingga sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan jika mereka menderita sakit.	Meningkatkan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan fasilitas anak kembali ke dunia pendidikan, pemeriksaan awal kesehatan anak, dan kepemilikan kartu Jamkesmas	●
14	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbanggunya sarana fisik yang	Jumlah penganggur yang mempunyai pekerjaan sementara	Orang	Kemenakertrans	85.712	34.320	91.520	105.000	90.000	Masih terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan termasuk menyempurnakan	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		dibutuhkan masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	Kab/ Kota	Kemenakertrans	45	231	360	360	360	rencana kegiatan, diantaranya disebabkan karena permasalahan teknis administrasi pengelolaan kegiatan serta lamanya waktu dalam penentuan penetapan lokasi kegiatan oleh kab/kota.	proses administrasi dan pengelolaan kegiatan serta meningkatkan koordinasi perencanaan pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja diantara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.	●
2. PNPM MANDIRI: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPM Pendukung													
1.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/ Lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)	Keswadayaan masyarakat (kelurahan)	Desa/ Kelurahan	Kemen PU	11.014	10.948	10.930	10.999	10.948	(1) Belum sinergi dan terintegrasinya program pemberdayaan pemerintah dan non pemerintah dengan perencanaan pembangunan desa; (2) Minimnya dukungan regulasi bagi pengembangan desa dan perdesaan;	(1) Meningkatkan keberpahaman sektor dan daerah dalam penyediaan sarana pra-sarana dasar, dan sarana prasarana produktif untuk pengaliran/ irigasi, jalan, jembatan, komunikasi, informatika, dan transportasi; (2) Mengembangkan kewira-	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Permukiman										(3) Belum memadainya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat desa; dan (4) Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia, baik pemerintah desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan.	usaha dan produk lokal, memantapkan lembaga keuangan mikro perdesaan, serta peningkatan akses terhadap lahan dan permodalan; (3) Meningkatkan kapasitas/penguatan pemerintahan daerah.	
2.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP)	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM Perdesaan)	Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM: - PNPM Inti	Kecamatan		4.334	4.791	4.978	5.020	5.100	(1) Beberapa Kabupaten telambat/tidak menyediakan DDUB; (2) Adanya Kekosongan Fasilitas (khususnya Teknik) di beberapa Lokasi (3) Kualitas pendampingan belum optimal	(1) Penundaan pelaksanaan PNPM-MPD diloaksi yang tidak menyediakan DDUB; (2) Rekrutmen fasilitator secara berkala; (3) Peningkatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan, rakor, workshop;(4) Monitoring dan Evaluasi	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PNPM Penguatan (termasuk di dalam lokasi PNPM Inti) :													
			- PNPM Generasi	Kecama tan		164	212	290	369	500	(1) Terlambatnya pengisian Grant TF yang berakibat pada keterlambatan progres kegiatan baik di tingkat pusat, provinsi (penggajian) dan lapangan karena menunggu proses revisi DIPa; (2) Penetapan pagu anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga harus menunggu proses revisi DIPa.	(1) Penetapan lokasi sedini mungkin dan tidak ada penambahan lokasi di pertengahan tahun; (2) Antisipasi pengisian grant TF sesuai dengan jadwal penyusunan anggaran.	
			- PNPM Integrasi SPP- SPPN	Kabupat en		10	40	75	83	90	(1) Beberapa Kabupaten telambat/tidak menyediakan DDUB; (2) Koordinasi Lintas SKPD masih lemah; (3) Pendampingan oleh Setrawan dan Fasilitator belum optimal	(1) Evaluasi bagi Kab. Yang tidak menyediakan DDUB; (2) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap SKPD terkait; (3) Peningkatan Kapasitas Fasilitator dan Setrawan	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			- PNPB Perbatasan	Kecamatan		80	80	80	80	80	Tidak terdapat permasalahan	-	●
			Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di kab. Nias dan Nias Selatan	Kecamatan	Kemenagri	5	9	n.a	n.a	n.a			●
			Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS	Kab/Kota		110	110	110	108	108	Target replikasi belum sesuai yang diharapkan karena bidang air minum dan sanitasi bukan urusan wajib daerah	Perlu ada advokasi, sosialisasi dan penguatan kapasitas daerah untuk membentuk komitmen daerah dalam mengelola urusan air minum dan sanitasi	●
			Cakupan PNPB-LMP	Kecamatan		78	78	78	78	0	(1) Kurangnya dukungan pengadministrasian keuangan terhadap implementasi di lapangan; (2) Keterlibatan antar pelaku PNPB-LMP belum sinkron; (3) Belum optimalnya	(1) perlu diadakan penguatan administrasi keuangan; (2) keterlibatan antar pelaku dituangkan dalam SOP; (3) menambah asisten PLTMH untuk mendukung penyelesaian PLTMH	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kecamatan dan desa	Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial (RISE)	Kecamatan		237	(kecamatan lokasi berulang)	237 (kecamatan lokasi berulang)	237 (kecamatan lokasi berulang)	237 (kecamatan lokasi berulang)	Dalam pelaksanaan PNPMP-PISEW TA. 2013 masih terdapat permasalahan terkait keberlanjutan pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kecamatan dikarenakan Pemda belum memiliki kapasitas penyediaan BLM	Sekretariat Nasional dan PIU Ditjen Cipta Karya sepakat untuk mengoptimalkan sumber pendanaan baru untuk membiayai BLM di 237 Kecamatan lokasi PNPMP-PISEW dengan besaran masing-masing kecamatan adalah sebesar Rp. 400, Milyar	
			Infrastruktur Perdesaan (PIP)	Desa		3.624	3.900	5.862	5.600	8.803			
			Jumlah SPAM Perdesaan (PAMSIMAS)	Desa		1.570 I/det 1.339.854 Jiwa	2.807	1.449	2.314	4.650	(1)Keterlanjutan sarana yang masih belum optimal, (2)Masih rendahnya prosentasi alokasi anggaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan sarana dan perluasan	(1) Konsentrasi wilayah penanganan hanya pada administrasi Kabupaten, (2) Penyempurnaan pendekatan pola pendampingan masyarakat oleh fasilitator dan bantuan	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-P2DTK)	Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan.	Kabupaten		51	51	7	-	-	approach, (3) Kurangnya monitoring fasilitator keberlanjutan terhadap desa pasca konstruksi, (4) Belum optimalnya 'promosi sanitasi' dalam strategi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam Pamsimas, (5) Penyediaan bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	manajemen konsultan, (3) Penyesuaian pola pemanfaatan bantuan langsung masyarakat dari yang semula Rp. 275 juta per desa disesuaikan menjadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan yang dialokasikan pada tingkat Kabupaten, (4) Pengembangan pola desa replikasi sebagai 'sharing program' bukan 'sharing budget' pada tingkat desa.	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Korflik		Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal.	Kabupaten	KPDT	51	51	7	-	-	(2) keterlambatan pelaksanaan study output disebabkan keterlambatan proses pengadaan. (3) PNPB-DTK Tahap I sampai dengan Juni 2012 sudah memasuki masa pengakhiran program closing date (31 Desember 2012), kegiatan lapangan berakhir pada 31 Desember 2011 dan sudah dilaksanakan Serah Terima serta Alih Kelola Hasil Pelaksanaan kepada Pemerintah Daerah (4) Dalam rangka pengakhiran program saat ini sedang disusun Study Output sebagai bahan Project Completion Report (PCR).	(2) Perbaikan terhadap RKP 2014	
			Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPM-P2DTK).	Kabupaten		51	51	7	-	-			

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											(5) dalam perkembangan-nya perencanaan untuk kegiatan PNPMD DTK II yang masuk dalam RKP 2013 dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan hasil rapat koordinasi terbatas Menko Perekonomian tanggal 2 Oktober 2012 tentang penyusunan Revisi Daftar Rencana Pijaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book) 2011-2014, sehingga tidak terdapat target capaian untuk 2014		
5.	Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya akses petani/peternak pada skema kredit bersubsidi.	Tersusunnya model pembiayaan bersubsidi	Model		n.a	1	1	1	n.a	(1) Belum ada model pembiayaan yang benar-benar cocok dengan karakteristik sektor pertanian yang resiko	(1) Telah diajukan usulan ke Kemenkeu untuk memberikan subsidi bunga dan jaminan kredit bagi petani; (2) Peningkatan	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung peningkatan produksi pertanian									kegagalannya tinggi; (2) Pembiayaan pertanian saat ini murni menggunakan dana perbankan yang mekanisme penyalurannya sangat ketat sehingga masih sedikit petani yang bisa memanfaatkan- nya	kapasitas petani agar lebih bankable	
			Penguatan modal Gapoktan PUAP (Gapoktan)	Gapok tan	Kementan	9.884	8.587	9.910	3.045	10.000	(1) Usulan Gapoktan penerima BLM PUAP saat ini harus mencantumkan nama pengurus Gapoktan yang menyulitkan dalam proses pemberkasan karena susunan pengurus Gapoktan di lapangan sangat dinamis (sering berubah); (2) Adanya pemekaran wilayah/desa	(1) Sebaiknya usulan desa calon penerima BLM PUAP cukup mencantumkan nama Gapoktan saja karena nama Gapoktan beserta pengurus sudah ditetapkan oleh kepala daerah; (2) Perlunya database nama desa yang terkini untuk menghindari terjadinya penyaluran ganda untuk 1 desa; (3) Penggunaan dana BLM PUAP harus	
			Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian	Unit	Kementan	n.a	1	1	1	n.a			

NO.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-PISEW)	Jumlah fasilitas Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPMP-PISEW	Kabupaten	32	34	34	34	34	menyulitkan penyaluran dana BLM PUJAP karena dana PUJAP hanya diberikan satu kali untuk setiap desa; (3) Pemanfaatan BLM PUJAP belum sepenuhnya digunakan untuk pengembangan usaha agribisnis; (4) Tidak tersedianya dukungan anggaran menyebabkan kurangnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten	mengacu pada pedum PUJAP dan dimonitor dengan baik (4) Perlunya disediakan dana pendukung untuk operasional kegiatan PUJAP di masing-masing instansi terkait	

NO.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
										(PNPM) yaitu berprinsip pemberdayaan masyarakat, sementara mikro kredit PNPM-PISEW tidak mengikuti kluster II tetapi kluster III;		
			Persentase Pemda yang mengimple-mentasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten)	Persen	100	100	100	100	100	Pelaksanaan kredit mikro baik berupa pengadaan jasa konsultan/fasili-tator maupun pemberian kredit melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sampai dengan saat ini belum mendapatkan persetujuan dari JICA;	Menunggu hasil review dari JICA	●
7.	Peningkatan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan	Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengurangan di kecamatan dan desa (PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan)	PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan	Kab/ Kota	120 Kab/kota	120 kab/kota	n.a	n.a	n.a	Kesiapan kelompok penerima PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan	Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat (KKP) dan pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemda, dll)	●
			- PUGAR		n.a	n.a	40 kab/kota (750 kelompok)	1000 kelompok	3500 kelompok			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			- PUMP Perikanan Tangkap			n.a	n.a	132 kab/kota (1106 kelompok)	3700 kelompok	2000 kelompok			●
			- PUMP Perikanan Budidaya			n.a	n.a	300 kab/kota (2070 kelompok)	3600 kelompok	5000 kelompok			●
			- PUMP Pengolahan dan pemasaran			n.a	n.a	53 kab/kota (408 kelompok)	1500 kelompok	2000 kelompok			●
8.	Peningkatan PNPB Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata melalui PNPB bidang pariwisata	Jumlah desa wisata	Desa	Kemen Budpar	104	200	569	200	350	Pengusulan yang belum sesuai dengan kriteria dan ketentuan; dan masih lemahnya kerjasama lintas sektor dan pelaku	Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan sejak dini; dan peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelaku	●
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL:													
Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010, perluasan cakupan kegiatan pemberdayaan usaha mikro dan kecil mulai tahun 2012													
9.	Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR	Persen	Kemen-keu	n.a	100,00	100,00	100,00	100,00			●
10.	Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Persentase rekomendasi kebijakan KUR yang terimplementasikan	Persen	Menko Perekonomian	n.a	60,00	65,00	50,00	80,00	Konsistensi pelaksanaan kebijakan KUR di lapangan	Peningkatan koordinasi K/L dan bank pelaksana dalam pelaksanaan program KUR	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.1.	Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP)	Menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/ kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi	Event/ Provinsi	Kem. KUKM	n.a	c)	d)	3	4			●
			Jumlah petugas lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat	Orang	Kem. KUKM	n.a	c)	d)	425	500			●
1.2.	Pengembangan dan pemantapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM	Meningkatnya kapasitas pembiayaan KSP/KJKS bagi UMKM	Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha	KSP/KJKS	Kem. KUKM	n.a	80	360	120	100	(1) Kapasitas dan kompetensi SDM pengurus/pengelola KSP/KJKS dalam pengelolaan keuangan masih kurang memadai; (2) Keterbatasan akses pembiayaan dan jangkauan dan pembiayaan; dan (3) Sulitnya	Perluasan cakupan kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas dan layanan pembiayaan melalui diklat, fasilitasi pembiayaan dan kerja sama pembiayaan.	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											memper-oleh informasi mengenai respon lembaga keuangan pasca pelaksanaan kegiatan (BRI, LPDB, Bank Andara, LPEI)		
			Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro	Skim	Kem. KUKM	n.a	c)	d)	1	1			●
13.	Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KIKS/UJKS-Koperasi dan LKM	Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi/KUKS/UJKS-Koperasi dan LKM	Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum	LKM	Kem. KUKM	n.a	100	100	131	100	Kesadaran LKM tentang aspek legalitas/badan hukum dalam penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat.	Peningkatan kualitas dan cakupan sosialisasi badan hukum bagi LKM yang akan diselesaikan pada triwulan III dan IV 2012.	●
14.	Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal bagi koperasi dan UMKM	Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage	KUMKM	Kem. KUKM	n.a	c)	500	200	500	(1) Akuntabilitas koperasi menurut penilaian bank masih kurang baik; dan (2) <i>Business plan</i> yang diajukan oleh koperasi ke bank kurang prospektif	Kerja sama dengan unit terkait untuk memperkuat UMKM untuk penguatan kapasitas UMKM.	●
			Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang	Koperasi	Kem. KUKM	n.a	2.586	1.370	1.099	1.450			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			menerima bantuan dana										
			Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya	KKMB	Kem. KUKM	n.a	c)	d)	n.a	150	Pengalihan sub kegiatan ke unit lain (lembaga pengembangan bisnis/LPB) menyebabkan data terpih belum dapat diperoleh.	Pelaksanaan penguatan lembaga pengembangan bisnis, termasuk di bidang keuangan (KKMB) pada tahun 2012 telah dilaksanakan dalam bentuk pelatihan bagi 426 konsultan LPB dari 24 provinsi, untuk selanjutnya diharapkan konsultan LPB mampu memberikan bimbingan dan pendampingan ke- pada 3.000 koperasi & UKM.	
			Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan	Koperasi	Kem. KUKM	n.a	c)	d)	n.a	50			
15.	Pengembangan asuransi, jasa keuangan, dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM	Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta administrasi perpajakan	Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/ pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM	LKM	Kem. KUKM	n.a	100	100	50	100			

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16.	Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM	Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi koperasi dan UMKM	Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)	Provinsi, PPKD	Kem. KUKM	n.a	2	2	1	2	Fasilitasi telah diberikan untuk 1 provinsi, namun PPKD belum terbentuk sehingga skema co-guarantee tidak dapat dikembangkan.	Akan diselesaikan pada triwulan III dan IV.	●
			Jumlah provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional	Provinsi, PPKD		n.a	2	2	1	2	(1) Kurangnya keberpihakan stakeholders terkait, termasuk eksekutif dan legislatif, karena minimnya pengetahuan bahwa bisnis PPK di daerah merupakan social cost; dan (3) Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang usaha penjaminan.	(1) Peningkatan sosialisasi kepada berbagai stakeholder di daerah yang melibatkan K/L terkait (Kemendagri, Kemenkeu, Bapepam, Kemenko Per-ekonomian, Kemendagri, BI, Askrindo, Jamkrindo) untuk menyamakan persepsi tentang perlunya pendirian PPKD di daerah; dan (2) Bekerjasama dengan lembaga penjaminan seperti PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo dalam memberikan	●

NO.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN					TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
17.	Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM	Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM	Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/ perbatasan melalui koperasi	Kem. KUKM	Unit	3075 KUMKM ^{b)}	7	6	3	34			
18.	Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan	Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan	Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan Jumlah peserta diklat kewirausahaan	Kem. KUKM	Orang	n.a	c)	d)	1.250	3.000			
19.	Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian	Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian	Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian	Kem. KUKM	Orang	n.a	c)	d)	393	1.700			
20.	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP	Diklat pengelola LKM	Kem. KUKM	Orang	n.a	c)	100	600	300			

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.1.	Perluasan KUR	Meningkatnya penyaluran KUR	Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR	Provinsi	Kem. KUM	n.a	33	33	15	33	Masih terdapat kesenjangan pemahaman mengenai KUR antara pemerintah dan masyarakat.	Peningkatan cakupan, jangkauan dan kualitas sosialisasi KUR bagi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi berbagai pihak baik instansi terkait, pemerintah daerah maupun dunia usaha.	
			Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR	UMKM	Kem. KUM		c)	d)	1.200	27.520			
4. TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK) di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran													
1.	Koordinasi kebijakan pengrusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengrusutamaan kebijakan dan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan di bidang pengrusutamaan	Kegiatan		8	8	8	8	8	Terdapat kebijakan operasional yang masih dikembangkan dan telah mendekati penyelesaian pada akhir tahun 2012	Kebijakan teknis tersebut akan terus dikembangkan sampai akhir tahun 2014, khususnya dalam penguatan desentralisasi program penanggulangan kemiskinan	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		anggaran	an kebijakan										
			Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran	Kegiatan		4	4	4	4	4			●
			Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan dan peraturan perundang-nya	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			●
2.	Sekretariat Koordinasi kebijakan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK	Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TKPK	Kegiatan		8	8	8	8	8	TKPK Daerah telah terbentuk hampir di seluruh kab/kota, namun kapasitas dan aktivitas TKPKD belum seperti diharapkan, khususnya dalam mengkoordinasikan program/kegiatan	Perlu dikembangkan skema kebijakan tentang: (1) skema alokasi pembiayaan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan penetapan pagu indikatif kecamatan,	●
			Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penguatan	Kegiatan		6	6	6	6	6			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			kelembagaan TKPK								penangguhlungan kemiskinan	(2) Pedoman yang menegaskan peran dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (3) penetapan sistem dan mekanisme pro poor budgeting dan (4) penerapan mekanisme tanggung jawab	
			Tingkat (indeks) usulan rekomendasi kebijakan yang menjadi kebijakan formal	Persen		100,00	100,00	100,00	100	100			●
3.	Koordinasi penguatan masyarakat dan kawasan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penangguhlungan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan	Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan	Kegiatan		9	9	9	9	9	Penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat ini diperlukan guna menghindari resiko gagalnya investasi modal sosial yang telah dicurahkan selama ini. Hal ini menjadi catatan permasalahan yang masih harus ditangani untuk penyiapan keberlanjutan program	Penguatan kelembagaan masyarakat yang mencakup kegiatan untuk: (1) merumuskan dasar hukum bagi eksistensi lembaga pemberdayaan masyarakat dan perannya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. (2) penetapan kebijakan kelembagaan dana bergulir masyarakat,	●
			Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Kegiatan		10	10	10	10	10			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perdesaan								pemberdayaan masyarakat	termasuk prosedur dan mekanisme pengelolaannya	
			Tingkat (indeks) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan dan perdesaan	Persn		100,00	100,00	100,00	100	100			●
4.	Koordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan	Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di	Kegiatan		7	8	8	8	8	Pola kemitraan dengan dunia usaha dan BUMIN, yaitu dengan program penyaluran dana tanggung jawab sosial (SCR) dan PKBL untuk membantu mengembangkan daerah miskin masih terbatas	Pengembangan kerjasama kemitraan dalam pencapaian target MDG's yang terintegrasi dengan kebijakan dan program pembangunan daerah berbasis pemberdayaan masyarakat	●
			Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraan	Kegiatan		6	6	6	6	6			●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			penanggulang-an kemiskinan										
			Tingkat (indeks) koordinasi dan hasil sinkronisasi pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kemitraan	Persen		100,00	100,00	100,00	100	100			●
5.	Koordinasi kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan	Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi persiapan LKM dengan kementerian/lembaga maupun masyarakat	Kegiatan		7	8	8	8	8	Pengembangan keuangan mikro akan dapat dicapai melalui pengembangan pembiayaan dan penguatan kelembagaan keuangan mikro		
			Jumlah penyiapan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan		6	6	6	6	6			●
			Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan	Persen		100,00	100,00	100,00	100	100			●

NO.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN 2)	TINDAK LANJUT ³⁾	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna									

Keterangan: 1) s.d. Juni 2012; 2) Permasalahan pelaksanaan dalam periode 2010-2012; 3) Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target 2014

*) indikator tahun 2011 berubah dari indikator 2010.

**) diambil dari RKA-KL BKKBN

***) Sesuai dengan Buku Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 (dengan indikator yang berbeda)

****) Data target RPJMN berubah karena adanya perubahan data sasaran

a) Pada tahun 2012, Kegiatan Redistribusi Tanah ditargetkan sebanyak 149.600 bidang. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut meliputi beberapa tahapan, sampai dengan Bulan Juni 2012 tahapan yang telah dilaksanakan adalah:

- Tahapan Penetapan lokasi: 149.600 bidang,
- Tahapan Penyuluhan: 145.865 bidang,
- Tahapan Penerbitan SK Penegasan Tanah Obyek Landreform: 77.310 bidang,
- Tahapan Penerbitan SK Redistribusi tanah: 13.892 bidang, dan
- Tahapan Penerbitan sertifikat: 0 bidang.

b) Sesuai dengan Buku Evaluasi 1 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 (dengan indikator yang berbeda)

c) Tidak ada target kegiatan atau tidak termasuk dalam prioritas nasional pada RKP dan RKA-KL tahun 2010

d) Tidak ada target kegiatan atau tidak termasuk dalam prioritas nasional pada RKA-KL dan RKA-KL tahun 2011

LAMPIRAN 5
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional S:Ketahanan Pangan
Tahun 2010-2012

No.	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status	
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	2009	2010	2011					2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar													
a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian													
1	Pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan hubungan masyarakat	Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertahanan dan hubungan masyarakat	Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanian dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	paket	BPN	n.a	1 paket	1 paket (Saat ini <i>draft</i> rancangan peraturan sedang dalam tahap pembahasan di Internal Badan Pertanahan Nasional)	1 paket (saat ini sudah disahkan) 4 pp pendukung UU PUP2B 1.PP No.12 thn 2012 ttg Insentif PUP2B 2.PP No.25 thn 2012 ttg Sistem Informasi PUP2B 3.PP No.30 thn 2012 ttg Pembiayaan PUP2B 4.PP No.1 thn 2012	1 Paket	Konversi lahan pertanian pangan ke penggunaan lain, dan semakin sulitnya perluasan areal pertanian di lahan baru, serta mahalnya infrastruktur pendukung terutama jaringan irigasi	Mengendalikan pengalihan fungsi lahan pertanian bahan pangan ke penggunaan lain dengan menerapkan pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2009, yang diperkuat juga dengan penyelesaian dan penyesuaian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) di daerah yang sesuai dengan Undang-undang	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									ttg Penetapan & Alih Fungsi PLP2B			tersebut	
b. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar													
	Perluasan Areal pertanian	Meningkatnya luasan areal baru dalam mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) perluasan areal tanaman pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan	Ha	Kementan	n.a	8.856	51.231	Target CetakSawah 100.730 terealisasi 58.036	481.360 dengan 100.000 adalah untuk cetak sawah	- Belum adanya data tentang luasan lahan di seluruh wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas areal pertanian - Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih mengkaji peruntukan tanah tersebut yang tidak saja untuk kepentingan pertanian tapi masih bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya. - Adanya konflik kepentingan	- Merealisasikan pemanfaatan lahan-lahan terlantar untuk lahan pertanian khususnya pertanian pangan, serta mendorong untuk merealisasikan pengembangan <i>food estate</i> oleh BUMN maupun swasta terutama di wilayah luar Pulau Jawa. - Koordinasi dengan BPN dan Kehutanan dalam bidang ketersediaan lahan yang dapat digunakan	●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											dengan Kementerian Kehutanan terkait lahan hutan yang akan digunakan untuk lahan pertanian Besarnya biaya investasi yang diperlukan untuk membuka areal pertanian baru	untuk perluasan sawah - Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bidang penyiapan infrastruktur dasar (waduk/bendungan, saluran primer, saluran sekunder, kanal drainase dan jalan pemukiman) - Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam bidang penyiapan tenaga kerja/transmigran yang siap untuk mengelola lahan sawah baru - Koordinasi	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												Kementerian BUMN dalam bidang Pen- suplai benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, dan sarana pertanian lainnya serta cetak sawah skala luas.	
c. Penertiban, serta optimasi penggunaan lahan terlantar													
Pengembangan Pengelolaan lahan Pertanian	Meningkatnya produktifitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Pro- duksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Luasan (Ha) lahan yang dioptimasi, dikonservasi dan direhabilitasi, direklamasi (Pengembangan rumah kompos)	Ha		Kementan	n.a	9.434 (optimasi) 235 rumah kompos	17.044 ha (optimasi Lahan, sumber: Tabel Realisasi Kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan per November 2011); 1375 (rumah kompos, sumber: Rekapitulasi Perembang	Optimasi Lahan dengan target 209.400 terealisasi 136.141	74.648 ha	Adanya ketidaksesuaian lahan untuk komoditas pertanian yang akan diusahakan.		

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								an Kegiatan RPPO dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional per November 2011)	Unit terealisasi 85 Unit				
INFRASTRUKTUR: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya													
a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya													
2.	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan	Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km untuk Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan produksi,	Km	Kementan	n.a	483 (JUT) 469 (jalan produksi)	668 km (JUT); 785 km (Jalan Produksi); sumber: Laporan Realisasi Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan per November 2011	Jalan Pertanian dengan target 454 Km terealisasi 274 Km	2.600 km	■ Pelaksanaan tender di beberapa daerah bermasalah dan harus diulang sehingga realisasi tidak sesuai target ■ Peningkatan kapasitas panitia pengadaan untuk menghindari keterlambatan tender		

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan	Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar.	Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkup luar dan daerah perbatasan yang potensial	Unit	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					KKP	816	816	816	816 (perkiraan)	988	■ Lemahnya kelembagaan dan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun di berbagai daerah seperti pelabuhan perikanan (PP) ■ Belum jelasnya status lahan, ■ Kurangnya dukungan prasarana daerah (jalan, listrik, air bersih, dll), ■ Keterlambatan proses pelelangan sehingga waktu pelaksanaan pelaksanaan konstruksi terbatas	■ Penguatan kelembagaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dibangun melalui penguatan kapasitas SDM ■ Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan	
b. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi													

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	Pengelolaan air untuk pertanian	Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung	Tersedianya optimasi pemanfaatan air irigasi melalui perbaikan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES) dan pengembangan Tata Air Mikro (TAM) yang berfungsi (ha)	Ha	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Kementan	n.a	57.527 (jitut) 44.227 (jides) 6.030 (TAM)	112.263 (JITUT); 83.845(JIDE S); 48.701 (TAM), sumber: Rekapitulasi Kegiatan Realisasi Jitut, Jides, Tam Dalam Rangka Inpres Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011	523.530	479.080	- Banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak - Menurunnya debit sumber air akibat rusaknya kondisi daerah tangkapan air (<i>watershed</i>), dan menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah rumah tangga, industri, pertanian menyebabkan terjadinya penurunan volume air yang dapat dimanfaatkan - Turunnya DIPA yang terlambat, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan - Diperlukan koordinasi yang lebih intens	Percepatan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah pertanian yang menjadi sentra produksi beras nasional baik melalui anggaran Pemerintah Pusat maupun optimalisasi DAK Irigasi; pembangunan daerah irigasi baru dengan prioritas di luar Pulau Jawa terutama pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; percepatan pembangunan tampungan-tampungan air baru	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												antara Dinas Pertanian, Dinas PU Pengairan dan Bappeda, karena banyak kegiatan yang saling terkait satu sama lain. ■ Melakukan rehabilitasi vegetasi terhadap hulu sungai dengan menjalin kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat. ■ Terbitnya DIPA saker Daerah agar lebih dipercepat mengingat banyak kegiatan yang tergantung dengan kegiatan Daerah	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM: PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP¹													
	Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan	Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat penangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP	Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT (kapal)	unit		46	121 (111 lainnya dari DAK)	125 (125 lainnya dari DAK)	1000 (kumulatif, direktif presiden)		- Perijinan, - Proses lelang yang terlambat - Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan	- Menyederhanakan birokrasi perijinan, - Meningkatkan koordinasi dan integrasi antara pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan	
	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi; 1,21 juta hektar rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar	Luas layanan jaringan irigasi yang meningkat	ha	Kemen PU	88,811 ⁴⁾	115.000	66.249	24.727	129.380	1. Kinerja layanan irigasi eksisting belum optimal mendukung peningkatan produksi pertanian pangan (Surplus Beras 10 Juta Ton) akibat kondisi infrastruktur yang cenderung	Percepatan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah pertanian yang menjadi sentra produksi beras nasional baik melalui anggaran Pemerintah Pusat maupun optimalisasi DAK Irigasi.	
			Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi	ha	Kemen PU	623,909 ⁴⁾	293,044	284,137	97,996	1.340.000			
			Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	ha	Kemen PU	2.091.528	2.315.000	2.143.589	756.805	2.315.000			

¹ Buku I, PN-5, RKP 2012

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Luas layanan jaringan rawa yang meningkat	ha	Kemen PU	102,971 ⁽⁴⁾	8.080	70.510	14.606	10.000	sudah tua dan banyak mengalami kerusakan terutama pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. 2. Meningkatnya tekanan alih fungsi lahan beririgasi produktif terutama di Pulau Jawa untuk keperluan lain yang lebih menguntungkan secara ekonomi seperti permukiman, industri, dll	■ Pembangunan daerah irigasi baru dengan prioritas di luar pulau Jawa terutama pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap.	      
			Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi	ha	Kemen PU	143.480	79.373	120.810	35.797	450.000 (52%)			
			Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara	ha	Kemen PU	376.319	1.107.996	1.040.005	499.947	1.200.000			
			Jumlah sumur air tanah yang dibangun/ditingkatkan	unit	Kemen PU	2,455 ha ⁽⁵⁾	84	131	78	70			
			Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi	unit	Kemen PU	3,033 ha ⁽⁵⁾	97	385	143	1.875			
			Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	unit	Kemen PU	3,000 ha ⁽⁵⁾	188	391	149	2.192			
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun/ditingkatkan	ha	Kemen PU	-	1.021	10.706	2.717	1.000			

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi	ha	Kemen PU	-	2.800	7.297	2.434	175.000			
	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 12,0 miliar m3	Jumlah waduk yang dibangun:								1. Kapasitas tampung waduk eksisting masih sangat terbatas dan baru mampu mensuplesi 11% dari total daerah irigasi di Indonesia.	1. Percepatan pembangunan tampungan-tampungan air baru.	
			1. waduk selesai dibangun	buah	Kemen PU	3	n.a	n.a	n.a	11	2. Pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air baru sering terhambat proses pembebasan lahan seperti terkendala izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi secara peraturan perundangan dan penolakan masyarakat.	2. Peningkatan kualitas kegiatan persiapan baik dalam aspek teknis maupun aspek sosial-kemasyarakatan yang diiringi dengan upaya koordinasi dengan stakeholder terkait.	
			2. embung/ situ selesai dibangun	buah	Kemen PU	12	32	105	59	158			
			3. waduk dalam pelaksanaan	buah	Kemen PU	1	7	8	9	1			
			Jumlah waduk yang direhabilitasi:										
			1. waduk selesai direhabilitasi	buah	Kemen PU	2	12	18	2	29			
			2. waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi	buah	Kemen PU	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a			
			3. embung/situ selesai direhabilitasi	buah	Kemen PU	11	21	41	25	298			
			Jumlah waduk/embung / situ yang	buah	Kemen PU	171	65	298	104	182			

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan	Kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan	Luas lahan budidaya sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat	Ha	KKP				1.394 Ha	1365.416 Ha			●
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:													
Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi													
3	Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler	Benih unggul berbasis biologi molekuler	Jumlah varietas benih unggul	varietas	LIPI		100 % 1 varietas padi tahan penggerek batang telah di Uji Multi Lokasi di 10 daerah untuk persiapan pelepasan varietas benih unggul tahun 2011.	364 galur ¹⁾		4 var			●
	Litbang pupuk organik dari	Pupuk organik dari mikroba	Percontohan produksi pupuk	varietas	LIPI	n.a	100 % Aplikasi di	n.a	n.a	n.a			●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	mikroba hayati Indonesia	hayati Indonesia	organik di pedesaan				desa cicurug, sukabumi						
	Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi	Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.	Varietas padi (padi sawah, padi gogo, padi dataran tinggi dan padi hibrida)	varietas	BATAN	n.a	1	2 padi gogo ₁	n.a	3 var			●
			Varietas kedelai (jenis biji besar, genjah, produksi tinggi dan jenis biji hitam)	varietas	BATAN	n.a	1	1 var (gema) ₁	n.a	1 var			●
INVESTASI, PEMBIAYAAN, DAN SUBSIDI:													
Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.													
a. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk sistem oleh pelaku usaha dan pemerintah													
4	Pengelolaan produksi tanaman sereal	Meningkatnya perluasan penerapan budi-daya tanaman sereal yang tepat dan berkelanjut untuk peningkatan	SLPTT padi (ribu ha)	ribu ha	Kementan		2.394	2.779 ²⁾	1507 ³⁾	4.625	- Penyediaan bibit/benih unggul dan pupuk terletak pada sering terjadinya keterlambatan penyediaan - Merubah sistem penganggaran penyediaan benih dan pupuk dari sistem bantuan langsung benih		●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.									karena pengadaan inputnya yang sangat tergantung pada mekanisme APBN (keterlambatan dan lamanya proses tender), sehingga tidak cocok dengan waktu musim tanam	menjadi sistem subsidi, yang diharapkan penyediaan benih/bibit dan pupuk dapat tersedia secara tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta tepat sasaran	
			SLPTT Jagung hibrida (ribu ha)	ribu ha	Kementan		150	207 ²⁾	200 ³⁾	250	- CPCL terlambat - Benih yang disalurkan tidak sesuai dengan keinginan petani. - Adanya keterlambatan tanam - Kesulitan mendapatkan benih kedelai berkualitas - Bansos SL-PTT komoditas sereal belum bisa dicairkan karena tanam mundur 1-2	- CPCL hingga sesuai target - Perbaikan koordinasi dengan Dinpartan Prop. - Merubah sistem penganggaran benih dan pupuk dari sistem bantuan langsung benih menjadi sistem subsidi, yang diharapkan penyediaan benih/bibit dan	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											bulan akibat serangan OPT tahun 2011 - Beberapa kegiatan bansos/PMUK Tugas Pembantuan sebagian masih dalam proses CP/CL - Penyediaan bibit/benih unggul dan pupuk terletak pada sering terjadinya keterlambatan penyediaan karena pengadaan inputnya yang sangat tergantung pada mekanisme APBN (keterlambatan dan lamanya proses tender), sehingga tidak cocok dengan waktu musim tanam	pupuk dapat tersedia secara tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, serta tepat sasaran Melanjutkan upaya peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan program yang menerapkan paket-paket inovasi teknologi seperti Sekolah Lapang Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan <i>System Rice Intensification</i> (SRI), mendorong penggunaan benih unggul dan pupuk	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Rendahnya realisasi peningkatan produksi bahan pangan utama	secara berimbang oleh petani, penelitian untuk menghasilkan benih/bibit unggul, pendampingan oleh petugas penyuluh di lapangan, dan perluasan area pertanian baru	
			SLPTT kedelai (ribu ha)	ribu ha	Kementan	n.a	244	300 ⁽²⁾	325 ⁽²⁾	500			
			Capaian luas areal (ribu hektar) pembinaan dan pengembangan tanaman tebu untuk mendukung Swasembada Gula Nasional	ribu ha	Kementan	440	418 ⁽⁵⁾	450 ⁽⁶⁾	438 ⁽⁶⁾	641			
			Pengembangan ternak sapi potong (ekor)	ekor	Kementan	n.a	13.581.570 ⁽¹⁰⁾	14.824.373 ⁽¹⁾ ₍₀₎	16.034.430 ⁽¹⁾ ₍₀₎	15.995.946 ⁽¹⁾ ₍₀₎			
			Pengembangan	ekor	Kementan	n.a	474.701 ⁽¹⁰⁾	488.448 ⁽¹⁰⁾	621.980 ⁽¹⁰⁾	1.830			

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			sapi perah (ekor)										
			Pengembangan kelompok unggas lokal	klp	Kementan	n.a	200	291	133	470			●
			Pengembangan kelompok non unggas	klp	Kementan	n.a	25	44	46	72			●
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk	Unit	Kementan	132	155	168	173	458	▪ Kurangnya koordinasi dan respon Pemda terhadap kelembagaan Penyuluhan, sehingga sampai saat ini Kelembagaan Penyuluhan Provinsi yang terbentuk sesuai UU No. 16, dari 33 provinsi, baru terbentuk sebanyak 22 unit (Perda & Pergub), campuran sebanyak 7 unit. Sedangkan Kelembagaan ▪ Meningkatkan koordinasi dengan Pemda. Sampai dengan saat ini sejumlah 24 kab/kota sudah dalam bentuk draft/rekomendasi	●	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											Penyuluhan Kab/Kota yang terbentuk sesuai UU No. 16 dari 497 kab/kota terbentuk sebanyak 151 unit (Perda & Perbup/Perwali), campuran sebanyak 182 unit.		
			Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)	Unit	Kementan	28.304	30.636	33.488	37.013	63.304	Untuk wilayah timur, kelompokkani kesulitan untuk membentuk gabungan kelompok, karena jarak antar lokasi yang sangat berjauhan. Selain itu ada kesulitan dalam menetapkan dalam kepengurusan Gapoktan	Melaksanakan pengawalan dan pendampingan bagi Gapoktan, yang dialokasikan dengan dana dekon	●
			Jumlah BPP model	Unit	Kementan	3.941	336	400	n.a	425	Pada tahun ini Proyek FEATI	Mencari sumber	●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											habis masa efektifnya, sehingga tidak ada fasilitas khusus untuk BPP Model. Saat ini jumlah BPP sebanyak 5.016 BPP di 6.672 kec.	pembiayaan lain	
		Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan	Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluh	Kelompok	KKP	n.a	300 kelompok di 50 kawasan	700	1612	700 kelompok di 50 kawasan			●
		Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	ribu ton	Kementan	n.a	76,91 (padi-BLBU) 13,90 (jagung-BLBU) 20,41 (kedelai-BLBU)	87,19 (BLBU padi) 7,62 (BLBU jagung hibrida) 12,00 (BLBU kedelai) ²⁾	75,15 (BLBU padi) 3,96 (BLBU jagung Hibrida) 12,76 (BLBU Kedelai)	226,92			●
			Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	juta ton	Kementan	n.a	7,36	8,3 (sumber: Laporan Bulanan)	8,9	12,2			●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								per- November 2011 Direktorat Pupuk dan Pestisida)					
			Jumlah unit perbenihan ikan yang bersertifikat	Unit	KKP	n.a	57	115	139 (s/d TW III)	116	Mutu benih yang tidak seragam	Penerapan Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CPIB)	
5	PANGAN DAN GIZI: Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan	Meningkatnya pemantapan pangan dan penanganan rawan pangan.	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan	Desa	Kementan	n.a	1.763 desa atau 100,80% dari target 1.749 desa.	2.247 desa atau 87,77% dari target 2.560 desa.	2.824 desa atau 94,48% dari target 2.989 desa.	5.000	- Sering pergantian dan mutasi pejabat di daerah yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal; - Masih kurangnya pelatihan pemberdayaan dan teknis kepada pendamping dan kelompok.	- Melakukan persiapan kegiatan lebih awal; dan - Memberikan pelatihan untuk tenaga pendamping dan kelompok.	
		Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Gapoktan	Kementan	n.a	749 Gap. atau 99,87% dari target 750 Gap.	984 Gap. atau 98,40% dari target 1.000 Gap.	1.248 Gap. atau 98,66% dari target 1.265 Gap.	2.000	Adanya gapoktan yang mengembalikan dana bansos, baik		

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya pemantapan panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Desa P2KP (Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan)	Desa	Kementan	n.a	1.950 desa atau 97,50% dari target 2.000 desa.	4.720 desa atau 100% dari target.	6.000 desa atau 100% dari target.	10.000	pada tahap penumbuhan atau pengembangan - Kendala teknis di lapangan seperti lokasi yang jauh, kelengkapan administratif yang belum terpenuhi, dan seringnya pergantian pejabat sehingga proses pencairan terhambat. - Masih lambat upaya diversifikasi konsumsi pangan di masyarakat	- Koordinasi dengan daerah, baik propinsi atau kab/kota yang belum melaporkan untuk segera melaporkan. - Perlu dikembangkan program-program yang lebih nyata dimasyarakat dengan lebih mendorong peranan pemerintah daerah dan swasta, dan peningkatan penyuluhan, serta mendorong industri pengolahan pangan yang berbasis sumber daya	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	Kemendes	63,9 ¹¹	67,87	71,4 ¹³	69,6	85	- Keterbatasan dana operasional Posyandu, sarana dan prasarana, pengetahuan kader; - Kurangnya kemampuan petugas dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling; serta - Kurangnya pemahaman akan manfaat Posyandu serta masih terbatasnya pembinaan kader.	- Optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk kegiatan promotif – preventif, termasuk di Posyandu; serta - Peningkatan pelatihan tenaga kesehatan dalam pemantauan pertumbuhan dan konseling.	●
		Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan dan tingkat konsumsi	Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar	TPI, pasar	KKP	n.a	n.a	n.a	5531 pasar	91 TPI 7.000 pasar			●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		ikan											
6	ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antispasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim	Meningkatnya populasi dan produksi hasil olahan ternak ruminansia terkait dengan Dampak Perubahan Iklim	Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos) (Dampak Perubahan Iklim)		Kementan	n.a	300	1.391	40 (kompos & biogas)	10.000	Kurangnya bahan baku (kotoran ternak) yang diolah menjadi pupuk organik karena tidak terpusat dalam satu kawasan	Pengembangan pembangunan pertanian yang terintegrasi berbasis kawasan	●

Catatan:

1. Sumber Data: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementan.
2. Sumber Data: Ditjen Tanaman Pangan, Kementan.
3. Sumber Data: Reviu Renstra Ditjen Hortikultura dan Data Produksi Tahun 2011.
4. Target 2011 Sesuai Renstra Pembangunan Perkebunan (2010-2014).
5. Capaian 2010 (Sesuai Statistik Perkebunan 2010-2012).
6. Capaian Sementara Tahun 2011, Ditjen Perkebunan, Kementan.
7. Sumber Data: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.
8. Sumber Data: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementan.
9. Angka 4.720 adalah Tambahan target dari APBNP 2011: 700 desa. Sumber data berasal dari Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Pusat Distribusi dan Akses Pangan, Pusat Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan, Pusat Ketahanan Pangan, Kementan.
10. Angka populasi ternak (Sumberdata: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan)
11. Mendapatkan tambahan alokasi dari Stimulus Fiskal TA 2009
12. Pada periode 2005-2009, satuan indikator kegiatan irigasi air tanah berupa "ha"

*) Sumber Data: Revisi Renstra Kementerian Pertanian, 12 Februari 2012

LAMPIRAN 6
Pencapaian Prioritas Nasional 6: Infrastruktur
Tahun 2010—2012

NO	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1. TANAH DAN TATA RUANG: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu														
1.	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Terlaksananya pengaturan dan penataan pe- nguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.	Neraca Penatagunaan	Kab/kota	BPN	100	100	99	33	500	Permasalahan yang sering terjadi dalam upaya percepatan pembangunan infra-struktur adalah terhambatnya proses pe- ngadaan tanah. Hambatan dalam proses pengadaan tanah ini terutama terjadi dalam upaya kesepakatan harga ganti rugi	Percepatan legalisasi aset tanah masyarakat bagi masyarakat golongan eko- nomi lemah, merupakan lang- kah strategis untuk membuka akses masyarakat ke sumber- sumber produksi dan permodalan		
											723.154	317.154	280.244	16.228

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												independen ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada semua pihak.	
		Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanian secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia	Cakupan peta pertanian	Hektar	BPN	2.100.000	2.100.000	2.100.000	-	10.500.000	Data dan informasi mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum dapat dicakup oleh sistem pemetaan sistematis	Pada kegiatan ini telah dibangun juga Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) sebanyak 22.193 titik KDKN serta 93 base station untuk Continuous Operating Reference System (CORS)	
2.	Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkan	Keserasian dan Keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN	Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya	Provinsi	PU	n.a	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	Belum selesainya RTRW untuk seluruh daerah: - Masih adanya permasalahan alih fungsi kawasan hutan yang belum selesai; - Terbatasnya	Belum selesainya RTRW: - Sosialisasi peraturan dan pedoman bidang pe-nataan ruang ke daerah; - Bimbingan teknis penataan ruang untuk	

NO	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
											kualitas SDM bidang penataan ruang - Masih kurangnya data, informasi dan pedoman bidang penataan ruang di daerah; - Masih kurangnya pembinaan teknis bidang penataan ruang; dan - Prosedur penetapan Perda RTRW yang tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, dalam hal ini DPRD juga sangat berperan - Sinkronisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang - Penyusunan panduan sinkronisasi - Sosialisasi panduan	meningkatkan kualitas SDM; - Klinik percepatan penyelesaian RTRW di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota; - Terobosan bidang hukum terkait alih fungsi kawasan hutan melalui implementasi holding zone, sesuai amanat pp 15/2010 tentang Pe- nyelenggaraan Penataan Ruang. - Sinkronisasi rencana pembangunan dan rencana tata ruang - Penyusunan panduan sinkronisasi - Sosialisasi panduan		

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
												sinkronisasi; dan - Pendampingan dalam melakukan sinkronisasi dengan target utama Pemerintah Provinsi.	
2. JALAN:													
Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km													
1	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional	Terjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 Km	Jumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km	KM	PU	29.531,71	30.371,00	35.357,80	36.757,13	171.695			●
			Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter	M	PU	257.866	100.824	223.734	290.036	602.944,38	- Berlanjutnya permasalahan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi sehingga menghambat percepatan penyelesaian pekerjaan;	- Sesuai amanat UU 2/2012, maka perlu segera disusun Perpres tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	●
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26.957,83 meter jembatan	Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km	KM	PU	2.443	2.808	3.292	5.997,17	19.370			●
			Jumlah jalan	KM		n.a	n.a	n.a	n.a	36,65		- Percepatan pembangunan	●

NO	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km		Kemen PU						- Masih rendahnya tingkat keselamatan pelayanan jasa transportasi; - Menurunnya kualitas dan kapasitas Infrastruktur transportasi di pusat- pusat kegiatan nasional serta di wilayah terpencil, perbatasan dan perbatasan sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing dan meningkatnya biaya logistik; - Kurang optimalnya peran swasta, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur transportasi.	sarana dan prasarana transportasi; - Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi yang terbatas; - Kaji ulang untuk optimalisasi kebijakan subsidi dan PSO.		
			Jumlah jembatan yang dibangun sepanjang 16.157,83 meter	M	Kemen PU	8.872,44	3.904,00	9.081,83	8.250,22	16.157,83				
			Jumlah	M	PU	2.219,42	3.767,00	3.464,75	7.939,73	10.800				

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			flyover/underpass yang dibangun sepanjang 10.800 meter										
			Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km	KM	PU	379	274	302	928	1.377,94			
2	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitas Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan	Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km	Jumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km	KM	PU	85	135	53	296	296			
3. PERHUBUNGAN: Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkatkecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini													
1.	Terbangunnya terminal antarnegara dan antarprovinsi di 15 lokasi per tahun	Terbangunnya terminal antar-negara dan antar-provinsi	Jumlah lokasi pembangunan terminal antar-negara dan	lokasi	Kemenuhub	13	15	27	31	29	- Alokasi anggaran yang terbatas untuk Sub Sektor Perhubungan	- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana	

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			antarprovinsi								Darat (terdapat Backlog antara kebutuhan dan Pagu Indikatif RPJMN 2010-2014 sebesar 64,14%) - Permasalahan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi sehingga menghambat percepatan penyelesaian pekerjaan; - Kurang optimalnya peran swasta, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur - Pembangunan jalan akses (penghubung) antara lokasi simpul menuju jalan utama Darat; - Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui MOU (Nota Kesepahaman) dalam pembangunan infrastruktur transportasi darat. - Koordinasi antar instansi/ lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan.		

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN					TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2.	Pembangunan Bus Air	Terbangunnya Bus Air	Jumlah Pembangunan Bus Air	Unit	Keme nhub	5	4	4	4	3				
3.	Pembangunan dan Pengelolaan prasarana KA	Terbangunnya prasarana KA termasuk pengelolaannya	Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda	km	Keme nhub	135,2	81	135	319	954				
			Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan	Paket	Keme nhub	7	10	9	14	16				
4.	Pembangunan Sarana KA	Terbangunnya sarana KA	Jumlah unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)	Paket	Keme nhub	20	3	61	20	67				
5.	Terbangunnya Bandara Kualanamu	Terbangunnya Bandara	Jumlah paket Bandara Kualanamu	Paket	Keme nhub	1	1	1	1	1				
6.	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana bandar udara	Jumlah bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi	Paket	Keme nhub	170	65	150	275	205				
			Jumlah bandara yang	Paket	Keme nhub		10	10	14	14				

NO	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana										
7.	Rehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi darat	Terlaksananya rehabilitasi fasilitas keselamatan transportasi darat	Jumlah paket fasilitas keselamatan transportasi darat	Paket	Keme nhub	32	32	32	32	1			●
8.	Pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	Terlaksananya pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian	Paket	Keme nhub	0	2	21	25	17			●
9.	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang kenavigasian	Terselenggaranya kegiatan di bidang kenavigasian beserta pengelolaannya	Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar; rambu suar; pelampung suar	Unit	Keme nhub	2; 42; 6	5; 40; 40	13; 38	26; 55; 60	20; 53; 18			●
10	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang pelabuhan dan pengerukan	Terselenggaranya kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan beserta pengelolaannya	jumlah volume pengerukan sedimen untuk alur pelayaran	juta m3	Keme nhub	2,58	3	7,67	1,83	13,03			●
		Terbangunnya/Me	Jumlah fasilitas	Lokasi	Keme	60	157	205	607	300			●

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		ningkatnya kapasitas 275 lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpulan (non strategis)	pelabuhan utama, pengumpul, pengumpulan (non strategis) beserta lokasi prasarananya		nhub								
11.	Paket/unit/set peralatan keamanan penerbangan	Terselenggaranya peralatan keamanan penerbangan	Jumlah peralatan keamanan penerbangan	paket/unit /set	Keme nhub	1628	240	346	104	140			
12.	412 unit/paket/set peralatan navigasi	Terselenggaranya peralatan navigasi penerbangan	Jumlah peralatan navigasi penerbangan	unit/paket /set	Keme nhub	1628	81	187	222	27			
13.	Pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi	Terselenggaranya Pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi	Jumlah Pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi	unit	Keme nhub	n.a	1	1	n.a	n.a			
4. PERUMAHAN RAKYAT: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012													
1.	Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan	Terbangunnya 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan	Jumlah satuan hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur	TB	PU	57	40	70	48	279	- Kesiapan lahan termasuk aspek legalitas lahan yang harus disiapkan oleh	- Meningkatkan koordinasi diantara pemangku kepentingan	

NO	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	RPJMN 2010-2014				CAPAIAN					PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	2009	2010	2011	2012 ¹⁾	TARGET 2014			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	permukiman	650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012	pendukungnya								pemerintah daerah. - Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan dan perumahan dan permukiman belum mantap, dan efisiensi - pembangunan perumahan masih rendah	termasuk pemerintah daerah dan penyedia layanan prasarana, sarana, dan utilitas. - meningkatkan kualitas dari pemenuhan kriteria kesiapan sebelum pelaksanaan program termasuk lahan dan organisasi pengelola.	
2.	Pembangunan rumah susun sederhana sewa	Terbangunnya 380 Twinblock (TB) rusunawa	Jumlah fasilitas terbangun	TB	Kementerian	99	49	0	217	380	- Kekurangan Anggaran Tahun 2010; - Alokasi Anggaran Tahun 2011 yang tidak dapat dimanfaatkan;	- Refocusing dan rasionalisasi sasaran pembangunan Tahun 2013 dan Tahun 2014	
3.	Fasilitas pembangunan prasarana, sarana, dan perumahan dan permukiman	Terbangunnya 700.000 unit	Jumlah fasilitas dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman	Unit	Kementerian	n.a	10.374	97.973	80.009	700.000	- Penerbitan DIPA APBN-P 2012 terlambat; - Kenalkan	- Peningkatan kualitas perencanaan program dan	

NO	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
4.	Bantuan subsidi perumahan tahun 2010-2014	Terbangunnya 1.350.000 unit	Jumlah bantuan subsidi perumahan	Unit	Kementerian	212.783	92.431	114.201	73.923	1.350.000	Anggaran yang tidak didukung SDM yang memadai; - Lemahnya dukungan kelembagaan bidang PKP di Daerah; - Sasaran RPJM Nasional Tahun 2010-2014 yang diperkirakan tidak dapat tercapai; - Penugasan Khusus yang diperkirakan tidak dapat tercapai; - Kapasitas Sumber Daya yang tidak memadai; - Inefisiensi Alokasi Anggaran; - Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan; - Terbatasnya	kegiatan Pengembangan Pendataan Penguatan Peran Pemerintah Daerah Penambahan Anggaran Kementerian		
5	Pembayaran tunggakan subsidi tahun 2008-2009	187.006 unit	Terbangunnya 50.000 unit	unit	Kementerian	-	90.000	270.770	-	-				
6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya	500.000 unit	Terbangunnya 50.000 unit	unit	Kementerian	698.711	2.000	12.353	18.159	50.000				
7.	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	50.000 unit	Terbangunnya 50.000 unit	unit	Kementerian	517.586	20.000	35.738	230.000	50.000				

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											akses masyarakat terhadap pem- biayaan perumahan; - Belum optimal nya dan tersedianya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman; - Belum mantap nya pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan; - 14) Masih rendah efisiensi dalam pembangunan perumahan.		
5. Pengendalian Banjir : Penyelesaian pembangua prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara terpadu daerah aliran sungai Bengawan Solo Sebelum 2013													
1	Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai	Terlindungnya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindungi-nya kawasan pantai	Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun	km	PU	70 ⁴⁾	321	463	65	216	Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana banjir dan abrasi pantai akibat kecenderungan - perubahan land-	Pengendalian dan pengurangan dampak banjir dan tanah longsor secara struktural dan non-struktural melalui	●

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ³⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m ³ lahar gunung berapi/sedimen									cover yang tidak diantisipasi (hilangnya tutupan lahan hutan dan) kerusakan daerah tangkapan air; - penggunaan dataran banjir untuk peruntukan yang tak sesuai; - gangguan aliran di alur sungai (sampah, sedimen, rumah, jembatan rendah, gorong-gorong yang kekecilan), dan - perubahan iklim yang berdampak pada perubahan pola distribusi air, kenaikan muka air laut, dll.	peningkatan kinerja sarana dan prasarana (baik melalui pem- bangunan, rehabilitasi dan optimalisasi kinerja OP) serta penerapan pendekatan <i>flood management</i> .	
				km	PU	148 ⁴⁾	171	144	84	386			
			Panjang sarana/ prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi										

NO	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			Panjang sarana/ prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara	km	PU	135	611	648	430	2.000				
			Jumlah sarana/ prasarana pengendali lahar/ sedimen yang dibangun	buah	PU	10 km ⁵⁾	13	43	10	28				
			Jumlah sarana /prasarana pengendali lahar/ sedimen yang direhabilitasi	buah	PU	10	5	18	10	85				
			Jumlah sarana/ prasarana pengendali lahar/ sedimen yang dioperasikan dan dipelihara	buah	PU	0.3 km ⁵⁾	11	5	17	150				
			Panjang sarana/ prasarana pengaman pantai yang dibangun	km	PU	31	25	51	21	30				
			Panjang sarana/ prasarana	km	PU	1	3	2	3	50				

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			pengaman pantai yang direhabilitasi										
			Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara	km	PU	2	10	25	14	50			●
		Disebaikannya dan berfungsi Kanal Banjir Timur untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di wilayah Jakarta ⁶⁾	Disebaikannya pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 s/d 29 ⁶⁾		PU	n.a	Paket 22-29	Paket 30-31 ⁷⁾	n.a	n.a	Beroperasinya Kanal Banjir Timur Jakarta tidak akan serta merta membebaskan wilayah DKI Jakarta dari ancaman banjir karena sebagian besar sungai yang melintasi wilayah DKI Jakarta telah mengalami penurunan kapasitas pengaliran.	Normalisasi Kali Pesangrahan, Kali Angke dan Kali Sunter dengan tujuan untuk mengembalikannya kapasitas pengaliran yang saat ini telah menurun akibat pendangkalan.	●
			Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo (pompa)	Lokasi	PU		8 lokasi	-	-	5 Lokasi	Pelaksanaan pembangunan waduk dan prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo	Peningkatan kualitas kegiatan persiapan baik dalam aspek teknis maupun aspek sosial kemasyarakatan yang diringi dengan upaya	●
		Terkendalnya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo ⁶⁾	Terbangunnya waduk prasarana pengendali banjir	Waduk	PU	1 ⁸⁾	1 ⁸⁾	1 ⁹⁾	-	7	terhambat proses pembebasan lahan seperti terkendala		●

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			di DAS Bengawan Solo								izin penggunaan kawasan hutan, permintaan ganti rugi lahan yang sulit dipenuhi secara peraturan perundangan dan penolakan masyarakat.	koordinasi dengan stakeholder terkait.	
			Tereabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo (8 waduk)	Waduk	PU	-	1	2	2	8			
			Terpeliharanya waduk di DAS Bengawasn Solo	Paket	PU		1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			
			Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo (2 lokasi)	2 Lokasi	PU					2 Lokasi			
6 TELEKOMUNIKASI: Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat													
1.	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika	Meningkatnya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial	Ibukota Provinsi yang terhubung dengan jaringan <i>backbone</i> nasional serat optik	%	Kemendikominfo	Pembangunan <i>link</i> Mataram-Kupang	29 prov	29 prov	29 prov	33 prov	Pembangunan jaringan <i>broadband</i> baik antar pulau (<i>backbone</i>) maupun jaringan ke ibukota kab/kota (ekstensi) selama ini dilakukan oleh PT Telkom dengan menggunakan dana	Untuk memastikan pencapaian target pembangunan jaringan <i>broadband</i> yang dilaksanakan oleh PT Telkom, Kementerian Komunikasi dan	

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											korporat. Adapun komitmen pembangunannya adalah 422 kab/kota hingga 2014. Pembangunan jaringan backbone di wilayah timur Indonesia yang menghubungkan Sulawesi, Maluku dan Papua (SMP Cable System) sedianya dimulai pada Juli 2012 tetapi mengalami penundaan terkait penyesuaian spesifikasi kabel laut dengan kondisi kebencanaan di wilayah tersebut. Saat ini proyek SMP Cable System sedang dalam proses lelang serta dijadwalkan untuk dimulai pada akhir tahun 2012 dan selesai pada tahun 2014.	Informatika serta Tim Kerja Konektivitas, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu melakukan koordinasi dengan PT Telkom dan pemantauan terhadap pelaksanaannya.	

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						n.a	-88%	-88%	-88%	-100%	Sementara itu, pembangunan jaringan ekstensi ke ibukota kab/kota pada tahun 2011 telah mencapai target 17 kab/kota sehingga pada akhir tahun 2011 terdapat 328 kab/kota. Adapun pembangunan tahun 2012 saat ini masih berlangsung. Target awal sebesar 51 kab/kota direvisi menjadi 33 kab/kota karena beberapa kab/kota terhubung dengan proyek SMP Cable System yang belum dimulai. Hingga Oktober 2012, pembangunan jaringan sudah dilakukan di 15 kab/kota, sedangkan 18 kab/kota lainnya dijadwalkan selesai pada Desember	Adapun untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan jaringan <i>broadband</i> oleh Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu segera mempersiapkan pelelangan proyek Palapa Ring agar pembangunan dapat dimulai pada tahun 2013. Sesuai surat Menteri Keuangan, penggunaan <i>ICT Fund</i> untuk membiayai proyek Palapa Ring dilakukan dalam bentuk belanja modal dengan dua tahap pelelangan yaitu untuk pem- bangunan jaringan dan	

NO	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
											2012.	pemilihan pelaksana/pemeli hara jaringan.		
											Untuk mem- percepat penetrasi <i>broadband</i> , Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun <i>Information and Communication Technology (ICT) Fund</i> yang menggunakan sebagian Dana <i>Universal Service Obligation (USO)</i> untuk membiayai pembangunan jaringan <i>broadband</i> (proyek Palapa Ring) di wilayah yang tidak dilayani oleh jaringan PT Telkom.			
			Ibukota Kab/kota yang terhubung secara <i>broadband</i>	%		311 kab/kota	311 kab/kota	328 kab/kota	343 kab/kot a	437 kab/kota				
														

NO	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						63%	63%	66%	69%	88%			
			Desa yang dilayani akses telekomunikasi (total target 33.184 desa)	%		24.051 desa (72,5%)	27.670 desa (83,4%)	30.413 desa (91,6%)	30.441 desa (91,7%)	33.184 desa (100%)	Penyediaan jasa akses telekomunikasi hingga Juni 2012 sudah mencapai 30.441 desa atau 92% dari target desa. Penyediaan jasa di 2.743 desa lainnya akan diselesaikan dalam dua tahun terakhir sehingga target RPJMN 2010-2014 terpenuhi.	Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sertaberkordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan layanan tersebut diketahui dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.	
			Desa ibukota kecamatan yang dilayani akses internet (total target 5.748 desa)	%		Proses pelelangan	4.269 desa (74,3%)	5.706 desa (99,3%)	6.694 desa (-116, 50%)	5.748 desa (100%)	Target RPJMN 2010-2014 sudah tercapai. Kementerian Komunikasi dan Informatika berinisiatif untuk memperluas penyediaan jasa internet ke	Untuk memastikan penggunaan fasilitas internet secara optimal termasuk pengisian content, perlu dilakukan pengawasan dan	

NO	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
											beberapa sentra produktif (tidak lagi berbasis wilayah/desa) sesuai dengan permintaan/masukan Kementerian/Lembaga pengguna layanan, seperti kelautan dan perikanan, UKM.	koordinasi secara terpadu antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian/Lembaga sektor pengguna.		
7. Transportasi Perkotaan: Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT danMonorail) selambat-lambatnya 2014.														
1.	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggaranya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi perkotaan	Paket	Kemendhub	2	2	2	6	9	- Tingginya tingkat kemacetan transportasi khususnya di wilayah perkotaan - Menurunnya kualitas lingkungan sebagai salah satu dampak transportasi darat. - Kurang optimalnya peran	- Pengembangan jaringan pelayanan transportasi secara antar-modan dan intermodal (terintegrasi) - Peningkatan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efesiensi dan		

NO	RPJMN 2010-2014						K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN											
					2009	2010		2011	2012 ¹⁾						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
		Terselenggaranya Transportasi Perkotaan	Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), KotaPercontohan, kawasan Percontohan.	Paket	Keme nhub	1	1	1	1	4	swasta, masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur angkutan massal yang handal.	memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan kepentingan pihak pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau oleh masyarakat.			
		Terselenggaranya Transportasi Ramah lingkungan	Jumlah Penyelenggara-an Transportasi Ramah Lingkungan	Paket	Keme nhub	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a					
2.	Penyelesaian Pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail)	Terselenggaranya angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan monorail)	Jumlah Monorail dan MRT	Paket		n.a	n.a	n.a	n.a	n.a					

Keterangan

- 1) Sampai dengan Juni 2012
- 2) Permasalahan pelaksanaan dalam periode 2010-2012
- 3) Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam tahun 2010-2014 untuk mencapai target 2014
- 4) Mendapatkan tambahan alokasi dari Stimulus Fiskal TA 2009
- 5) Data yang tercantum di Realisasi Penetapan Kinerja Ditjen SDA tahun 2009 dalam "km"
- 6) Merupakan sasaran dan indikator khusus yang baru ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014
- 7) Pekerjaan tambahan untuk penyelesaian konstruksi Kanal Banjir Timur Jakarta
- 8) Dalam pelaksanaan pembangunan
- 9) Selesai dibangun

LAMPIRAN 7
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Tahun 2010-2012

No	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1.KEPASTIAN HUKUM :														
Reformasi regulasi secara bertahap di tingkatan nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidaktepatan dan inkonsistensi dalam implementasinya														
1	Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU (RanperUU) di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan	1. Persentase yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan	peraturan perundang-undangan	Kemen-kumha m	n.a	Tercapai 25 % yaitu 3 RUU dan 3 RPP, RUU terdiri dari Perubah -an UU Desain Industri, RUU perubah -an UU Paten, RUU perubah -an UU Pengadil-an Anak. dan RPP mengenai RPP	2 RPP, 1 R PERPRES dan 21 RPERMEN	7 RUU dan 6 RPP dalam tahap penyusunan	100%	Penyusunan Peraturan Tingkat daerah masih dengan belum sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011	Meningkatkan peran kantor wilayah dalam pelaksanaan tugas-tugas pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah dengan memberdayakan tenaga-tenaga perancang peraturan perundang-undangan		
			2. Persentase yang selesai di bahas di DPR secara tepat waktu	peraturan perundang-undangan	Kemen-kumha m	n.a		4 RUU Prakarsa Pemerintah, 4 RUU inisiatif DPR, 5 RUU yang ditugas-	2 dari 6 RUU sudah selesai dibahas di DPR yakni UU tentang	100%				

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							melaksa- nakan UU Merek, RPP Visa ijin masuk dan ijin keimigra- sian, dan RPP dan RPP Pelaksa- naan Hak cipta	kan Presiden dan 1 RUU Kumulatif terbuka	pengesa- han Persetu- juan antara Pemerin -tah Republik Indone- sia dan Pemerin -tah Daerah Adminis- trasi Khusus Hongko ng RRC tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah Pidana dan UU Sistem Peradi- lan Pidana Anak				

No	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2009		2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			3. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan per- UU yang mendapat kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dan akuntabel	Orang	Kemen- kumha m	n.a		23 dari 81 orang yang mendapatkan kualifikasi dan promosi secara tepat waktu de- ngan adminis- trasi yang akuntabel lebih- nya sesuai dengan standar.	n.a	100%				
			4. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka secara akurat dan <i>up to date</i>	peraturan perundang- undangan	Kemen- kumha m	n.a		53 Peraturan Per- undang- undangan	n.a	100%				
			5. Pembenahan Peraturan PerUUan di bidang Pertanian, tata ruang dan	peraturan perundang- undangan	Kemenk umham	n.a		n.a	n.a	n.a				

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIFIKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			LH										
			6. Peraturan PerUuan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor	peraturan perundang-undangan	Kemenkumham	n.a		1 RUU Perlindungan Saksi dan Korban	Direnakan untuk masuk dalam Prolegnas 2013	100%			●
			7. Peraturan PerUuan di bidang yang mendorong pemberantasan Korupsi	peraturan perundang-undangan	Kemenkumham	n.a		4 RUU yakni RUU Perampasan Aset, RUU Pembekantan Tiplikor, RUU KUHP dan RUU KUHAP	n.a	100%			●
2	Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatkan keharmonisan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum,	1. Persentase di bidang politik, hukum dan keamanan	peraturan perundang-undangan		n.a	Dari 219 permohonan harmonisasi Peraturan Perunda	8 RUU, 4 RPP dan 4 RPERPRES telah diharmonisasi	6 RUU, 4 RPP dan 5 RPERPRES selesai harmonisasi	100%	Perancangan peraturan Perundang-undangan yang dimintakan harmonisasi semakin meningkat.	Mempercepat pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dimohonkan peng-	●

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIFIKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis					ng-undangan yang dapat diselesaikan harmonisasinya adalah 140 peraturan perundangan-undangan					harmonisasian peraturan perundangan yang diharmonisasikan di Dirjen Peraturan Perundangan	
						n.a			5 RUU, 5 RPP dan 1 RPERPR ES dalam Proses harmonisasi	100%			●
						n.a		4 RUU dan 44 RPP telah diharmonisasi	3 RUU, 33 RPP selesai harmonisasi	100%			●
						n.a				100%			●

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			3. Persentase di bidang industri yang harmonis	peraturan perundang-undangan		n.a		4 RUU, 14 RPP dan 1 RPerpes telah diharmonisasi	8 RPP dan 1 RPERPR ES selesai harmonisasi	100%			●
						n.a			4 RUU, 13 RPP dan 2 RPERPR ES dalam proses harmonisasi	100%			●
			4. Persentase di bidang kesra	peraturan perundang-undangan		n.a		1 RUU dan 11 RPP telah diharmonisasi	7 RPP dan 5 RPERPR ES selesai harmonisasi	100%			●
						n.a			6 RPP dan 2 RPERPR ES Proses harmonisasi	100%			●

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									sasi				
			5. Pembentukan Peraturan PerUUan di bidang Pertanahan, tata ruang dan LH	peraturan-perundang-undangan		n.a		6 RPP telah diharmonisasi sasi		100%			●
			6. Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan Saksi dan Pelapor	peraturan-perundang-undangan		n.a		1 RUU telah diharmonisasi sasi		100%			●
			7. Peraturan PerUUan yang mendorong pemberantasan korupsi.	peraturan-perundang-undangan		n.a		1 RUU telah diharmonisasi sasi		100%			●
2. PENYEDERHANAAN PROSEDUR: Penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPSE) pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan surat ijin usaha perdagangan (SIUP)													
1	Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi	Diterapkannya SPIPSE pada PTSP di 33 provinsi dan	Jumlah provinsi dan kab/kota yang telah	Prov/Kab/Kota	BKPM	n.a	73	83	83	83	-	-	●

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan Perda pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	40 kabupaten/kota	menerapkan SPIPISE										

3. LOGISTIK NASIONAL:

Pengembangan dan Penetapan sistem logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi

1	Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok	Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok	1. Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pem-binaan pasar dan distribusi	Jenis	Kemendag	n.a	6	4	4	4	6. belum optimalnya logistik nasional sehingga menyebabkan biaya distribusi barang yang cukup tinggi dan mengganggu ketersediaan bahan pokok pada waktu-waktu tertentu.	1. Peningkatan dan perluasan sistem National Single Window dalam rangka pengembangan logistik nasional	
			2. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan,	orang		n.a	1800	n.a	n.a	3.000	7. berbagai gejala yang secara langsung memicu kenaikan harga	2. Penggabungan sistem trans-portasi dan pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi sebuah	

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			pelatihan dan bimbingan teknis								pangan dunia, seperti: krisis pangan dunia dan anomali cuaca yang terjadi di berbagai belahan dunia	konektivitas nasional 3. Pengembangan <i>Early Warning System</i> untuk mendukung stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok	
			3. Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama	%		n.a	4,5	3,5	2,2	5 - 9			
			4. Rata-rata rasio koefisien variasi harga provinsi dan nasional			n.a	1,8	1,9	2,1	1,5 - 2,5			
			5. Rata-rata rasio koefisien variasi harga di dalam dan luar negeri			n.a	0,22	0,3	0,4	< 1			
			6. Jumlah perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dijalani secara online			n.a	12	15	15	11			
			7. Waktu penyelesaian perijinan dan nonperijinan	Hari		n.a	6	5	4	2			

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI	
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
2	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok	Jumlah pasar percontohan	Unit	Kemend ag	10	12 dan -	15 dan 1	20 dan 1	26 dan 5	Masih kurangnya komitmen peme- rintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan sarana distribusi per- dagangan	Penerapan suatu penerapan sistem yang dapat meningkatkan komitmen daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana distribusi perdagangan, termasuk jaringan distribusinya	●	
			Jumlah pembangunan pusat distribusi			n.a	2	1	1	1			1	●
			Jumlah rekomendasi penataan sistem distribusi			n.a	2	3	n.a	6			●	
4 SISTEM INFORMASI: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama custom advanced Trade System (CATS) di dry port cikarang														
1	Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor	Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor	1. Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor	Peraturan	Kemend ag	n.a	4	2	1	4			●	
			2. Jumlah pengembangan sistem elektronik	Kegiatan		n.a	2	2	n.a	2			●	

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			bidang fasilitasi pelayanan publik										
			3. Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online melalui INATRADE	Perusahaan		n.a	1.536	2.064	2.618	7500			
			4. Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan	Kegiatan			60	87	5	5			
			5. Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan	Kegiatan			5	23	12	60			
			6. Jumlah partisipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan di dalam dan luar negeri				-	12	8	17			
			7. jumlah laporan evaluasi				-	32	5	5			

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan										
5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK): Pengembangan KEK di 5 Lokasi melalui skema public private partnership sebelum 2012													
1	Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public Private Partnership sebelum 2012	Meningkatnya peranan sektor perdagangan di Kawasan Ekonomi Khusus	Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus	Peraturan	Kemen- dag		1	-	2	2			
			Jumlah kebijakan perdagangan yang diimpahkan ke KEK	Peraturan			-	-	1				
		Terlaksananya pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public Private Partnership sebelum 2012	Terlaksananya sosialisasi dan promosi dalam rangka pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	BKPM		4 negara & 7 daerah	3 negara & 3 daerah	2 negara & 2 daerah	7 negara & 8 daerah				
6 KEBIYAKAN KETENAGAKERJAAN: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.													
1	Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan	Peraturan yang dapat mendorong penciptaan	Tersusunnya peraturan kompensasi &	Peraturan perundangan	Kemena kertrans	Masuk dalam Prolegn	Naskah Akade- mis	Penunda- an revisi dan	Permen akertran s No. 13	-	Adanya ketidak- sesuaian pandangan antara pemerintah,	Melakukan sosialisasi dan konsolidasi yang	

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		kesempatan kerja dan memperkuat lembaga H	penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & outsourcing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja			as		dikeluar-kan dari Prolegnas ²⁾	tahun 2012 dan No. 19 Tahun 2012 ²⁾		serikat buruh, dan pengusaha untuk amandemen UU 13/2003.	lebih menyeluruh dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas untuk menyampaikan pentingnya amandemen UU 13/2003.	
			Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh	Kajian			-	1	1	Sosialisasi		Sosialisasi tentang UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang akan beroperasi paling lambat 1 Juli 2015.	●
			Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI	Kajian			-	1	1	Sosialisasi			●
		Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah	Harmonisasi kebijakan jaminan sosial	Dokumen			-	4	4	Sosialisasi	Masih terdapat tuntutan serikat pekerja/serikat buruh soal iuran jaminan		●

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIF IKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		yang sinergis									sosial (BPIS).		
			Selarasnya peraturan bidang HI	Dokumen			Inventarisasi Perda HI	Review	Sosialisasi	Sosialisasi dan konsolidasi dengan pemda			●
2	Pengelolaan Kelembagaan dan Penasyarakatan Hubungan Industrial	Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja	Mekanisme perundingan secara bipartit, pencatatan, keterwakilan dan verifikasi SP/SB	Naskah			2	2	-		Belum dipahaminya makna hubungan industrial dengan baik sehingga serikat pekerja dan pengusaha belum harmonis.	Sosialisasi aturan-aturan pelaksanaan di bidang hubungan industrial yang lebih intensif kepada para pelaku hubungan industrial.	●
			Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipartit di perusahaan	LKS Bipartit		12.115	13.246	13.912	14.339	15.000	Mekanisme penerapan upah minimum sering tidak mencapai kesepakatan.	Menyempurnakan kebijakan pengupahan sebagai payung hukum.	●
			Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat	Perwakilan			130	2.250	-	1.500	- Masih belum tepatnya mekanisme penentuan kebutuhan hidup	Menyempurnakan mekanisme penentuan KHL.	●

No	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	NOTIFIKASI
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			pendidikan teknik bernegosiasi								layak (KHL) yang akan menjadi dasar sistem pengupahan - Keterbatasan jumlah pegawai teknis hubungan industrial (mediator).		
		Diterapkannya manajemen dan standar K3.	Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3	Perusahaan			Naik 10%	Naik 10%	Naik 10%	% perusahaan Naik 10%	Masih terbatasnya jumlah tenaga pengawas ketenagakerjaan	Meningkatkan jumlah tenaga pengawas terutama di daerah-daerah rawan kasus K3	●
			% kenaikan tenaga pengawas K3 bersertifikat kompetensi	Orang			270	750	-	Naik 50%	Masih terbatasnya mekanisme kerja pengawasan ketenagakerjaan	Merumuskan mekanisme atau sistem pengawasan ketenagakerjaan	●
			Jumlah tenaga pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang			60	60	60	-			●
		Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan yang efektif	Jumlah Pengawas ketenagakerjaan	Orang		1.542 orang	1.821 orang	1.404 orang	1.295 orang	1.633 orang			●

LAMPIRAN 8
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 8 : Energi
Tahun 2010-2012

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
1	Penetapan kebijakan energi yang memastikan penangnanan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
2	Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi mulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diikuti oleh BUMN lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
3	Kapasitas Energi : Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3000MW per tahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencapai 62 persen pada 2010 dan 80 persen pada 2014 dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per	Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik	Jumlah produksi minyak bumi	MBOPD	KESDM	949	945	902	877	1.010	- Kehilangan peluang produksi karena <i>unplanned shutdown</i> - Keterlambatan proyek/ pengembangan lapangan - Permasalahan <i>off-taker</i>	- Meningkatkan kehandalan peralatan operasi migas - Meningkatkan koordinasi terkait dalam mengatasi kendala sosial dan pembebasan lahan	●

No.	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN			2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	<u>hari mulai 2014</u>											- Kendala <i>subsurface</i> (a.l. kenaikan water cut, problem kepasiran) - Perpanjangan planned <i>shutdown</i> - Kendala perijinan, khususnya ijin lokasi, pemboran dan trans-portasi - Permasalahan-an sosial (pencurian minyak dan demonstrasi masyarakat)		
		Total Kapasitas Pembangkit	Jumlah Kapasitas Pembangkit	MW	KESDM	31.959	33.983	39.899	42.839	3.000		Pembebasan tanah, perizinan dan kinerja kontraktor yang lambat	Apabila perizinan tidak dapat diselesaikan, akan dilakukan reroad; pendekatan kepada masyarakat untuk negosiasi harga, memberi peringatan kepada kontraktor	
		Total Panjang Transmisi	Jumlah Panjang Transmisi	KMS	KESDM	34.949	35.147	36.720	37.390	54.411				
		Total Kapasitas Gardu Induk	Jumlah Kapasitas Gardu Induk	MVA	KESDM	63.375	65.669	71.615	72.275	76.234				
		Total Panjang jaringan Distribusi	Jumlah Panjang jaringan	KMS	KESDM	639.517	679.424	681.762	728.603	718.786				

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
			Distribusi										
		Total Kapasitas Gardu Distribusi	Jumlah Kapasitas Gardu Distribusi	MVA	KESDM	34.725	35.703	39.277	39.556	41.833			
		Rasio elektrifikasi	Persentase Rasio elektrifikasi	%	KESDM	65,79	67,15	72,95	75,90	80,00			
4	Energi Alternatif : Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2000MW pada 2012 dan 5000MW pada 2014 dan dimulainya produksi Coal Bed Methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, mikro hidro, bio energi, dan nuklir secara bertahap	Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik	Jumlah produksi CBM	MMSCFD	KESDM	0	0	3	-	113,21	- Fasilitas pemboran terbatas, saat ini menggunakan conventional drilling (overspec horse-power) sehingga cost sewa mahal (conventional 800 psi; unconventional 500 psi); - Keterbatasan rig drilling untuk CBM. Dalam pelaksanaan bergantian antar lokasi/ perusahaan sehingga menunda	- Koordinasi yang lebih intensif dengan BPMIGAS terkait dengan ketersediaan peralatan operasi CBM - Meningkatkan studi GGR - Meningkatkan koordinasi terkait dalam proses perijinan	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
											pekerjaan; - Lokasi pengeboran daerah rawa-rawa, sehingga menghambat mobilitasi dan jadwal pemboran. Dibuat kanal2 untuk mobilitasi fasilitas <i>drilling</i> ke lokasi yang memakan waktu yg cukup lama; - Permasalahan sosial; - Perijinan & tumpang tindih lahan. - Kompleksitas kondisi bawah permukaan; - Internal KKKS (<i>operatorship, financial/sharin g risk, prioritas holding</i>); - Kendala teknis pada pompa sumur yang digunakan untuk		

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
											<i>dewatering</i> ; - Proses PJBG dan negosiasi harga gas yang belum mencapai kesepakatan.		
		Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014	Kapasitas energi alternatif geothermal yang ter-manfaatkan	MWe	ESDM	1.179	1.189	1.226	1.226	5.795	- Tumpang tindih kawasan hutan - Negosiasi kontrak (PPA)	- Telah diamandemen UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi telah sampai tahap pembahasan antar kementerian dan harmonisasi RUU di Kementerian Hukum dan HAM & Telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan terkait 28 proyek panas bumi yang berada di kawasan hutan - Diperlukannya amandemen UU No 5 Tahun 1990	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
												tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta UU No 41 Tahun 1999 Kehutanan Telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2012 terkait Feed in Tariff Panas Bumi dan telah diundangkan pada Berita Negara RI Tahun 2012 No.850 - Pemerintah memberikan Jaminan Kelayakan Usaha kepada PT.PLN	
		Meningkatnya pemanfaatan potensi tenaga surya dan mikrohidro	Kapasitas terpasang pembangkit listrik dari sumber energi surya dan mikrohidro	MW/p	ESDM	16,43	17,66	21,56	54,49	385,49	- Belum ada regulasi penetapan wilayah aliran dan terjunan air (WATA) - Harga tidak kompetitif - Biaya Investasi PLTS relatif	- Menetapkan Regulasi WATA - Penetapan feed in tariff - Perlu skema kredit yang mendukung pembangunan PLTS	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
											besar		
		Meningkatnya pemanfaatan potensi bioenergi	Kapasitas pembangkit dari sumber energi biomassa	MW	ESDM	405	450	500	550	700	Kebijakan harga jual (<i>Feed in Tariff</i>) untuk sampah kota dianggap belum menarik	Revisi Permen 04 tahun 2012 untuk pembangkit listrik dari sampah kota	
5	Hasil iktan dan turunan minyak bumi/gas: Revitalisasi industri pengolahan hasil iktan/turunan minyak bumi dan gas bumi sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya.	Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik	Jaminan pasokan gas untuk industri, transportasi, pembangkit listrik	%	KESDM	0	70	82,5	83	70	- Keterbatasan infrastruktur gas bumi - Jauhnya jarak lokasi sumber gas dan pengguna gas	- Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur gas bumi - Mendekatkan pengguna gas dengan sumber gas	
6	Konversi menuju penggunaan gas: Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya	Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM dan listrik	Jumlah pendistribusian paket perdana	Paket (ribu)	KESDM	24.355,4	4.714,7	5.603,9	212,96	-	a. Faktor Internal: - Lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait (PT Pertamina Persero) - Terdapat ketidaktepatan distribusi paket perdana	- Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait (PT Pertamina Persero) - Peningkatan pengawasan (baik terhadap ketidaktepatan distribusi paket pendistribusian	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
	dan Denpasar		- Jumlah wilayah penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan	Wilayah	KESDM	-	-	1	1	-	kepada yang tidak berhak - Terdapat paket perdana yang diterima masyarakat dalam kondisi rusak atau tidak lengkap - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik tingkat I maupun tingkat II - Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sosialisasi dan Edukasi, Satuan Tugas Intensifikasi Pengawasan, dan Satuan Tugas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Pengamanan Penggunaan Elpiji (LPG) 3 kg untuk menanggulangi dampak negatif dari kasus ledakan pada LPG Tabung 3 kg dan menjamin keselamatan b. Faktor Eksternal - Adanya ledakan LPG 3kg yang diakibatkan oleh kebocoran selang maupun tabung gas - Kondisi geografis yang sangat luas yang merupakan daerah terkonversi - Terlanjut perijinan dari daerah - Kurangnya koordinasi Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota		

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	
											- Adanya Pilkada (adanya kepentingan spesifik di masing-masing daerah)	serta keamanan penggunaan LPG tabung 3 kg.	

¹⁾ Sampai dengan Juni 2012

²⁾ Permasalahan pelaksanaan dalam periode 2010-2012

³⁾ Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam tahun 2012-2014 untuk mencapai target 2014

LAMPIRAN 9
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 9 : Lingkungan Hidup dan Bencana Alam
Tahun 2010-2012

No.	Kegiatan	RPJMN 2010-2014			Indikator	Satuan	K/L	Perkembangan Pencapaian			Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Notifikasi
		(3)	(4)	(5)				(6)	(7)	(8)				
(1)														
1. PERUBAHAN IKLIM:														
Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan, seperti Dana Luran Hak Pemanfaatan Hutan (LPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi														
1. Peningkatan Keberdayaan Pengelolaan Lahan Gambut														
a	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Facilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha	ha	Kemendhut	-	10.401	(terakumu-lasi dalam pencapaian RHL)	295.000					
b	Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut	Tersedianya perangkat kebijakan pengelolaan kualitas ekosistem gambut, yang terpadu dan bersifat lintas K/L	Penyelesaian penataan kesatuan hidrologi gambut di 8 provinsi yang terkoordinasi dengan K/L terkait	Persen (%)	KLH	10	25	NA	100					
			Verifikasi karakteristik ekosistem gambut di 5 provinsi yang terkoordinasi antar K/L terkait	Provinsi	KLH	1	2	NA	8					
2. peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun														
a	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	Facilitasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS	ha	Kemendhut	229.217	742.364	1.251.883	1.600.000					

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	Perkembangan Pencapaian			Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Notifikasi
	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan		2010	2011	2012				
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Prioritas									
b	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	ha	Kemenhut	528.507	1.036.678	1.537.005	2.500.000			●
			Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan	ha	Kemenhut	51.506	102.067	158.421	250.000			●
c	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Terkelolanya 20% kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan 15 jenis biota perairan yang terancam punah	Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan	ha	KKP	1.267.751	2.542.353	3.225.100	4.500.000			●
3. Penekanan Laju Deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan, seperti Dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi												
a	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan	(capaian indikator pada RPJMN sudah tercakup pada sasaran peningkatan rehabilitasi hutan dan	ha per-tahun	Kemenhut	450.000 (periode 2009-2011)						●

No.	Kegiatan	RPJMN 2010-2014				K/L	Perkembangan Pencapaian				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Notifikasi
		Sasaran	Indikator	Satuan	(8)		(9)	(10)	(11)					
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
			lahan)											
b	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L	% penyelesaian dokumen pedoman kebijakan pengawasan pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan [dari 5 dokumen yang direncanakan yang terkoordinasi antar K/L	%	KLH	NA	20	40	100					
2.PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketepatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan Penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; Penghentian kerusakan lingkungan di 13 DAS yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya.														
1. Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketepatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa														
a	Pengendalian Pencemaran Air	Menurunnya beban pencemar air dan udara dari industri yang dipantau dan diawasi	Jumlah industri pertambangan, energi dan migas, agro-industri dan manufaktur yang dipantau dan diawasi	industri	KLH	705	996	1.312	680					

No.	RPJMN 2010-2014					K/L	Perkembangan Pencapaian			Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Notifikasi
	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	2010		2011	2012					
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
b	Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri, dan Jasa	Meningkatnya kebijakan dan penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 serta meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola dalam kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas, manufaktur, agroindustri dan jasa	Jumlah pengawasan kinerja industri yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	industri	KLH	NA	NA	1.312	795				
2. Penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun													
a	Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatnya sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan, dan lahan	Hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% per tahun dari rerata 2005-2009	%	Kemenhut	83,42%	51,65%	45,11%	67,20%				
3. penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50%													
a	Pengendalian Pencemaran Air dan Pengendalian Pencemaran Udara	Menurunnya beban pencemaran udara dan air dari industri yang dipantau dan diawasi	(capaian indikator pada RPJMN sudah tercakup pada sasaran penurunan beban pencemaran lingkungan)	industri	KLH	705	996	1.312	680				

No.	Kegiatan	RPJMN 2010-2014			K/L	Perkembangan Pencapaian			Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Notifikasi
		Sasaran	Indikator	Satuan		2010	2011	2012				
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4. Penghentian kerusakan lingkungan di 13 DAS rawan bencana												
a	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	Terselenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS Prioritas	Rencana Pengelolaan DAS Terpadu	DAS	Kemenhut	22	58	95	108			●
3. SISTEM PERINGATAN DINI: Penjaminan berjalannya fungsi sistem peringatan dini tsunami (TEWS) dan sistem peringatan dini cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta sistem peringatan dini iklim (CEWS) pada 2013												
a	Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG	Tersedianya kebijakan teknis dalam penanganan penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami	Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami	%	BMKG	90	100	100	90			●
b	Pengelolaan Meteorologi Publik BMKG	Meningkatnya pelayanan data dan informasi meteorologi publik serta peringatan dini cuaca ekstrim	Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim	%	BMKG	50	66,67	78,78	80			●
c	Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan data dan informasi di bidang iklim agroklimat dan iklim maritim	% pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara	Persen (%)	BMKG	39	68	80	90			●
4. PENANGGULANGAN BENCANA: Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1). penguatan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2). Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia												
1. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi												

No.	Kegiatan	RPJMN 2010-2014				K/L	Perkembangan Pencapaian				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Notifikasi		
		Sasaran	Indikator	Satuan	(5)		(6)	(7)	2010	2011					2012	(8)
a	Pengendalian Kebakaran Hutan	Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan, dan lahan	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan	DAOPS	Kehutanan	30	32	32	30							
b	Penyiapan Peralatan dan Logistik di Kawasan Rawan Bencana	Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan dan Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan	Prov/Kota	BNPB	16 provinsi	33 provinsi/265 kab/kota	33 provinsi/160 kab/kota	77 kab/kota	Ketersediaan dan distribusi logistik yang belum memadai; keterbatasan daerah dalam penyediaan peralatan kebencanaan	penyediaan logistik dan peningkatan kapasitas pengelolaan logistik kebencanaan; dukungan penyediaan peralatan kebencanaan sesuai standar minimal yang ditetapkan dan diprioritaskan di kawasan rawan bencana tinggi					
2. Pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia																
a	Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontijensi	Jumlah rencana kontijensi yang tersusun	Provinsi	BNPB	5	8	33	8	masih lemahnya kapasitas dan antisipasi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	dukungan peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah dan masyarakat serta fasilitas penyusunan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana					
b		Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB)	Terbentuknya satuan reaksi cepat (SRC-PB)	Lokasi	BNPB	2	2	2	2							

No.	RPJMN 2010-2014					K/L	Perkembangan Pencapaian				Target 2014	Permasalahan	Tindak Lanjut	Notifikasi
	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Satuan	(7)		2010	2011	2012	(11)				
(1)	c	Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	Koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah	Lokasi	BNPB	58	40	137	175	masih lemahnya koordinasi penanganan darurat antar instansi baik di pusat maupun daerah	meningkatkan koordinasi penanganan darurat antar semua pihak terkait		

LAMPIRAN 10
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 10:
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, Dan Pascakonflik

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
KEBIJAKAN : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011													
1	Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rencana aksi pengembangan daerah		KPDT	-	-	2	27	27	Belum optimalnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program khusus dan alokasi pendanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tertinggal, ter-depan, terluar, dan pascakonflik di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan	Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan program khusus untuk me-nuntaskan permasalahan daerah ter-tinggal, ter-depan, terluar, dan pascakonflik yang memerlukan intervensi spesifik dalam penanganannya	
3	Pelayanan Pemberdayaan dan Pe-merataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non-komersial	Jumlah desa berdering	desa	kemenkomi nfo	24.051	27.670	30.413	30.441	33.184	terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan komunikasi	Meningkatkan sinergi pelaksanaan kebijakan dan program antar sektor	
			Jumlah desa Pusat Layanan Internet Kecamatan/PLIK	desa		-	4.269	5.706	6.694	5.748			
4	Pembinaan Pelayanan kesehatan komunitas	Meningkatnya kualitas pelayanan-kesehatan kepada masyarakat	Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawat di	unit	Kemenkes	76	76	83	86	96			

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	RPJMN 2010-2014			K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
		SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
			perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk										
5	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan di perbatasan dan pulau terluar	unit	Kemenkes	101	101	-	-	101			
6	Pembinaan Pelayanan Medik Spesialistik	Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat	Jumlah kab/kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)	unit	Kemenkes	-	-	24	24	58			
7	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di DTPK dan diberi insentif di DTPK dan di DBK	orang	Kemenkes	-	-	1.391	4.248	7.020			
8	Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik	Tersedianya guru yang bermutu dan merata antar prov, kab dan kota	Jumah guru penerima tunjangan khusus	orang	Kemen- dikbud	32.500	41.531	46.896	53.954	30.000	- Kuota tunjangan khusus masih kecil. - Sekolah/madrasa h terpencil tidak selalu berada di daerah tertinggal sesuai daftar dari KPDT.	Memperbaiki pendataan dan penganggaran tunjangan khusus guru. Memasukan kriteria sekolah/madras ah terpencil dalam juknis tunjangan khusus.	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
9	Peningkatan akses, mutu kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan madrasah	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan tenaga kependidikan	Tunjangan guru non PNS	orang	Kemenag	-	3.500	3.241	3.790	3.500	Kuota tunjangan masih kecil	Memperbaiki pendataan dan penganggaran tunjangan guru	
10	Pendayagunaan pulau-pulau kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai, ekosistem baik, siap terhadap bencana dan 25 diantaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi potensi pulau-termasuk pulau-terluaran dipetakan	pulau	KKP	12	20	35	74	200			
			Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	pulau	KKP	5	19	30	120	200			
KERJA SAMA INTERNASIONAL :													
Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan													
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat	WPP	KKP	-	3	3	5	5	Aksesibilitas yang belum memadai, termasuk minimnya transportasi menghubungkan antar-pulau	Peningkatan sarana dan prasarana	
		Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur		WPP	KKP		6	6	6	6			

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
		SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN			2009	2010	2011	2012				
2	Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan dan pemantauan kapal perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancangan bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akurat dan tepat waktu	unit	KKP		-	-	21	-	-	Belum idealnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pengawasan dan pengamanan yang tersedia untuk menyelenggarakan upaya pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan secara intensif	Mempererat kerjasama antarnegara dalam upaya pengamanan wilayah dan pengawasan sumberdaya kelautan yang didukung oleh upaya peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengamanan dan pengawasan	
KEUTUHAN WILAYAH :														
Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste dan Filipina pada 2010-2014														
1	Pelaksanaan perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau	Terlaksananya perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat	perundingan	Kemenlu		12	58	51	10	12	- Terlaksananya perundingan sangat bergantung pada kesiediaan negara tetangga - Terbatasnya sumber daya manusia pelaksanaan perundingan	Meningkatkan upaya mempercepat penyelesaian delimitasi batas negara Pemerintah terus mencari peluang untuk melanjutkan perundingan batas laut dan darat dengan negara tetangga yang belum selesai dan	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
2	Penetaan batas wilayah	Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah	Jumlah NLP peta batas wilayah negara (Joint Mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000	NLP	Bakosur-tanal / SIG	-	37	12	45	72	Adanya perbedaan pandangan mendasar antara Indonesia dengan negara tetangga mengenai batas negara	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemetaan batas wilayah dan kecamatan perbatasan serta mendorong pemanfaatan hasil pemetaan oleh instansi terkait di pusat dan daerah.	
			Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	NLP	Bakosur-tanal / SIG	-	-	89	-	-			

No.	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
		SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN			2009	2010	2011	2012				
			Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar	pulau	Bakosurtana I / SIG		-	-	-	94 pulau	114 pulau	Sulitnya akses transportasi ke pulau kecil dan terluar dan perbatasan darat NKRI	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait ketersediaan transportasi	●
3	Pengelolaan pertahanan provinsi	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	SP	BPN		-	200	394	578	885	Belum optimalnya antar instansi dalam pelaksanaan pemetaan batas wilayah dan kecamatan perbatasan	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemetaan batas wilayah	●
4	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	paket	BPN		-	-	1	-	1			●
DAERAH TERTINGGAL : Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014														
1	Pengembangan kebijakan pengelolaan komoditas unggulan	Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tertinggal berbasis komoditas unggulan	Jumlah daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pengembangan produk unggulan	Kab	KPDT		-	-	-	64	105	Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber-daya lokal, belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal, masih lemahnya koordinasi antar pelaku	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan termasuk fasilitas kegiatan stimulan di daerah tertinggal,	●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
											pembangunan Terbatasnya sarana dan prasarana dasar wilayah	terdepan, terluar dan pascakonflik melalui optimalisasi peran KPDT dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, maupun unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang baru terbentuk	
	Pengembangan kebijakan, koordinasi pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal	Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di daerah tertinggal	Jumlah kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perdesaan terpadu	kab	KPDT	-	-	12	40	50			●
	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur daerah tertinggal	Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal	Kab	KPDT	-	28	53	64	35			●

No.	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN	2009		2010	2011	2012					
2	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur	unit	Kemensos	-	2.303	2.431	2.671	4.250	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal	Diperlukan adanya kerjasama antar daerah agar pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih efisien		
3	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut	Tersedianya kapal penunjang dan perintis 34 unit	Pemberian jaminan hidup Unit kapal	KK	Kemensos	-	4.272	2.353	5.367	5.671				
		Tersedianya subsidi perintis angkutan laut 76 trayek di 17 provinsi	Jumlah trayek	trayek	Kemenhub	-	60	61	67	76				
4	Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan	Pelayanan keperintisan angkutan jalan (577 bus perintis dan 907 lintas perintis)	Unit bus perintis	unit	Kemenhub	-	37	50	83	170				
			Lintas bus perintis	Lintas	Kemenhub	-	143	147	180	190				
5	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP	Teredianya 510 pelayanan keperintisan	Jumlah lintas	lintas	Kemenhub	-	99	99	135	120				
6	Pelayanan angkutan udara	Tersedianya 580 rute perintis	Jumlah rute perintis yang	rute	Kemenhub	-	112	130	130	115				

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	KENDALA	TINDAK LANJUT	Status
	SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN**	INDIKATOR**	SATUAN		2009	2010	2011	2012				
	perintis		terlayani										

Keterangan:

*) sumber data : RKP 2011, RKP 2012, BPS 2008 Data diolah, Direktorat Bappenas

**) sumber data : RPJMN, hasil penyesuaian

LAMPIRAN 11
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi,
Sampai dengan Tahun 2012

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN 2)	TINDAK LANJUT 3)	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 1)				
1. PERAWATAN:													
Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011													
1.	Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Purbakala	Terlaksananya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revita- lisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011.	Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya (kawasan warisan budaya dunia yang dimulai dengan Candi Borobudur, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Candi Prambanan)	- Kesepakatan/ aturan/ Peraturan - Kajian/ Model	-	1	2	*)	3	- PP sebagai dasar hukum pengelolaan terpadu cagar budaya perlu diselesaikan - Koordinasi antar pihak terkait dalam penetapan bentuk pengelolaan terpadu cagar budaya perlu ditingkatkan	- Sinergi antar pihak terkait perlu ditingkatkan untuk menyelesaikan PP sebagai dasar hukum dari perpres pengelolaan terpadu cagar budaya - Melakukan pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya antar pihak terkait secara berkualitas.		
2.	Pengembangan Pengelolaan Pemuseuman		Jumlah museum yang direvitalisasi	Unit Museum	-	6	30	6	30	Kerjasama SKPD yang menangani kebudayaan dengan UPTD Museum dalam melaksanakan	Melakukan review terhadap seluruh rancangan museum yang		

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN 2)	TINDAK LANJUT 3)	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 1)				
3	Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi		Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (<i>e-library</i>) dan jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan	Unit Perpustakaan: ▪ Provinsi ▪ Kab/ Kota ▪ Desa ▪ Perpustakaan Keliling & Terapung		-	33 250 2.143 91	33 300 3.102 55	*) *) *) *)	33 150 2.300 33	revitalisasi museum perlu ditingkatkan	diusulkan untuk revitalisasi pada tahun berikutnya	
											- SDM yang menangani bidang IT di daerah perlu ditingkatkan agar operasionalisasi perpustakaan digital dapat berfungsi dengan baik. - Komitmen dari sebagian Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan biaya operasional perpustakaan keliling perlu ditingkatkan agar frekuensi layanan perpustakaan keliling di Kabupaten/kota meningkat.	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi	
2 SARANA:													
Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012													
1.	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan	Jumlah daerah yang mendapatkan sarana seni budaya. - Provinsi	- Provinsi - Kab/ Kota			5 15	14 247	25 399	35 60		Meningkatkan dan mengembangkan seni budaya yang didukung oleh penyediaan	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN 2)	TINDAK LANJUT 3)	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 1)				
		pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten-lambang-lambatnya Oktober 2012	- Kab/kota									sarana.	
- PENCIPTAAN:													
Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas													
1.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi dan Kebudayaan	Meningkatnya litbang bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalamMendukung kebijakan pembangunan kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan serta bidang arkeologi.	Kegiatan Penelitian ■ Bidang Kebudayaan ■ Bidang Arkeologi	n.a		13	21	*)	22	Kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan perlu ditingkatkan.	Meningkatkan penelitian dan pengembangan kebudayaan serta penelitian arkeologi.	●
							144	155	*)	148			
- KEBIJAKAN :													
Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya													
1.	Pelestarian dan Pengembangan Kesenian	Meningkatnya apresiasi, kreativitas, dan produktivitas para pelaku seni	Jumlah fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai	Kegiatan			20	33	*)	20	Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual perlu ditingkatkan.	Pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas seni dan budaya, serta peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan budaya seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, dan	●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN 2)	TINDAK LANJUT 3)	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 1)				
2.	Pengembangan perfilman Nasional	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi film nasional	Jumlah fasilitasi festival film dalam dan luar negeri	Kegiatan		18	11		*)	11	--	berbagai industri kreatif berbasis budaya. Mengembang- kan perfilman nasional yang adaptif dan kreatif	
3.	Peningkatan Sensor Film	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film	Jumlah film/video/iklan lulus sensor	Judul Film/ Video/ Iklan		40.000	42.200		*)	50.000	--	terhadap nilai- nilai budaya baru yang positif	
- INOVASI TEKNOLOGI: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda													
1.	Peningkatan kapasitas pemuda	Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq	Orang		3.180	3.180		*)	3.180	- sinergi kegiatan inovasi iptek (integrasi program, koordinasi, kolaborasi, kerjasama, dan harmonisasi kegiatan) diantara sesama pelaku riset iptek perlu ditingkatkan; - sistem inter- mediasi yang	Paket-paket riset akan ditingkatkan baik dari segi kuantitas mau- pun kualitasnya, revitalisasi laboratorium- laboratorium, peningkatan pendidikan peneliti hingga jenjang doktoral, serta	

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN 2)	TINDAK LANJUT 3)	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 1)				
2	Pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda	Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif	Orang			3.180	3.180	*)	3.180	efektif membangun sisi penyedia dan pengguna teknologi, mengakibatkan rendahnya kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru hasil invensi teknologi yang tersedia perlu dibangun; dan apresiasi, kreasi dan budaya iptek di masyarakat perlu ditingkatkan.	dorongan kepada pihak swasta untuk bekerja sama dengan para peneliti di dalam negeri, untuk mendorong perekonomian berbasis pengetahuan dalam rangka meningkatkan daya saing nasional	●
	Pelaksanaan insentif riset dasar dan terapan	Terselenggaranya paket riset insentif SINAS ₂	Jumlah paket riset dasar	Paket		n.a	54	38	n.a*)	35	Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan untuk mendukung pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda	Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, serta optimalisasi peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan kreativitas dan kualitas pemuda	●

No.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN 2)	TINDAK LANJUT 3)	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 1)				
		yang terdiri atas insentif riset	Jumlah paket riset terapan	Paket		n.a	144	155	n.a*)	60			
	Pelaksanaan insentif difusi iptek	dasar, insentif riset terapan, insentif difusi iptek dan insentif peningkatan kapasitas iptek	Jumlah paket difusi dan pemanfaatan iptek	Paket			40	17	*)	75			
		peningkatan kapasitas iptek	Jumlah paket peningkatan kapasitas iptek Sistem Produksi	Paket		n.a	109	78	n.a*)	100			

Keterangan :

- 1) Sampai dengan bulan Juni 2012
- 2) Permasalahan pelaksanaan dalam periode 2010-2012
- 3) Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai target 2014
- *) Data baru tersedia pada akhir tahun 2012

LAMPIRAN 12
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 12: Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Tahun 2010-2012

NO.	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
		SASARAN	INDIKATOR	SATUAN			2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
1	Kegiatan Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme	terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme	Jumlah Rakor Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme		Kemendagri	Kemenko Polhukam	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	isu radikalisme yang cenderung me-ningkat, koordinasi antar lembaga dalam bidang penanggulangan terorisme	perlu dilakukan suatu upaya berskala nasional dalam rangka mencegah penyebaran ideologi radikal	●
							4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali			●
							12	12	12	12	12 kali			●
2	Pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme, melalui :	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan & fasilitasi pengembangan nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan		Kemendagri	Kemendagri	n.a	3 Modul (1 modul demokrasi dan pemilu, 1 modul peraturan perundang-dan 1 modul praktek pemilu)	3 Modul (1 modul Pemilu, 1 modul Demokrasi, 1 modul Pendidikan dan Politik	3 modul (1 modul sosialisasi wasbang, 1 modul pening-katan kesadaran bela negara, 1 modul Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa)	1 modul	Tidak ada kendala	Perlu dilakukan updating modul secara berkala	●
			Jumlah sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan				n.a	n.a	15 forum	20 forum	25 forum	Tidak ada kendala	Kegiatan ini sangat strategis sehingga perlu	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
			untuk pemuda, perempuan, aparaturn pemerintah									di laksanakan secara berkelanjutan	
	Operasi Penanggulangan Terorisme	Tertaksananya tugas OMSP secara efektif	Jumlah dan cakupan wilayah penyelenggaraan OMSP		TNI	-	30%	29%	30%	32%	Alokasi anggaran pelaksanaan operasi militer selain perang yang terbatas	Meningkatkan keseimbangan pelaksanaan operasi militer dan operasi militer selain perang sesuai dengan keadaan lingstra	●
		Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen	Jumlah anggaran yang tersedia		BIN	-	30%	30%	30%	32%	Alokasi anggaran operasional BIN yang terbatas	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara institusi intelijen negara	●
		Meningkatnya jumlah forum kemitraan Polisi dan masyarakat	Jumlah Forum Kemitraan Polmas		Polri	-	41.000	45.100	49.600	60.000	Forum kemitraan Polmas yang belum secara efektif dapat menyelesaikan berbagai masalah keamanan yang ada di masyarakat	Meningkatkan ke-efektifan sasaran masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan polmas	●
		Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme	Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Terorisme tk Nasional		Polri	-	100%	100%	102%	103%	Indeks penyelesaian perkara (lidik sidik) yang belum sesuai dengan kebutuhan Polri	Penyesuaian indeks penyelesaian perkara (lidik sidik)	●
		Meningkatnya kondisi ketertiban di daerah rawan.	kuualitas dan kuantitas operasi Gaklib.		TNI	-	45%	44%	45%	47%	Masih terdapat tumpang tindih kewenangan	Perlu didorong penyelesaian	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
	Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan	Kemenko Polhukam	-	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	Tidak ada kendala	kantor BIN Daerah dan hanya menyewa)	●
			Jumlah pemantauan dan evaluasi			4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		Pada tahun 2013 akan dilaksanakan pemantauan draft Grand Design wawasan kebangsaan yang telah dihasilkan tahun 2012, kemudian tahun 2014	●
			Draft Grand Design Wawasan kebangsaan			-	-	-	1 dok	-		diarahkan untuk penyusunan payung hukum dan lembaga/wadah pelaksanaan pemantauan wawasan kebangsaan	●
			Payung hukum Pemantauan Wawasan kebangsaan			-	-	-	-	1 dok		diarahkan untuk penyusunan payung hukum dan lembaga/wadah pelaksanaan pemantauan wawasan kebangsaan	●
			Lembaga/ wadah pelaksana Pemantauan wawasan kebangsaan			-	-	-	-	1 dok		diarahkan untuk penyusunan payung hukum dan lembaga/wadah pelaksanaan pemantauan wawasan kebangsaan	●
						-	-	-	-	-		diarahkan untuk penyusunan payung hukum dan lembaga/wadah pelaksanaan pemantauan wawasan kebangsaan	●
3.	Penguatan dan pemantauan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Penanganan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya	Jumlah penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan di Kejaksaan		Kejaksaan		148 perkara	112 perkara (Sumber data : JAMPIDSU S, Kejaksaan RI)	85 (Sumber data : JAMPIDSU S, Kejaksaan RI)	145	Komitmen yang masih rendah dan belum meratanya kesepahaman dalam kerangka pemberantasan korupsi di internal pemerintah di tingkat pusat maupun daerah serta lembaga	Pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ⁴⁾				
			Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan di Kejaksaan		Kejaksaan		48 perkara	105 perkara Sumber data : JAMPIDUS S Kejaksaan RI	76 Sumber data : JAMPIDUS S Kejaksaan RI	100	maupun instansi terkait lainnya.	korupsi.	
			Meningkatnya penyelesaian perkara Tipikor yang cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan di seluruh daerah di jajaran Kejaksaan		Kejaksaan		Penyidikan : 2.315 perkara Penuntutan : 1.706 perkara	Penyidikan : 1.624 perkara Penuntutan : 1.425 perkara Sumber data : JAMPIDUS S, Kejaksaan RI	Penyidikan : 1.316 perkara Penuntutan : 1.435 perkara Sumber : Pidsus	1400	- Koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum yang berwenang dalam memeriksa kasus korupsi masih lemah; - Penanganan kasus korupsi juga masih bersifat individual, tidak bersifat komprehensif sampai ke akar permasalahan	Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi untuk mencapai target yang telah ditetapkan	
4.	Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor	Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan di bidang mekanisme perlindungan saksi dan pelapor		Kemenkumham		UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dianggap belum bisa memberikan perlindungan yang	RUU Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat masuk dalam Prolegnas 2012 karena DPR hanya menyetujui	- RUU Perlindungan Saksi dan Pelapor masuk dalam Prolegnas tahun 2013	100 %	Substansi pembahasan RUU ini lebih menitik-beratkan pada kelembagaan LPSK sehingga perlu adanya tanggapan dari Kemen PAN & RB	Akan dilakukan harmonisasi yang melibatkan wakil dari K/L untuk membahas RUU perlindungan saksi korban	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
						optimal terhadap pelapor utama menyangkut kejahatan yang terorganisir, sehingga baru pada tahun 2011 akan dilakukan harmonisasi dan diharapkan dapat prioritas dalam Prolegnas 2012	RUU luncuran dari Prolegnas sebelumnya terhadap judul RUU baru tidak mendapatkan persetujuan. Namun demikian secara substansi RUU Perlindungan Saksi dan Korban baik dokumen RUU-nya maupun Naskah Akademiknya telah dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun ijin Presiden	- Pembahasan dengan tim ahli telah dilakukan dan pembahasan dengan K/L terkait					

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
5.	Pengembalian aset (asset recovery)	Peningkatan pengembalian aset hasil tipikor	Meningkatnya kegiatan kerjasama hukum dalam kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.		Kejaksaan		Kejaksaan telah melaksanakan kerjasama dengan negara/ lembaga seperti: Vietnam, Australia, Amerika Serikat, RRC, Departmen of Justice Hongkong SAC, CPS (Crown Prosecutor Service) yaitu di Singapura, Belanda, Swiss, Inggris, Hongkong, Cina, Amerika Serikat, Australia dan Kanada	Kejaksaan melakukan kerjasama dengan negara/ lembaga seperti: Vietnam, Australia, Amerika Serikat, RRC, Departmen of Justice Hongkong SAC, CPS (Crown Prosecutor Service) yaitu di Singapura, Belanda, Swiss, Inggris, Hongkong, Cina, Amerika Serikat, Australia dan Kanada	Melakukan kerjasama hukum : 1) Penadangan perjanjian antara kerjasama RI dengan kejaksaan Malaysia. 2) Perjanjian kerjasama hukum antara kejaksaan RI dengan Inggris, Inggris dalam rangka MLA maupun ektradisi dalam rangka penanggulangan kejahatan trans-	10	Perbedaan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat aset hasil tindak pidana korupsi berada	- Penanganan perkara korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk pemidanaan terhadap pelakunya akan tetapi juga pengembalian kerugian Negara - Peningkatan pembagian peran dan koordinasi di antara lembaga penegak hukum dalam rangka kerjasama terkait pengembalian aset baik yang berada dalam satuan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
								lain terkait seperti: PPATK, KADIN, LSPK, Kementerian dan HAM, Polri, KPK, Mahkamah Agung, dan Menteri Keuangan. Beberapa rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan tahun 2012 seperti : 1)RUU yang terkait dengan pemberantasan korupsi, 2) RUU tentang bantuan hukum untuk menyam-paikan masukan, saran dan pendapat ditinjau dari kewenang	nasional; 3) upaya bentuk kerjasama dengan kejaksaan Perancis Berpartisi dalam sejumlah rancangan peraturan perundang-perundangan yang telah diselesaikan tahun 2012 seperti : 1)RUU pemberian tasan korupsi, 2) RUU tentang bantuan hukum timbul balik				

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
								an Kejaksaan RI. Pembahas -an tersebut antara lain tentang RUU Pemberan tasan Tindak Pidana Korupsi dan RUU Perampas an Aset Tindak Pidana Sumber data : Biro Hukum Kejaksaan RI					
			Jmlh pelatihan bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll			238 orang untuk hakim di tingkat kasasi, tingkat banding dan tingkat pertama.	Sejak tahun 2007 telah dialih 1.211 orang hakim untuk pembekal- an terkait masalah	1.104 hakim dan panitera yang mendapat pelatihan berkelanju tan, sertifikasi tipikor dan materi	1.000 orang				

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
								Tipikor dan telah mempunyai ai sertifikat menangan i perkara Tipikor, dimana pada tahun 2011 khusus untuk pelatihan Tipikor dilaksanakan an untuk 120 orang hakim. Sumber: Bahan Laptah MA-RI 2011	terkini				
			Peraturan Perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi				Telah dilakukan sosialisasi RUU tentang Perampasan Asset Tindak Pidana. Pada	Beberapa RUU yang berkaitan dengan Pemberantasan Korupsi yaitu: 1. RUU Pembe-	RUU KUHP RUU KUHAP dan RUU Pemberantasan Tipikor masih di pemerinta h dan	100 %			

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
						Tahun 2011 RUU Perampas an Asset menjadi prioritas yang akan dibahas di DPR bersama dengan RUU KUHAP, KUHP dan RUU Pemberan tasan Tipikor.	rantas- an Tipikor saat ini masih menun- ggu surat presi- den menge- nai penun- jukan wakil pemer- intah untuk pemba- hasan di DPR 2. RUU KUHP dan RUU KUHAP saat ini persia- pan pemba- hasan menun- ggu arahan Presi- den.	belum diserah- kan ke DPR dan direncana- kan masuk kembali dalam prolegnas 2012					

NO.	RPJMN 2010-2014					K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN			2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
6.	Peningkatan kepastian hukum	Peningkatan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan murah bagi pencari keadilan	Jumlah percepatan penyelesaian perkara di tingkat MA					13.891 pkr	Perkara yang ditangani (sisa perkara tahun 2010 dan perkara masuk tahun 2011) adalah	Perkara yang ditangani : 21.107 pkr, putus : 10.991 pkr (55%)		Rendahnya kapasitas sumber daya manusia yang berupa kapasitas dan profesionalisme yang masih belum akuntabel	Peningkatan sistem pembatasan perkara dan penyelesaian perkara-perkara yang dapat ditangani sampai dengan tingkat Mahkamah Agung	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
								sebanyak 21,414 perkara Perkara yang putus adalah sebanyak 13,719 dan sisa di tahun 2011 adalah sebanyak 7,695 Sumber: Bahan Laptah MA-RI 2011					
			Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum				1. Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama : 2.742.1	Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama (sisa tahun 2010 dan perkara masuk 2011): 2.742.1	Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan umum di tingkat pertama : Perkara ditangani : 3.666.442 perkara yang				●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
						69 pkr Putus = 2.703,2 65 pkr <u>Tingkat Banding : Perkara yg ditanga ni =13.488 pkr Putus = 10.795 pkr</u>	yang ditanga ni = 4.854,1 11 Putus = 4.808,8 81pkr <u>Tingkat Banding : Perkara yg ditanga ni =13.488 pkr Putus = 10.795 pkr</u>	yang ditanga ni = 4.854,1 11 Putus = 4.808,8 81pkr <u>Tingkat Banding : Perkara yg ditanga ni : 11.403 Putus : 9.373 kr Putus =10.911 pkr Sumber: Bahan Lapiah MA-RI 2011</u>	putus: 3.375,5 59 (92,06%) <u>Tingkat banding : Perkara yang ditanga ni : 11.403 Putus : 9.373</u>				
			Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama			1. Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama : Aga- ma <u>Tingkat Pertama :</u>	Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama : Peradilan Agama <u>Tingkat Pertama : (sisa tahun 2010 dan</u>	Penyelesaian Perkara di tingkat Pertama : Peradilan Agama <u>Tingkat Pertama : Perkara yang ditanga ni :</u>					

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
							Perkara yang datang dari: 377.382 pr Putus: 314.407 pr <u>Tingkat Banding:</u> Perkara yg datang dari: 935 pr Putus: 751 pr	<u>Perkara masuk 2011:</u> Perkara yang datang dari: 377.382 pr Putus: 426.208 pr Putus = 353.933 pr <u>Tingkat Banding:</u> Perkara yg datang dari: 935 pr Putus: 751 pr	477.126 Perkara yang putus: 371.457 (77.8%) <u>Tingkat Banding:</u> Perkara yg datang dari: 2.534 pr Putus: 2.253 pr				
			Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama				Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama: Militer.	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama: Militer.	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama: Militer.				

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
			dan Banding di lingkungan Peradilan Militer				<u>Tingkat Pertama:</u> Perkara yang ditangani: 16.520 pkr Putus: 6988 pkr <u>Tingkat Banding:</u> Perkara yg ditangani: 460 pkr Putus : 374 pkr	<u>Tingkat Pertama:</u> Perkara yang ditangani: 3.429 pkr Putus: 3.000 pkr <u>Tingkat Banding:</u> Perkara yg ditangani: 397 pkr Putus : 368 pkr Sumb er: Bahan Lapta h MA-RI 2011	<u>Pertama:</u> Perkara yang ditangani: 3.251 pkr Putus: 2.673 pkr <u>Tingkat Banding:</u> Perkara yg ditangani: 460 pkr Putus : 346 pkr				
			Jumlah penyelesaian administrasi perkara (vg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di				Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN				●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
			lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)				Pertama : Perkara yang ditangani: 1.768 prk Putus: 1.107 prk <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani: 935 prk Putus: 751 prk	Pertama : Perkara yang ditangani: 1.870 prk Putus: 1.428 prk <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani: 935 prk Putus: 1008 prk	Pertama : Perkara yang ditangani: 1.975 prk Putus: 1.433 prk <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani: 935 prk Putus: 753 prk				
7.	Penguatan perlindungan HAM	Peningkatan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia	Peningkatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di lingkungan Peradilan Umum				Tahun 2010, anggaran total untuk kegiatan Bankum melalui peradilan umum adalah sebesar	Untuk tahun 2011, Alokasi Peradilan Umum adalah Rp. 33.905,79	Pengalokasian dana bankum untuk operasional Posbankum di 39 Pengadilan Negeri kelas IA dan IA				●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
						Rp. 41.965.900.000 dan realisasi sepanjang tahun 2010 adalah sebesar 7.532.817.863 atau sebesar 17,95 %.	anggaran bankum adalah sebesar Rp.3.123,913,800 Sumber: Bagian Perencana an Ditjen Badilum) Untuk pelaksana an pembebas an biaya advokat dan penyeleng garaan zitting plaitz data tidak tersedia	angaran bankum adalah sebesar Rp.3,123,913,800 Sumber: Bagian Perencana an PN dengan 228 lembaga penyedia jasa an advokat dan melayani 42.55 pencari keadilan. Dari realokasi anggaran 2012 sebesar Rp. 24 M terserap 9,6 M (39,42%)					
		Peningkatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang			Tahun 2010, anggaran total untuk	Pelaksana an kegiatan berdasarkan SEMA	Di lingkungan pengadilan agama						

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
			tidak mampu di lingkungan Peradilan Agama				kegiatan Bankum melalui pengadilan adalah sebesar Rp. 41.965.900.000 dan realisasi sepanjang tahun 2010 adalah sebesar Rp. 7.532.817.863 atau sebesar 17,95 %. Untuk alokasi ke peradilan agama tahun 2010 adalah sebesar Rp. 3.996.967.000 dimana penyerapan adalah sebesar Rp. 3.272,		No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum : Jumlah pelaksanaan sidang keliling di 338 lokasi dengan 18.882 perkara yang ditangani 273 ni Jumlah perkara yang dibebaskan biaya perkara (prodeo) sebanyak 11.908 perkara Jumlah pelayan an dalam Posba-			(359 sakter) sudah melaksanakan 3 kegiatan pokok bankum sesuai dengan SEMA 3/2010 tentang bankum. Sidang keliling dilaksanakan di 273 lokasi dengan 23.675 pkr yang diajukan oleh masyarakat miskin. Pelaksanaan prodeo (pembebasan biaya perkara) sebanyak 12.243 pkr.	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
						422,469 Penyelesai-an perkara prodeo di pengadila n agama sebanyak 4.823 pkr dengan rincian perkara cerai gugat 3.175, perkara cerai talak 510, dan perkara lain-lain 1.138 Catatan: Prodeo=4. 906 perkara (data Ditjen Badilag 11 Januari 2011 – data belum terpilah sesuai jenis perkara)	kum kepada 35.009 orang (masyar akat miskin) di 46 lokasi (pengadi lan Agama) yang dilayani oleh 291 petugas /pembe ri jasa advokasi (Data Ditjen Badilag 19 januari 2011)	Pelayanan bankum di posban- kum dilaksanak an di 69 lokasi di seluruh Indonesia dan melayani 55.860 pencari keadilan. Total serapan anggaran adalah Rp. 9,05 M dari 11,84 M (76,3 %).					

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
							Pelaksanaan an Sidkel=13. 010 perkara						
			Peningkatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu di lingkungan Pengadilan Miltun			Tahun 2010, anggaran total untuk kegiatan Bankum melalui pengadilan adalah sebesar Rp. 41.965.900.000 dan realisasi sepanjang tahun 2010 adalah sebesar Ro. 7.532.817.863 atau sebesar 17,95 %.	n.a	Di lingkungan Mittun, dana alokasi untuk bankum yang berjumlah Rp. 475 juta tidak terserap di kegiatan pelayanan Bankum di lingkungan pradilan militer dan TUN di tahun 2012, karena hanya melayani pencari keadilan di PTUN Surabaya oleh sengketa					

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
									kepegawaian dan secara operasional menggunakan anggaran rutin operasional.				
8.	Pemberdayaan Industri Strategis bidang Pertahanan	Tersusunnya rencana pengembangan & pengadaan alutsista TNI dan Alut Polri 2010 – 2014	Dokumen rencana pengembangan dan pengadaan		Kemhan/ TNI Polri	-	50%	100%	-	100%	Tidak ada masalah. Sasaran tercapai	Tidak ada tindak lanjut	●
		Tersusunnya mekanisme pendanaan Industri Pertahanan dalam negeri yang bersifat multiyears	Rumusan pendanaan Industri Pertahanan Dalam Negeri yang bersifat multiyears		Kemhan/ TNI Polri	n.a	Surat Men PPN/Ka Bappenas No. 223 perihal PDN TA 2010 Untuk Polri	Kepmen PPN/Ka. Bappenas No. Kep.10 /M.PPN/H K/01/2011 1 ttg DKPDN Tahun 2010 – 2014	Kepmen PPN/Ka Bappenas No:Kep.86 /M.PPN/H K/09/2011 ttg Daftar Kegiatan PDN Tahun 2012	n.a	Tidak ada masalah. Sasaran tercapai	Tidak ada tindak lanjut	●
							Surat Men PPN/Ka Bappenas No. 223 perihal PDN TA	Surat Men PPN/Ka. Bappenas No.0065/ M.PPN/03 /2011 Ttg					

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
							2010 Untuk Kemhan/TNI	DKPPDN Tahun 2011					
		Tersedianya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan	Ditetapkannya Keppres Pengadaan barang dan jasa		-	100%	-	100%	100%	Telah dilaksanakan 2 kali revisi melalui Perpres 54/2010 dan Perpres 70/2012	Tidak ada tindak lanjut	●	
		Tersedianya data kemampuan produksi alutsista TNI dan Alut Polri oleh Industri Pertahanan dalam Negeri	Jumlah item produk alutsista TNI dan Alut Polri yang mampu diproduksi oleh Industri Pertahanan dalam Negeri		-	25%	25%	50%	100%	Tidak ada masalah. Sasaran tercapai	Tidak ada tindak lanjut	●	
		Tersedianya badan Clearing House lintas bidang dan lintas K/L	Efisiensi dan Efektivitas pengadaan Alutsista TNI dan Alut POLRI		n.a	Perpres No. 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	n.a	Tersusunnya konsep awal KKIP baru	100%	Telah terbentuknya KKIP melalui Perpres 42/2010	Tidak ada tindak lanjut	●	
		Terwujudnya model dan/atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan	Jumlah model dan/ atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai dengan kemajuan		30%	30%	30%	30%	30%	Pendanaan yang terpisah-pisah dan terbatas membatasi pelaksanaan litbang peralatan pertahanan yang baik	Sedang dirancang skema pelaksanaan litbang alat peralatan pertahanan secara terpadu	●	

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
		IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri	IPTEK dan mampu dikembangkan secara mandiri									lintas K/L	
		Meningkatnya produksi Alutsista Industri dalam negeri	Jumlah produksi Alutsista Industri dalam negeri	%	Kemhan	n.a	12,65	13,61	15,86	17,57	Kemampuan produksi industri pertahanan dalam negeri yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI	Melanjutkan pelaksanaan program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri	●
		Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi	Jumlah hasil pengkajian dan pengembangan peralatan sandi		Lemsaneg	-	3	3	2	13	Terbatasnya industri alat persandian dalam negeri sehingga masih banyak tergantung dari produk luar negeri	Penggunaan alat persandian dari luar negeri disertai dengan pengembangan software atau bahasa persandian secara mandiri	●
		Meningkatkan kemandirian alat Polri produksi dalam negeri	Jumlah dan jenis peralatan utama dan peralatan teknis Polri yang memenuhi standar keamanan internasional		Polri	-	20%	25%	25%	25%	Kemampuan produksi industri pertahanan dalam negeri yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan khusus Polri	Melanjutkan pelaksanaan program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri	●
		Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan pelayanan masyarakat	Jumlah Prototype yang dihasilkan		Polri	-	-	-	-	5	Pelaksanaan litbang Polri yang terbatas	Meningkatkan kerja sama tripartit antara Polri, Institusi Pendidikan dan Litbang, serta Industri untuk	●

NO.	RPJMN 2010-2014				K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN ²⁾	TINDAK LANJUT ³⁾	STATUS
	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2009	2010	2011	2012 ¹⁾				
												mengembangkan alat khusus Polri	

LAMPIRAN 13
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 13: Perencanaan
Tahun 2010 – 2012

N o.	RPJMN 2010-2014		Indikator	Satuan	K/L	Capaian			Targe t 2014	Permasalahan**	Tindak Lanjut***	Status
	Substansi Inti	Sasaran				2010	2011	2012*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional												
1.	Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical	Facilitasi Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis CPO di 3 provinsi	Provinsi Sumut, Kaltim, dan Riau	Persen	Kemen. Perindustrian	20%	40%	60%	100%	Perubahan status lahan dari Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Peman-faatan Lahan (HPL) Belum Selesai	Koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/ lembaga terkait khususnya untuk penyelesaian RTRW	●
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Perusahaan	Kemen. Perindustrian	10	15	20	25	Infrastruktur pendukung kawasan/klaster industri antara lain pelabuhan, jalan akses, angkutan kereta api, listrik, dan gas bumi belum memadai	Penyediaan infrastruktur serta jaminan penyediaan bahan baku melalui insentif fiskal dan insentif lainnya	●
		Pilot project industri urunan kelapa sawit	Pilot Project Industri turunan kelapa sawit	Unit	Kemen. Perindustrian	2	1	1	-			●
Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional												
4	Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional	Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar	Jumlah partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional Jumlah posisi runding yang disusun Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di	Kemend ag	Kemend ag	41	55	19 (target 55)	55	Relatif tidak memenuhi kendala yang berarti	Peningkatan koordinasi antara tim perunding perdagangan internasional dan Kementerian teknis yang membidangi sektor yang dirundingkan serta para pemangku kepentingan terkait	●
						17	29	7 (target 15)	8			●

No.	RPJMN 2010-2014			Satuan	K/L	Capaian			Target 2014	Permasalahan**	Tindak Lanjut***	Status
	Substansi Inti	Sasaran	Indikator			2010	2011	2012*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Dalam Negeri									
			Jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report)		Kemendag	34	37	13 (target 37)	34			●
			Jumlah sosialisasi hasil kesepakatan perundingan internasional			4	8	5 (target 9)	8			●

Keterangan:

*Capaian Tahun 2012 sampai dengan bulan Juni.

** Permasalahan pelaksanaan dalam periode 2010-2012.

*** Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam tahun 2012-2014 untuk mencapai target 2014.

LAMPIRAN 14
Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 14: Kesejahteraan Rakyat
Tahun 2010-2012

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN					TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
						2009	2010*	2011**	2012***				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010													
1	Pelayanan Haji dan Umrah	Terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta pengawasan haji	Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar	Jemaah	Kemenag	211.000	221.000	221.000 ¹⁾	211.000 ²⁾	210.000	Masih terjadinya permasalahan teknis baik selama di Indonesia maupun pada saat pelaksanaan di Arab Saudi; diantaranya adalah masih terlambatnya distribusi buku manasik haji di daerah, belum adanya identitas khusus bagi petugas pada saat operasional di Armina sehingga menyulitkan koordinasi di lapangan, masih adanya keluhan mengenai pelayanan katering seperti ketidaksiapan pelayanan katering selama di Armina, dan transportasi selama pelaksanaan di Arab Saudi yang dirasakan masih jauh dari tempat pemondokan.	Melanjutkan pengembangan Kankemenag yang belum online sebanyak 34 Kab/kota Melakukan perbaikan perhitungan secara random untuk memilih lokasi pemondokan jemaah (Qur'ah), jadwal pemberangkatan, visa, dan setoran akhir; Antisipasi dan koordinasi intensif antarinstansi yang terkait terhadap petugas kloter/non-kloter 20% dari unsur di luar Kemenag dan Kementerian Lembaga, deviasi antara kualitas pemondokan di Madina dan Makkah, perbedaan layanan kualitas makanan katering antara kantor pelayanan haji Arab Saudi (<i>Muasastadsah</i>) dan konsorsium perusahaan katering Arab Saudi (<i>Mutahiddin</i>),	

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN					TARGET 2014 (11)	PERMASALAHAN (12)	TINDAK LANJUT (13)	
						2009 (7)	2010* (8)	2011** (9)	2012*** (10)					
2	Pelayanan Kesehatan Ibadah Haji	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	Pelayanan kesehatan kepada jemaah haji	jemaah	Kemendes	211.000	221.000	221.000	211.000	210.000	Pelayanan kesehatan yang dirasakan belum memuaskan dan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait petugas kesehatan haji di setiap kloter yang perlu ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas	- Pemberian prioritas kepada jemaah haji yang beresiko tinggi, seperti yang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik dan jemaah berusia lanjut - Peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan jemaah haji, baik ditanah air maupun di Arab Saudi		
Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)														
1	Pembinaan kerukunan hidup umat beragama (FKUB)	Meningkatnya dan terpeliharanya kondisi dan suasana yang aman dan damai di kalangan umat beragama	Pembangunan Sekretariat Bersama FKUB Kab/Kota	unit	Kemenag	15	15	15	--	30	Kerukunan kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud;	Pemberdayaan peran FKUB sebagai wadah bersama antarumat dan tokoh agama Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-undangan dibidang kerukunan umat beragama Membangun sistem antispasi dini dan trauma healing di daerah rawan konflik Peningkatan koordinasi dengan Pemda dan aparat keamanan		

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN					TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						2009	2010*	2011**	2012***					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
			Operasional FKUB Tk Provinsi Kab/Kota	unit unit	Kemenag		33 150	33 440	- -	33 473		terkait		
			Pemulihan Pascakonflik	kegiatan	Kemenag		1	1	1	1				
Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan <i>hospitality management</i> yang kompetitif di kawasan Asia														
1	Pengembangan Daya tarik Pariwisata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata	Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan budaya	daya tarik	Kemparekraf	-	7	29	4	29	Belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata yang disebabkan antara lain oleh belum meratanya pembangunan kepariwisataan antar daerah dan kawasan, serta kurang memadainya sarana dan prasarana menuju destinasi pariwisata	Penyebaran pengembangan destinasi pariwisata di luar Jawa dan Bali termasuk pulau-pulau kecil dan terdepan; Peningkatan kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya peningkatan kenyamanan dan kemudahan akses di destinasi wisata; dan Pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi di pusat dan daerah.		
2	Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata	Meningkatnya jumlah desa wisata	Jumlah desa wisata	desa	Kemparekraf	-	200	569	200	350				
3	Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata	Berkembangnya usaha, industri dan investasi pariwisata	Jumlah profil investasi pariwisata	lokasi	Kemparekraf	-	5	14	5	7				
4	Pengembangan standarisasi pariwisata	Terlaksananya penyusunan dan pemutakhiran standar pariwisata serta penerapan standard dan kompetensi pariwisata	1. Jumlah standar kompetensi 2. Jumlah standar usaha 3. Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	standar	Kemparekraf	-	13	6	0	4				
				standar	Kemparekraf	-	2	19	0	4				
				ribu orang	Kemparekraf	-	10	16	9	6				
5	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengembangan	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan	1. Jumlah Organisasi Pengelolaan Destinasi (<i>Destination Management</i>	lokasi	Kemparekraf	-	2		15	15				

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN				TARGET 2014 (11)	PERMASALAHAN (12)	TINDAK LANJUT (13)	
						2009 (7)	2010* (8)	2011** (9)	2012*** (10)				
	Destinasi Pariwisata	kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata	Organization/D MO)										
			2. Jumlah dukungan fasilitas pariwisata	daya tarik	Kemparekraf	-	18	8	0	29			
6	Peningkatan Promosi pariwisata luar negeri	Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (<i>sales mission</i>) dan festival di tingkat internasional	1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata internasional, pelaksanaan misi penjualan (<i>sales mission</i>), dan pendukung- an penyeleng- garan festival	event	Kemparekraf	-	78	84	24	64			
			2. Jumlah perwakilan promosi pariwisata Indonesia (<i>Indonesia Tourism Promotion Representative Officers</i>) di luar negeri	kota	Kemparekraf	-	12	12	14	15			
7	Peningkatan promosi pariwisata dalam	Meningkatnya jumlah event pariwisata dalam	Jumlah penyelenggara dalam promosi	event	Kemparekraf	-	47	54	17	45			

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN				TARGET 2014 (11)	PERMASALAHAN (12)	TINDAK LANJUT (13)	
						2009 (7)	2010* (8)	2011** (9)	2012*** (10)				
	negeri	negeri	langsung (<i>direct promotion</i>), dan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional dan internasional.										
8	Pengembangan informasi pasar pariwisata	Meningkatnya pemanfaatan informasi pasar pariwisata	1. Jumlah penyebaran informasi fokus pasar pariwisata Indonesia 2. Jumlah permintaan pasar untuk berkunjung ke Indonesia	naskah transaksi	Kemparekraf	-	640			640			
					Kemparekraf	-				10400			
9	Peningkatan publikasi pariwisata	Meningkatnya kelengkapan informasi tujuan pariwisata Indonesia	1. Jumlah destinasi yang memiliki data dan informasi yang lengkap 2. Jumlah bahan promosi cetak, promosi elektronik, publikasi media cetak, media elektronik dan media luar ruang 3. Jumlah bahan promosi cetak dan promosi elektronik yang	daerah ribu buah	Kemparekraf	-	10	13	0	10			
					Kemparekraf	-	1149,08	776,65	0	1125			
					Kemparekraf	-	690	0	0	709			

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN					TARGET 2014 (11)	PERMASALAHAN (12)	TINDAK LANJUT (13)	
						2009 (7)	2010* (8)	2011** (9)	2012*** (10)					
10	Peningkatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and exhibition)/MICE	Meningkatnya penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and exhibition)/MICE nasional dan internasional di Indonesia	terdistribusikan Jumlah daerah yang dikembangkan menjadi tujuan wisata MICE	daerah	Kemparekraf	-				9				
11	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Pemasaran	Terselenggaranya kegiatan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan kebijakan, peningkatan kualitas SDM aparatur, dan dukungan teknis peningkatan pemasaran pariwisata	Jumlah event pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata oleh masyarakat dan daerah	event	Kemparekraf		102			91				
12	Pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia aparatur/industri	Jumlah sumber daya yang dilatih di bidang kebudayaan dan	orang	Kemparekraf		1.150	1.270	195	1200				

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN					TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
						2009	2010*	2011**	2012***				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		dan masyarakat bidang kebudayaan dan pariwisata	pariwisata (orang)										
13	Pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata	Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata	Jumlah program studi	program	Kemparekraf		34	48	48	42			
Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012													
1	Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan	Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan	1. Jumlah fasilitas penyediaan prasarana olahraga. 2. Jumlah penyediaan sarana olahraga	Paket	Kemenpora	-	4	19 ³⁾	-	-	Belum adanya pemahaman tentang tugas dan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana olahraga.	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal tugas dan kewenangan penyediaan prasarana sarana olahraga di daerah sesuai dengan peraturan perundangan.	
							44	44	-	-			
2	Pembinaan Olahraga Prestasi	Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi	1. Jumlah olahragawan andalan nasional 2. Jumlah fasilitas penyelenggaraan SEA Games dan Para Games pada tahun 2011 3. Jumlah fasilitas keikutsertaan pada	Orang Kegiatan	Kemenpora	-	520	520	-	-	Belum optimalnya peningkatan budaya dan prestasi olahraga yang disebabkan antara lain oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, terbatasnya ruang terbuka olahraga, terbatasnya jumlah dan kualitas SDM keolahragaan, belum optimalnya upaya pembibitan atlet unggulan, serta masih terbatasnya apresiasi dan	Peningkatan pembinaan olahraga prestasi	
						-	-	2	-	-			
							2	2	-	-			
						-	2	2	-	-			

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN				TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT	
						2009	2010*	2011**	2012***				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games								penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi		
Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; Revitalisasi Gerakan Pramuka													
1.	Peningkatan wawasan pemuda	Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup	Orang	Kemempora	-	5.500	6.000	-	7.500	Belum optimalnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, yang disebabkan antara lain oleh : (i) rendahnya partisipasi pemuda dalam pendidikan; (ii) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda; (iii) rendahnya kesadaran pemuda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS serta kekerasan di kalangan pemuda; (iv) belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan pemuda; (v) terbatasnya prasarana dan sarana kepemudaan untuk mengembangkan kapasitas, kompetensi,	Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan dilakukan melalui: Peningkatan jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan hidup, Peningkatan jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, Peningkatan jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar	
2.	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan dan	1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam	Orang	Kemempora	-	6.000	7.000	-	10.000			
				Organisasi Kepemudaan	Kemempora	-	38	100	-	140			

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN				TARGET 2014 (11)	PERMASALAHAN (12)	TINDAK LANJUT (13)	
						2009 (7)	2010* (8)	2011** (9)	2012*** (10)				
			memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan								organisasi kepemudaan, Peningkatan jumlah pemuda kader kepemimpinan, Peningkatan jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan		
3	Pengembangan kewirausahaan pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaanpe muda	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Orang	Kemenpora	-	3.175	10.000 ³⁾	-	3.500		●	
4	Pengembangan kepemimpinan pemuda	Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinanpe muda	Jumlah pemuda kader kepemimpinan	Orang	Kemenpora	-	4.500	10.000 ³⁾	-	11.500		●	
5	Pengembangan Kepanduan	Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepramukaan	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepemudaan, kepramukaan	Orang	Kemenpora	-		10.000 ³⁾	-	500		●	
			2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Orang	Kemenpora	-	1.000	4.850	-	5.600	Rendahnya minat pemuda untuk berperan serta dalam kegiatan kepramukaan	Revitalisasi Gerakan Pramuka dilakukan dengan peningkatan jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	●
Perumusan Kebijakan dan Pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan													
1	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas	Kebijakan	KPP&PA	-	2	1	-	-	- Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; - Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan;	- Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke	●

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN					TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
						2009	2010*	2011**	2012***				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender	Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam bidang kesehatan	pendidikan 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan	K/L dan Prov	KPP&PA	-	2 K/L dan 3 Prov	2 K/L dan 3 Prov	1 K/L dan 1 Prov	1 K/L dan 5 Prov	dan - Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender; termasuk belum optimalnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran (PPRG), serta penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.	dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga; - Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintas sektor, lintas program, dan lintas kementerian/Lembaga (K/L); - Penyusunan sistem manajemen data dan informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; - Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. - Sinkronisasi berbagai peraturan dan produk hukum terkait perempuan dan terus dilakukan koordinasi, sosialisasi, dan fasilitasi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan perempuan	
						-	3	1	-	-			
3	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pengambilan keputusan 3. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik	Kebijakan K/L dan Prov	KPP&PA	-	2 K/L dan 4 Prov	1 K/L dan 4 Prov	1 K/L dan 4 Prov	1 K/L dan 5 Prov			
						-	2	3	1	-			

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN					TARGET 2014	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
						2009	2010*	2011**	2012***				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
			dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan penerapan sistem data terpilah gender	Prov			11 Prov	5 Prov		9 Prov			
7	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Kebijakan	KPP&PA	-	1	2	1	3			
			2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	K/L dan Prov	KPP&PA	-	0 K/L dan 0 Prov	2 K/L dan 5 Prov	2 K/L dan 3 Prov	1 K/L dan 3 Prov			
8	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang	Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang	Kebijakan	KPP&PA	-	2	3	-	-			
			2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana	K/L dan Prov	KPP&PA	-	19 K/L dan 17 Prov	19 K/L dan 21 Prov	20 K/L dan 17 Prov	10 K/L dan 15 Prov			

No.	SUBSTANSI INTI	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	K/L	CAPAIAN				TARGET 2014 (11)	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
						2009 (7)	2010* (8)	2011** (9)	2012*** (10)			
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			perdagangan orang									
9	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak	1. Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak 2. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak	Kebijakan Prov	KPP&PA	-	2	1	1	1		
						-	7 K/L dan 2 Prov	1 K/L dan 1 Prov	1 K/L dan 6 Prov	1 K/L dan 5 Prov		

Keterangan :

*) Sesuai dengan Buku Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2011.

**) Sesuai dengan Buku Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2011.

***j) Data sampai dengan Juni 2012.

- 1) Kenalkan disebabkan karena adanya tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi
- 2) Penurunan disebabkan karena tidak mendapatkan kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi
- 3) Sumber: Laporan capaian kinerja Kempenpora Tahun 2011